



KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2027

(PEMUTAKHIRAN)

**Tumbuh Lebih Tinggi
Sejahtera Lebih Cepat**



Halaman ini sengaja dikosongkan



KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2027

Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan karunia-Nya sehingga proses penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027 dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu. Sebagai dokumen negara, penyusunan KEM-PPKF merupakan amanat Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan pentingnya landasan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam proses penganggaran negara. Sebagai bagian dari siklus penganggaran, KEM-PPKF akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam agenda pembicaraan pendahuluan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2).

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan bentuk komitmen bersama untuk **mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur**. Komitmen tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

KEM-PPKF memiliki peran strategis dalam memberikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan. Oleh karena itu, penyusunan KEM-PPKF senantiasa mempertimbangkan kondisi dan tantangan perekonomian terkini, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, arah dan strategi kebijakan dalam KEM-PPKF didesain untuk merespons dinamika perekonomian dan mengatasi tantangan guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sejalan dengan peran strategis tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah **“Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”**. Melalui tema ini, Pemerintah menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*pro growth*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro welfare*). Tema tersebut sekaligus menjadi landasan strategis untuk mendorong produktivitas, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial secara simultan.

Untuk memastikan arah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, pelaksanaannya difokuskan pada Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang terdiri dari 8 (delapan) klaster dan 1 (satu) pendukung klaster atau *enabler*, yang secara keseluruhan mencakup 60 program kerja. **Pertama**, kedaulatan pangan (9 program kerja). **Kedua**, kemandirian energi dan air (16 program kerja). **Ketiga**, pendidikan (13 program kerja). **Keempat**, kesehatan (4 program kerja). **Kelima**, hilirisasi dan industrialisasi (5 program kerja). **Keenam**, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana (5 program kerja). **Ketujuh**, ekonomi kerakyatan dan desa (2 program kerja). **Kedelapan**, penurunan kemiskinan (2 program kerja). Sedangkan **1 pendukung klaster (*enabler*)** adalah pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi (4 program kerja). Dengan

klasterisasi tersebut, PKPN dirancang untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah tidak tersebar secara sektoral dan parsial, melainkan terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata.

Agar pelaksanaan program-program prioritas tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas lembaga yang solid, khususnya antara kebijakan fiskal, moneter, dan Danantara. Dari sisi kebijakan fiskal, APBN berperan sebagai katalis untuk memberdayakan peran swasta dan instrumen *countercyclical* untuk mendorong pertumbuhan, perlindungan sosial dan mendukung kebutuhan publik dengan senantiasa menjaga disiplin fiskal. Sementara itu, kebijakan moneter sinergis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui terjaganya likuiditas yang memadai dalam perekonomian dengan *cost of fund* yang kompetitif sehingga mendorong peningkatan kredit pada sektor riil yang lebih kuat. Sedangkan Danantara didorong untuk akselerasi investasi produktif dan strategis serta bernilai tambah tinggi.

Untuk mendukung agar kolaborasi fiskal, moneter, dan Danantara semakin solid maka Pemerintah secara konsisten terus mendorong iklim investasi semakin kondusif melalui *debottlenecking* dan deregulasi serta ditopang pengelolaan APBN yang sehat, kredibel dan *sustainable*. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB. Untuk itu, Pemerintah akan terus melanjutkan reformasi fiskal guna optimalisasi pendapatan negara yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, meningkatkan kualitas belanja agar lebih pro-pertumbuhan dan pro-kesejahteraan, serta mendorong pembiayaan inovatif, berkelanjutan, dan sinergis dengan Danantara. Disamping itu, Pemerintah juga akan terus memperkuat harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah untuk mewujudkan layanan publik yang semakin berkualitas dan kesejahteraan yang semakin merata dan berkeadilan.

KEM-PPKF Tahun 2027 telah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 20 Mei 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya dilakukan rangkaian pembahasan dalam agenda Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Pembahasan ditutup dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembicaraan Pendahuluan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Juli 2026. Dokumen KEM PPKF Tahun 2027 ini telah dimutakhirkan sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPR RI dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN TA 2027 dan Nota Keuangan.

Pada akhirnya, KEM-PPKF Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menavigasi ekonomi, meredam gejolak di tengah ketidakpastian global, sekaligus melaksanakan agenda pembangunan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap langkah perjuangan ini.

Jakarta, Juli 2026

Pemerintah Republik Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR BOKS	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DINAMIKA, PROSPEK, DAN TANTANGAN EKONOMI DAN FISKAL.....	3
2.1. Kondisi, Prospek, dan Tantangan Perekonomian Global	3
2.1.1. Kondisi Perekonomian Global.....	3
2.1.2. Prospek Perekonomian Global	5
2.1.3. Tantangan Perekonomian Global	6
2.2. Kondisi, Prospek, dan Tantangan Perekonomian Domestik.....	10
2.2.1. Kondisi Perekonomian Domestik	10
2.2.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Domestik	27
2.3. Kinerja Fiskal dan Pembangunan	32
2.3.1. Kinerja Makrofiskal	32
2.3.2. Capaian Sasaran Pembangunan.....	35
BAB III STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL JANGKA MENENGAH.....	39
3.1. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	39
3.1.1. Transformasi Sektor Riil untuk Meningkatkan Produktivitas.....	40
3.1.2. Peningkatan Investasi yang Produktif dan Kondusif.....	43
3.2. Strategi Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan.....	44
3.3. Program Kerja Prioritas Nasional	45
3.3.1. Kedaulatan Pangan	46
3.3.2. Kemandirian Energi dan Air	47
3.3.3. Pendidikan	50
3.3.4. Kesehatan.....	52

3.3.5. Hilirisasi dan Industrialisasi.....	54
3.3.6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana	57
3.3.7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa.....	62
3.3.8. Penurunan Kemiskinan	63
3.3.9. Klaster Pendukung (<i>Enabler</i>).....	66
3.4. Strategi Kebijakan Jangka Menengah	66
3.4.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	66
3.4.2. Makro Fiskal Jangka Menengah.....	69
3.4.3. Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah.....	70
3.5. Penguatan Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan	71
BAB IV ARAH DAN STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL TAHUN 2027	75
4.1. Strategi Ekonomi Makro Tahun 2027	76
4.2. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2027	79
4.3. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027	85
4.3.1. Kebijakan Pendapatan Negara.....	85
4.3.2. Kebijakan Belanja Negara.....	102
4.3.3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan	121
4.4. Sasaran Pembangunan Tahun 2027.....	133
4.5. Kebijakan Sektor Keuangan.....	134
BAB V HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2027	137
5.1. Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kewilayahan	137
5.1.1. Perkembangan Kinerja Perekonomian-Kewilayahan	138
5.1.2. Tantangan	138
5.2. Arah dan Strategi Kebijakan Kewilayahan Tahun 2027	139
5.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	140
5.2.2. Penurunan Kemiskinan	142
5.2.3. Pendidikan	144
5.2.4. Kesehatan.....	145
5.2.5. Pengelolaan Sampah	147
5.2.6. Kedaulatan Pangan	148
5.3. Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan Tahun 2027	149
5.3.1. Pendapatan Daerah.....	149

5.3.2. Belanja Daerah.....	150
5.3.3. Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif APBD	150
BAB VI PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2027	155
6.1. Kinerja APBN secara Umum Tahun Anggaran 2025.....	155
6.2. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025	155
6.3. Kinerja Belanja Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025	156
6.4. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2026.....	159
6.5. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2027	159
6.5.1. Kebijakan Umum Belanja K/L.....	160
6.5.2. Kebijakan Khusus Belanja K/L.....	161
6.5.3. Kebijakan Belanja K/L Menurut Jenis Belanja	164
6.6. Pagu Indikatif Transfer Ke Daerah Tahun 2027	166
BAB VII RISIKO FISKAL.....	167
7.1. Risiko Ekonomi Makro.....	167
7.1.1. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Penerimaan Perpajakan	167
7.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara.....	168
7.1.3. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Utang.....	168
7.2. Risiko Kontingensi	169
7.2.1. Risiko Penjaminan Infrastruktur	169
7.2.2. Risiko Penjaminan Program PEN	170
7.2.3. Risiko Penjaminan Kredit Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	170
7.3. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....	171
LAMPIRAN	173
L.1. Arah dan Strategi Kebijakan Kewilayahan Tahun 2027	173

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	69
Tabel 2. Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah.....	71
Tabel 3. Pemetaan Aspek Indeks Daya Saing Daerah, 2025	141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, 2026 dan 2027 (% yoy).....	5
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi, 2021-2025 (% yoy).....	10
Grafik 3. Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran, 2021-2025 (% yoy)	11
Grafik 4. Pertumbuhan PDB sisi Produksi, 2021-2025 (% yoy).....	13
Grafik 5. Perkembangan Inflasi (% yoy), 2021-2025.....	17
Grafik 6. Perkembangan Neraca Pembayaran, 2021 – 2025 (USD miliar)	17
Grafik 7. Transaksi Berjalan, 2021 – 2025 (USD miliar).....	18
Grafik 8. Neraca Perdagangan Barang, 2021 – 2025 (USD miliar)	19
Grafik 9. Neraca Transaksi Modal dan Finansial, 2021 – 2025 (USD miliar).....	21
Grafik 10. Perkembangan Cadangan Devisa, 2021-2025	21
Grafik 11. Perkembangan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan Uang Beredar, 2021-2025	24
Grafik 12. Suku Bunga Kredit Tertimbang, 2025.....	25
Grafik 13. Perkembangan Kredit, 2021-2025 (persen, yoy).....	26
Grafik 14. Perkembangan DPK, 2021-2025 (persen, yoy).....	26
Grafik 15. Perkembangan Nilai Tukar (Rp) dan Suku Bunga SBN 10 Tahun (%), 2021-2025	27
Grafik 16. Rasio Pendapatan Negara, 2021-2025 (% PDB).....	33
Grafik 17. Perkembangan Defisit Anggaran, 2021 – 2025 (% PDB)	34
Grafik 18. Perkembangan Keseimbangan Primer, 2021 – 2025 (% PDB).....	34
Grafik 19. Perkembangan Rasio Utang, 2021 – 2025 (% PDB).....	35
Grafik 20. Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Wilayah di Indonesia.....	41
Grafik 21. Business Ready Pillars Antara Indonesia dan Negara Mitra (%).....	43
Grafik 22. Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB).....	70
Grafik 23. Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2021-2026 (Rp T).....	86
Grafik 24. Perkembangan PNBPNBP, 2021 - 2026 (Rp T).....	90
Grafik 25. Perkembangan PNBPNBP SDA, 2021 - 2026 (Rp T).....	92
Grafik 26. Perkembangan PNBPNBP SDA Migas, 2021 – 2026 (Rp T).....	94
Grafik 27. Perkembangan PNBPNBP SDA Nonmigas, 2021 – 2026 (Rp T).....	94
Grafik 28. Perkembangan PNBPNBP KND, 2021 - 2026 (Rp T).....	97

Grafik 29. Perkembangan PNBP Lainnya, 2021 - 2026 (Rp T).....	97
Grafik 30. Perkembangan PNBP BLU, 2021 - 2026 (Rp T)	101
Grafik 31. Perkembangan Belanja Negara, 2021 - 2026 (Rp T)	103
Grafik 32. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2021 - 2026 (Rp T).....	104
Grafik 33. Perkembangan Subsidi, 2021 - 2026 (Rp T).....	107
Grafik 34. Perkembangan Subsidi Energi, 2021 - 2026 (Rp T)	108
Grafik 35. Perkembangan Subsidi Nonenergi, 2021 - 2026 (Rp T).....	110
Grafik 36. Perkembangan Transfer ke Daerah, 2021-2026 (Rp T)	113
Grafik 37. Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2021 - 2026 (Rp T).....	114
Grafik 38. Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2021-2026 (Rp T)	114
Grafik 39. Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2021-2026 (Rp T)	115
Grafik 40. Perkembangan Dana Otsus, 2021 - 2026 (Rp T).....	116
Grafik 41. Perkembangan Dana Keistimewaan, 2021 - 2026 (Rp T).....	116
Grafik 42. Perkembangan Dana Desa, 2021 - 2026 (Rp T)	117
Grafik 43. Perkembangan Dana Insentif Fiskal 2021-2026 (Rp T).....	117
Grafik 44. Defisit APBN, 2021-2027 (% PDB).....	121
Grafik 45. Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2021 - 2026 (Rp T)	124
Grafik 46. Perkembangan Pembiayaan Utang, 2021 - 2026 (Rp T)	124
Grafik 47. Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2021 - 2026 (Rp T)	128
Grafik 48. Perkembangan Pemberian Pinjaman, 2021 - 2026 (Rp T)	128
Grafik 49. Perkembangan Kewajiban Penjaminan, 2021 - 2026 (Rp T).....	132
Grafik 50. Perkembangan Pembiayaan Lainnya, 2021 - 2026 (Rp T).....	132
Grafik 51. Status Penuntasan SPM Pendidikan Perwilayah, 2024	144
Grafik 52. Perkembangan Indikator UHH, Persalinkes, dan Prevalensi <i>Stunting</i> di Daerah	146
Grafik 53. Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2021-2025 (Rp T)*	152
Grafik 54. Realisasi Pembiayaan Utang Daerah (PUD) dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, 2021-2025 (Rp T)	153

DAFTAR BOKS

Boks 1. Dampak Ekonomi dari Konflik di Timur Tengah	7
Boks 2. Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Domestik Pada Periode Tertentu	33
Boks 3. Optimalisasi Infrastruktur Digital melalui Pusat Data	42
Boks 4. Kebijakan Bea Keluar Emas: Upaya Mendorong Nilai Tambah Nasional	87
Boks 5. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara	122
Boks 6. Penguatan Sisi Permintaan, Penawaran, dan Pembiayaan untuk Mendukung Program Perumahan yang Berkelanjutan	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	84
Gambar 2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kewilayahan	139

DAFTAR SINGKATAN

1.	3T	:	Tertinggal, Terdepan, Terluar
2.	ABS	:	<i>Automatic Blocking System</i>
3.	ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
4.	AHU	:	Administrasi Hukum Umum
5.	AI	:	<i>Artificial Intelligence</i>
6.	AKG	:	Angka Kecukupan Gizi
7.	Almatsus	:	Alat dan Material Khusus
8.	Alsintan	:	Alat dan Mesin Pertanian
9.	Alutsista	:	Alat Utama Sistem Senjata
10.	AP	:	<i>Administered Price</i>
11.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12.	APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
13.	APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
14.	APK	:	Angka Partisipasi Kasar
15.	AS	:	Amerika Serikat
16.	ASEAN	:	<i>The Association of Southeast Asian Nation</i>
17.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
18.	ASRI	:	Aman, Sehat, Resik, dan Indah
19.	ATK	:	Alat Tulis Kantor
20.	BBM	:	Bahan Bakar Minyak
21.	BIN	:	Badan Intelijen Negara
22.	BKC	:	Barang Kena Cukai
23.	BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
24.	BLTS	:	Bantuan Langsung Tunai Sementara
25.	BLU	:	Badan Layanan Umum
26.	BMN	:	Barang Milik Negara
27.	BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
28.	BOPPJ	:	Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
29.	BPI Danantara	:	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
30.	BPP	:	Belanja Pemerintah Pusat
31.	BPS	:	Badan Pusat Statistik
32.	BULOG	:	Perusahaan Umum (d/h Badan Urusan Logistik)
33.	BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
34.	BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
35.	BUN	:	Bendahara Umum Negara
36.	BVK	:	Bebas Visa Kunjungan
37.	CAR	:	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
38.	CCUS	:	<i>Carbon Capture, Utilization, and Storage</i>
39.	CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah

40.	CEISA	: <i>Customs Excise Information System and Automation</i>
41.	CEOR	: <i>Chemical Enhanced Oil Recovery</i>
42.	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
43.	CKG	: Cek Kesehatan Gratis
44.	CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
45.	CPP	: Cadangan Pangan Pemerintah
46.	CRM-IRE	: <i>Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine</i>
47.	CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
48.	Dais DIY	: Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
49.	DAK	: Dana Alokasi Khusus
50.	Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
51.	DBH	: Dana Bagi Hasil
52.	Dekon	: Dekonsentrasi
53.	DEN	: Dewan Energi Nasional
54.	DHE	: Devisa Hasil Ekspor
55.	DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
56.	DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
57.	DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
58.	DKI Jakarta	: Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
59.	DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
60.	DMTT	: <i>Domestic Minimum Top-up Tax</i>
61.	DOB	: Daerah Otonom Baru
62.	DPK	: Dana Pihak Ketiga
63.	DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
64.	DSP4	: Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak
65.	DST	: <i>Digital Services Tax</i>
66.	DTI	: Dana Tambahan Infrastruktur
67.	DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
68.	DTPPFM	: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
69.	DTSEN	: Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional
70.	EBT	: Energi Baru Terbarukan
71.	ECB	: <i>European Central Bank</i>
72.	ECI	: <i>Economic Complexity Index</i>
73.	EOR	: <i>Enhanced Oil Recovery</i>
74.	e-PIT	<i>Penangkapan Ikan Terukur</i>
75.	ERI	: <i>Electronic Registration and Identification</i>
76.	ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
77.	ESG	: <i>Environmental Social Governance</i>
78.	ETLE	: <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>
79.	ETM	: <i>Energy Transition Mechanism</i>
80.	FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
81.	FFR	: <i>Federal Funds Rate</i>

82.	FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
83.	FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
84.	FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
85.	G20	: <i>The Group of Twenty</i>
86.	Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
87.	Gbps	: <i>Gigabits Per Second</i>
88.	GEI	: <i>Government Effectiveness Index</i>
89.	Genesis	: <i>Geothermal Energy Information System</i>
90.	GIR	: <i>GloBE Information Return</i>
91.	GKP	: Gabah Kering Panen
92.	GKG	: Gabah Kering Giling
93.	GRK	: Gas Rumah Kaca
94.	GVC	: <i>Global Value Chain</i>
95.	GW	: <i>Giga Watt</i>
96.	Ha	: Hektare
97.	HCI	: <i>Human Capital Index</i>
98.	HET	: Harga Eceran Tertinggi
99.	HGBT	: Harga Gas Bumi Tertentu
100.	HKPD	: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
101.	HPP	: Harmonisasi Peraturan Perpajakan
102.	HPP	: Harga Pembelian Pemerintah
103.	ICOR	: <i>Incremental Capital Output Ratio</i>
104.	ICP	: <i>Indonesian Crude-oil Price</i>
105.	IEA	: <i>International Energy Agency</i>
106.	IGT	: Informasi Geospasial Tematik
107.	IIR	: <i>Income Inclusion Rules</i>
108.	IK	: Indeks Kesehatan
109.	IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
110.	IKN	: Ibu Kota Nusantara
111.	IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
112.	IMM	: Indeks Modal Manusia
113.	Inpres	: Instruksi Presiden
114.	IP	: Indeks Pertanaman
115.	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
116.	IPU	: Indeks Persaingan Usaha
117.	ISP	: <i>Internet Service Provider</i>
118.	ISR	: Izin Stasiun Radio
119.	IT	: <i>Information Technology</i>
120.	JBT	: Jenis BBM Tertentu
121.	JETP	: <i>Just Energy Transition Partnership</i>
122.	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
123.	JKM	: Jaminan Kematian

124.	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
125.	K3LL	: Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan
126.	K/L	: Kementerian/Lembaga
127.	KB	: Keluarga Berencana
128.	KB	: Kawasan Berikat
129.	KD/KMP	: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
130.	KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
131.	Kemendag	: Kementerian Perdagangan
132.	Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
133.	Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
134.	Kemendiktisaintek	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
135.	Kementerian ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
136.	Kementerian PPN/Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
137.	KEM-PPKF	: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
138.	Kg	: Kilogram
139.	KIP	: Kartu Indonesia Pintar
140.	KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
141.	KL	: Kiloliter
142.	Km	: Kilometer
143.	KND	: Kekayaan Negara yang Dipisahkan
144.	KNMP	: Kampung Nelayan Merah Putih
145.	KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
146.	KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
147.	KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
148.	KPP	: Kredit Program Perumahan
149.	KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
150.	KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
151.	KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
152.	KRL	: Kereta Rel Listrik
153.	KSPP	: Kawasan Sentra Produksi Perikanan
154.	KSPP	: Kawasan Sentra Produksi Pangan
155.	KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
156.	KUA	: Kredit Usaha Alsintan
157.	KUA-PPAS	: Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
158.	KTI	: Kawasan Timur Indonesia
159.	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
160.	LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
161.	LNPR	: Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
162.	LNSW	: Lembaga National Single Window
163.	LPDB-KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian UMKM

164.	LPEI	:	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
165.	LPG	:	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
166.	LRT	:	<i>Light Rail Transit</i>
167.	M1	:	Uang Beredar Sempit
168.	M2	:	Uang Beredar Luas
169.	Masyarakat KP	:	Masyarakat Kelautan dan Perikanan
170.	MBG	:	Makan Bergizi Gratis
171.	MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
172.	MDI-I	:	<i>Multidimensional Deprivation Index-Indonesia</i>
173.	Migas	:	Minyak dan Gas
174.	MIP-PNBP	:	Mitra Instansi Pengelola PNBP
175.	MLT		Manfaat Layanan Tambahan
176.	MPP	:	Mal Pelayanan Publik
177.	MRT	:	<i>Mass Rapid Transit</i>
178.	Nakes	:	Tenaga Kesehatan
179.	NEK	:	Nilai Ekonomi Karbon
180.	NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
181.	NIM	:	Net Interest Margin
182.	NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
183.	NPL	:	Non-Performing Loan
184.	NPP	:	Narkotika Psikotropika dan Prekursor
185.	NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
186.	NRKB	:	Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
187.	NTB	:	Neraca Transaksi Berjalan
188.	NTMF	:	Neraca Transaksi Modal dan Finansial
189.	NTNP	:	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan
190.	NTP	:	Nilai Tukar Petani
191.	NZE	:	<i>Net Zero Emissions</i>
192.	ODS	:	<i>One Day Service</i>
193.	OECD	:	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
194.	OIP	:	Operator Investasi Pemerintah
195.	OPEC+	:	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus</i>
196.	OSS-RBA	:	<i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i>
197.	Otsus	:	Otonomi Khusus
198.	P2SK	:	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
199.	P2SP	:	Percepatan Program Strategis Pemerintah
200.	PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
201.	PAT	:	Pajak Air Tanah
202.	PARB	:	Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana
203.	PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
204.	PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
205.	PBBR	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

206.	PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
207.	PDB	:	Produk Domestik Bruto
208.	PDN	:	Pinjaman Dalam Negeri
209.	PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
210.	Perlinsos	:	Perlindungan Sosial
211.	Perpres	:	Peraturan Presiden
212.	PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
213.	PIP	:	Program Indonesia Pintar
214.	PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
215.	PKH	:	Program Keluarga Harapan
216.	PKP	:	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
217.	P-KP	:	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
218.	PKPN	:	Program Kerja Prioritas Nasional
219.	PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
220.	PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
221.	PMA	:	Penanaman Modal Asing
222.	PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
223.	PMI Manufaktur	:	<i>Purchasing Managers' Index</i> Manufaktur
224.	PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
225.	PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
226.	PMN	:	Penyertaan Modal Negara
227.	PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
228.	PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
229.	PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
230.	PoD	:	<i>Plan of Development</i>
231.	PP	:	Peraturan Pemerintah
232.	PPh	:	Pajak Penghasilan
233.	PPKE	:	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
234.	PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
235.	PPN DTP	:	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
236.	PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
237.	PPP	:	<i>Public-Private Partnership</i>
238.	PPSE	:	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi
239.	PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
240.	PT	:	Perseroan Terbatas
241.	PTM	:	Penyakit Tidak Menular
242.	PU	:	Pekerjaan Umum
243.	RCEP	:	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
244.	RKAB	:	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
245.	RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
246.	RM	:	Rupiah Murni
247.	ROA	:	<i>Return on Assets</i>

248.	RMP	:	Rupiah Murni Pendamping
249.	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
250.	SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
251.	Sarpras	:	Sarana dan prasarana
252.	Satgas P3M-PPE	:	Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
253.	SBN	:	Surat Berharga Negara
254.	SBUM	:	Subsidi Bantuan Uang Muka
255.	SD	:	Sekolah Dasar
256.	SDA	:	Sumber Daya Alam
257.	SDG	:	<i>Sustainable Development Goal</i>
258.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
259.	Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok
260.	SIM	:	Surat Izin Mengemudi
261.	SIMBARA	:	Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara
262.	SIP	:	<i>Systematic Investment Plan</i>
263.	SIPNBP-PKH	:	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak - Penggunaan Kawasan Hutan
264.	SKEM	:	Standar Kinerja Energi Minimum
265.	SKCK	:	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
266.	SMA	:	Sekolah Menengah Atas
267.	SMF	:	Sarana Multigriya Finansial
268.	SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
269.	SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
270.	SMV	:	<i>Special Mission Vehicles</i>
271.	SNT	:	Sekolah Nasional Terintegrasi
272.	SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
273.	SPPG	:	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
274.	SR	:	Sekolah Rakyat
275.	SSRG	:	Skema Subsidi Resi Gudang
276.	STCK	:	Surat Tanda Coba Kendaraan
277.	Stdtd	:	Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan
278.	STNK	:	Surat Tanda Nomor Kendaraan
279.	STEMM	:	<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine</i>
280.	SUG	:	Sekolah Unggul Garuda
281.	SWF	:	<i>Sovereign Wealth Funds</i>
282.	TA	:	Tahun Anggaran
283.	TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
284.	TB	:	Tuberkulosis
285.	TCKB	:	Tanda Coba Kendaraan Bermotor
286.	THR	:	Tunjangan Hari Raya
287.	THT	:	Tunjangan Hari Tua
288.	TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi

289.	TKD	:	Transfer ke Daerah
290.	TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
291.	TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
292.	TNKB	:	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
293.	TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
294.	TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
295.	TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
296.	TPIP	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
297.	TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
298.	TPST3R	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
299.	TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
300.	UHH	:	Umur Harapan Hidup
301.	UMi	:	Ultra Mikro
302.	UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
303.	USD	:	<i>United States Dollar</i>
304.	UU	:	Undang-Undang
305.	UUD	:	Undang-Undang Dasar
306.	VA	:	<i>Volt-Ampere</i>
307.	WEF	:	<i>World Economic Forum</i>
308.	WHO	:	<i>World Health Organization</i>
309.	Wisman	:	Wisatawan Mancanegara
310.	Wisnas	:	Wisatawan Nasional
311.	YoY	:	<i>Year on Year</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan

KEM-PPKF Tahun 2027

Dokumen Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan
RAPBN 2027 antara Pemerintah dan DPR

Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat

Pasal 33 UUD 1945

1

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

**INDONESIA MEMPUNYAI POTENSI BESAR UNTUK
MEWUJUDKAN INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR**



POSISI GEOGRAFIS STRATEGIS

Keuntungan strategis:
logistik perdagangan,
pusat pertumbuhan
regional di kawasan
Indo-Pasifik



KEUNGGULAN DEMOGRAFI

Pasar Domestik.
Konsumsi domestik
besar yang resilien.



SDA MELIMPAH

- Batubara
- Tembaga
- Timah
- Perikanan

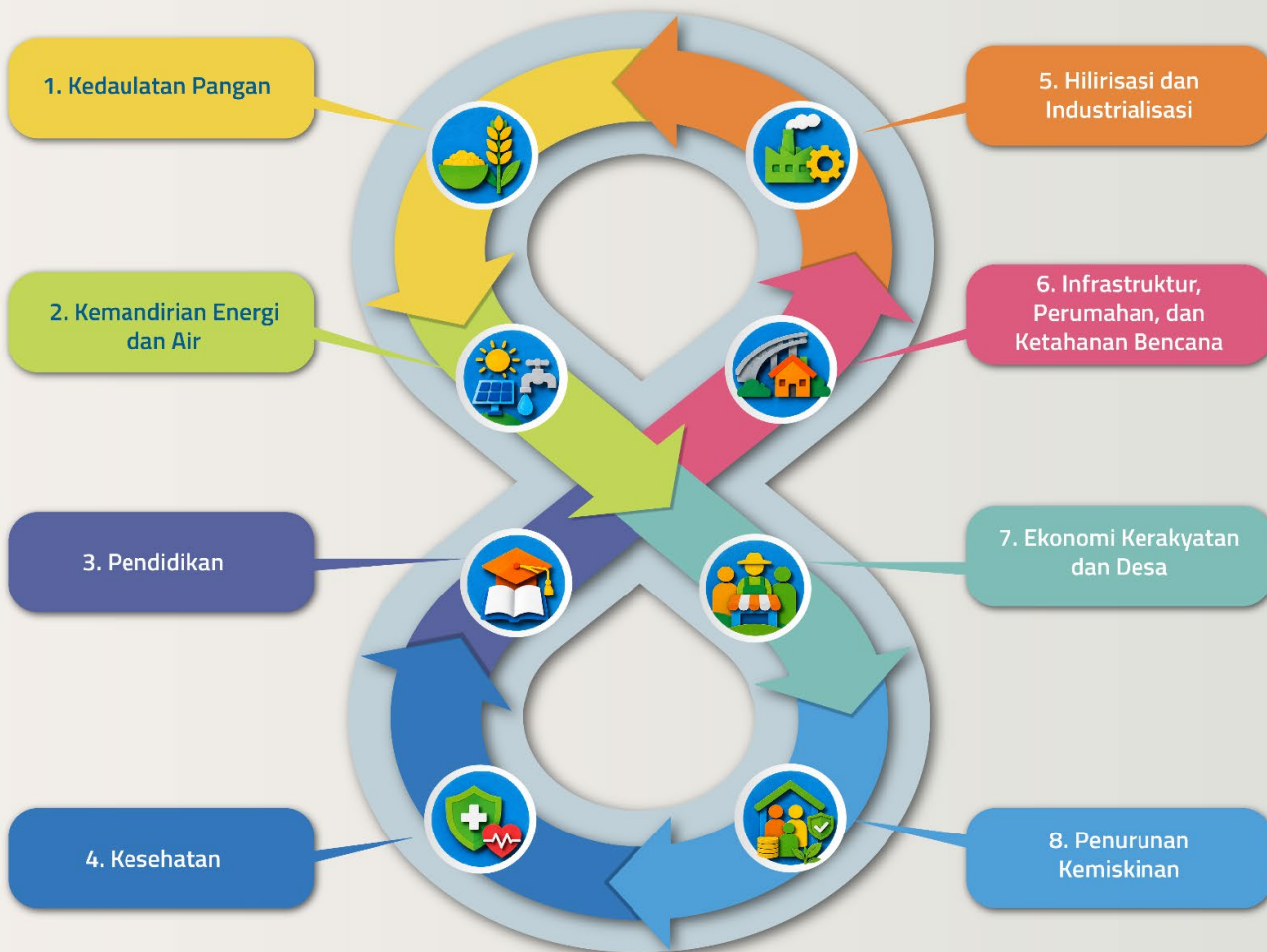


FISKAL YANG DISIPLIN

- Stabilitas makroekonomi
- Kredibilitas pengelolaan fiskal
- Kepercayaan pasar

8 Klaster

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)



Pendukung (*enabler*):
**Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum,
Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi**

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2027

							
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp/USD)	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)
KEM-PPKF 2027	5,8 - 6,5	1,5 - 3,5	16.800 - 17.500	6,5 - 7,3	70 - 95	602 - 615	934 - 977
Kesepakatan DPR	5,8 - 6,5	1,5 - 3,5	16.800 - 17.500	6,5 - 7,3	70 - 95	605 - 620	951 - 990

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

POSTUR MAKRO FISKAL 2027 (% PDB)

Uraian	KEM PPKF 2027		Kesepakatan DPR	
	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Pendapatan Negara Dan Hibah	11,82	12,40	12,01	12,40
Penerimaan Perpajakan	10,02	10,50	10,16	10,50
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,80	1,89	1,85	1,89
Hibah	0,002	0,003	0,002	0,003
Belanja Negara	13,62	14,80	13,81	14,80
Belanja Pemerintah Pusat	11,07	12,01	11,26	12,01
Transfer ke Daerah	2,55	2,79	2,55	2,79
Keseimbangan Primer	0,45	(0,14)	0,45	(0,14)
Defisit Anggaran	(1,80)	(2,40)	(1,80)	(2,40)
Pembiayaan Investasi	(0,50)	(0,90)	(0,50)	(0,90)
Rasio Utang	40,31	40,64	40,31	40,64

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

SASARAN PEMBANGUNAN 2027

Indikator	KEM PPKF	Kesepakatan DPR	Indikator	KEM PPKF	Kesepakatan DPR
 Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0	0,0	 Indeks Modal Manusia	0,575	0,575
 Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 6,5	6,0 - 6,5	 Indeks Kesejahteraan Petani	0,8038	0,8038
 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 - 4,87	4,30 - 4,87	 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81	40,81
 Rasio Gini (Indeks)	0,362 - 0,367	0,362 - 0,367	Sumber: Bappenas		

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya penyediaan landasan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal sebagai bagian integral dari proses penyusunan anggaran negara. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran berikutnya. Sebagai dokumen kebijakan strategis, KEM PPKF memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian terkini, proyeksi ke depan, serta arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah. **Penyusunan dokumen ini juga merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.**

Pemerintah menyadari bahwa pencapaian visi tersebut dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, baik yang bersumber dari dinamika global maupun kondisi domestik. Lingkungan global bergerak sangat dinamis. Sejak awal 2026, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah berkembang menjadi konfrontasi terbuka, sanksi ekonomi, dan intensifikasi konflik tidak langsung di kawasan. Perang ini tidak lagi terbatas pada dimensi politik dan keamanan, tetapi telah berimplikasi signifikan terhadap stabilitas ekonomi global. Kondisi tersebut berimplikasi pada gangguan pasokan energi, jalur perdagangan internasional, dan stabilitas keuangan global, yang pada akhirnya memicu volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, suku bunga dan nilai tukar, serta menguatnya ketidakpastian global yang berdampak pada lintas negara.

Namun demikian, Indonesia juga memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, struktur pasar domestik yang besar, posisi geo-ekonomi yang strategis, dan terjaganya stabilitas sosial-politik menjadi modal dasar untuk dimanfaatkan secara optimal guna mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Selain itu, disiplin fiskal dan pengelolaan APBN yang hati-hati juga menjadi modal penting dalam menjaga dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Agenda pembangunan secara garis besar difokuskan pada Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari 8 klaster dan 1 (satu) klaster pendukung atau enabler, yang secara keseluruhan mencakup 60 program kerja. Klasterisasi program kerja tersebut berdasarkan kesamaan tema, tujuan, dan sasaran kebijakan. Pertama, kedaulatan pangan (9 program kerja). Kedua, kemandirian energi dan air (16 program kerja). Ketiga, pendidikan (13 program kerja). Keempat, kesehatan (4 program kerja). Kelima, hilirisasi dan industrialisasi (5 program kerja).

Keenam, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana (5 program kerja). Ketujuh, ekonomi kerakyatan dan desa (2 program kerja). Kedelapan, penurunan kemiskinan (2 program kerja). Dengan klaster pendukung (enabler) meliputi pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi (4 program kerja). PKPN dirancang untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah tidak tersebar secara sektoral dan parsial, melainkan terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata.

Dengan memanfaatkan peluang, diharapkan Indonesia mampu menjawab tantangan, sekaligus mendukung agenda pembangunan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut **Pemerintah menegaskan orientasi kebijakan yang ditempuh difokuskan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi (*pro-growth*) dan akselerasi terwujudnya kesejahteraan (*pro-welfare*)**, dengan menempatkan percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta stabilitas nasional sebagai prioritas utama.

Kerangka kebijakan ini membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama sinergi fiskal-moneter, termasuk dengan optimalisasi peran Danantara. Dari sisi fiskal, APBN berperan sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta sebagai mesin pertumbuhan dan APBN juga dioptimalkan sebagai instrumen *countercyclical* untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi dan dukungan dunia usaha dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Sementara itu, arah kebijakan moneter diharapkan dapat menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan melalui dukungan likuiditas yang memadai dengan *cost of fund* yang kompetitif untuk peningkatan pembiayaan pada sektor riil. Sementara Danantara diharapkan dapat mengakselerasi investasi produktif dan strategis yang bernilai tambah tinggi. Strategi investasi Danantara perlu diselaraskan untuk mendukung program prioritas Pemerintah.

Sejalan dengan itu, tema kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2027 adalah **“Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”**. Melalui tema ini, Pemerintah menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tema tersebut sekaligus menjadi landasan strategis dalam perumusan dan pelaksanaan program pada setiap klaster, sehingga kebijakan yang dijalankan mampu mendorong produktivitas, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial secara simultan.

Untuk mendukung upaya tersebut, kebijakan fiskal, dirancang kolaboratif, terarah, dan terukur dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman dan mengelola utang secara prudent dan terkendali. Peran APBN sebagai instrumen *countercyclical* tetap dipertahankan untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

KEM PPKF 2027 disusun secara sistematis dan terstruktur yang menyajikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan ekonomi dan fiskal Pemerintah. **Pertama**, Pendahuluan yang berisi gambaran besar dan struktur isi dokumen. **Kedua**, Dinamika, Prospek, dan Tantangan Ekonomi dan Fiskal. **Ketiga**, Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah. **Keempat**, Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2027. **Kelima**, Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Tahun 2027. **Keenam**, Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2027. **Ketujuh**, Risiko Fiskal Tahun 2027.

BAB II

DINAMIKA, PROSPEK, DAN TANTANGAN EKONOMI DAN FISKAL

2.1. Kondisi, Prospek, dan Tantangan Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan bergerak sangat dinamis. Setelah dorongan sementara dari percepatan aktivitas perdagangan di awal 2025 mereda, dampak kebijakan fiskal dan moneter yang ketat di negara maju semakin terasa. Tekanan ini membatasi ruang ekspansi dalam jangka menengah dan menjadi tantangan utama bagi stabilitas global. Perekonomian global pada periode transisi menuju tahun 2027 memasuki fase yang sangat dinamis. Ketahanan ekonomi global akan terus diuji oleh peningkatan kerentanan sistemik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan dan investasi internasional.

Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, resiliensi ekonomi global dibayangi oleh berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu arus logistik, tetapi juga mengubah paradigma kerja sama ekonomi multilateral secara fundamental. Dinamika ini dipicu oleh perubahan kepemimpinan di berbagai negara ekonomi utama yang membawa pergeseran kebijakan, terutama terkait kebijakan tarif. Meskipun sempat terjadi upaya deeskalasi melalui kesepakatan pemangkasan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap berbagai negara, fluktuasi kebijakan tersebut telah menciptakan beban tambahan bagi ekonomi global. Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran menambah tingginya risiko dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat berujung pada terjadinya stagflasi, di mana perlambatan ekonomi global dibarengi dengan tekanan inflasi akibat gangguan struktural di pasokan minyak yang berakibat pada tingginya harga energi. Dengan kondisi dunia yang masih berusaha bangkit pascapandemi, peningkatan risiko dan ketidakpastian ini semakin menekan prospek pertumbuhan ekonomi global jangka menengah.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Sepanjang tahun 2025, performa ekonomi global menunjukkan pola divergensi antarkawasan. Negara-negara berkembang di Asia, termasuk India, Vietnam, dan Indonesia, menjadi motor penggerak utama pertumbuhan dunia. Kinerja konsumsi domestik yang solid dan akselerasi investasi infrastruktur baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik maupun kemajuan digitalisasi (*artificial intelligence/data center*) mampu memperkuat prospek kawasan ini. Sebaliknya, negara-negara maju cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan akibat tekanan inflasi yang persisten, lonjakan biaya energi, serta pelemahan sektor industri manufaktur.

Dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), hubungan ekonomi antara AS-Tiongkok, dan eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi faktor yang menentukan arah perekonomian dunia. Ketegangan dagang yang meningkat melalui kebijakan tarif agresif menimbulkan ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan. Stabilitas hubungan AS-Tiongkok menjadi krusial karena setiap perubahan kebijakan dapat berpengaruh pada arus perdagangan, investasi, dan rantai pasok global secara signifikan. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah berpotensi menimbulkan rantai pasok energi yang akan memicu lonjakan harga komoditas dan tekanan inflasi.

Harga komoditas energi, terutama minyak mentah, mengalami tren menurun pada 2025, tetapi mengalami kenaikan di awal 2026 yang dipicu konflik di Timur Tengah. Pelemahan di 2025 tersebut disebabkan oleh proyeksi surplus produksi global dengan kisaran harga berada pada level USD60 per barel. Harga batu bara juga terus mengalami tren penurunan pada 2025 sejalan dengan komitmen banyak negara untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan rendah emisi. Penurunan harga komoditas energi akan memberikan tekanan pada pendapatan negara-negara pengekspor sumber daya alam, termasuk Indonesia. Potensi dampak dari hal-hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada penerimaan negara, tetapi juga pada strategi diversifikasi ekonomi yang semakin mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Pergerakan harga komoditas lain beragam, dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan percepatan transisi energi hijau. Harga emas mencetak rekor historis pada tahun 2025 dengan kenaikan rata-rata sebesar 65 persen sebagai dampak dari pelarian investor ke aset perlindungan nilai di tengah ketidakpastian global. Komoditas logam industri seperti tembaga juga mengalami penguatan signifikan yang didorong oleh lonjakan permintaan masif untuk pembangunan pusat data dan infrastruktur kendaraan listrik global. Tren ini sekaligus menegaskan pergeseran kebutuhan global menuju material yang mendukung transformasi digital dan energi bersih.

Aktivitas manufaktur global menunjukkan fragmentasi antara ekspansi di Asia dan kontraksi di negara maju. *Purchasing Managers' Index (PMI)* Manufaktur India memimpin zona ekspansi dengan level 59,1 mencerminkan optimisme pelaku industri terhadap permintaan domestik dan ekspor. Sebaliknya, Eropa dan Jepang terjebak dalam zona kontraksi akibat gangguan rantai pasok dan pelemahan ekspor. Meskipun sektor jasa sempat menjadi penopang ekonomi, ketahanannya mulai tergerus oleh penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga pokok yang melampaui pertumbuhan upah riil juga menekan konsumsi global sehingga memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.

Kondisi sektor keuangan global masih volatil dengan sensitivitas tinggi terhadap arah kebijakan moneter bank sentral utama. Pasar ekuitas global sempat mengalami penguatan yang didorong oleh optimisme terhadap sektor teknologi dan kecerdasan artifisial, namun kembali terkoreksi akibat indikasi inflasi yang persisten dan perubahan kebijakan suku bunga. Di pasar obligasi, selisih suku bunga *US Treasury 10-Year Bond* dan Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun cenderung terjaga stabil di kisaran 200 basis poin, mencerminkan persepsi risiko yang terjaga. Namun, volatilitas tetap tinggi karena investor berpotensi untuk menyesuaikan portofolionya terhadap ketidakpastian arah kebijakan moneter.

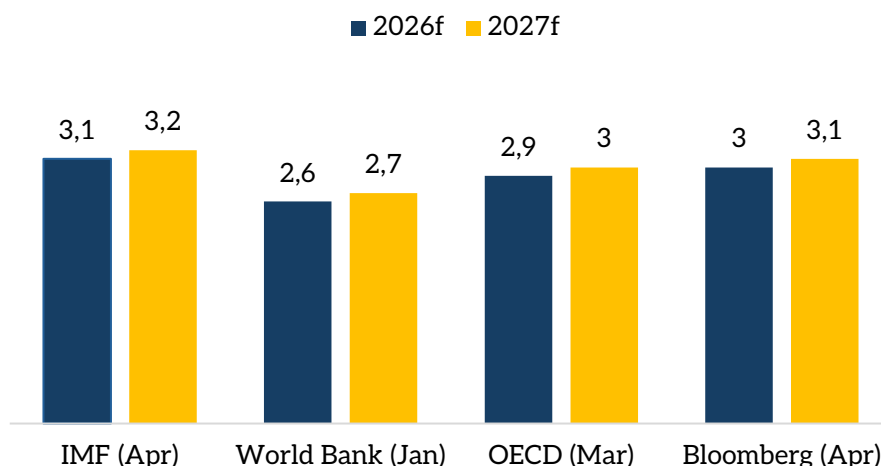
Dominasi dolar Amerika Serikat memicu tekanan depresiasi pada mata uang negara berkembang. Hal tersebut juga meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dalam valuta asing sehingga berpotensi mempersempit ruang fiskal negara berkembang. Ketidakpastian arah likuiditas global menuntut otoritas keuangan untuk selalu waspada terhadap potensi pembalikan arus modal secara tiba-tiba. Stabilitas sistem keuangan nasional akan menjadi prioritas utama mengingat guncangan eksternal dapat bertransmisi ke sektor riil dan memperburuk prospek ekonomi domestik.

2.1.2. Prospek Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global di tahun 2027 diproyeksikan memasuki fase pemulihan yang lebih stabil, namun sangat rentan terhadap guncangan geopolitik. Momentum ini akan sangat dipengaruhi oleh tingginya investasi pada teknologi kecerdasan artifisial serta rekonfigurasi hubungan dagang antar kekuatan ekonomi besar dunia. Berakhirnya masa transisi tarif di akhir 2026 dan penguatan blok perdagangan regional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan hilirisasi di pasar berkembang diprediksi menjadi katalis utama yang menentukan arah aliran modal global. Di sisi lain, tertahannya proses normalisasi kebijakan moneter pasca-era suku bunga tinggi karena eskalasi konflik geopolitik akan menjadi tantangan bagi ketahanan daya beli domestik serta keberlanjutan beban utang di berbagai negara berkembang yang memiliki ruang fiskal terbatas.

Pertumbuhan ekonomi global dalam fase pemulihan ini diproyeksikan akan berada dalam tren stabil namun melambat. OECD memperkirakan ekonomi global tumbuh 2,9 persen di 2026 dan 3,0 persen di 2027. Sejalan dengan itu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 3,1 persen di 2026 dan 3,2 persen di 2027. Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan yang lebih pesimis dengan 2,6 persen di 2026 dan 2,7 persen di 2027. Meskipun angka tersebut menunjukkan moderasi dibandingkan dekade sebelumnya, resiliensi pertumbuhan ekonomi global pada jangka menengah didorong oleh adaptabilitas sektor swasta terhadap pergeseran kebijakan perdagangan serta kontribusi positif dari integrasi teknologi digital.

Grafik 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, 2026 dan 2027 (% yoy)



Sumber: *Economic Outlook*, 2026

Laju inflasi global diperkirakan terus melandai meskipun prosesnya berjalan cukup lambat. Bank Dunia memproyeksikan inflasi global diprediksi turun ke level 3,8 persen pada 2026 dan menyentuh 3,4 persen pada 2027 seiring dengan kebijakan moneter yang tetap relatif ketat di banyak negara. Penurunan ini didukung oleh normalisasi rantai pasok dan meredanya tekanan harga pangan, meskipun risiko proteksionisme pangan tetap membayangi. Persistensi tingkat upah pada sektor jasa tetap menjadi tantangan utama yang harus diwaspadai oleh para pengambil kebijakan. Selain itu, kesenjangan inflasi yang lebih lebar dibandingkan di negara berkembang juga menjadi tantangan. Laju kenaikan harga di wilayah ini diprediksi tetap tinggi akibat besarnya biaya distribusi domestik serta kerentanan yang lebih besar terhadap volatilitas nilai tukar.

Sejalan dengan melandainya inflasi, kebijakan moneter global akan memasuki fase normalisasi yang hati-hati untuk menghindari risiko resesi. *The Fed* diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan secara bertahap menuju level netral di kisaran 3,0–3,5 persen pada akhir 2027, langkah yang kemungkinan diikuti oleh *European Central Bank (ECB)* ke level 2,5 persen. Sebaliknya, *Bank of Japan* diperkirakan tetap menaikkan suku bunga menuju 1,0 persen guna mengakhiri era kebijakan ultra-longgar. Meskipun tren suku bunga global menurun, suku bunga riil di berbagai negara maju dan berkembang diperkirakan tetap bertahan di level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata prapandemi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Harga komoditas global diprediksi akan mengalami koreksi struktural. Secara umum, indeks harga menunjukkan kecenderungan menurun hingga akhir 2027, kecuali jika terjadi eskalasi konflik di wilayah produsen utama. Indeks harga energi diperkirakan melemah seiring melimpahnya pasokan minyak mentah dari produsen non-OPEC+ yang berpotensi menahan harga Brent di bawah USD70 per barel, dalam skenario tanpa gangguan pasokan signifikan. Sebaliknya, harga logam dasar dan mineral kritis yang dibutuhkan untuk transisi energi diprediksi tetap tangguh karena permintaan jangka panjang untuk teknologi hijau terus meningkat secara konsisten, menjadikan mineral kritis sebagai komoditas geopolitik baru.

Perdagangan dunia diperkirakan mengalami normalisasi setelah sempat bergejolak akibat penyesuaian kebijakan tarif AS. Pertumbuhan arus barang diprediksi melandai ke angka 2,6 persen pada 2026 sebelum menuju 3,1 persen pada 2027 seiring dengan terbentuknya koridor logistik baru yang lebih efisien, namun lebih terfragmentasi. Bank Dunia memproyeksikan bahwa laju pertumbuhan perdagangan di negara-negara berkembang akan melampaui negara maju, didorong oleh integrasi manufaktur regional. Secara permanen, pola perdagangan global mengalami pergeseran menuju fragmentasi geoekonomi, di mana aliran barang lebih terkonsentrasi pada kemitraan strategis berdasarkan kedekatan geopolitik daripada sekadar efisiensi biaya.

2.1.3. Tantangan Perekonomian Global

Tantangan perekonomian global dalam jangka menengah berasal dari lima faktor risiko utama. Faktor pertama adalah tensi geopolitik dan konflik antarnegara yang melibatkan rivalitas kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia, serta konflik di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Ketegangan ini menjadi sumber utama ketidakstabilan internasional yang mengganggu jalur logistik energi dan pangan dunia, yang pada gilirannya memicu volatilitas harga komoditas global. Faktor kedua berkaitan dengan kecenderungan proteksionisme dan fragmentasi ekonomi melalui kebijakan yang bersifat mementingkan

kepentingan domestik secara sepihak, perluasan tantangan nontarif, serta strategi pengurangan risiko yang melemahkan sistem perdagangan bebas. Faktor ketiga adalah volatilitas sektor keuangan. Hal ini dipicu oleh fluktuasi suku bunga, beban utang pemerintah negara-negara maju, dan prediksi beberapa lembaga internasional yang menunjukkan adanya potensi *bubble* di pasar modal karena investasi sangat besar di sektor teknologi dan AI. Kombinasi ketiga faktor tersebut berpotensi mendorong aliran modal ke aset-aset *safe-haven* dan meningkatkan risiko pelarian modal dari pasar negara berkembang, dan pada gilirannya mempersempit ruang kebijakan stabilisasi global.

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kuartal ke depan, bahkan hingga tahun 2027, risiko geopolitik, proteksionisme dan fragmentasi ekonomi masih menjadi faktor utama. Perang antara AS/Israel dengan Iran yang saat ini mengalami kecenderungan eskalasi serta meningkatkan volatilitas sektor keuangan, krisis energi, dan pangan yang mendorong kenaikan inflasi dan menurunkan *outlook* perekonomian global berujung pada stagflasi.

Boks 1. Dampak Ekonomi dari Konflik di Timur Tengah

Saat ini, risiko terbesar bagi ekonomi global adalah potensi dampak stagflasi dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran yang terjadi sejak tanggal 28 Februari 2026. Konflik tersebut telah meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global, terutama melalui disrupsi jalur perdagangan minyak di Selat Hormuz yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Hal ini telah mendorong lonjakan harga minyak global, dengan harga Brent menembus USD100 per barel pada awal April 2026 dan berpotensi lebih tinggi apabila gangguan pasokan berlanjut. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar energi global mulai menghadapi risiko *shock* pasokan yang bersifat struktural, bukan sekadar peningkatan premi risiko geopolitik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan inflasi global, meningkatkan volatilitas pasar keuangan, memperbesar potensi tingkat suku bunga tinggi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Dinamika pasar saat ini menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan terjadinya gangguan pasokan riil, sehingga pergerakan harga minyak mulai menyerupai pola krisis energi global pada dekade 1970-an.

Sebagai respons jangka pendek atas gangguan pasokan minyak global, negara-negara anggota *International Energy Agency (IEA)* di Maret 2026 menyepakati pelepasan cadangan minyak strategis mencapai 400 juta barel, dengan kontribusi AS sebesar 170 juta barel. Namun, langkah ini bersifat sementara dan hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi jangka pendek untuk meredakan tekanan harga. Kebijakan ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan potensi kekurangan pasokan apabila gangguan struktural pada produksi dan distribusi minyak berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama.

Selain gangguan transportasi minyak, konflik juga mulai memengaruhi aktivitas produksi energi di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara produsen mengalami penurunan produksi bahan bakar minyak akibat keterbatasan ekspor dan kendala logistik. Kapasitas kilang minyak yang terganggu diperkirakan telah mencapai lebih dari 3 juta barel per hari. Situasi ini menunjukkan bahwa kendala utama saat ini tidak hanya terletak pada produksi minyak, tetapi juga pada kemampuan distribusi pasokan energi secara aman dan efisien ke pasar global.

Dalam kondisi gangguan pasokan energi global ini, sejumlah negara mulai menerapkan kebijakan pembatasan ekspor energi guna menjaga stabilitas ketersediaan energi domestik. Tiongkok, misalnya, dilaporkan menghentikan ekspor produk bahan bakar minyak untuk memastikan kecukupan pasokan dalam negeri. Kebijakan pembatasan ekspor tersebut berpotensi memperburuk kondisi pasar energi global karena

dapat memfragmentasi pasar energi internasional dan meningkatkan perbedaan harga antar kawasan. Di akhir Maret 2026, berbagai negara juga telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan energi dan kenaikan harga.

Eskalasi krisis energi global menimbulkan beberapa risiko utama bagi perekonomian dunia. Risiko tersebut antara lain: (i) tekanan inflasi global akibat kenaikan harga energi dan biaya transportasi; (ii) peningkatan volatilitas pasar keuangan, terutama pada pasar komoditas dan nilai tukar; (iii) risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya bagi negara-negara importir energi utama di Asia dan Eropa; (iv) potensi munculnya tekanan stagflasi karena kenaikan inflasi terjadi bersamaan dengan pelemahan aktivitas ekonomi global.

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak global dapat memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, peningkatan harga minyak berpotensi meningkatkan tekanan inflasi domestik, khususnya melalui harga energi dan biaya transportasi. Kedua, harga minyak yang bertahan tinggi meningkatkan beban fiskal, terutama apabila Pemerintah perlu menambah alokasi subsidi energi atau kompensasi untuk menjaga stabilitas harga domestik. Ketiga, volatilitas pasar energi global juga dapat meningkatkan tekanan terhadap neraca perdagangan dan transaksi berjalan, terutama apabila harga impor energi meningkat signifikan karena Indonesia mengimpor minyak yang cukup besar.

Faktor risiko keempat mencakup disrupti teknologi melalui adopsi AI. Perkembangan AI memunculkan peluang dan risiko yang berpotensi mengubah struktur ekonomi secara mendalam, seperti yang sebelumnya terjadi dengan listrik dan internet. AI berpotensi mendorong peningkatan produktivitas jangka panjang, tetapi manfaat ini tidak muncul secara instan, dan harus dibarengi dengan upaya peningkatan investasi serta penguatan regulasi dan kualitas sumber daya manusia. AI juga mendorong *capital deepening* melalui investasi besar pada pusat data, semikonduktor, dan layanan *cloud computing*, sehingga pola akumulasi modal bergeser dari industri fisik ke infrastruktur digital. Di sisi lain, AI mengubah pasar tenaga kerja dengan mengotomatisasi beberapa jenis tugas terutama di sektor jasa. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil, serta antarsektor, sehingga berpotensi memperbesar ketimpangan di sektor riil. Transformasi AI juga membawa risiko makroekonomi dan keuangan. Investasi besar di sektor ini dapat memicu gelembung aset teknologi, seperti pada krisis *dot-com* atau telekomunikasi di awal tahun 2000-an dan berpotensi mengalami koreksi yang dapat berujung pada terjadinya krisis keuangan.

Faktor risiko kelima adalah perubahan iklim dan transisi energi semakin bersifat struktural. Tantangan ekonomi baru yang muncul dari risiko ini berupa tekanan pada biaya energi dan dampak turunan terhadap inflasi global yang sulit diprediksi secara akurat. Namun, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta transisi energi juga membuka peluang investasi dan adopsi teknologi di sektor energi yang dalam jangka panjang mampu memperkuat struktur ekonomi Indonesia. *Global Risks Report 2026* (WEF, 2026) menunjukkan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik, konfrontasi geoekonomi, dan ketidakpastian global telah menggeser perhatian dunia dari isu lingkungan dalam horizon dua tahun ke depan. Akan tetapi, perubahan iklim tetap menjadi risiko jangka panjang paling signifikan berupa gangguan rantai pasok, risiko inflasi pangan, serta potensi tantangan perdagangan berbasis lingkungan. Tanpa antisipasi melalui investasi ketahanan iklim, diversifikasi pembiayaan, dan kebijakan fiskal yang adaptif, akumulasi dampak perubahan

iklim berisiko menggerus PDB, memperberat APBN, dan menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Daya Saing Investasi dan Bisnis Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global

Daya saing investasi Indonesia perlu diperkuat dengan percepatan reformasi struktural agar tetap kompetitif di tengah fragmentasi ekonomi global. Berdasarkan laporan *Business Ready (B-Ready)* Bank Dunia 2025, Indonesia menunjukkan keunggulan pada aspek *Business Location* dengan skor 66.94 yang berada di atas rata-rata ASEAN. Aspek *Financial Services* juga relatif kuat dengan skor 70.05 mengungguli negara-negara di kawasan yang bukan *financial hub*. Selain itu, penyempurnaan pada aspek *Market Competition* mencerminkan fondasi regulasi dan layanan publik yang lebih siap melayani pelaku usaha. Dengan keunggulan tersebut, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menarik investasi berkualitas di tengah ketidakpastian global.

Akselerasi investasi Indonesia masih tertahan oleh sejumlah tantangan struktural. Aspek *Business Entry* masih dinilai kompleks, menjadikan Indonesia tertinggal dari Malaysia dan Vietnam dalam kemudahan memulai usaha. *Utility Services* menunjukkan efisiensi yang rendah dan belum menampakkan penyempurnaan signifikan, dengan performa Indonesia yang rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. *Labor* menghadapi kendala fleksibilitas akibat regulasi dan praktik lapangan, dengan skor sekitar 60.37 dan tren persepsi lebih lemah dibanding sejumlah negara sejawat di kawasan. *International Trade* berada di kisaran 58.15 yang mengindikasikan masih ada friksi prosedural dibanding negara ASEAN dengan proses lintas batas yang lebih lancar. Jika tidak segera diatasi, tantangan-tantangan tersebut dapat meningkatkan biaya dan risiko operasional bagi investor.

Di tengah tantangan tersebut, kualitas tata kelola Indonesia menunjukkan keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Selama periode 2021-2025, rata-rata skor *World Governance Index* Indonesia konsisten lebih tinggi dibandingkan Tailan dan Filipina, dua negara yang memiliki *credit rating* yang setara dengan Indonesia. Dibandingkan kedua negara tersebut, Indonesia paling menonjol pada *Regulatory Quality* dan *Voice and Accountability*, sekaligus mengungguli aspek *Rule of Law* dan *Political Stability*. Pada indikator *Government Effectiveness*, Indonesia tetap di atas Filipina dan mempertahankan posisi kompetitif terhadap Tailan. Keunggulan tata kelola ini memberikan rasa aman bagi investor jangka panjang, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kredibel dan berkelanjutan.

Ke depan, agenda kebijakan kemudahan investasi diarahkan untuk menyederhanakan proses, menutup celah inefisiensi, dan meningkatkan kepastian hukum lintas sektoral. Prioritas utama adalah penyederhanaan regulasi dan integrasi penuh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) hingga ke tingkat pemerintah daerah guna menekan biaya transaksi. Lebih lanjut, Pemerintah memperkuat peran Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) guna menyelesaikan tantangan-tantangan investasi secara proaktif. Dengan lingkungan usaha yang kondusif dan atraktif, Indonesia menargetkan posisi sebagai pusat relokasi industri global yang kompetitif sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.

2.2. Kondisi, Prospek, dan Tantangan Perekonomian Domestik

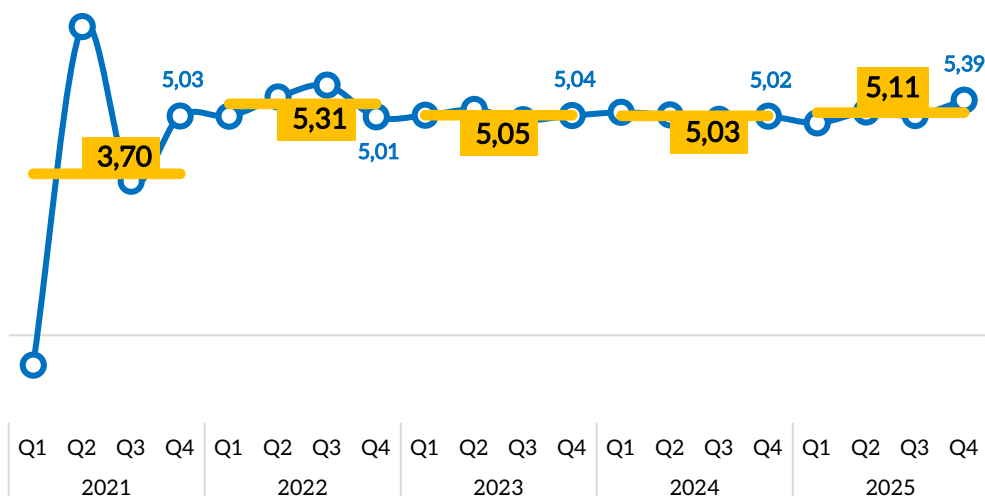
2.2.1. Kondisi Perekonomian Domestik

Perkembangan Ekonomi Sektor Riil

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan solid. Setelah tumbuh 3,70 persen pada 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022 dan tetap terjaga pada level tinggi sebesar 5,05 persen pada 2023. Kinerja tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, serta didukung berbagai langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah melalui stimulus fiskal dan moneter. Kombinasi kebijakan tersebut berhasil menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan memperkuat fondasi pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Momentum pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen dan melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut, ditopang oleh permintaan domestik yang solid, peningkatan investasi, serta aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Memasuki tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,11 persen. Secara umum, capaian tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan investasi yang tinggi, belanja pemerintah yang optimal, serta kinerja ekspor yang tetap stabil. Selain itu, penempatan kas negara pada bank komersial turut mendukung likuiditas perekonomian. Dari sisi produksi, sektor-sektor bernilai tambah tinggi serta sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat menjadi sumber utama pertumbuhan. Dalam konteks ini, APBN berperan strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diperkuat melalui sinergi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan, sehingga perekonomian tidak hanya tumbuh kuat tetapi juga berkelanjutan dengan stabilitas makrofiskal yang tetap terjaga.

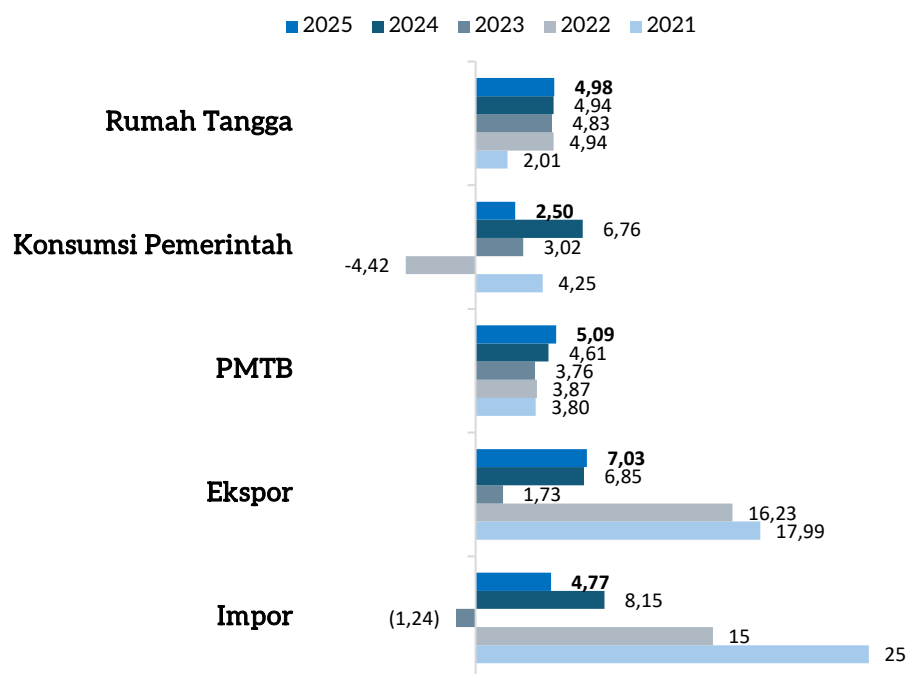
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi, 2021-2025 (% yoy)



Sumber: BPS, 2026

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kinerja yang kuat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2021 sebesar 2,01 persen menunjukkan pemulihan pascapandemi COVID-19. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga menunjukkan tren yang resilien dan kuat, yaitu sebesar 4,94 persen pada tahun 2022 menjadi 4,98 persen pada tahun 2025. Kinerja positif ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui pengendalian inflasi untuk menekan gejolak kenaikan harga. Lebih lanjut, untuk melindungi daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyalurkan berbagai program bantuan dan insentif sosial. Pada tahun 2025, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), melaksanakan program magang, serta menerapkan kebijakan diskon transportasi yang membantu meningkatkan daya beli sekaligus mobilitas masyarakat. Selain itu, APBN juga berperan dalam mendukung stabilitas kondisi perekonomian dan kondusifitas kondisi ketenagakerjaan yang mampu mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga melalui paket stimulus ekonomi, antara lain melalui program magang perguruan tinggi, perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, dan program padat karya tunai.

Grafik 3. Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran, 2021-2025 (% yoy)



Sumber: BPS, 2026

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh positif. P-KP pada periode 2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif namun selaras dengan dinamika belanja negara sebagai *shock absorber* dan katalis dalam merespons dinamika perekonomian, baik global maupun domestik. Setelah tumbuh 4,25 persen pada 2021, P-KP sempat mengalami kontraksi 4,42 persen pada 2022 seiring penurunan signifikan belanja barang sebesar 19,60 persen pasca normalisasi belanja terkait penanganan pandemi, sebelum kembali pulih pada 2023 dan mencapai akselerasi tertinggi 6,76 persen pada 2024 yang didorong lonjakan belanja pegawai

(tumbuh 12,64 persen) dan belanja barang (tumbuh 20,95 persen) sebagai cerminan peningkatan aktivitas layanan publik dan kualitas pelaksanaan anggaran. Pada 2025, sebagai tahun pertama administrasi pemerintahan baru, terdapat penyesuaian program pemerintah dan akselerasi belanja, sehingga P-KP tumbuh lebih rendah namun tetap ekspansif pada 2,50 persen. Pergeseran anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) ke program pemerintah pusat juga turut menahan rambatan konsumsi pemerintah dari sisi pengeluaran pemerintah daerah.

Komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan kinerja yang semakin meningkat. Setelah pandemi COVID-19, PMTB dapat kembali tumbuh di atas 3 persen pada tahun 2021 dan terus bertahan di level 3,87 persen pada tahun 2022 dan 3,76 persen pada tahun 2023. Dalam dua tahun terakhir, kinerja pertumbuhan investasi terakselerasi menjadi 4,61 persen di tahun 2024 dan 5,09 persen di tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha kembali pulih dengan tren semakin membaik. Peningkatan kinerja investasi ini didukung berbagai kebijakan Pemerintah untuk mendukung iklim investasi dan mendorong dunia usaha untuk tumbuh lebih cepat dengan upaya *debottlenecking* kegiatan investasi dan penyediaan infrastruktur pendukung yang lebih baik.

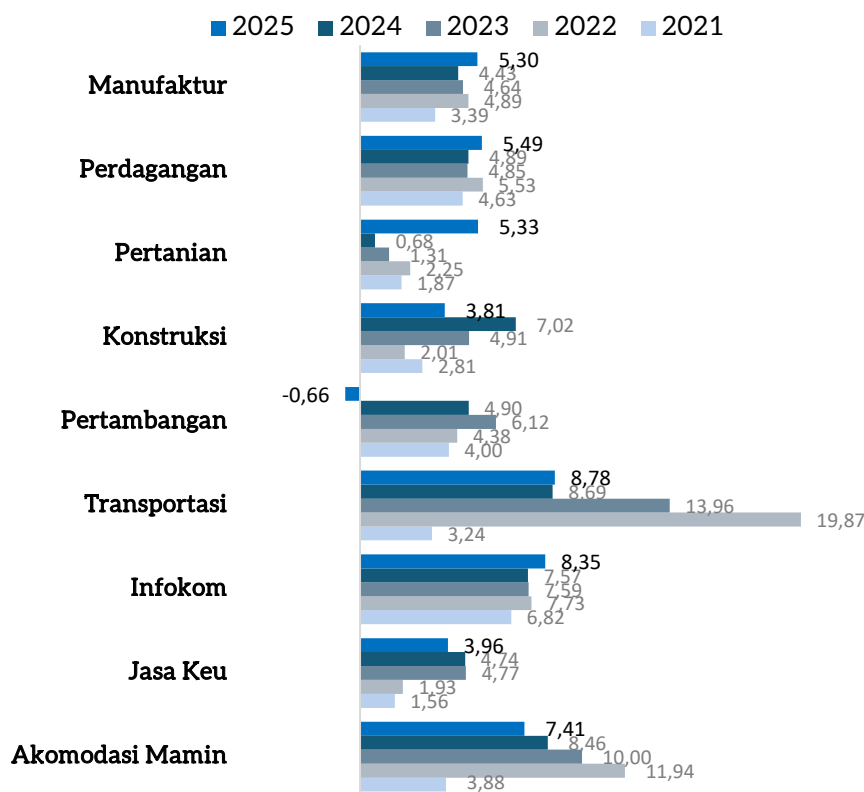
PMTB dapat tumbuh 5,09 persen pada tahun 2025, ditopang oleh kinerja komponen bangunan serta mesin dan bangunan. Investasi bangunan tumbuh sebesar 3,25 persen, seiring kuatnya realisasi belanja modal Pemerintah dan BUMN yang mendorong aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, investasi mesin dan perlengkapan meningkat signifikan sebesar 17,99 persen yang mengindikasikan penguatan kapasitas produksi dan aktivitas sektor industri pengolahan. Investasi kendaraan turut berekspansi sebesar 5,16 persen, sejalan dengan meningkatnya impor barang modal dan peralatan transportasi yang mendukung aktivitas logistik dan distribusi. Momentum investasi tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kepercayaan investor tetap kuat, tercermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 12,66 persen sepanjang tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup kuat didukung juga oleh kinerja ekspor barang dan jasa riil Indonesia yang terus tumbuh positif. Pasca pandemi, kinerja ekspor Indonesia menunjukkan pemulihan yang konsisten. Setelah ekspor neto berkontraksi 8,42 persen pada 2020, ekspor tumbuh kuat secara berturut-turut pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar 17,99 persen dan 16,23 persen, didorong oleh tingginya harga komoditas dan mulai pulihnya pariwisata. Tren ini berlanjut pada 2023, meskipun dengan perlambatan, ketika ekspor barang dan jasa riil tumbuh 1,73 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor migas dan jasa di tengah moderasi harga ekspor nonmigas. Pada 2024, ekspor tetap tumbuh sebesar 6,85 persen, terutama berasal dari sektor industri pengolahan dan pertanian. Memasuki 2025, nilai ekspor Indonesia tumbuh 7,03 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor barang, khususnya ekspor nonminyak dan gas (nonmigas) yang meningkat 8,87 persen. Di sisi jasa, kinerja ekspor juga menunjukkan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2025 turut menopang pertumbuhan ekspor jasa dan berkontribusi pada akselerasi ekspor barang dan jasa secara keseluruhan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di

pasar global relatif tetap terjaga dan sekaligus menguatkan peran sektor ekspor dalam menopang perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan internasional.

Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa riil juga mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, impor Indonesia mulai meningkat pascakontraksi tajam pada masa pandemi. Pada 2021 dan 2022, impor barang dan jasa tumbuh masing-masing 24,86 persen dan 15,00 persen, mencerminkan pemulihan aktivitas produksi dan permintaan domestik. Pada 2023, impor sempat terkontraksi 1,24 persen akibat penurunan impor nonmigas, meskipun impor migas dan jasa tetap tumbuh seiring meningkatnya mobilitas dan konsumsi. Pada 2024, kinerja impor kembali menguat 8,15 persen didominasi oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal untuk menopang kegiatan industri dan investasi. Tren tersebut berlanjut pada 2025, impor Indonesia tumbuh 4,77 persen, setelah pada tahun 2024 kembali mencatat pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan impor tersebut terutama didorong oleh impor barang nonmigas yang meningkat 9,20 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas sektor industri dan investasi yang membutuhkan bahan baku, barang modal, serta barang penolong. Sementara itu, impor jasa tetap tumbuh meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan impor barang. Secara keseluruhan, peningkatan impor pada tahun 2025 masih mencerminkan kebutuhan riil perekonomian domestik dan tetap berada dalam kondisi yang terkendali, sejalan dengan kinerja ekspor yang lebih kuat sehingga neraca perdagangan Indonesia tahun 2025 tetap mencatat surplus yang signifikan.

Grafik 4. Pertumbuhan PDB sisi Produksi, 2021-2025 (% yoy)



Sumber: BPS, 2026

Jika dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh Sektor Manufaktur yang berekspansi kuat dan berkontribusi 19,01 persen terhadap PDB. Setelah tumbuh relatif stabil di tahun 2021-2024 pada kisaran di atas 4,5 persen, Sektor Manufaktur dapat terakselerasi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,30 persen pada tahun 2025. Kinerja ini sejalan dengan PMI Manufaktur yang berada di level ekspansif. Kuatnya permintaan domestik dan pulihnya permintaan global menjadi motor penggerak utama. Secara struktural, pertumbuhan tersebut ditopang kuat oleh industri berbasis hilirisasi. Industri logam dasar melonjak tajam sebesar 15,71 persen didorong tingginya permintaan ekspor produk besi dan baja. Industri mesin dan perlengkapan juga tumbuh impresif mencapai 13,98 persen. Sementara itu, industri makanan dan minuman tumbuh 6,38 persen seiring peningkatan produksi *Crude Palm Oil* (CPO) beserta produk turunannya.

Sektor Manufaktur diperkirakan tetap menjadi penopang utama perekonomian. Sektor ini diharapkan tumbuh persisten untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Prospek positif tersebut bersumber dari keberlanjutan hilirisasi dan penguatan daya saing industri di pasar global. Pemerintah akan konsisten mendorong sektor strategis yang memiliki nilai tambah dan kapasitas produksi tinggi. Kebijakan transformasi industri guna memperkuat daya serap tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing terus didorong oleh Pemerintah.

Sektor pertanian menunjukkan dinamika yang relatif resilien dan berperan penting dalam menopang pertumbuhan sisi sektoral. Pada 2023-2024, Sektor pertanian mengalami perlambatan dari 2,25 persen (2022) menjadi 1,31 persen (2023) dan 0,68 persen (2024) sebelum akhirnya melonjak signifikan pada 2025. Sektor pertanian tumbuh 5,33 persen pada tahun 2025 didorong panen raya padi dan jagung, penyempurnaan distribusi pupuk, dan penyempurnaan jaringan irigasi. Peningkatan permintaan domestik terkait kebutuhan program MBG serta membaiknya teknologi dan sarana budidaya turut mendorong pertumbuhan subsektor pertanian lainnya seperti tanaman pangan tumbuh 9,94 persen, peternakan 7,78 persen, dan perikanan 4,95 persen. Pada tahun 2026, sektor pertanian diperkirakan masih akan tumbuh tinggi. Hal tersebut didorong oleh kebijakan Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional melalui produksi yang berkelanjutan dan stabilitas pasokan domestik untuk mengurangi ketergantungan impor pada komoditas pangan strategis.

Sementara itu, sektor pertambangan mencatatkan kinerja yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, sektor pertambangan tumbuh dengan tren yang meningkat dari sebesar 4,00 persen menjadi 6,12 persen. Pada periode tersebut, kinerja Sektor Pertambangan didorong oleh kinerja subsektor pertambangan batu bara dan subsektor pertambangan bijih logam seiring kuatnya permintaan ekspor serta tingginya harga komoditas global. Namun, kinerja sektor ini mulai melambat pada 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,90 persen akibat menurunnya permintaan global terhadap batu bara Indonesia. Pada 2025, Sektor pertambangan bahkan mengalami kontraksi sebesar 0,66 persen sejalan dengan penurunan harga komoditas pertambangan global. Lebih lanjut, penerapan kebijakan larangan ekspor bijih logam sebagai bagian dari strategi hilirisasi menyebabkan kontraksi yang cukup dalam terhadap kinerja subsektor pertambangan bijih logam karena aktivitas ekspor bahan mentah berkurang. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pengeboran dan optimalisasi produksi lapangan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mendorong kinerja produksi hulu migas sehingga mampu menahan kontraksi Sektor Pertambangan.

Sektor Konstruksi menunjukkan pola pertumbuhan yang cukup kuat. Pertumbuhan Sektor Konstruksi sempat melemah pada periode pandemi sekitar 2,81 persen pada 2021, dan masih melemah menjadi sekitar 2,01 persen pada 2022 seiring dimulainya pemulihan aktivitas ekonomi dan kembali berjalannya proyek pembangunan. Namun, pada 2023 pertumbuhan mulai terakselerasi menjadi sekitar 4,91 persen, mencerminkan fase penyesuaian setelah percepatan pembangunan pascapandemi serta adanya normalisasi belanja Pemerintah dan investasi. Pada 2024, pertumbuhan sektor ini cukup signifikan sebesar 7,02 persen dengan kontribusi sekitar 10 persen terhadap PDB, menjadikannya salah satu sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya PMTB, termasuk kenaikan impor barang modal, peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN, serta pertumbuhan belanja modal Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi lainnya. Sementara itu di tahun 2025, pertumbuhan Sektor Konstruksi cukup moderat karena basis yang tinggi di tahun sebelumnya. Dinamika pertumbuhan di sektor konstruksi ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi sempat mengalami fase pemulihan yang bertahap setelah pandemi, diikuti oleh periode konsolidasi investasi pada 2022-2023 ketika aktivitas pembangunan tidak tumbuh secepat sektor lain. Akselerasi pada tahun 2024-2025 mengindikasikan mulai menguatnya kembali aktivitas pembangunan dan investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, yang berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap sektor terkait seperti industri bahan bangunan, manufaktur, dan jasa konstruksi.

Kinerja sektor perdagangan menunjukkan tren menguat dalam beberapa tahun terakhir. Pasca COVID-19, Sektor Perdagangan tumbuh cukup solid terutama ditopang Subsektor perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi sekitar 85 persen terhadap total output perdagangan. Sementara itu, subsektor perdagangan mobil dan motor masih menghadapi tantangan permintaan. Tahun 2021 menandakan masa pemulihan sektor perdagangan dari COVID-19, tercermin dari pertumbuhan yang tercatat sebesar 4,63 persen (yoy) setelah berkontraksi -3,79 persen pada 2020. Sektor ini secara konsisten tumbuh resilien selama empat tahun berikutnya, dengan angka pertumbuhan sebesar 5,53 persen pada 2022, 4,85 persen pada 2023, 4,89 persen pada 2024, dan 5,49 persen pada 2025. Kinerja positif sektor perdagangan dipengaruhi berbagai faktor, seperti pemulihan dan penguatan permintaan konsumsi masyarakat pasca-COVID-19, serta aktivitas ekspor-impor yang terjaga. Berbagai kebijakan Pemerintah untuk menstimulus aktivitas perekonomian, seperti penyelenggaraan acara internasional, promosi pariwisata, transformasi pembayaran digital, dan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat juga krusial untuk menjaga kinerja perdagangan.

Sepanjang 2021-2025, Sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan Minum menunjukkan pola pemulihan kuat pascapandemi yang kemudian termoderasi. Pertumbuhan tahunan meningkat dari 3,88 persen pada 2021 menuju puncak 11,95 persen pada 2022, sebelum melandai menjadi 10,00 persen pada 2023, 8,46 persen pada 2024, dan 7,41 persen pada 2025. Pola ini selaras dengan dinamika permintaan wisata, di mana kenaikan signifikan kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 15,39 juta sepanjang 2025 serta mobilitas wisatawan nusantara memperkuat Subsektor Makanan-Minuman, sementara pemulihan Subsektor Akomodasi tertahan oleh tingkat hunian yang belum merata. Selain itu, ekspansi ekosistem *online food delivery* dan implementasi program MBG turut mendorong pertumbuhan Subsektor Jasa Boga. Dengan inflasi yang relatif terkendali dan konsumsi rumah

tangga tetap solid, keseluruhan kinerja sektor ini mencerminkan transisi menuju fase pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi periode 2021 - 2025 sejalan dengan peningkatan utilitas telekomunikasi. Pada tahun 2021, sektor ini mencatatkan pertumbuhan yang tinggi 6,82 persen sejalan dengan adaptasi masif masyarakat terhadap ekosistem digital akibat pergeseran pola konsumsi dan kerja pascapandemi. Momentum pertumbuhan yang tinggi berlanjut pada tahun 2022 yang mencapai 7,73 persen, yang didorong oleh integrasi sistem pembayaran digital serta perluasan penetrasi internet yang semakin menjangkau wilayah pelosok melalui berbagai program strategis Pemerintah. Memasuki tahun 2023 dan 2024, sektor ini konsisten tumbuh tinggi capaian masing-masing sebesar 7,59 persen dan 7,57 persen, di mana periode tersebut menjadi masa krusial bagi penguatan infrastruktur strategis seperti optimalisasi infrastruktur telekomunikasi nasional dan perluasan jaringan serat optik.

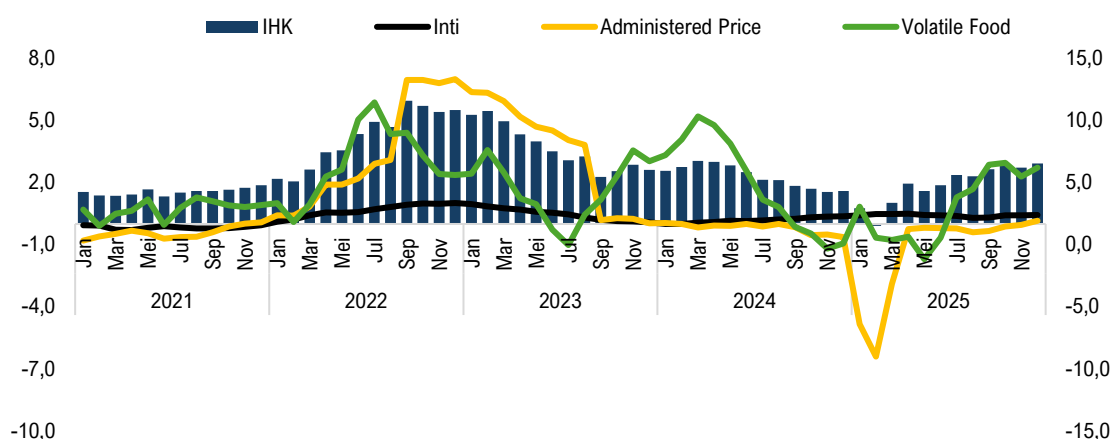
Tren pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi terutama didukung digitalisasi operasional sektor pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sektor UMKM yang terintegrasi. Pada tahun 2025, Sektor Informasi dan Komunikasi berhasil mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,35 persen seiring dengan masifnya adopsi teknologi seperti AI dan internet berbasis satelit yang memberikan nilai tambah signifikan pada efisiensi industri manufaktur dan jasa. Di sektor manufaktur, kehadiran AI secara efektif menekan biaya produksi melalui pemeliharaan mesin prediktif dan optimasi rantai pasok presisi tinggi. Sementara itu, pada sektor jasa, kecerdasan artifisial melipatgandakan produktivitas dengan mengotomatisasi pengolahan data analitik dan tugas administratif yang kompleks, membebaskan ruang bagi tenaga profesional untuk berfokus pada pengambilan keputusan strategis. Keseluruhan tren pertumbuhan yang konsisten dari ambang 6,82 persen menuju 8,35 persen ini menegaskan bahwa sektor tersebut kini memegang peranan vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi teknologi yang kompetitif.

Jika dilihat dari perspektif regional, pertumbuhan ekonomi di semua wilayah tercatat positif. Pertumbuhan yang cukup baik tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi yang ditujukan untuk terus memperkuat daya saing daerah serta menopang persebaran pertumbuhan yang lebih inklusif sepanjang 2025. Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif dengan Sulawesi mencatat laju tertinggi 6,23 persen, diikuti Jawa 5,30 persen, Bali-Nusa Tenggara 4,87 persen, Sumatera 4,81 persen, dan Kalimantan 4,79 persen. Sementara itu, Maluku-Papua tumbuh moderat sebesar 1,44 persen seiring moderasi aktivitas pertambangan besar. Jawa tetap menjadi penggerak utama perekonomian dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB nasional. Di sisi lain, laju pertumbuhan yang dicapai Sulawesi menunjukkan bahwa industri pengolahan berbasis hilirisasi mempercepat pertumbuhan di samping sektor pertanian dan perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten didukung oleh inflasi yang terjaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Dinamika inflasi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan domestik dalam lima tahun terakhir. Inflasi tercatat berada di bawah rentang sasaran pada tahun 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik selama pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2022, inflasi meningkat menjadi 5,51 persen (yoy) seiring dengan penyesuaian harga energi domestik serta lonjakan harga komoditas global. Memasuki periode pemulihan ekonomi, tekanan inflasi

kembali mereda dan inflasi tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 1,60 persen (yoy) pada tahun 2024 yang merupakan level terendah sepanjang sejarah. Pada tahun 2025, inflasi kembali meningkat secara moderat menjadi sekitar 2,92 persen (yoy) seiring dengan menguatnya permintaan domestik, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Grafik 5. Perkembangan Inflasi (% yoy), 2021-2025

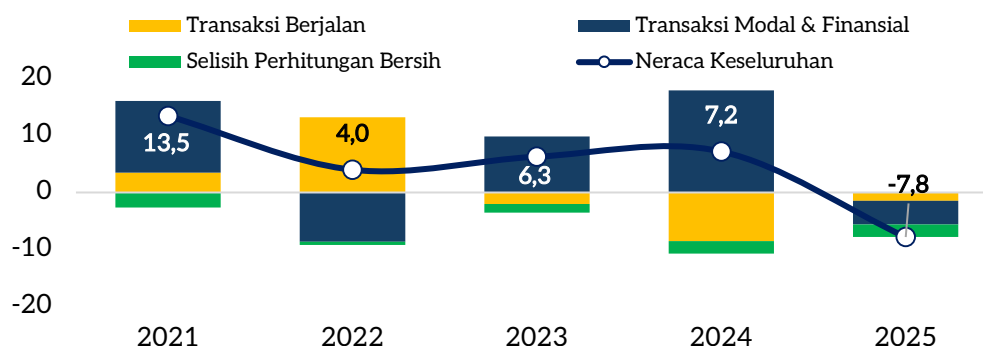


Sumber: BPS, 2026

Perkembangan Sektor Eksternal dan Neraca Pembayaran

Ketahanan sektor eksternal masih tetap terjaga, meskipun neraca pembayaran Indonesia (NPI) menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Dalam periode 2021 hingga 2024, NPI konsisten mencatatkan surplus dengan puncaknya pada tahun 2021 sebesar USD13,5 miliar. Dalam tahun 2024 NPI mencatatkan surplus yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, terutama ditopang oleh menguatnya surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF), seiring dengan melebarinya defisit pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB). Dalam tahun 2025, di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi dan keuangan global, NPI kembali mencatatkan defisit sebesar USD7,8 miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial yang mengalami defisit.

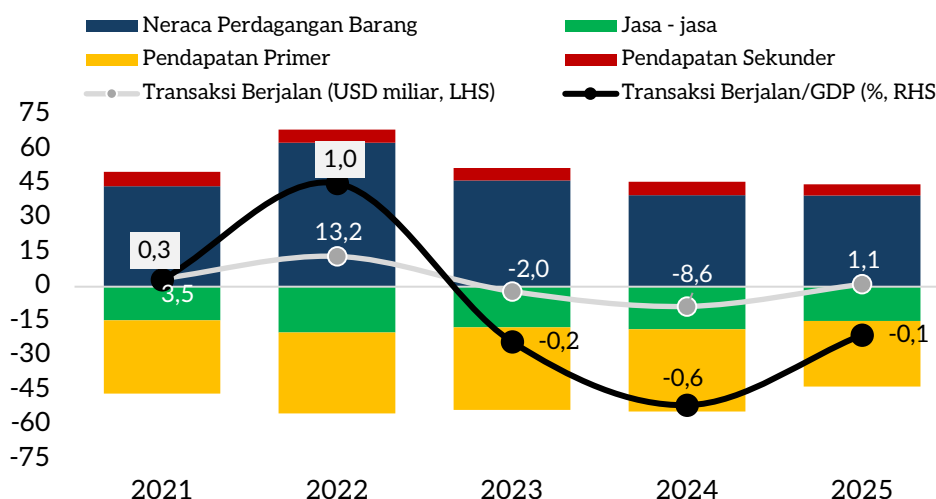
Grafik 6. Perkembangan Neraca Pembayaran, 2021 – 2025 (USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia, 2026

Keseimbangan neraca transaksi berjalan relatif menguat. Setelah mencatatkan surplus dalam tahun 2021 dan 2022, kinerja NTB mengalami penurunan dalam periode 2023 hingga 2024, dengan mencatatkan defisit masing-masing sebesar USD2,0 miliar (0,2 persen dari PDB) pada tahun 2023 dan sebesar USD8,6 miliar (0,6 persen dari PDB) pada tahun 2024. Dalam tahun 2025 NTB masih mencatatkan defisit dan terjaga rendah sebesar USD1,5 miliar (0,1 persen dari PDB), terutama didorong oleh kenaikan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer di tengah peningkatan surplus neraca perdagangan dan surplus neraca pendapatan sekunder.

Grafik 7. Transaksi Berjalan, 2021 – 2025 (USD miliar)



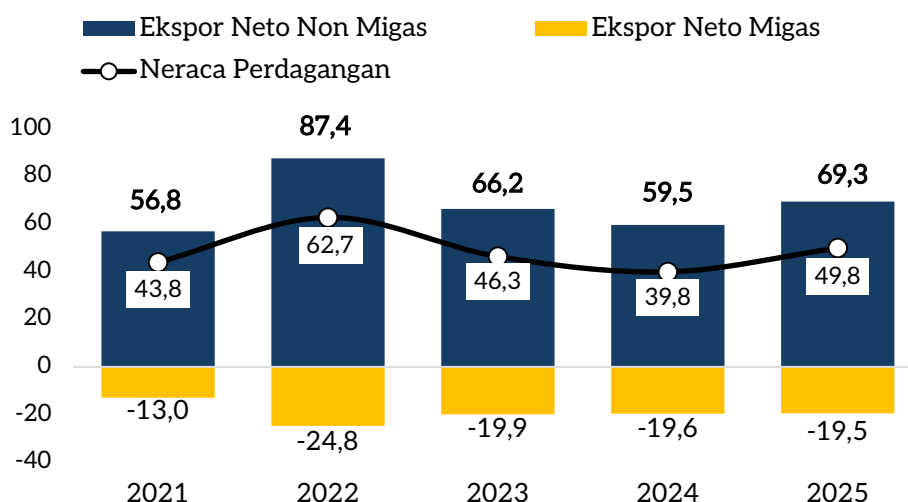
Sumber: Bank Indonesia, 2026

Neraca perdagangan barang mencatatkan surplus, namun cenderung menurun sepanjang tahun 2021-2024. Pergerakan harga komoditas dan permintaan global telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan barang dalam periode 2021-2024. Kenaikan harga komoditas di pasar global akibat gangguan rantai pasok (*global value chains*) serta fragmentasi politik dan ekonomi memberikan andil yang cukup kuat terhadap surplus perdagangan barang tahun 2021 dan 2022, yang tercatat masing-masing sebesar USD43,8 miliar dan USD62,7 miliar. Dalam tahun 2023, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar USD46,3 miliar, turun dibandingkan tahun 2022 karena pengaruh perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas internasional yang dibarengi dengan meningkatnya tensi geopolitik. Penurunan surplus neraca perdagangan barang terus berlanjut hingga mencapai USD39,9 miliar tahun 2024, akibat peningkatan ekspor nonmigas yang lebih rendah dibandingkan peningkatan impor nonmigas seiring dengan membaiknya perekonomian dan menguatnya permintaan domestik.

Pada tahun 2025, surplus neraca perdagangan barang mengalami peningkatan dari sebesar USD39,8 miliar pada tahun sebelumnya menjadi sebesar USD49,8 miliar, ditopang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan barang nonmigas di tengah penurunan defisit neraca perdagangan barang migas. Kenaikan surplus neraca perdagangan barang nonmigas didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang lebih tinggi dibandingkan impor nonmigas sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik. Peningkatan ekspor barang nonmigas

terjadi pada komoditas utama, seperti minyak kelapa sawit, besi dan baja, mesin/peralatan listrik, kimia organik, logam tidak mengandung besi serta pakaian. Penyempurnaan kinerja ekspor barang nonmigas juga ditopang oleh peningkatan ekspor ke negara-negara tujuan utama ekspor, seperti Tiongkok, AS, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, penurunan defisit neraca perdagangan barang migas didorong oleh penurunan impor minyak sejalan dengan berlanjutnya penurunan harga minyak dunia di tengah terjaganya permintaan di dalam negeri.

Grafik 8. Neraca Perdagangan Barang, 2021 – 2025 (USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia, 2026

Sementara itu, neraca jasa masih mencatatkan defisit. Dalam periode 2021 – 2024 kinerja neraca jasa masih mengalami defisit dengan tren meningkat. Secara umum, defisit neraca jasa sangat dominan dipengaruhi oleh jasa transportasi dan jasa perjalanan. Jasa transportasi sebagai penyumbang defisit neraca terbesar menunjukkan tren meningkat selama periode tersebut, terutama akibat peningkatan pembayaran transportasi barang (*freights*) dan penumpang. Kenaikan defisit neraca jasa yang lebih dalam selama periode tersebut tertahan oleh peningkatan surplus jasa perjalanan yang didorong oleh peningkatan penerimaan dari perjalanan wisatawan mancanegara (*wisman*) ke Indonesia yang lebih besar dibandingkan pembayaran jasa perjalanan wisatawan nasional (*wisnas*) ke luar negeri.

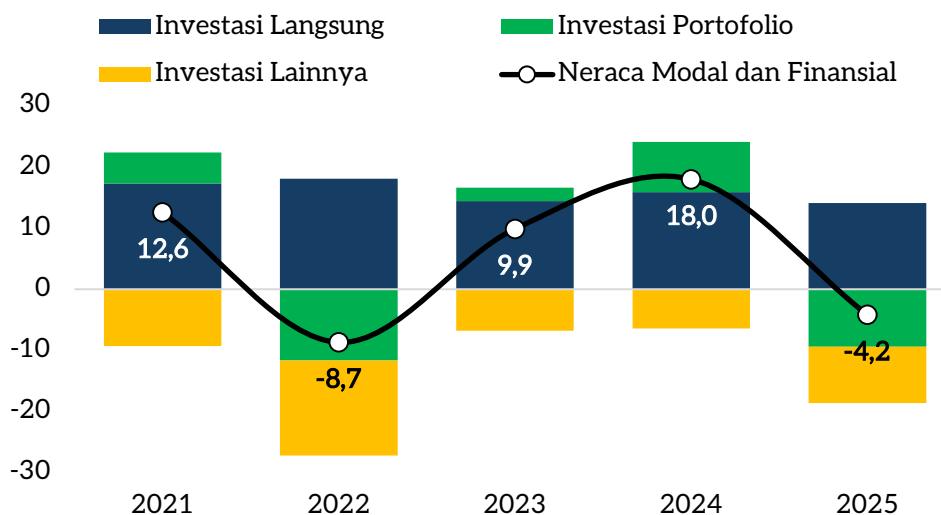
Pada tahun 2025, neraca jasa mencatatkan defisit sebesar USD19,8 miliar, meningkat dibandingkan defisit pada tahun sebelumnya sebesar USD18,5 miliar. Peningkatan defisit ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan defisit jasa bisnis lainnya, jasa telekomunikasi, jasa keuangan, serta jasa asuransi dan dana pensiun. Defisit jasa transportasi, meskipun sedikit menurun masih memberikan sumbangan terbesar terhadap defisit neraca jasa secara keseluruhan. Di sisi lain, jasa perjalanan mencatatkan surplus yang lebih tinggi sehingga dapat menahan pelebaran defisit jasa lebih lanjut, seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman dari 13,90 juta orang pada tahun 2024 menjadi sebanyak 15,50 juta orang pada tahun 2025. Jumlah wisman ini lebih besar dari jumlah kunjungan wisnus yang bertambah dari 8,90 juta orang menjadi 9,20 juta orang.

Neraca pendapatan primer masih defisit, sementara neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus. Dalam periode 2021 – 2024, neraca pendapatan primer mengalami defisit, yang bersumber dari pembayaran kompensasi tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan peningkatan penerimaan kompensasi tenaga kerja serta pembayaran imbal hasil atas investasi asing dalam bentuk bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan hasil investasi penduduk di luar negeri. Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder konsisten mencatatkan surplus, bersumber dari penerimaan neto pendapatan sekunder Pemerintah dan transfer lainnya, serta penerimaan dari transfer personal melalui remitansi pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2024 remitansi pekerja migran Indonesia mencapai USD15,70 miliar, meningkat dari remitansi tahun sebelumnya sebesar USD14,20 miliar, seiring dengan kenaikan jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 257 ribu orang dari tahun sebelumnya hingga mencapai 3,90 juta orang.

Pada tahun 2025, neraca pendapatan primer mencatatkan defisit sebesar USD38,2 miliar, lebih besar dibandingkan defisit pada tahun sebelumnya sebesar USD35,8 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran suku bunga atas investasi langsung dan investasi portofolio sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik. Sementara itu, neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus sebesar USD6,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus pada tahun 2024 sebesar USD5,9 miliar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan transfer personal berupa remitansi PMI seiring dengan peningkatan jumlah PMI sebanyak 243 ribu pekerja, yaitu dari 3,9 juta pekerja pada tahun 2024 menjadi 4,2 juta pekerja pada tahun 2025, dengan penempatan terbanyak di Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Singapura.

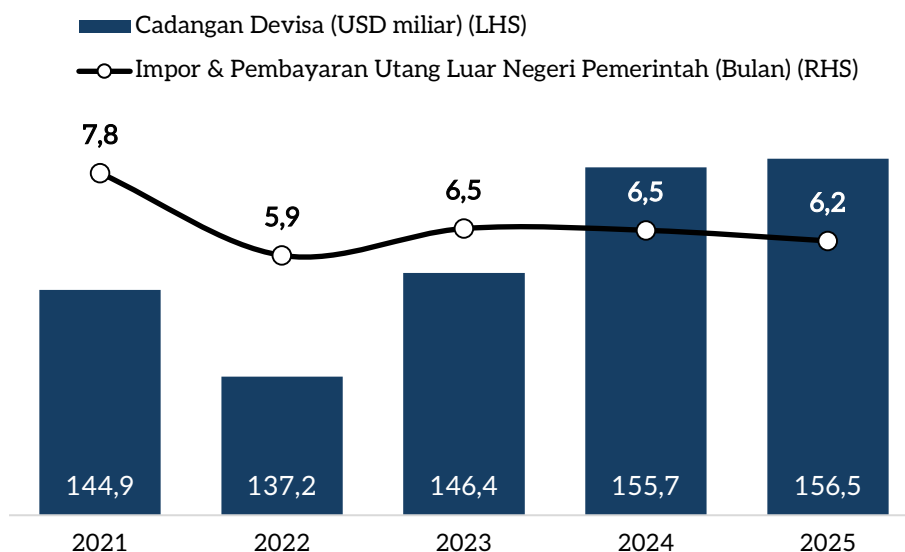
Neraca transaksi modal dan finansial menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Dalam periode 2021 – 2024 NTMF secara umum menunjukkan kinerja positif dan terus membaik. Setelah mencatatkan defisit sebesar USD8,7 miliar pada tahun 2022, dalam tahun-tahun selanjutnya NTMF kembali menunjukkan surplus masing-masing sebesar USD9,9 miliar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi sebesar USD18,0 miliar pada tahun 2024. Peningkatan kinerja NTMF didukung oleh investasi langsung yang konsisten mengalami surplus, sejalan dengan masih terjaganya iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Peningkatan kinerja NTMF terutama pada tahun 2024 juga ditopang oleh surplus investasi portofolio seiring dengan penurunan arus keluar investasi lainnya.

Tahun 2025, NTMF mencatatkan defisit sebesar USD4,2 miliar. Pembalikan kinerja NTMF tahun 2025 tersebut didorong oleh peningkatan aliran keluar modal asing (*net outflows*) dalam bentuk investasi portofolio dan investasi lainnya seiring dengan penurunan surplus investasi langsung. Investasi portofolio pada tahun 2025 mencatatkan defisit sebesar USD9,4 miliar, berbalik arah dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan surplus sebesar USD8,2 miliar. Pembalikan ini dipengaruhi oleh peningkatan premi risiko di pasar keuangan sehingga mendorong investor mengalihkan portofolio ke aset-aset *safe haven*. Sementara itu, investasi lainnya pada tahun 2025 mencatatkan defisit sebesar USD9,2 miliar, meningkat dari defisit tahun 2024 sebesar USD6,4 miliar. Perkembangan ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal (*net inflows*) sejalan dengan meningkatnya penarikan neto utang luar negeri. Di sisi lain, investasi langsung pada tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar USD14,1 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus pada tahun 2024 sebesar USD15,9 miliar, akibat penurunan aliran masuk modal berupa ekuitas dan instrumen utang.

Grafik 9. Neraca Transaksi Modal dan Finansial, 2021 – 2025 (USD miliar)


Sumber: Bank Indonesia, 2026

Cadangan devisa meningkat dan berada di atas standar kecukupan internasional. Secara keseluruhan, dengan kinerja NPI tersebut, posisi cadangan devisa dalam periode 2021 – 2025 memperlihatkan tren meningkat hingga mencapai USD156,5 miliar pada akhir tahun 2025. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional (*threshold*) 3 bulan impor. Dengan posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Grafik 10. Perkembangan Cadangan Devisa, 2021-2025


Sumber: Bank Indonesia, 2026

Perkembangan Harga Minyak Mentah ICP dan *Lifting* Migas

Perkembangan harga minyak mentah *Indonesia Crude Price* (ICP) selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, perkembangan geopolitik, serta perubahan kondisi permintaan dan pasokan energi dunia. Pada tahun 2021, harga ICP mulai meningkat seiring membaiknya aktivitas ekonomi global pascapandemi COVID-19 yang mendorong kenaikan permintaan energi. Kenaikan harga berlanjut pada tahun 2022 akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama konflik Rusia-Ukraina, yang memicu gangguan pasokan energi global dan mendorong lonjakan harga minyak dunia. Selain itu, kebijakan pengaturan produksi oleh negara-negara produsen utama turut memengaruhi keseimbangan pasar minyak global. Pada periode 2023–2024, harga minyak mentah dunia mulai bergerak lebih stabil meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, penyesuaian kebijakan produksi negara-negara produsen minyak, serta perkembangan permintaan energi dunia. Di sisi lain, meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah turut menambah volatilitas pasar energi global melalui potensi gangguan terhadap distribusi dan pasokan minyak. Memasuki tahun 2025, harga ICP masih menghadapi tekanan volatilitas di tengah ketidakpastian prospek ekonomi global, meningkatnya fragmentasi perdagangan internasional, serta percepatan transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih. Secara keseluruhan, perkembangan ICP pada periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pasar minyak global masih sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, geopolitik, serta dinamika permintaan dan pasokan energi dunia.

Sejalan dengan penguatan kebijakan yang terarah dan terintegrasi, produksi migas tahun 2026 diproyeksikan meningkat dan mendorong peningkatan kinerja *lifting* migas. Pada tahun 2025, capaian *lifting* migas menunjukkan kinerja yang relatif terjaga di tengah tantangan penurunan alamiah (*natural decline*) pada lapangan eksisting, dengan realisasi *lifting* minyak mencapai 605,9 ribu barel per hari (rbph) yang meningkat dari *lifting* minyak tahun 2024 sebesar 579,7 ribu barel per hari (rbph) dan *lifting* gas sebesar 971,7 (975,0 angka salur gas) ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Kinerja tersebut didukung oleh berbagai upaya optimalisasi produksi, melalui pemanfaatan kembali sumur-sumur tidak aktif (*idle well*), peningkatan produktivitas sumur eksisting melalui penerapan teknologi termasuk *enhanced oil recovery* (EOR), serta penguatan pengawasan *lifting*.

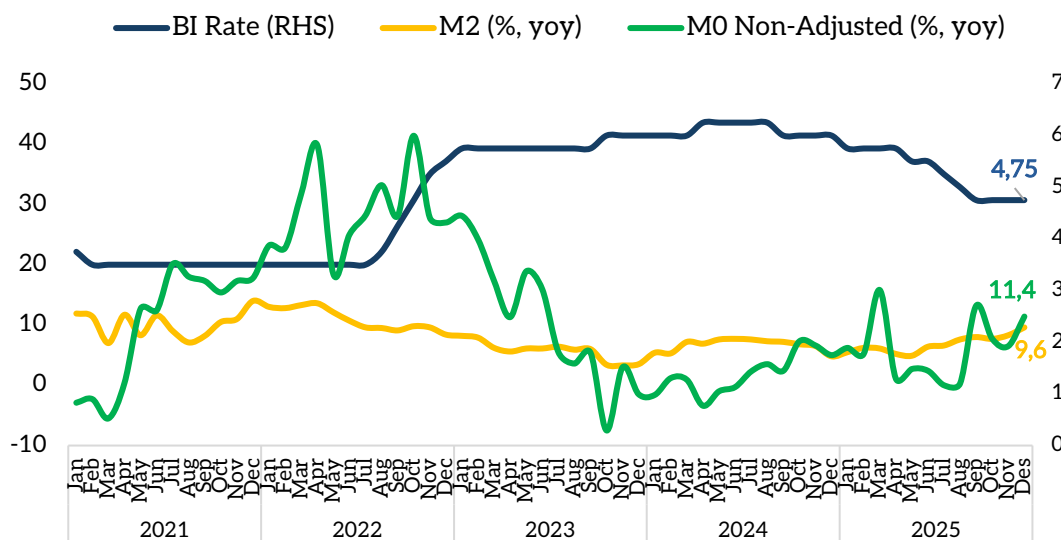
Di sisi lain, Kementerian ESDM dan SKK Migas saat ini sedang melakukan proses penyempurnaan metodologi pencatatan dan pelaporan produksi hidrokarbon, antara lain melalui pengelompokan *Natural Gas Liquid* (NGL) sebagai bagian dari minyak bumi atau *liquid*. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan konsistensi penyajian data hidrokarbon nasional agar selaras dengan praktik internasional dan ketentuan yang berlaku, tanpa memengaruhi perhitungan bagian negara pada kontrak eksisting. Dalam proses penyelarasan tersebut, realisasi *lifting* minyak bumi tahun 2025 telah memperhitungkan kontribusi NGL, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap produksi hidrokarbon nasional.

Perkembangan Sektor Moneter dan Keuangan

Kebijakan pelonggaran moneter Indonesia searah dengan tendensi pelonggaran moneter global. Peningkatan likuiditas terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Pada tahun 2021, Indonesia masih dalam fase pemulihan ekonomi menerapkan suku bunga rendah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dilakukan *The Fed*. Pada pertengahan tahun 2022 hingga 2024, terjadi pengetatan kebijakan moneter di tengah gejolak ekonomi global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina sehingga mendorong kenaikan *BI rate*. Pada periode tersebut, terjadi fenomena "*Higher for Longer*" di mana suku bunga acuan dunia tetap tinggi untuk waktu yang lama guna meredam inflasi yang tinggi. Dengan kondisi fundamental ekonomi yang stabil, mulai bulan September 2024 hingga 2025, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan *BI rate* secara bertahap dari 6,25 persen menuju 4,75 persen. Sejak September 2025 hingga April 2026, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga pada level 4,75 persen, yang mencerminkan kebijakan moneter yang tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Pertumbuhan uang beredar didorong melalui penguatan efektivitas ekspansi likuiditas moneter dan sinergi dengan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan uang primer (M0) sempat tumbuh tinggi pada periode pascapandemi tahun 2021 hingga semester I 2023 yang didorong oleh tingginya *excess reserve* bank di BI di tengah pengetatan kebijakan moneter. Namun, pada semester II 2023 hingga pertengahan 2025, pertumbuhan uang primer (M0) mengalami tren penurunan, antara lain dipengaruhi penurunan *excess reserve* bank dan penempatan pada instrumen moneter sehingga likuiditas pada perekonomian relatif terbatas. Pada periode yang sama, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) juga mengalami moderasi dan tumbuh stagnan mencerminkan peran intermediasi perlu ditingkatkan.

Pada September 2025, Pemerintah melakukan pemindahan kas negara dari Bank Indonesia ke perbankan untuk mendorong likuiditas perekonomian. Strategi pengelolaan kas sebagai bagian dari kebijakan fiskal ini meningkatkan *excess reserve* bank sehingga mendorong pertumbuhan M0 sebesar 13,2 persen pada bulan September 2025. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga acuan rendah dan operasi moneter yang lebih longgar, serta didukung oleh penempatan dana Pemerintah di perbankan, mendorong pertumbuhan M0 tumbuh dua digit pada Maret 2026. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk peningkatan likuiditas guna menurunkan *cost of fund* dan meningkatkan penyaluran kredit dapat berdampak pada kinerja sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

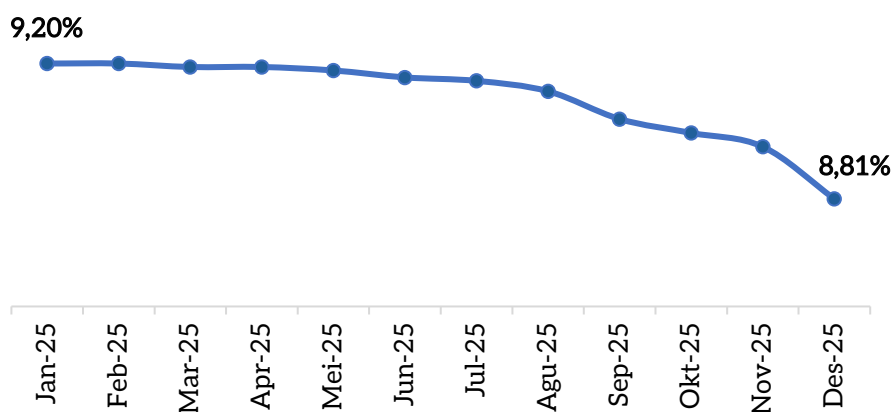
Grafik 11. Perkembangan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan Uang Beredar, 2021-2025

Sumber: Bank Indonesia, 2026

Perkembangan pertumbuhan kredit di Indonesia periode 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan pascapandemi yang terjaga. Pada 2021, pertumbuhan kredit mulai pulih setelah kontraksi di masa pandemi 2020, didorong pelonggaran kebijakan moneter dan program stimulus pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Memasuki 2022-2023, pertumbuhan kredit semakin menguat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, konsumsi rumah tangga, serta investasi dunia usaha. Momentum berlanjut sepanjang 2024 kredit mampu tumbuh dua digit di tengah peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pertumbuhan ini didukung oleh likuiditas perbankan yang kuat, peningkatan dana pihak ketiga, serta kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Pada awal 2025, pertumbuhan kredit masih berada di sekitar 10 persen (yoy), namun dalam tren perlambatan hingga pertengahan tahun disebabkan oleh ekspansi dunia usaha yang lebih berhati-hati, pelonggaran kebijakan moneter yang kurang berdampak terhadap penurunan suku bunga kredit, serta preferensi perusahaan untuk menggunakan pembiayaan internal.

Pada bulan September 2025, Pemerintah melakukan pemindahan kas negara sebesar Rp200 triliun di perbankan sebagai strategi *cash management* untuk turut mendorong likuiditas perekonomian. Penempatan kas negara di perbankan turut berkontribusi terhadap penurunan *cost of fund* ditunjukkan pada penurunan suku bunga INDONIA, suku bunga deposito, penurunan pemberian deposito *special rate* dan suku bunga kredit. Pertumbuhan kredit pada bulan Desember 2025 tumbuh tinggi 9,6 persen didorong oleh pertumbuhan kredit investasi. Transmisi terhadap sektor riil akan terus didorong melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat dalam menjaga likuiditas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 12. Suku Bunga Kredit Tertimbang, 2025



Sumber: Bank Indonesia, 2026

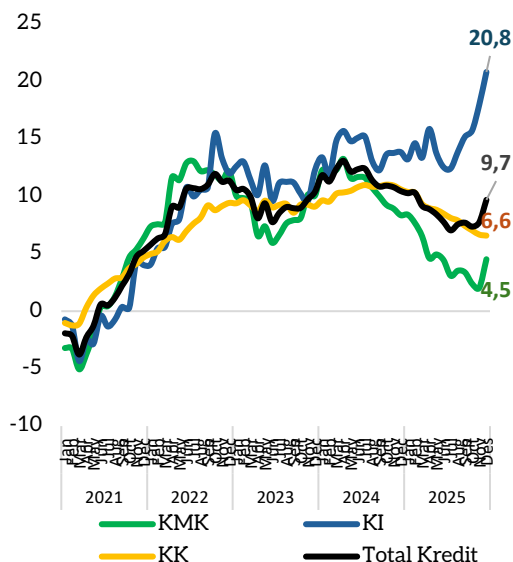
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh relatif stabil dalam mendukung pendanaan perbankan menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit ke sektor riil. Pertumbuhan DPK di tahun 2021 tumbuh tinggi didorong preferensi masyarakat untuk menabung di perbankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi selama pandemi. Memasuki 2022–2023, pertumbuhan DPK termoderasi seiring normalisasi aktivitas ekonomi. Sebagian dana masyarakat mulai dialihkan untuk konsumsi dan investasi sehingga terjadi penurunan pada giro dan tabungan. Setelah sempat menguat semester I 2024 yang didukung peningkatan DPK korporasi, pada semester II 2024 DPK mengalami tren penurunan hingga semester I 2025. Penurunan giro dan simpanan berjangka pada periode tersebut mengindikasikan adanya peralihan preferensi investasi masyarakat pada instrumen nonperbankan seperti emas. Selanjutnya di semester II 2025, DPK mengalami peningkatan dan turut didukung oleh penempatan kas negara pada perbankan, ditunjukkan pertumbuhan konsisten dua digit dari bulan September. Pada awal tahun 2026, DPK tumbuh tinggi didorong pertumbuhan simpanan berjangka dan giro bank. DPK perbankan bulan Maret 2026 tumbuh tinggi sebesar 13,6 persen (yoy) ditopang oleh peningkatan DPK dari korporasi. Peningkatan pertumbuhan giro yang tinggi dari peningkatan transaksi korporasi mengindikasikan adanya kebutuhan jangka pendek yang tinggi dalam waktu dekat untuk mendukung kebutuhan aktivitas bisnis. Ke depan, likuiditas perbankan akan terus dijaga dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong transmisi ke sektor riil.

Sementara dari sisi indikator permodalan dan profitabilitas cukup kuat dan stabil untuk memberikan bantalan untuk mitigasi risiko dari pertumbuhan kredit ke depan. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) pada Februari 2026 tercatat 25,83 persen, jauh di atas *threshold* minimum CAR 8 persen dan *threshold* CAR sesuai profil risiko bank (kisaran 10-14 persen). Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan terjaga rendah sebesar 2,1 persen di Desember 2025, terkendali di bawah batas minimum 5 persen. Ketahanan perbankan tetap kuat menghadapi risiko ke depan ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas dari korporasi yang terjaga. Meskipun demikian, ketahanan perbankan perlu tetap mendapatkan perhatian dan pengawasan berkelanjutan

khususnya pada risiko kredit UMKM yang cenderung meningkat. Indikator profitabilitas perbankan tetap stabil dengan NIM dan ROA yang masih berada pada level yang stabil, manajemen risiko perbankan yang *prudent* dan efisiensi operasional yang terus diperbaiki akan menjadi penopang ketahanan kinerja perbankan.

Grafik 13. Perkembangan Kredit, 2021-2025

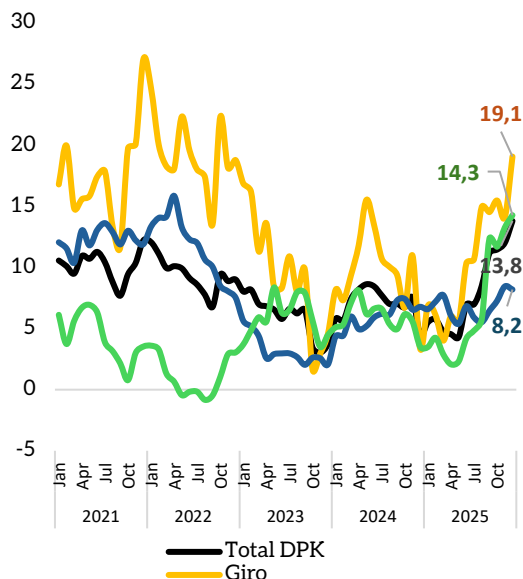
(% , yoy)



Sumber: OJK, 2026

Grafik 14. Perkembangan DPK, 2021-2025

(% , yoy)



Sumber: OJK, 2026

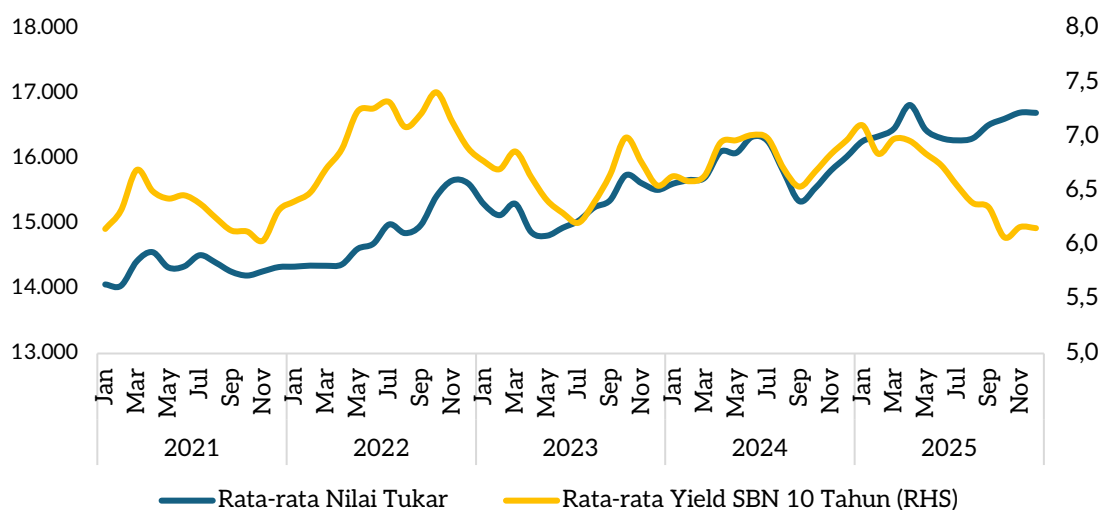
Dinamika pasar keuangan global dan domestik turut memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2021, tekanan pada Rupiah relatif kecil sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi pascapandemi yang terjadi di global maupun domestik. Memasuki tahun 2022-2023, Rupiah mengalami tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik dan lonjakan inflasi global, yang diikuti era suku bunga tinggi di negara maju. Pelonggaran moneter AS pada September 2024 sempat memberikan sentimen positif di pasar keuangan global, namun kembali mengalami tekanan pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS menjelang akhir 2024. Volatilitas di pasar keuangan global semakin meningkat akibat ketidakpastian kebijakan tarif dan proteksionisme AS pada April 2025, yang berpotensi menurunkan volume perdagangan serta laju pertumbuhan ekonomi global.

Ketidakpastian *stancemoneter* The Fed juga kembali meningkat seiring dengan ekspektasi kenaikan inflasi AS. Tekanan mulai mereda dengan adanya gencatan perang dagang (*trade truce*) dan upaya negosiasi yang dilakukan oleh berbagai negara. Pemangkasan *Fed Fund Rate* (FFR) di bulan September 2025, turut mendorong penurunan volatilitas di pasar keuangan global. Dari dalam negeri, pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara gradual di sepanjang tahun 2025 juga memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah meski relatif terbatas. Tingginya *capital outflow* di tahun 2025 serta meningkatnya kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri telah mendorong permintaan terhadap dolar AS. Pada akhir Agustus 2025, gejolak politik dan ekonomi domestik memicu demonstrasi dan kerusuhan berdampak depresiasi Rupiah. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia

melakukan upaya stabilisasi melalui intervensi pasar dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah. Di akhir tahun 2025, Rupiah ditutup pada level Rp16.782 per dolar AS, terdepresiasi 3,84 persen dibanding akhir tahun 2024, dengan rata-rata tahun 2025 sebesar Rp16.475 per dolar AS, atau mengalami depresiasi 3,97 persen dibanding rata-rata tahun 2024.

Selain dampak pada nilai tukar rupiah, dinamika global dan domestik juga memengaruhi pergerakan suku bunga SBN tenor 10 tahun. Sempat mengalami peningkatan di awal tahun 2021, suku bunga SBN 10 tahun konsisten menurun dari bulan Mei hingga akhir 2021, ditopang optimisme pemulihan ekonomi domestik. Namun di tahun 2022, suku bunga SBN 10 tahun cenderung meningkat akibat tekanan pengetatan moneter global. Sepanjang tahun 2023 hingga triwulan III 2024, volatilitas suku bunga SBN 10 tahun cenderung menurun seiring dengan penyesuaian pasar terhadap ekspektasi dimulainya pelonggaran moneter AS. Namun, suku bunga SBN 10 tahun kembali mengalami peningkatan pada akhir 2024 menyusul tingginya volatilitas di pasar keuangan global akibat tekanan geopolitik dan efek *super election year*. Pada tahun 2025, sejalan dengan perkembangan positif pasar SBN, suku bunga SBN 10 tahun berada dalam tren penurunan dan sempat mencapai titik terendahnya di 5,94 persen pada pertengahan Oktober 2025. Selain didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter, penurunan suku bunga ini juga didukung oleh masih kuatnya permintaan domestik terhadap instrumen SBN serta peningkatan persepsi risiko terhadap Indonesia. Namun, suku bunga SBN 10 tahun kembali meningkat secara moderat pada level 6,08 persen pada akhir 2025 akibat sentimen terhadap kondisi politik di dalam negeri.

Grafik 15. Perkembangan Nilai Tukar (Rp) dan Suku Bunga SBN 10 Tahun (%), 2021-2025



Sumber: Nilai Tukar: Bank Indonesia, 2026 dan Yield SBN 10 Tahun: Bloomberg, 2026

2.2.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Domestik

Berkaca pada kinerja ekonomi tahun 2025, Pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2026 dapat tumbuh lebih kuat. Optimisme ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, kualitas belanja pemerintah yang semakin baik, kinerja sektor eksternal yang kompetitif, serta peningkatan investasi dengan peran sektor swasta yang

semakin besar. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61 persen (yoy), didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan akselerasi belanja negara seiring dengan berjalannya berbagai program prioritas pemerintah. Pemerintah akan terus mencermati dinamika ekonomi global dan domestik dengan memastikan kebijakan fiskal tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan selaras dengan kebijakan sektor keuangan. Melalui sinergi kebijakan tersebut, seluruh sumber pertumbuhan diharapkan dapat bergerak secara harmonis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Memasuki tahun 2026, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap akan tumbuh kuat. Sepanjang triwulan I 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy) didorong berbagai kebijakan Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemerintah seperti bantuan pangan, pemberian THR, serta diskon tarif transportasi. Momentum Ramadhan dan Idulfitri juga mendorong peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode tersebut. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh meningkatnya aktivitas transaksi perdagangan elektronik. Selain itu, berbagai program prioritas pemerintah seperti program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan relatif kuat dengan pertimbangan dinamika fiskal akhir 2025 serta peluang akselerasi belanja pada awal tahun anggaran. Pada triwulan I 2026 pertumbuhan P-KP mencapai 21,81 persen (yoy). Komponen konsumsi pemerintah (P-KP) masih berada pada tren ekspansi, ditopang oleh peningkatan belanja pegawai, terutama akibat kenaikan jumlah PNS, PPPK, TNI dan Polri, serta peningkatan belanja barang-jasa yang tumbuh signifikan seiring naiknya realisasi belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Akselerasi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 semakin mengoptimalkan konsumsi pemerintah baik pusat dan daerah melalui pencairan THR PNS, PPPK, TNI, dan Polri pada bulan Maret 2026. Selain itu, program MBG mendorong peningkatan belanja barang yang cukup tinggi, mengingat jumlah SPPG triwulan I 2026 jauh lebih banyak dibanding triwulan yang sama 2025. Sinergi antara percepatan belanja pegawai, intensifikasi pelaksanaan MBG, serta basis pertumbuhan yang relatif rendah pada periode yang sama tahun sebelumnya memberikan landasan yang cukup untuk P-KP tumbuh kuat.

Peranan investasi diperkirakan terus meningkat seiring peningkatan partisipasi sektor swasta dan optimalisasi operasional Danantara. Pada triwulan I 2026, PMTB tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy). Peningkatan investasi ini didorong oleh proyek-proyek yang dilakukan Danantara dan realisasi investasi swasta yang cukup tinggi. Selain itu peningkatan investasi juga didukung oleh pelaksanaan program prioritas Presiden antara lain pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, Sekolah Garuda Baru, dan Sekolah Rakyat. Ke depan, prospek investasi diperkirakan tetap terjaga didukung stabilitas makroekonomi domestik serta kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha. Belanja modal Pemerintah terus dioptimalkan sebagai katalis strategis. Momentum positif ini turut dijaga melalui pelaksanaan PKPN yang difokuskan pada proyek-proyek strategis jangka menengah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemerintah terus mendorong penguatan investasi melalui optimalisasi peran BPI Danantara dan peningkatan peran sektor swasta untuk memperkuat pembiayaan investasi strategis. Ekosistem investasi yang semakin tangguh ini mengakselerasi aliran PMA dan PMDN.

Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap positif meskipun perdagangan global masih menghadapi tantangan. Ketahanan ini antara lain didukung oleh semakin berkembangnya produk-produk hasil hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. Ke depan, penguatan industri berbasis hilirisasi diharapkan terus menjadi penopang utama kinerja ekspor nasional. Pada triwulan I 2026, kinerja perdagangan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekspor riil yang mencapai 0,90 persen (yoy), sementara impor riil juga mencatat pertumbuhan sebesar 7,18 persen (yoy), sejalan dengan masih terjaganya aktivitas produksi dan permintaan domestik.

Aktivitas ekonomi yang tumbuh harus didukung dengan inflasi yang stabil dan terkendali. Memasuki tahun 2026, dinamika inflasi dipengaruhi oleh perkembangan harga energi global, kondisi pasokan pangan domestik, serta kebijakan stabilisasi harga yang ditempuh Pemerintah. Pada awal 2026, inflasi tahunan sempat meningkat, antara lain dipengaruhi oleh *low base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun 2025. Seiring dengan berakhirnya *low base effect*, inflasi kembali termoderasi ke level 2,42 persen (yoy) di tengah volatilitas harga komoditas global, khususnya energi dan pangan yang masih menjadi sumber tekanan bagi inflasi domestik. Dari sisi komponennya, inflasi *volatile food* (VF) menunjukkan tren yang lebih terkendali, didukung oleh membaiknya kondisi produksi pertanian serta berbagai kebijakan penguatan pasokan pangan domestik. Pasca periode HBKN Idulfitri, inflasi VF melanjutkan tren perlambatannya pada April 2026 yang didorong oleh penurunan beberapa harga komoditas pangan pokok. Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan Pemerintah (CPP), serta pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah di berbagai daerah. Sementara itu, inflasi *administered prices* masih dipengaruhi oleh perkembangan harga energi global, terutama minyak mentah, serta kebijakan pemerintah terkait tarif energi domestik. Di sisi lain, inflasi inti menunjukkan penguatan moderat yang mencerminkan terjaganya permintaan domestik serta transmisi perkembangan harga global terhadap perekonomian nasional.

Tingkat inflasi nasional 2026 terus dijaga agar sesuai rentang sasaran. Hal ini didukung oleh terjaganya stabilitas harga komoditas domestik, koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta upaya berkelanjutan dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Stabilitas inflasi juga didukung oleh penguatan kebijakan stabilisasi harga pangan, kebijakan energi Pemerintah yang memastikan harga BBM subsidi tetap terjangkau, pengelolaan ekspektasi inflasi yang baik, serta pengendalian *administered prices* yang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian.

Beberapa risiko inflasi tetap perlu diwaspadai agar dampak dapat diantisipasi. Fluktuasi harga komoditas global dan dinamika nilai tukar Rupiah berpotensi memberikan tekanan melalui transmisi *imported inflation*. Sementara itu, dari sisi domestik, potensi gangguan produksi pangan akibat anomali iklim, tantangan distribusi antarwilayah, serta peningkatan permintaan domestik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi perkembangan inflasi, terutama pada kelompok pangan bergejolak. Dalam menghadapi berbagai risiko tersebut, Pemerintah terus memperkuat kebijakan stabilisasi harga melalui kebijakan pengendalian harga komoditas energi dan pangan, penguatan CPP, peningkatan

efisiensi distribusi logistik, serta terus memperkuat koordinasi kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia melalui TPIP-TPID.

Stabilitas moneter dan sektor keuangan domestik pada tahun 2026 juga diperkirakan tetap terjaga meskipun tekanan eksternal masih tinggi. Dinamika geopolitik yang memicu volatilitas harga energi serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global berpotensi memicu sentimen *risk-off* masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar keuangan domestik. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter diperkirakan akan tetap diarahkan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi dalam rentang sasaran, serta memastikan likuiditas sistem keuangan tetap memadai bagi kebutuhan dunia usaha. Dinamika kebijakan Bank Sentral AS ke depan juga akan dipengaruhi oleh transisi kepemimpinan seiring berakhirnya masa jabatan Jerome Powell di 2025 dan meningkatnya perhatian pasar terhadap kemungkinan penggantian oleh Kevin Warsh, yang dinilai memiliki preferensi kebijakan moneter lebih hawkish. Kondisi tersebut berpotensi membuat proses pelonggaran moneter global berlangsung lebih gradual dengan volatilitas pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan suku bunga aset keuangan global tetap relatif tinggi dan mendorong arus modal internasional semakin sensitif terhadap perubahan sentimen.

Bagi Indonesia, transmisi tekanan eksternal pada 2026 terutama terjadi melalui pergerakan nilai tukar dan arus modal portofolio sehingga stabilitas sektor eksternal menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar Rupiah diperkirakan masih berfluktuasi di tengah tingginya ketidakpastian global, termasuk eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, ketidakpastian arah kebijakan AS, serta volatilitas harga komoditas global yang mendorong sentimen *risk-off* dan *rebalancing* portofolio investor global terhadap aset *emerging markets*. Dalam menghadapi tekanan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan stabilisasi melalui intervensi terukur di pasar valas, optimalisasi instrumen moneter pro-market, penguatan pasokan valas domestik melalui hilirisasi dan optimalisasi DHE-SDA, serta pengelolaan cadangan devisa yang memadai. Stabilitas kurs tetap penting untuk menahan *imported inflation*, terutama di tengah risiko kenaikan harga minyak global yang dapat meningkatkan biaya impor energi dan bahan baku industri. Selain itu, penguatan sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), reformasi struktural pasar keuangan, dan penguatan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus didorong guna menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan nasional.

Sementara itu, tingkat suku bunga domestik diperkirakan relatif terkendali meskipun premi risiko negara berkembang masih tinggi. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan masih berada dalam tren meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian global dan sentimen *risk-off*, namun *spread* SBN terhadap *US Treasury* yang tetap menarik diharapkan dapat menjaga minat investor global terhadap instrumen domestik. Langkah kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah dalam menjaga *spread* suku bunga dan stabilitas pasar keuangan diperkirakan menjadi katalis positif bagi pergerakan *yield* ke depan. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta disiplin fiskal yang kuat diharapkan tetap menjadi daya tarik utama bagi investor.

Dari sisi moneter dan sektor keuangan, intermediasi perbankan diperkirakan tetap solid didukung likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, dan permodalan yang kuat. Pada awal 2026, pertumbuhan kredit tetap tinggi terutama didorong kredit investasi yang tumbuh kuat seiring membaiknya iklim investasi dan realisasi program prioritas Pemerintah,

sementara kredit konsumsi tetap resilien didukung permintaan domestik. Di sisi lain, pertumbuhan DPK tetap tinggi terutama ditopang peningkatan simpanan korporasi. Pertumbuhan kredit dan DPK juga didukung oleh terjaganya likuiditas perbankan, termasuk melalui penempatan kas negara di perbankan yang membantu memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan sektor perbankan, serta mendukung kecukupan likuiditas domestik. Meski demikian, tantangan masih muncul dari belum meratanya penyaluran kredit ke sektor produktif serta tekanan biaya pendanaan domestik di tengah tingginya ketidakpastian global dan sensitivitas pasar terhadap perubahan *yield* global. Oleh karena itu, momentum pertumbuhan kredit perlu terus dijaga untuk mendukung sektor riil, pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.

Memasuki tahun 2026, hingga bulan April, harga minyak global mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tengah tingginya volatilitas pasar energi dunia. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh memanasnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan jalur distribusi dan pasokan energi global. Harga minyak mentah Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak global. Selain faktor geopolitik, pergerakan ICP juga dipengaruhi oleh kebijakan pengaturan produksi negara-negara produsen utama, dinamika permintaan energi global, serta ketidakpastian prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, perkembangan transisi energi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan turut memengaruhi ekspektasi pasar terhadap permintaan minyak dalam jangka menengah.

Sementara itu, pada tahun 2026 Pemerintah menargetkan adanya peningkatan *lifting* minyak. Target tersebut ditempuh melalui kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi, antara lain melalui penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan kepastian berusaha, intensifikasi pengawasan *lifting*, percepatan pengaktifan sumur-sumur idle, optimalisasi lapangan eksisting melalui penerapan teknologi, serta percepatan *Plan of Development* (PoD) pada lapangan yang telah selesai dieksplorasi. Dalam konteks tersebut, penguatan sinergi kebijakan dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, khususnya antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas, adalah penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi diharapkan tidak hanya mampu mendorong pencapaian target *lifting*, tetapi juga mengoptimalkan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional serta mendukung keberlanjutan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang.

Walaupun *outlook* 2026 cukup positif, perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menahan akselerasi pertumbuhan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian ekonomi global, termasuk perlambatan pertumbuhan dunia, ketegangan perdagangan internasional. Secara khusus, ketidakpastian global saat ini disebabkan adanya konflik geopolitik yaitu perang Iran dan ketegangan di Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global karena kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur utama distribusi hampir sepertiga perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan volatilitas pasar energi global, yang pada akhirnya berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia melalui peningkatan inflasi dan biaya produksi. Bagi Indonesia, potensi kenaikan harga bahan bakar dapat menimbulkan tekanan inflasi domestik, memperbesar beban subsidi energi dalam APBN, serta meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang dapat berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga.

Selain faktor eksternal tersebut, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan domestik yang dapat memengaruhi prospek pertumbuhan pada 2027. Tantangan utama antara lain adalah masih terbatasnya produktivitas sektor manufaktur, ketergantungan pada komoditas primer, serta rendahnya kedalaman sektor keuangan yang membatasi pembiayaan bagi sektor produktif. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja masih menjadi isu penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi. Tantangan lainnya adalah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar di tengah komitmen untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali. Dalam hal peningkatan investasi, Indonesia masih dihadapkan tantangan untuk mendorong investasi lebih tinggi. Peningkatan efisiensi regulasi dan koordinasi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik investasi jangka panjang merupakan hal penting yang harus terus didorong agar pertumbuhan ekonomi di 2027 bisa lebih kuat.

Dalam jangka menengah, tantangan yang lebih fundamental berkaitan dengan transformasi struktural ekonomi dan peningkatan produktivitas. Pertumbuhan Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik dan komoditas, sementara kontribusi sektor manufaktur berteknologi tinggi dan industri bernilai tambah masih relatif terbatas. Selain itu, peningkatan produktivitas industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti Indonesia akan menghadapi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup dan sesuai untuk penduduk Indonesia yang sebagian besar masih berusia produktif. Tanpa reformasi struktural yang memperkuat daya saing industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat diversifikasi ekonomi, Indonesia berpotensi mengalami *middle-income trap* dan kesulitan mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat juga sejumlah peluang yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh permintaan domestik dan konsumsi rumah tangga memberikan bantalan terhadap guncangan eksternal. Selain itu, potensi bonus demografi masih bisa dioptimalkan terutama dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan keuntungan struktur penduduk usia produktif maka peluang untuk peningkatan investasi dan produktivitas diberbagai sektor kunci dan unggulan masih terbuka. Selain itu, di Indonesia peluang agar ekonomi tumbuh tinggi masih sangat potensial jika Indonesia melakukan reformasi struktural secara berkelanjutan, peningkatan investasi infrastruktur, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Peran BPI Danantara dan swasta sebagai aktor ekonomi sebagai motor utama dalam mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas juga dapat terus diupayakan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut dan mengelola risiko eksternal serta domestik secara tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan dalam jangka menengah.

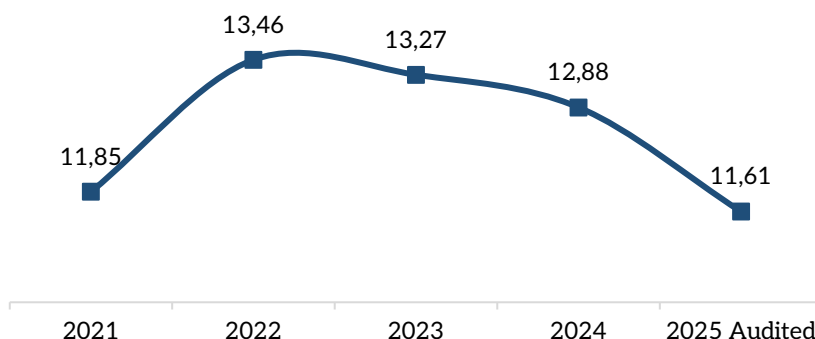
2.3. Kinerja Fiskal dan Pembangunan

2.3.1. Kinerja Makrofiskal

Kebijakan makro fiskal secara sistematis diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian yang terus berkembang, baik yang bersifat struktural maupun siklikal, sekaligus sebagai instrumen stabilisasi dan pencapaian pembangunan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketahanan ekonomi sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam kerangka jangka menengah, pengelolaan fiskal difokuskan

pada optimalisasi fungsi kebijakan fiskal dan katalis pertumbuhan ekonomi. Efektivitas kebijakan makrofiskal tercermin pada kinerja pendapatan negara, defisit anggaran, keseimbangan primer, dan rasio utang.

Grafik 16. Rasio Pendapatan Negara, 2021-2025 (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Rasio pendapatan negara terhadap PDB pada 2021-2025 menunjukkan penguatan kapasitas fiskal pascapandemi sekaligus proses normalisasi, namun masih tetap perlu dioptimalkan. Rasio pendapatan negara 2023 menurun dibandingkan 2022 seiring dengan moderasi harga komoditas global yang mengurangi kontribusi penerimaan berbasis sumber daya alam. Memasuki 2025, rasio pendapatan negara menjadi 11,61 persen PDB yang menunjukkan fase normalisasi yang lebih dalam. Kinerja ini selain disebabkan oleh tren penurunan harga komoditas, juga didorong oleh penerapan kebijakan percepatan restitusi, dan pengalihan pendapatan negara yang dipisahkan ke Danantara sebagai bagian dari penguatan tata kelola aset negara. Pemerintah terus memperkuat kinerja penerimaan melalui perluasan basis pajak, penyempurnaan administrasi dan pelayanan, serta penguatan pengawasan berbasis data. Implementasi reformasi perpajakan, termasuk penguatan regulasi melalui UU HPP dan modernisasi sistem (*Coretax System*), diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, menjaga iklim usaha, serta memastikan penerimaan yang berkelanjutan.

Boks 2. Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Domestik Pada Periode Tertentu

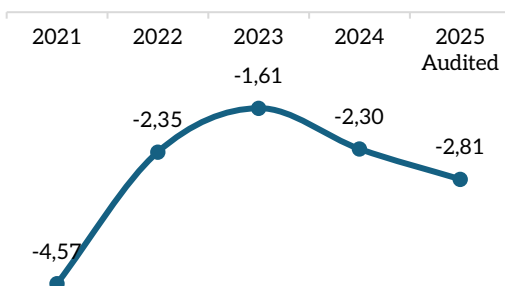
Serangkaian kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik sepanjang 2025–2026 merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan industri penerbangan. Pada 2025, insentif diberikan melalui PMK 18/2025 yang berlaku mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, pemerintah menanggung 6 persen PPN, sementara penumpang tetap membayar 5 persen PPN atas penggantian jasa angkutan udara kelas ekonomi. Kebijakan serupa kembali diberlakukan melalui PMK 71/2025, yang mencakup pembelian tiket 22 Oktober 2025–10 Januari 2026 dan penerbangan 22 Desember 2025–10 Januari 2026, dengan skema penanggung PPN yang sama.

Tahun 2026, pemerintah memperluas stimulus dengan mengeluarkan PMK 4 Tahun 2026. PMK tersebut berlaku khusus untuk periode libur Idulfitri 1447 H, yaitu pembelian tiket 10 Februari–29 Maret 2026 serta penerbangan 14–29 Maret 2026. Pada kebijakan ini, PPN DTP diberikan 100 persen, sehingga penumpang tidak menanggung PPN atas komponen tarif dasar maupun *fuel surcharge*. Insentif penuh ini menunjukkan upaya pemerintah mendorong mobilitas masyarakat dan menjaga stabilitas harga menjelang periode puncak mudik.

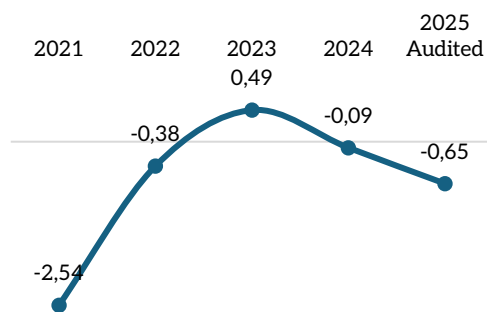
Jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, skema PPN DTP pada 2025–2026 menunjukkan pola respons fiskal yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Pada periode Nataru 2025/2026, pemerintah menargetkan peningkatan aktivitas perjalanan melalui pemberian subsidi sebagian PPN, sedangkan pada periode Lebaran 2026, pemberian insentif penuh mencerminkan fokus kuat pada stabilitas harga dan peningkatan daya beli. Konsistensi pemerintah menanggung 6 persen PPN dalam berbagai aturan 2025 juga berpijak pada ketentuan PMK 131/2024 mengenai mekanisme DPP Nilai Lain yang menetapkan dasar pengenaan pajak 11 persen dari harga tiket.

Dari sisi dampak ekonomi, kebijakan PPN DTP terbukti mampu menekan biaya perjalanan, menjaga konsumsi rumah tangga, serta mendorong sektor transportasi dan pariwisata. Lebih rendahnya harga tiket diharapkan meningkatkan minat bepergian, terutama pada periode liburan panjang, sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor terkait seperti hotel, kuliner, dan destinasi wisata. Di sisi lain, industri penerbangan juga mendapat manfaat berupa peningkatan volume penumpang di masa puncak, sehingga memperkuat arus kas maskapai. Maskapai tetap memperoleh pendapatan penuh karena PPN yang seharusnya dibayar penumpang diganti oleh pemerintah, sehingga membantu stabilitas kas industri penerbangan nasional yang masih dalam tahap pemulihan. Dengan demikian, kebijakan PPN DTP tidak hanya berperan sebagai insentif harga, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan fiskal yang memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025–2026.

Grafik 17. Perkembangan Defisit Anggaran, 2021 – 2025 (% PDB)



Grafik 18. Perkembangan Keseimbangan Primer, 2021 – 2025 (% PDB)

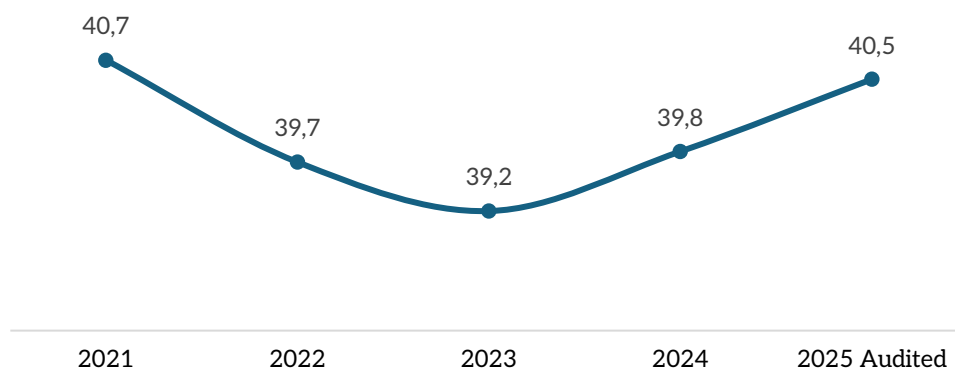


Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Kinerja defisit anggaran menunjukkan dinamika yang mencerminkan proses konsolidasi fiskal yang *prudent* dan terkendali, sekaligus respons terhadap kondisi eksternal. Pasca pandemi Covid-19, defisit menurun menjadi 4,57 persen PDB pada 2021 dan 2,35 persen pada 2022. Defisit kembali menurun signifikan pada 2023 hingga mencapai 1,61 persen PDB. Pencapaian ini merupakan level terendah dalam satu dekade dan menggambarkan penguatan penerimaan negara serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan belanja. Namun, pada 2024 defisit anggaran kembali melebar menjadi 2,30 persen PDB seiring meningkatnya tekanan eksternal dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas domestik. Pada 2025, defisit diperkirakan berada pada 2,81 persen PDB, mencerminkan peran APBN sebagai *shock absorber* sekaligus instrumen untuk mendukung agenda pembangunan di tengah ketidakpastian global. Pelebaran defisit tersebut merupakan langkah terukur yang ditujukan untuk menjaga

stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan dengan tetap menjaga kredibilitas APBN.

Grafik 19. Perkembangan Rasio Utang, 2021 – 2025 (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Rasio utang terhadap PDB menunjukkan stabilitas yang tetap terjaga dan konsisten dengan prinsip keberlanjutan fiskal dan dikelola secara hati-hati untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Pada 2021, rasio utang berada pada 40,7 persen PDB seiring kebijakan fiskal ekspansif untuk Program PEN. Dengan konsolidasi fiskal dan penguatan penerimaan, rasio tersebut menurun pada 2022 menjadi 39,7 persen dan 2023 menjadi 39,0 persen PDB dengan penyempurnaan kinerja penerimaan negara dan berlanjutnya konsolidasi fiskal. Namun, pada 2024 rasio utang berada pada 39,4 persen PDB, menunjukkan stabilisasi di tengah normalisasi pendapatan dan kebutuhan belanja prioritas. Pada 2025, rasio utang tercatat 40,5 persen PDB sejalan dengan kebutuhan pembiayaan fiskal yang meningkat secara moderat untuk mendukung agenda prioritas dan menghadapi dinamika perekonomian global. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan utang tetap dijalankan secara *prudent*. Pemerintah mempertimbangkan profil jatuh tempo, risiko suku bunga, dan kondisi likuiditas pasar dalam pengambilan keputusan, sehingga stabilitas fiskal jangka menengah tetap terjaga. Pengelolaan utang terus diarahkan pada strategi pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah melalui pendalaman pasar keuangan domestik, optimalisasi komposisi mata uang dan tenor, serta penguatan manajemen risiko untuk menjaga biaya utang yang terjangkau dan keberlanjutan fiskal.

2.3.2. Capaian Sasaran Pembangunan

Ketenagakerjaan

Data yang akurat semakin merepresentasikan kondisi ketenagakerjaan terkini. BPS untuk pertama kalinya mengeluarkan data ketenagakerjaan untuk periode November 2025 setelah pada periode sebelumnya hanya mengeluarkan data ketenagakerjaan dua kali dalam setahun yaitu di periode Februari dan Agustus. Pada November 2025, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia tercatat mencapai 218,9 juta orang, meningkat sebanyak 0,7 juta orang atau 0,3 persen dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 218,2 juta orang. Peningkatan ini mencerminkan semakin bertambahnya populasi usia produktif yang berpotensi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Potensi ini semakin terlihat dari jumlah angkatan kerja di November 2025

yang berada di angka 155,3 juta orang. Angka tersebut meningkat dari data di Agustus 2024 dan Agustus 2025 yang berada di angka 152,1 juta orang dan 154 juta orang. Peningkatan angkatan kerja ini juga diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sebesar 70,95 persen pada November 2025 meningkat dari TPAK Agustus 2024 dan Agustus 2025 yang masing-masing sebesar 70,63 persen dan 70,59 persen.

Penciptaan lapangan kerja masih pada tren yang positif seiring dengan kondisi ekonomi yang kuat. Jumlah orang bekerja di November 2025 berada di angka 147,9 juta orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,4 juta orang atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,7 persen. Kondisi ini lebih baik daripada di Agustus 2024 di mana terdapat orang yang bekerja sebanyak 144,6 juta orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,5 juta orang atau TPT sebesar 4,9 persen. Peningkatan jumlah orang yang bekerja dan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru serta menurunkan jumlah pengangguran. Dengan realisasi TPT Februari 2026 sebesar 4,7 persen, Pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai TPT ke level 4,44 – 4,96 persen pada tahun 2026.

Kualitas kondisi tenaga kerja nasional juga turut membaik. Proporsi tenaga kerja formal yang meningkat secara bertahap sejak 2020 mengindikasikan adanya penyempurnaan gradual dalam kualitas struktur ketenagakerjaan. Faktor lainnya juga disebabkan mulai pulihnya sektor industri pengolahan yang banyak menyerap tenaga kerja formal. Di 2020, pekerja informal mencapai 60,5 persen namun angka ini terus menurun hingga 57,8 persen pada 2025, sementara pekerja formal meningkat dari 39,5 persen menjadi 42,2 persen dalam periode yang sama. Berdasarkan rilis ketenagakerjaan terbaru di November 2025, jumlah orang yang bekerja di sektor informal terus turun hingga mencapai 85,4 juta orang atau sekitar 57,7 persen dari total pekerja, sedangkan pekerja di sektor formal mencapai 62,6 juta orang atau 42,3 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan di masa pandemi, rata-rata upah bulanan juga mengalami kenaikan sejak 2017 didukung oleh peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan produktivitas. Rata-rata upah di Agustus 2025 tercatat sebesar Rp3,3 juta, atau meningkat sebesar 1,9 persen dibandingkan Agustus 2024. Rilis terbaru BPS di November 2025 ini menunjukkan angka rata-rata upah yang relatif sama dibandingkan rilis di Agustus 2025.

Peningkatan kualitas tenaga kerja secara umum terjadi di mayoritas wilayah di Indonesia, meski disparitas antarwilayah masih cukup terlihat. Berdasarkan data November 2025, kondisi tenaga kerja mayoritas wilayah di Indonesia mengalami peningkatan yang tercermin dari menurunnya TPT. Secara regional, TPT tertinggi tercatat di Papua sebesar 7,1 persen, disusul oleh beberapa provinsi di Indonesia yakni Banten, Jawa Barat, dan Papua Barat Daya. Sebaliknya, TPT terendah masih tercatat di wilayah Bali sebesar 1,5 persen, menegaskan kuatnya pasar tenaga kerja di wilayah tersebut, terutama yang ditopang oleh sektor pariwisata dan jasa. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, mayoritas provinsi di Indonesia Timur menunjukkan tren penurunan TPT pada November 2025, meskipun terdapat pengecualian di beberapa provinsi. Penurunan TPT terbesar terjadi di Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah, sementara peningkatan TPT paling signifikan tercatat di DKI Jakarta.

Kesejahteraan dan Kualitas SDM

Tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun. Per September 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,3 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23,4 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir (2015-2025) bahkan terendah sejak tingkat kemiskinan diumumkan oleh BPS di tahun 1960. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2025 di perkotaan berada pada level 6,6 persen atau sebanyak 11,2 juta orang penduduk miskin. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan berada pada level 10,7 persen atau sebanyak 12,2 juta orang penduduk miskin. Pulau Maluku dan Papua menjadi pulau dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia dengan total 18,2 persen diikuti Bali dan Nusa Tenggara dengan 11,3 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun berada pada tren yang semakin menurun. Per 2025, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,85 persen dan ditargetkan menuju 0 persen di tahun 2026.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk masih harus terus dipantau dan diperbaiki. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) per September 2025 berada pada level 0,363, lebih rendah dari Rasio Gini per Maret 2025 sebesar 0,375. Peningkatan kualitas tersebut didorong oleh turunnya Rasio Gini, baik di perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing mencapai 0,383 dan 0,295. Secara spasial, hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini di bawah level prapandemi pada September 2025. Target Rasio Gini pada 2026 sebesar 0,377 – 0,380.

Kualitas modal manusia terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat terus naik mencapai 75,90 di 2025, meningkat sebesar 0,88 poin (1,2 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di 2024 serta rata-rata pertumbuhan tahunan selama 2020-2024. Peningkatan IPM 2025 didorong oleh penyempurnaan pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara spasial, IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (85,05) sedangkan yang terendah adalah Papua Pegunungan (54,91). Sejak 2025, Pemerintah mulai mengadopsi Indeks Modal Manusia (IMM). Indikator ini menjadi salah satu sasaran pembangunan pengganti IPM yang memberikan gambaran lebih komprehensif atas kualitas SDM Indonesia. Target IMM 2026 sebesar 0,57.

Indikator Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Perkembangan indikator lain, seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), menunjukkan tren peningkatan meskipun masih dipengaruhi perubahan harga komoditas serta biaya produksi. NTP pada 2025 tercatat sebesar 123,26, meningkat dibandingkan 2024 sebesar 119,62. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga yang diterima petani pada subsektor hortikultura dan tanaman pangan. Sementara itu, NTN pada 2025 mencapai 103,86 atau meningkat 2,1 poin dari 2024 yang sebesar 101,76 seiring dengan kenaikan harga yang diterima nelayan. Sejak 2026, Pemerintah mulai mengadopsi Indeks Kesejahteraan Petani (IKP). Indikator ini menjadi salah satu sasaran pembangunan pengganti NTP dan NTN yang memberikan ukuran lebih menyeluruh untuk menilai kondisi kesejahteraan rumah tangga petani. Target IKP 2026 sebesar 0,7731.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

JANGKA MENENGAH

3.1. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi

Dalam jangka menengah, strategi ekonomi Indonesia diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, merata, dan stabil. Pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional. Melalui kombinasi ketiga pilar tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam jangka pendek dan menuju 8 persen dalam jangka menengah (2029) sehingga pertumbuhan tidak hanya kuat secara agregat tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan ekonomi Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi potensial dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti Danantara. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong sektor keuangan berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong daya beli, peningkatan konsumsi serta menggairahkan investasi yang pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pendekatan pembangunan bertumpu pada penambahan modal, tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas lahir dari inovasi dan efisiensi, yang terefleksi dalam peningkatan *Total Factor Productivity* (TFP). Peningkatan produktivitas ditempuh melalui empat intervensi strategis yaitu:

1. *People*, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja terampil;
2. *Process*, efisiensi operasional serta adopsi teknologi;
3. *Product*, penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan daya saing; dan
4. *Policy*, regulasi yang mendukung inovasi dan iklim usaha.

Strategi pertumbuhan juga diperkuat melalui pengembangan sektor-sektor yang resilien dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Strategi ini didukung oleh kebijakan fiskal yang kolaboratif, berkualitas dan berkelanjutan. APBN berperan sebagai katalis untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan partisipasi sektor swasta, sekaligus menjaga fiskal yang sehat dan kredibel. Melalui sinergi antar sektor, yakni sektor keuangan yang bergerak cepat, sektor riil yang kuat, serta iklim investasi yang kondusif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen serta penurunan kemiskinan menuju 0 persen pada tahun 2029.

3.1.1. Transformasi Sektor Riil untuk Meningkatkan Produktivitas

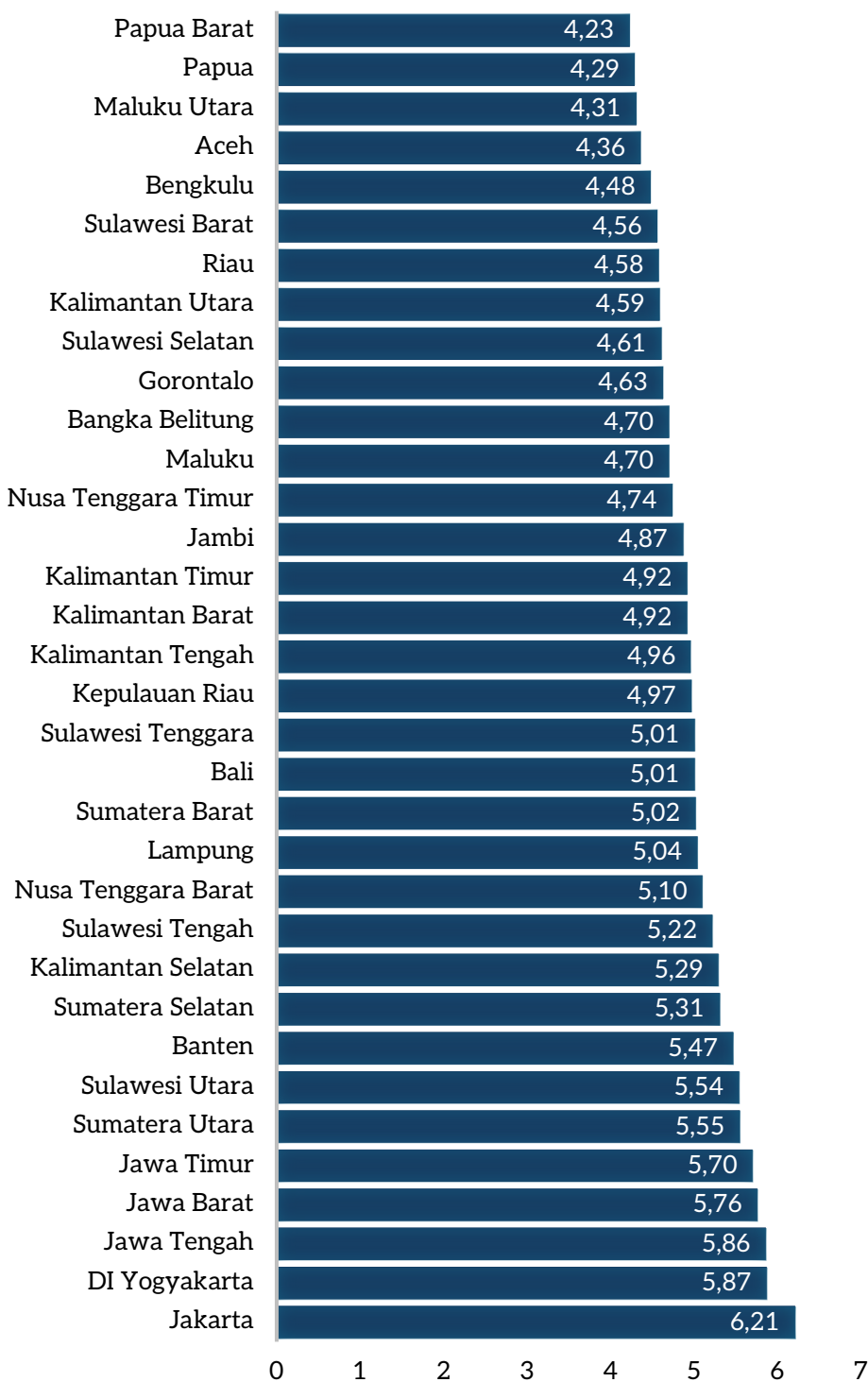
Peningkatan produktivitas merupakan kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam investasi di Indonesia bukan hanya peningkatan investasi namun juga kemampuan investasi dalam mendorong transformasi sektor riil dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Transformasi sektor riil perlu diarahkan pada pergeseran dari aktivitas berbasis komoditas primer menuju sektor dengan nilai tambah lebih yang tinggi, khususnya pada industri manufaktur, pengolahan sumber daya alam, serta sektor jasa *modern* yang berbasis teknologi dan inovasi. Dengan demikian, struktur ekonomi menjadi lebih produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Tantangan peningkatan daya saing bisnis untuk mentransformasi sektor riil di Indonesia tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga spasial. Indeks Persaingan Usaha (IPU) tahun 2026 yang dikembangkan oleh KPPU menemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antarwilayah. Jakarta mencatat skor tertinggi sebesar 6,2 yang mencerminkan bahwa ekosistem bisnis lebih kompetitif dengan didukung oleh infrastruktur, akses pasar, serta kedalaman sektor jasa dan keuangan. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Papua dengan skor sekitar 4,3 menunjukkan tingkat persaingan yang masih relatif terbatas. Lebih jauh, IPU mencatat persaingan usaha di Indonesia paling kuat terjadi pada sektor jasa. Sektor akomodasi dan makanan minuman, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan menunjukkan tingkat persaingan yang relatif sehat dan dinamis. Sebaliknya, sektor utilitas dan ekstraktif menunjukkan tingkat persaingan yang lebih rendah. Sektor listrik dan gas, pertambangan, serta pengelolaan air dan limbah memiliki skor sekitar 4,4 hingga 4,6 yang mengindikasikan struktur pasar yang lebih terkonsentrasi serta dominasi pemain besar. Berdasarkan fakta tersebut, kebijakan penguatan iklim usaha perlu diarahkan pada pengurangan konsentrasi pasar di sektor-sektor strategis serta penguatan ekosistem bisnis di luar pusat ekonomi utama.

Penguatan sektor-sektor strategis mencakup beberapa sektor utama antara lain pertanian, manufaktur, pertambangan dan infokom. Penguatan sektor pertanian diarahkan untuk mendukung program kedaulatan pangan dan ketahanan energi, seperti swasembada beras, daging dan susu, serta pemanfaatan biodiesel. Di sektor manufaktur dan pertambangan pemerintah akan terus mendorong program hilirisasi mineral strategis dan industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Untuk mendukung peningkatan sektor infokom, kebijakan akan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi serta percepatan pengembangan jaringan digital nasional.

Penguatan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor primer di atas tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan perubahan iklim. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi tetap didorong untuk mendukung transformasi menuju pembangunan yang rendah karbon dan berkelanjutan. Strategi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengurangi risiko ekonomi akibat dampak perubahan iklim, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan baru yang muncul dari transisi menuju ekonomi hijau, termasuk penciptaan lapangan kerja baru.

Grafik 20. Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Wilayah di Indonesia



Sumber: KPPU, 2026

Boks 3. Optimalisasi Infrastruktur Digital melalui Pusat Data

Pengembangan pusat data (*data center*) menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam rangka memperkuat kedaulatan data, mendorong transformasi digital, serta memposisikan Indonesia sebagai simpul layanan komputasi kawasan Asia Tenggara. Saat ini, kapasitas terpasang pusat data di Indonesia diperkirakan sekitar 430 MW pada tahun 2025, dengan intensitas hanya sekitar 1,5 Watt per kapita sehingga masih tertinggal dibandingkan negara sejawat seperti Jepang yang telah mencapai sekitar 13,2 Watt per kapita serta Singapura yang melebihi 115 Watt per kapita. Sejalan dengan tren ekonomi digital dan adopsi kecerdasan artifisial (AI), kebutuhan kapasitas dalam negeri minimal di atas 2.800 MW, sehingga diperlukan akselerasi pembangunan secara terukur dan berkelanjutan hingga tahun 2030.

Mempertimbangkan prospek permintaan domestik dan peluang layanan lintas negara, Indonesia berpotensi menambah kapasitas pusat data sekitar 3.692 MW hingga tahun 2030. Kebutuhan investasi pusat data bersifat kapital intensif: setiap 100 MW memerlukan investasi sekitar Rp13 triliun yang komponen impornya mencapai sekitar 35 persen, sehingga total kebutuhan pembiayaan investasi untuk merealisasikan kapasitas tambahan diperkirakan sekitar Rp424 triliun hingga tahun 2030. Sumber pendanaan utama berasal dari investasi langsung asing dan perbankan dengan kebutuhan dukungan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk integrasi energi baru terbarukan agar biaya listrik kompetitif dan keandalan pasokan listrik terjaga.

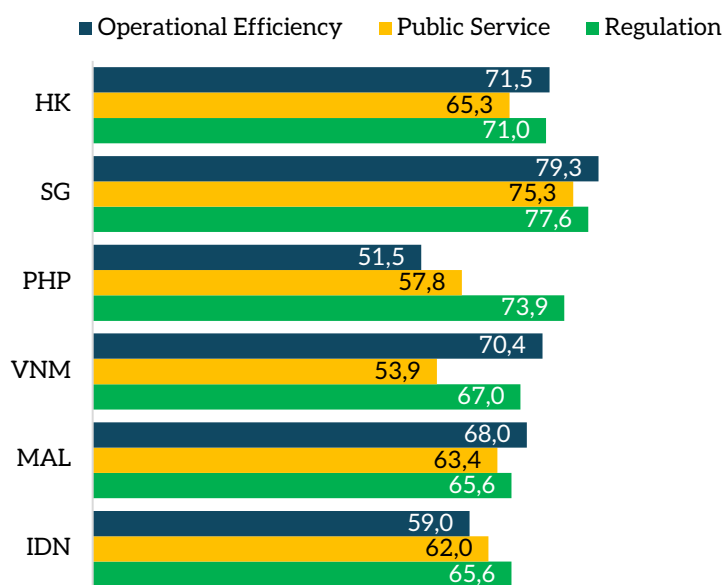
Secara makroekonomi, investasi pusat data memberikan efek *multiplier* yang signifikan pada *output*, nilai tambah, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan setiap investasi 100 MW selama lima tahun, proyek pusat data berpotensi menciptakan *output* baru sebesar Rp28 triliun, nilai tambah Rp12,7 triliun, pendapatan Rp4,5 triliun, serta menyerap sekitar 65.013 tenaga kerja, dengan rasio *multiplier* masing-masing 2,17 untuk *output*, 0,98 untuk nilai tambah, dan 0,34 untuk pendapatan. Dengan skala kapasitas tambahan yang direncanakan, peluang kumulatif lapangan kerja dapat mencapai sekitar 4,8 juta orang yang terdiri atas tenaga konstruksi, *engineer*, teknisi operasi dan pemeliharaan, serta profesi pendukung, di samping penambahan PDB dari industri pusat data dan pembangkit listrik yang diperkirakan sekitar Rp218 triliun per tahun serta tambahan penerimaan pajak sekitar Rp33 triliun. Ketika memperhitungkan keterkaitan ekosistem digital yang lebih luas, setiap satu satuan investasi teknologi informasi berpotensi mendorong PDB sebesar 1,64 satuan. Dengan demikian, total dampak terhadap PDB nasional diperkirakan dapat mencapai Rp1.150-Rp1.804 triliun pada saat kapasitas tambahan tersebut terealisasi.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai hub pusat data kawasan ASEAN, diperlukan kebijakan pendukung yang berorientasi pada simplifikasi perizinan, lokalisasi infrastruktur, serta harmonisasi ketentuan fiskal dan perpajakan. Proses perizinan saat ini melibatkan setidaknya sembilan kementerian/lembaga sehingga perlu diterapkan mekanisme persetujuan tunggal (*single-agency approval*) sebagaimana praktik baik di negara lain, guna mempercepat tahap prakonstruksi, konstruksi, dan praoperasi. Di sisi fiskal, tersedia fasilitas pembebasan atau pengurangan atas biaya impor peralatan yang mencakup PPN Impor, PPh 22 Impor, dan bea masuk untuk meningkatkan iklim investasi dan menarik FDI. Kebijakan kedaulatan data (*data sovereignty*) baik data publik dan privat juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan penyimpanan dan pemrosesan data masyarakat dan pelaku usaha dilakukan di dalam negeri, meningkatkan ketahanan data, sekaligus mendorong hilirisasi digital. Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan mampu mengakselerasi pengembangan pusat data nasional, meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat data di kawasan.

3.1.2. Peningkatan Investasi yang Produktif dan Kondusif

Tantangan utama investasi di Indonesia adalah rendahnya *operational efficiency* dan regulasi yang belum optimal dalam mendukung iklim investasi. *Business Readiness Index* (*B-Ready*) dari Bank Dunia mencatat Indonesia berada pada tier menengah di kawasan Asia. Dari 101 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat 39 dalam penyelesaian sengketa bisnis, peringkat 36 dalam mendorong persaingan pasar, peringkat 44 dalam regulasi perpajakan, namun masih peringkat 78 dalam regulasi ketenagakerjaan. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kerangka regulasi, Indonesia relatif kompetitif, tetapi masih menghadapi tantangan pada beberapa aspek kebijakan pasar tenaga kerja. Jika dilihat dari tiga pilar utama *B-Ready*, kekuatan Indonesia berada pada kerangka regulasi, dengan skor sekitar 65,61, bahkan lebih baik dibanding Malaysia dan mulai mendekati Vietnam. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi antara investasi, deregulasi, dan *debottlenecking* guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan efisien. Salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka merespons tantangan tersebut adalah deregulasi dan *debottlenecking* untuk simplifikasi serta mengurangi tantangan dalam kegiatan usaha.

Grafik 21. *Business Ready Pillars* Antara Indonesia dan Negara Mitra (%)



Sumber: *Business Ready*, World Bank, 2025

Dalam rangka menyelesaikan tantangan, penyimpangan, serta permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses perizinan maupun operasional usaha, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE). Satgas ini juga menyediakan kanal layanan aduan *debottlenecking* yang memungkinkan pelaku usaha menyampaikan berbagai kendala investasi secara langsung. Mekanisme ini berperan sebagai jembatan antara dunia usaha dan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis seperti perizinan usaha, sertifikasi, perpajakan, akses lahan, energi dan infrastruktur, hingga logistik

dan pembiayaan. Dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dapat ditangani secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, khususnya *Foreign Direct Investment (FDI)*, Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal untuk sektor-sektor prioritas. Penguatan kawasan pertumbuhan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga terus didorong melalui percepatan proses perizinan dan digitalisasi layanan berbasis teknologi informasi. Penguatan investasi berkualitas juga didorong melalui kolaborasi antara Danantara dan sektor swasta untuk mempercepat pembiayaan investasi. Sektor-sektor tersebut meliputi infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, ketahanan pangan, serta sektor hulu strategis yang menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional. Selain itu, Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan produktif melalui kombinasi deregulasi yang progresif, penyelesaian tantangan investasi, serta penguatan pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, investasi tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing industri nasional, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Strategi Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan perlu diiringi dengan upaya pembangunan inklusif untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah. Tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses layanan dasar menuntut kebijakan yang terintegrasi, dan berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk merumuskan kerangka kebijakan yang tidak hanya mendorong akselerasi pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan melalui penurunan tingkat kemiskinan serta penguatan pembangunan kewilayahan dengan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi kebijakan fiskal sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi.

Kerangka kebijakan penurunan kemiskinan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan pada akselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Instruksi Presiden tersebut menegaskan perlunya penyelarasan program dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis perencanaan, penargetan, dan pemantauan. DTSEN menjadi instrumen utama untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan fiskal. Dengan data yang akurat, program perlindungan sosial dapat lebih tepat sasaran sehingga mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*, serta meningkatkan efisiensi belanja. Kerangka kebijakan ini memerlukan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Strategi pengentasan kemiskinan ditekankan pada tiga pilar utama sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Pilar pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, ditempuh melalui penguatan perlindungan sosial adaptif yang menempatkan bantuan pangan, bantuan tunai, dan subsidi layanan dasar sebagai instrumen stabilisasi konsumsi rumah tangga miskin. Pilar kedua, peningkatan pendapatan, ditempuh terutama melalui penguatan pendidikan, pengembangan ekonomi desa, koperasi, dan UMKM, serta transformasi dari paradigma bantuan sosial menjadi peningkatan kapasitas, akses modal,

keterampilan, dan kemandirian masyarakat miskin. Pilar ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan, ditempuh melalui peningkatan infrastruktur dasar seperti konektivitas jalan desa, pelayanan dasar, dan fasilitas pendidikan. Ketiga pilar tersebut akan dijalankan secara terintegrasi lintas K/L dan pemerintah daerah untuk memastikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menuju 4,5–5,0 persen pada 2029.

Strategi pengentasan kemiskinan tersebut menjadi fondasi bagi pembangunan inklusif yang merata di seluruh wilayah Indonesia dalam jangka menengah. Dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas fiskal jangka menengah, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai katalis transformasi sosial-ekonomi. Pembangunan inklusif yang berkeadilan akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan eksternal, meningkatkan produktivitas, dan daya saing ekonomi nasional.

Strategi arah pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Strategi ini menggunakan pendekatan yang bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial, di mana setiap wilayah dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung. Melalui konsep ini, pembangunan tidak lagi dilakukan secara terisolasi, melainkan disesuaikan dengan karakteristik unik dan potensi spesifik masing-masing daerah untuk mencapai keseimbangan nasional.

Implementasi strategi ini dilakukan melalui pembagian kawasan tematik yang terarah, mulai dari pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi perkotaan, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penguatan swasembada pangan dan energi. Selain itu, aspek afirmasi bagi daerah tertinggal serta perlindungan kawasan konservasi dan mitigasi bencana menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan ekologi. Fokus intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki fungsi strategis yang berkontribusi pada ketahanan nasional secara menyeluruh. Sebagai langkah konkret di tingkat daerah, intervensi prioritas diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar seperti konektivitas energi terbarukan, digitalisasi, serta peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan menjamin akses pelayanan publik sektor kesehatan yang semakin merata.

3.3. Program Kerja Prioritas Nasional

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) merupakan pedoman pembangunan yang dirancang untuk memastikan arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja Pemerintah. Penyusunan PKPN lebih terfokus, terintegrasi, dan berorientasi pada isu-isu yang paling strategis serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui PKPN, upaya pembangunan tidak hanya diarahkan untuk menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Secara struktur, PKPN disusun ke dalam 8 klaster dan 1 pendukung klaster (*enabler*) yang mencakup total 60 program kerja. Setiap klaster mengelompokkan program-program berdasarkan kesamaan tema, tujuan, dan sasaran kebijakan. Delapan klaster tersebut adalah: Pertama, kedaulatan pangan (9 program kerja). Kedua, kemandirian energi dan air (16 program kerja). Ketiga, pendidikan (13 program kerja). Keempat, kesehatan (4 program kerja).

Kelima, hilirisasi dan industrialisasi (5 program kerja). Keenam, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana (5 program kerja). Ketujuh, ekonomi kerakyatan dan desa (2 program kerja). Kedelapan, penurunan kemiskinan (2 program kerja). Sebagai klaster pendukung (*enabler*) adalah pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi (4 program).

3.3.1. Kedaulatan Pangan

Sektor pangan nasional menunjukkan tren penguatan yang resilien sehingga mendorong transformasi paradigma kebijakan dari Ketahanan Pangan menjadi Kedaulatan Pangan.

Transformasi ini menuntut tidak hanya peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga penguatan sistem distribusi, stabilisasi harga, dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah terus memperkuat intervensi pada komoditas strategis serta menjaga keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan guna mendukung ketahanan sistem pangan secara berkelanjutan.

Pada periode 2021-2025, capaian sektor pangan menunjukkan kinerja optimal, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan jagung pada tahun 2025. Produksi beras mengalami peningkatan sebesar 10,68 persen (dari 31,36 juta ton di tahun 2021 menjadi 34,71 juta ton di tahun 2025). Dengan konsumsi di tahun 2025 sebesar 31,16 juta ton, terdapat surplus beras sebesar 3,5 juta ton. Jagung juga mengalami peningkatan produksi dari 13,41 juta ton di tahun 2021 menjadi 16,11 juta ton tahun 2025 (naik 20,13 persen). Pada tahun 2025, surplus juga terjadi pada jagung sebesar 0,47 juta ton, dengan konsumsi 15,64 juta ton. Dari sisi distribusi dan stabilisasi, pemerintah memperkuat peran BULOG melalui pengadaan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pengadaan setara beras meningkat signifikan sebesar 212,75 persen (dari 1,02 juta ton di tahun 2021 menjadi 3,19 juta ton di tahun 2025). Stok CBP juga meningkat dari 0,81 juta ton menjadi 4 juta ton (naik 393,83 persen). Capaian ini salah satunya didukung melalui pembiayaan Operator Investasi Pemerintah (OIP) sebesar Rp16,57 triliun pada 2025.

Kedaulatan pangan nasional ke depan dihadapkan pada tantangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan keterjangkauan. Perubahan iklim meningkatkan risiko gagal panen akibat kekeringan dan banjir, sementara konversi lahan pertanian menekan kapasitas produksi domestik. Ketergantungan impor pada komoditas tertentu seperti daging sapi dan susu menimbulkan kerentanan terhadap volatilitas harga global dan gangguan rantai pasok. Selain itu, keterbatasan infrastruktur logistik, disparitas harga antarwilayah, serta rendahnya akses pembiayaan dan teknologi bagi petani, nelayan dan peternak turut menghambat optimalisasi produksi. Dari sisi permintaan, implementasi program MBG berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan, khususnya protein hewani.

Strategi kedaulatan pangan jangka menengah difokuskan pada swasembada produksi komoditas strategis, penguatan rantai pasok, serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak. Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui modernisasi pertanian, penguatan sarana dan prasarana, serta adopsi teknologi. Di sisi hilir, stabilisasi pasokan dan harga diperkuat melalui pengelolaan cadangan pangan dan intervensi pasar. Selanjutnya dilakukan penguatan kelembagaan dan skema pembiayaan seperti *blended finance* dan subsidi diarahkan untuk meningkatkan partisipasi petani, nelayan dan peternak. Selain itu, terdapat beberapa program baru yang dimunculkan untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional melalui program ekonomi biru. Langkah strategis implementasi

klaster kedaulatan pangan dijabarkan dalam kelompok program perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemanfaatan kawasan, dan peningkatan produksi protein.

Perikanan tangkap

Pada sektor perikanan tangkap, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bertujuan untuk mentransformasi pemukiman nelayan menjadi pusat ekonomi perikanan yang produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi usaha perikanan tangkap serta pendampingan. Sebanyak 5.000 KNMP ditargetkan terbangun di berbagai wilayah di Indonesia hingga tahun 2029, dengan peningkatan produksi perikanan yang diharapkan hingga 800 ton per tahun. Selanjutnya, pembangunan kapal ikan modern juga turut digagas guna memodernisasi armada penangkapan ikan rakyat sekaligus memperkuat kapasitas industri galangan kapal dalam negeri. Program kapal ikan modern ini diharapkan dapat mencapai target pembangunan 4.582 unit kapal ikan pada tahun 2029.

Perikanan budidaya

Kedaulatan pangan juga didukung dengan berbagai program sektor perikanan budi daya. Program tersebut antara lain: (i) revitalisasi tambak nila salin Pantura yang ditargetkan mencapai peningkatan produksi sekitar 1,18 juta ton pada tahun 2029; (ii) pembangunan tambak udang Waingapu yang diharapkan mencapai produktivitas sekitar 52.800 ton pada tahun 2029; (iii) budi daya ikan darat tematik, budi daya lele dan nila bioflok di 40.000 lokasi dan budi daya mina padi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung penyediaan protein hewani.

Pemanfaatan kawasan

Di bidang pemanfaatan kawasan untuk kedaulatan pangan, terdapat: (i) kawasan pangan terintegrasi yang diharapkan dapat mencapai kemandirian komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai, dengan target masing-masing 58,05 juta ton, 25,89 juta ton, 18,3 juta ton, dan 0,42 juta ton pada 2029; (ii) kawasan sentra industri garam nasional yang diharapkan dapat meningkatkan produksi garam 400 ribu ton; dan (iii) kawasan perkebunan (untuk kelapa sawit, tebu, dan komoditas lainnya) di beberapa wilayah di Indonesia yang juga dicanangkan untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung hilirisasi.

Peningkatan produksi daging, susu, dan telur

Program peningkatan produksi daging, susu, dan telur diimplementasikan melalui pengembangan peternakan modern terintegrasi, skema kemitraan, dan peningkatan stabilitas pasokan antarwilayah untuk menjamin kuantitas dan kualitas produk ternak. Melalui integrasi ini, diharapkan produksi daging, telur, dan susu meningkat masing-masing dapat mencapai 5,56 juta ton, 8,79 juta ton, dan 900,40 ribu ton pada tahun 2029.

3.3.2. Kemandirian Energi dan Air

Kebijakan Kemandirian Energi dan Air diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan air nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengurangan ketergantungan impor, peningkatan pemanfaatan sumber daya domestik, perluasan akses energi dan air yang merata, serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Melalui klaster Kemandirian Energi dan Air, Pemerintah mendorong sinergi lintas sektor dan wilayah agar

sasaran pembangunan RPJMN tercapai secara terukur, berdampak nyata bagi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Bioenergi

Pengembangan biodiesel Indonesia telah dimulai sejak tahun 2006 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Komitmen pengembangan tersebut kemudian diperkuat dengan kebijakan mandatori dalam penggunaan biodiesel penggunaan campuran biodiesel secara bertahap sampai dengan 40 persen (B40) yang dimulai sejak tahun pada 2025 hingga saat ini.

Kebijakan pencampuran biodiesel wajib (*mandatory blending*) merupakan bagian dari strategi mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan, memperkuat ketahanan energi domestik, dan mendukung pengembangan industri pengolahan minyak sawit. Dengan memperhatikan dinamika harga komoditas energi global yang terus berkembang, aspek kesiapan teknis pemanfaatan, serta kapasitas produksi bahan baku domestik, Pemerintah mempertimbangkan peningkatan lebih lanjut ke mandat pencampuran yang lebih tinggi seperti B50.

Energi Baru dan Terbarukan

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi pilar utama transisi energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kebijakan EBT difokuskan pada percepatan pemanfaatan sumber energi domestik yang rendah emisi, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi yang andal. Program unggulan dalam EBT adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 GW, baik skala besar, PLTS atap, maupun PLTS terdistribusi. Pengembangan ini berperan penting dalam diversifikasi bauran energi, dedieselisasi pembangkit, serta peningkatan penggunaan energi bersih di berbagai sektor.

Selain PLTS, transisi energi diperkuat melalui pembangunan PLTA skala besar terintegrasi yang berfungsi sebagai penopang keandalan sistem kelistrikan, khususnya bagi kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya ini dipadukan dengan elektrifikasi 10.000 desa untuk memperluas akses listrik yang andal dan berkelanjutan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga transisi energi berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan. Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) juga hadir sebagai inisiatif strategis untuk merespons tantangan timbulan sampah nasional dan peluang sumber energi. Program PSEL hadir sebagai solusi teknologi yang terukur untuk mengatasi tantangan timbulan sampah nasional yang tidak lagi mampu ditangani secara konvensional.

Lifting Migas

Peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi merupakan agenda strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah tren penurunan alami produksi migas dan meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi migas yang ada sekaligus menyiapkan sumber produksi baru yang berkelanjutan.

Upaya peningkatan *lifting* dilakukan melalui optimalisasi sumur tua dan sumur minyak masyarakat dengan pendekatan legal, aman, dan berwawasan lingkungan. Penataan

sumur-sumur tersebut tidak hanya memberikan tambahan produksi jangka pendek, tetapi juga meningkatkan tata kelola, keselamatan kerja, serta penerimaan negara dan daerah.

Di sisi jangka menengah dan panjang, Pemerintah mendorong eksplorasi 10 blok migas baru guna memperluas basis cadangan dan menjaga kesinambungan produksi nasional. Keseluruhan kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor migas, memperkuat ketahanan energi, serta memberikan dampak ekonomi bagi wilayah penghasil.

Konservasi Energi

Konservasi energi menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan energi dari sisi efisiensi dan pengendalian konsumsi. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan intensitas energi nasional tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) menjadi inisiatif untuk memastikan peralatan dan sistem energi yang digunakan memenuhi tingkat efisiensi tertentu, sehingga konsumsi energi dapat ditekan secara sistematis. Sementara itu, Pemerintah juga melakukan akselerasi transisi energi melalui pembangunan *Small Scale Green Modular Refinery* dan *Storage* untuk mengolah bahan baku hijau (*green feedstock* seperti *biofuel* dan *e-fuel*). Pembangunan kilang modular ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi CPO dan biomassa domestik, menurunkan emisi di sektor transportasi, serta mengurangi ketergantungan impor.

Di sektor rumah tangga, Pemerintah mendorong penggunaan kompor listrik sebagai alternatif yang lebih efisien dan bersih. Untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor LPG, program pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) turut menjadi inisiatif kebijakan guna menyediakan gas bumi yang aman dan terjangkau melalui jaringan pipa distribusi. Selain itu, program ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan subsidi yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.

Di sektor transportasi, konservasi energi diwujudkan melalui konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik, yang berkontribusi pada pengurangan konsumsi BBM dan emisi, serta peningkatan kualitas udara. Secara keseluruhan, konservasi energi berperan menyeimbangkan peningkatan pasokan dengan pengelolaan permintaan energi secara berkelanjutan.

Swasembada Air

Kemandirian air merupakan bagian integral dari ketahanan nasional yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan swasembada air melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berkeadilan antarwilayah.

Upaya kemandirian air mencakup penyediaan dan penguatan infrastruktur air baku, air minum, dan sanitasi, serta peningkatan tata kelola dan layanan air di tingkat pusat dan daerah. Dengan terjaminnya ketersediaan air yang aman dan terjangkau, kemandirian air menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi, kesehatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3.3.3. Pendidikan

Dalam rangka mencapai Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Hal ini diupayakan melalui peningkatan akses dan keterjangkauan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, Pemerintah secara konsisten telah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen. Secara nominal, besaran alokasi anggaran ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan terealisasi sebesar Rp479,5 triliun dan meningkat menjadi Rp656,6 triliun pada tahun 2025, atau secara rata-rata tumbuh sebesar 8,32 persen.

Pada jangka menengah, pemanfaatan anggaran pendidikan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM unggul yang cerdas, berintegritas dan berdaya saing. Kualitas SDM unggul tersebut diharapkan dapat merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Pada periode 2026-2029, Pemerintah akan mengarahkan anggaran pendidikan untuk mendukung PKPN klaster pendidikan.

Makan Bergizi Gratis

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, khususnya bagi anak usia sekolah. MBG ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak, kehadiran, dan partisipasi sekolah, menanamkan kebiasaan perilaku makan sehat, serta meningkatkan prestasi belajar dalam jangka panjang. Pemberian MBG kepada anak sekolah mencakup seluruh jenjang mulai dari PAUD/RA/TK, SD/MI/ sederajat, SMA/MA/ sederajat, SLB, serta sekolah keagamaan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan MBG pada 2025 menunjukkan capaian yang cukup signifikan, yaitu telah diberikan kepada 53,69 juta orang melalui 19.068 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan realisasi anggaran sebesar Rp51,5 triliun. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan desain dan peningkatan kualitas implementasi program.

Optimalisasi tersebut ditempuh melalui penyempurnaan desain intervensi gizi yang berbasis kebutuhan anak sekolah, peningkatan kualitas menu yang seimbang dan aman dikonsumsi, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap capaian status gizi dan partisipasi peserta didik. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dalam mendukung konsentrasi belajar, kualitas pembelajaran, serta pencapaian hasil pendidikan yang lebih baik. Selain itu, integrasi data lintas kementerian/ lembaga akan terus diperkuat guna memastikan ketepatan sasaran, efisiensi, dan efektivitas implementasi program. Sasaran kelompok pendidikan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 72,3 juta jiwa di tahun 2029.

Sekolah Rakyat

Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab berbagai persoalan multidimensi melalui ekosistem pendidikan berasrama yang terintegrasi. Sekolah Rakyat dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan karakter kuat. Para lulusan diharapkan dapat

melanjutkan pendidikan tinggi atau terserap di sektor formal yang lebih produktif, sehingga mendorong mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan diluncurkan pada 2025 dengan total hampir 10 ribu peserta didik.

Dalam jangka menengah, penguatan program Sekolah Rakyat akan difokuskan pada standardisasi kualitas layanan pendidikan, peningkatan kapasitas dan distribusi tenaga pendidik, serta penyempurnaan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Pemerintah juga akan memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk integrasi Sekolah Rakyat dengan berbagai program perlindungan sosial dan vokasi. Pemerintah menargetkan sebanyak 514 Sekolah Rakyat permanen dapat selesai dibangun dan beroperasi secara bertahap hingga 2029.

Sekolah Unggul Garuda

Sekolah Unggul Garuda (SUG) ditujukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan lulusan yang unggul sehingga dapat melanjutkan pendidikan tinggi di bidang sains dan teknologi. Program ini dijalankan melalui dua skema, yaitu pembangunan sekolah baru (SUG Baru) dan transformasi sekolah negeri atau swasta yang sudah ada menjadi sekolah binaan (SUG Transformasi). Pembangunan SUG Baru Tahap I dilaksanakan di 4 lokasi yaitu Belitung Timur (Bangka Belitung), Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Bulungan (Kalimantan Utara). Pada akhir 2025, keempat lokasi SUG Baru telah memasuki tahap konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Pada tanggal 8 Oktober 2025 telah diluncurkan 12 SUG Transformasi di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan 20 SUG Baru dan 80 SUG Transformasi pada 2029.

Sekolah Nasional Terintegrasi

Pemerintah memprioritaskan pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai model pendidikan satu kawasan untuk menjamin keberlanjutan kurikulum dan manajemen dari jenjang SD hingga menengah. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan mendasar seperti belum meratanya akses layanan pendidikan berkualitas, terbatasnya sarana pembelajaran pendukung, serta minimnya satuan pendidikan unggul di tingkat kecamatan. Strategi pengembangannya dilakukan melalui pembangunan unit sekolah baru dan konsolidasi sekolah dalam satu area terpadu yang didukung fasilitas lengkap serta tenaga pendidik berkualifikasi internasional. Dengan target pembangunan 500 SNT pada tahun 2029, SNT diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan kolaboratif yang memudahkan siswa melanjutkan sekolah antarjenjang serta mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi.

Revitalisasi Sekolah dan Madrasah

Revitalisasi sekolah dan madrasah merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyediakan lingkungan belajar aman dan nyaman, serta layanan pendidikan yang ideal bagi peserta didik. Program ini juga diharapkan mampu mengatasi ketimpangan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan antar wilayah. Pada 2025, Pemerintah telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan, melampaui target sebesar 10.440 unit. Revitalisasi tersebut mencakup penyempurnaan ruang kelas, laboratorium, sanitasi, serta penambahan alat peraga.

Revitalisasi Sekolah dan Madrasah dalam jangka menengah difokuskan untuk sekolah rusak berat, serta sekolah di daerah 3T dan wilayah terdampak bencana. Pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi sekolah pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan diprioritaskan di tahap awal. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat perencanaan melalui pemutakhiran data secara berkala, pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah untuk keberlanjutan pemeliharaan, dan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif dan kemitraan dengan swasta. Strategi tersebut akan dilakukan dengan mengutamakan bangunan aman bencana, ramah lingkungan, dan inklusif. Pemerintah menargetkan dapat merevitalisasi lebih dari 300.000 sekolah dan madrasah di Indonesia hingga 2029.

Kebijakan anggaran pendidikan jangka menengah tahun 2026-2029 akan mendukung program prioritas Pemerintah lainnya di bidang pendidikan. PKPN lainnya di sektor pendidikan adalah: (i) Bantuan Perlengkapan Sekolah; (ii) Studio Guru; (iii) Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital); (iv) 10 Universitas Baru: *Medical University* berbasis STEM; (v) 500.000 Lulusan SMK *Go Global*; (vi) Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional; (vii) Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan; dan (viii) Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

3.3.4. Kesehatan

Upaya Pemerintah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan utamanya melalui peningkatan akses dan penguatan layanan kesehatan. Peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta mengurangi *out-of-pocket cost* (OOP) pengeluaran kesehatan masyarakat. Hal tersebut memberikan proteksi finansial kepada masyarakat ketika menderita penyakit. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sebagai upaya mendorong kesehatan rakyat dilakukan Pemerintah dengan peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat Indonesia. Salah satu indikator penting kemajuan di bidang kesehatan adalah peningkatan usia harapan hidup saat lahir.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus didukung dengan anggaran kesehatan yang memadai. Anggaran kesehatan dialokasikan mengacu kepada rencana induk bidang kesehatan dengan menerapkan prinsip *money follow program* mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran, serta mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan secara optimal. Pada tahun 2021-2025, realisasi anggaran kesehatan mengalami fluktuasi, yakni dari Rp312,4 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp203,9 triliun pada tahun 2025. Fluktuasi realisasi anggaran kesehatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 selama tahun 2020 - 2022. Anggaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan dan reformasi sistem kesehatan nasional. Hingga 2029, anggaran kesehatan diperkirakan berada pada kisaran 6 persen dari total belanja negara.

Untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas pada jangka menengah, kebijakan anggaran kesehatan akan mendukung pelaksanaan PKPN. Di sektor kesehatan, PKPN mengamankan empat program yang harus dilaksanakan, yaitu: (i) pemberian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B); (ii) Pemeriksaan Kesehatan Gratis; (iii) penuntasan tuberkulosis; dan (iv) 66 Rumah Sakit Upgrade.

MBG untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non-PAUD)

Program MBG untuk 3B merupakan salah satu intervensi utama untuk menurunkan prevalensi *stunting*. Pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar target prevalensi *stunting* sebesar 14,2 persen pada 2029 dapat tercapai. Kualitas gizi ibu hamil juga masih perlu menjadi perhatian sebab sebanyak 27,7 persen ibu hamil mengidap anemia. Oleh karena itu, program MBG telah mensasar kelompok 3B untuk memenuhi kebutuhan gizi, mengingat 1000 hari pertama kehidupan (HPK) merupakan waktu terbaik untuk mengintervensi peningkatan gizi dalam hal penurunan *stunting*. Hingga akhir 2025, 1,5 juta ibu hamil/menyusui dan 3,3 juta balita telah menerima manfaat MBG.

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan MBG untuk meningkatkan status gizi 3B demi pencapaian target prevalensi *stunting*. Optimalisasi tersebut ditempuh melalui penyempurnaan desain intervensi gizi, peningkatan kualitas menu yang seimbang dan aman dikonsumsi, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap capaian status gizi 3B. Pemerintah berkomitmen untuk mengutamakan menu berbasis sumber pangan lokal. Selain itu, Pemerintah juga berupaya memitigasi potensi alergi atau intoleransi melalui penyediaan alternatif makanan lain. Sasaran kelompok 3B diharapkan terus meningkat hingga mencapai 4,9 juta ibu hamil, 2,28 juta ibu menyusui, dan 18,05 juta balita pada 2029.

Peningkatan Cakupan Cek Kesehatan Gratis

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu kebijakan preventif yang dikembangkan pemerintah dalam rangka memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Melalui program ini, Pemerintah berupaya meningkatkan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular (PTM) yang menjadi penyumbang utama beban penyakit di Indonesia. Selain berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, CKG juga diproyeksi dapat menurunkan beban pembiayaan kesehatan dalam jangka panjang, khususnya OOP yang masih relatif tinggi. Pada 2025, sebanyak 70,7 juta orang telah memanfaatkan CKG, dengan 46 juta orang di antaranya melakukan CKG di Puskesmas dan sisanya melalui CKG Sekolah.

Perluasan CKG sebagai strategi penguatan *primary health care* penting dilakukan untuk memastikan pemerataan jangkauan layanan kesehatan dasar yang promotif dan preventif. Strategi jangka menengah diarahkan pada penguatan peran fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama garda terdepan dalam skrining dan manajemen faktor risiko kesehatan. Pendekatan CKG berbasis sekolah dan komunitas akan diteruskan sebagai strategi efektif memperluas cakupan skrining. Ke depan, Pemerintah juga akan memperkuat CKG tidak hanya pada tahap skrining, tetapi juga pada tindak lanjut pascadiagnosis, seperti rujukan, pengobatan awal, dan edukasi gaya hidup sehat. Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan cakupan CKG dapat menjangkau sekitar 70 persen populasi Indonesia pada 2029.

Percepatan Penuntasan Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan utama di Indonesia. Berdasarkan *Global Tuberculosis Report (2025)*, *World Health Organization (WHO)* melansir bahwa pada tahun 2024, Indonesia menyumbang 10 persen kasus TB di dunia (1,08 juta kasus), naik 1,3 kali lipat dari 7 persen (842 ribu kasus) di tahun 2010, dengan 126.000 kasus meninggal. Selain itu, angka insiden mencapai 388,1 kasus per 100.000 penduduk dan angka kematian TB adalah 41 kematian per 100.000 penduduk.

Dalam jangka menengah, Pemerintah menargetkan penurunan insidensi kasus TB dari 382 per 100.000 penduduk pada 2024 menjadi 190 per 100.000 penduduk pada 2029. Selain itu, Pemerintah menargetkan penurunan angka kematian TB dari 55 kematian pada tahun 2024 menjadi 6 kematian per 100.000 penduduk pada tahun 2029. Penurunan strategi ini akan dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain: (i) intervensi penemuan kasus dengan meningkatkan sarana, prasarana, dan data skrining; (ii) intervensi pencegahan dengan pemberian terapi pencegahan yang terintegrasi dan perluasan vaksin TB; serta (iii) intervensi pengobatan melalui pemenuhan obat program TB dan penguatan pengawasan kepatuhan minum obat

Revitalisasi Rumah Sakit

Pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata melalui Program Revitalisasi Rumah Sakit. Program ini dilaksanakan tidak hanya melalui pembangunan dan rehabilitasi fisik gedung rumah sakit, tetapi juga melalui pemenuhan sarana, dan alat kesehatan yang memadai di rumah sakit daerah. Selain itu, program ini diarahkan untuk memperkuat penyediaan layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu Anak (KJSA-KIA) sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Dalam jangka menengah, Pemerintah menargetkan penyelesaian revitalisasi 66 Rumah Sakit di daerah hingga 2027 melalui skema pembangunan *multiyear contract*. Program yang diinisiasi pada tahun 2025 ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kabupaten/kota yang belum memiliki Rumah Sakit dengan akreditasi minimal C. Dari target 22 Rumah Sakit yang direvitalisasi pada 2025, sebanyak 15 Rumah Sakit telah diselesaikan, sementara 7 Rumah Sakit lainnya diproyeksikan selesai pada awal 2026.

3.3.5. Hilirisasi dan Industrialisasi

Program hilirisasi industri strategis utamanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah domestik dari komoditas unggulan melalui transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Selain berfungsi sebagai instrumen kebijakan industri, program hilirisasi juga merupakan strategi untuk memperluas skala ekonomi melalui peningkatan aktivitas manufaktur dan pengurangan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Program hilirisasi diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di daerah. Dengan kebutuhan investasi yang besar, Pemerintah mendorong peran Danantara dalam mendukung implementasi program hilirisasi.

Proyek hilirisasi industri strategis yang direncanakan meliputi 18 proyek dalam 5 sektor. Pertama, sektor Mineral dan Batu bara meliputi Industri Smelter Aluminium (Bauksit), Industri DME (batu bara), Industri Aspal (Aspal Buton), Industri Mangan Sulfat (Mangan), Industri *Stainless Steel Slab* (Nikel), Industri *Copper Rod, Wire & Tube*, Industri Besi Baja (Pasir Besi), dan Industri *Chemical Grade Alumina*. Kedua, sektor pertanian meliputi Industri Oleoresin

(Pala), Industri Oleofod (Kelapa Sawit), Industri *Nata de Coco*, MCT, dan turunan kelapa lainnya. Ketiga, sektor kelautan dan perikanan meliputi Industri *Chlor Alkali Plant* (Garam), Industri *Fillet* Tilapia dan Industri *Carrageenan* (Rumput Laut). Keempat, sektor ketahanan energi mencakup proyek *Oil Refinery* dan *Oil Storage Tanks*. Kelima, sektor transisi energi meliputi Modul Surya Terintegrasi dan Industri Bioavtur berbasis *Used Cooking Oil*.

Mobil Nasional

Pengembangan Mobil Nasional (Mobnas) merupakan bagian dari strategi industrialisasi dan hilirisasi PKPN untuk memperkuat kemandirian industri otomotif nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Selain itu, substitusi impor kendaraan dan peningkatan kandungan lokal dapat berkontribusi pada peningkatan neraca perdagangan. Namun demikian, perlu menjadi perhatian bagaimana pencapaian skala produksi yang efisien, efektivitas alih teknologi, dapat selanjutnya mendukung produk memiliki daya saing di pasar domestik dan global.

Dalam rangka mendukung proyek ini, direncanakan pembangunan kawasan industri mobnas di Subang, Jawa Barat, dengan luas kawasan sekitar 412 hektare. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada strategi pemanfaatan aset negara yang belum optimal, sekaligus mendukung efisiensi penggunaan lahan publik dalam pengembangan kawasan industri baru. Pada tahun 2026, PKPN Mobil nasional telah menempuh *pre-feasibility study* dan pradesain prototipe. Pendanaan atas proyek Mobnas jangka menengah diharapkan akan didukung oleh Danantara dan swasta. Sementara itu, beberapa kementerian secara koordinatif akan mendukung ekosistem pelaksanaan proyek ini.

Motor Nasional

Program motor nasional berbasis listrik untuk memperkuat kemandirian industri otomotif dan kebutuhan operasional negara. Proyek ini berfokus pada pengembangan dan produksi kendaraan operasional roda dua listrik untuk kebutuhan taktis, dengan PT LEN sebagai pelaksana utama lintas kementerian. Hingga April 2026, proyek telah mencapai distribusi 3.000 unit secara nasional, dengan fase 1 selesai dan fase 2 dalam tahap akhir kontrak. Ini merefleksikan keberhasilan tahap awal dalam menciptakan basis produksi domestik dan validasi operasional produk. Namun, capaian masih berada pada tahap *pilot-scale*, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan skala produksi sehingga dampak ekonominya optimal.

Program motor nasional diharapkan dapat memberi kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut antara lain: substitusi impor (mengurangi ketergantungan kendaraan dan komponen luar negeri), penciptaan nilai tambah domestik (*local content* dan rantai pasok), serta transmisi teknologi ke industri kendaraan listrik nasional. Dalam jangka menengah, kontribusi terhadap PDB manufaktur dan penciptaan tenaga kerja diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Ekosistem Industri Kedirgantaraan

Pengembangan ekosistem kedirgantaraan merupakan upaya strategis untuk mengatasi keterbatasan konektivitas nasional. Program ini diharapkan dapat meningkatkan posisi

Indonesia dalam rantai nilai global. Program akan difokuskan pada transformasi Bandara Kertajati menjadi *Aerospace Park* yang terintegrasi, mencakup pengembangan fasilitas *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO), manufaktur komponen, serta hub logistik dan konektivitas. Tahapan meliputi relokasi dan pengembangan kapasitas GMF AeroAsia, pembangunan hanggar dan fasilitas MRO, hingga pengembangan kawasan industri berbasis *engine* dan komponen pesawat. Target tahun 2026–2029 mencakup pembangunan infrastruktur kunci (hanggar, *taxiway*, *MRO center*) dan penguatan KEK Kertajati.

Hingga 2026, proyek telah memasuki tahap awal pengembangan dengan penyiapan kawasan Kertajati sebagai *aerospace hub* dan perencanaan pembangunan fasilitas MRO. Inisiatif penguatan industri pesawat nasional dan ekosistem pendukung telah berjalan, termasuk kolaborasi lintas kementerian dan BUMN. Namun, capaian masih pada tahap *foundational*, dengan infrastruktur utama dan utilisasi industri belum sepenuhnya terealisasi.

Pengembangan Industri Semikonduktor

Pengembangan industri semikonduktor merupakan agenda strategis untuk menjadikan sektor ini sebagai mesin pertumbuhan baru (*new engine of growth*). Arah kebijakan pemerintah kini fokus pada percepatan penguasaan teknologi melalui penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir. Langkah ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan Nasional Semikonduktor serta pembentukan Satgas khusus untuk mengoordinasikan pengembangan industri ini di tingkat nasional. Salah satu terobosan besar yang telah dilakukan adalah kerjasama strategis antara Danantara dan *Arm Limited* yang bertujuan mencetak 15.000 ahli desain *chip* dan memindahkan pengetahuan teknologi penting ke Indonesia agar memiliki hak kekayaan intelektual (IP) sendiri.

Peta jalan pengembangan Fase 1 (2025–2029) menitikberatkan pada pembangunan fondasi industri, terutama pada bidang desain komponen elektronik dan fasilitas pengemasan *chip*. Pemerintah menargetkan munculnya perusahaan desain *chip* lokal, pembangunan fasilitas pembuatan fisik *chip* skala kecil, serta fasilitas pengemasan dan pengujian akhir *chip*. Untuk itu, Pemerintah menyediakan berbagai dukungan antara lain pembebasan pajak (*tax holiday*), subsidi bunga pinjaman, dan pengurangan pajak hingga 300 persen bagi perusahaan yang melakukan riset dan pelatihan tenaga kerja.

Industri semikonduktor memiliki potensi nilai tambah ekonomi yang tinggi. Semakin tinggi penguasaan pada tahap desain dan pembuatan fisik *chip*, semakin besar keuntungan ekonomi yang diperoleh dibandingkan hanya melakukan perakitan akhir. Dengan menguasai desain, Indonesia tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga penentu spesifikasi produk yang digunakan di dalam negeri. Kekuatan utama Indonesia terletak pada pasar domestik yang sangat luas untuk produk elektronik dan otomotif (termasuk kendaraan listrik), serta ketersediaan bahan baku penting seperti pasir silika, nikel, dan timah. Hal ini membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok global, meningkatkan penggunaan komponen lokal guna menghemat devisa, serta menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi. Melalui pengembangan ekosistem yang berkelanjutan, industri ini diharapkan menjadi solusi bagi Indonesia untuk keluar dari *middle-income trap* menuju Indonesia Emas 2045.

3.3.6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana

Peran strategis klaster Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Program kerja pada klaster ini akan diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang tidak hanya memperkuat konektivitas dan penyediaan hunian layak tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana. Lebih lanjut, penguatan rantai pasok dan industri material konstruksi dalam negeri menjadi fokus penting sebagai fondasi hilirisasi sektor perumahan dan infrastruktur. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, meningkatkan nilai tambah domestik, dan menciptakan *multiplier effect* yang luas bagi perekonomian nasional. Fokus kebijakan ini diharapkan menjaga kontribusi sektor konstruksi pada kisaran 9–10 persen terhadap PDB sekaligus memperluas dampak pengganda terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam jangka menengah, transformasi produktivitas dan digitalisasi konstruksi menjadi pilar utama dalam mendukung PKPN klaster Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana. Strategi ini dilaksanakan melalui modernisasi sektor infrastruktur melalui pengadopsian ekosistem manajemen proyek berbasis digital yang terintegrasi secara *end-to-end*. Fokus ini tidak hanya berhenti pada penggunaan perangkat lunak semata, melainkan merevolusi metode pembangunan konvensional ke arah teknik modular dan *prefabricated construction* yang memungkinkan komponen bangunan diproduksi secara presisi di lingkungan pabrik sebelum dirakit di lokasi.

Program *Giant Sea Wall* (GSW)

Proyek GSW bertujuan melindungi kawasan pesisir dari risiko lingkungan yang meningkat, sekaligus mendukung peningkatan daya saing ekonomi nasional. Kebijakan ini mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim, terutama Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Kawasan Pantura memiliki risiko penurunan muka tanah dengan perkiraan laju 1 hingga 20 sentimeter per tahun. Risiko banjir rob juga semakin sering terjadi dan berdampak luas pada aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, kenaikan muka air laut memperbesar potensi kerugian ekonomi di masa depan. Kawasan ini perlu dilindungi keberlanjutannya karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat strategis dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 38,8 persen dan menampung sekitar 17 juta penduduk. Pembangunan GSW direncanakan meliputi lima provinsi utama, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang seluruhnya memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Rencana proyek ini meliputi pembangunan GSW sepanjang 535 kilometer dalam 20 tahun, terdiri dari tanggul laut, tanggul pantai, dan *breakwater mangrove*.

Pembiayaan proyek ini membutuhkan partisipasi sektor swasta dan BUMN melalui skema KPBU, serta peran Danantara sebagai pengelola investasi strategis nasional. APBN akan difokuskan pada fungsi katalistik dan pengurangan risiko proyek. Dengan demikian, beban fiskal dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, proyek ini memiliki potensi dampak yang signifikan. Dalam jangka panjang, proyek ini melindungi aset ekonomi nasional yang bernilai tinggi dan menekan kerugian akibat banjir rob. Pada tahun 2025 telah terlindungi kawasan seluas 155,39 hektare dari risiko daya rusak air di pesisir utara Jawa. Capaian ini menjadi indikator awal efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan menjadi pijakan bagi akselerasi program ke depan.

Dalam jangka menengah, target pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan pada piloting proyek, yaitu Teluk Jakarta sepanjang 16 km dan kawasan Semarang-Demak-Kendal sepanjang 15 km. Secara kelembagaan, pelaksanaan GSW dikoordinasikan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang bertugas mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian LH, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah terkait. Sinergi antar kementerian dan dengan pemerintah daerah menunjukkan bahwa program ini memiliki kompleksitas tinggi. Keberhasilan GSW tidak hanya bergantung pada pembangunan tanggul di zona pesisir dan laut, tetapi juga mensyaratkan sinkronisasi program zona hulu yang meliputi konservasi DAS, normalisasi sungai utama Pantura, dan penyediaan air baku permukaan sebagai pengganti ekstraksi air tanah.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera

Dalam upaya meningkatkan ketahanan bencana jangka menengah dan sebagai respons atas bencana yang terjadi di Sumatera, Pemerintah akan berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Sebagai respons atas bencana banjir bandang dan tanah longsor Sumatera di akhir tahun 2025, Pemerintah akan berfokus untuk membangun kembali sarana, prasarana, dan sumber penghidupan masyarakat di wilayah terdampak. Rehabilitasi dan rekonstruksi akan difokuskan pada tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (53 Kabupaten/Kota). Adapun kegiatan fisik yang akan dilakukan antara lain pembangunan hunian tetap terpusat, jalan, jembatan, sekolah, lahan pertanian, dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, Pemerintah senantiasa meningkatkan ketahanan bencana di berbagai aspek termasuk upaya mitigasi bencana, penanganan kedaruratan, respons pascabencana, peningkatan tata kelola, serta pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, adapun kebijakan penanggulangan bencana difokuskan untuk: (i) penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; (ii) peningkatan sinergi antarkementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana; (iii) penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan; (iv) penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel; (v) peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal; dan (vi) percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dari segi pembiayaan bencana, Pemerintah mendorong implementasi strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB) secara efektif dan efisien.

Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng menjadi Genteng

Gerakan Aman, Sehat, Resik dan Indah (ASRI) diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, melalui penggantian atap seng menjadi genteng yang lebih sehat, tahan lama, dan sesuai standar. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah tidak layak huni, tetapi juga mencakup penataan kawasan permukiman, khususnya di wilayah padat dan kumuh, guna menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak dan berkelanjutan. Urgensi pelaksanaan Gerakan ASRI untuk penggantian atap seng menjadi

genteng didasarkan pada kebutuhan peningkatan kualitas atap sebagai satu kesatuan dari program perbaikan rumah tidak layak huni, termasuk dalam kerangka program 3 juta rumah. Selain itu, perbaikan atap juga berkontribusi terhadap peningkatan estetika kawasan permukiman dan kualitas hunian secara keseluruhan, sehingga mendukung terbentuknya lingkungan yang lebih sehat dan tertata.

Pelaksanaan program dirancang secara terintegrasi dengan program nasional lainnya, seperti BSPS dan FLPP, guna memastikan peningkatan kualitas hunian secara menyeluruh. Kebijakan ini juga mencakup dukungan terhadap program daerah dalam penanganan rumah tidak layak huni serta peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Selanjutnya, strategi implementasi mencakup industrialisasi perumahan berbasis bahan lokal dengan penguatan rantai pasok genteng melalui pelibatan UMKM dan koperasi. Di samping itu, pengembangan skema pembiayaan perumahan juga menjadi fokus, baik untuk pembangunan maupun perbaikan rumah, dengan tetap mengedepankan prinsip bangunan gedung hijau serta skema pembiayaan berbasis koperasi untuk memperluas akses masyarakat.

Dari sisi dampak ekonomi, Gerakan ASRI memiliki potensi untuk menciptakan efek pengganda yang signifikan terhadap material konstruksi domestik. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri genteng lokal, memperkuat peran UMKM, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan manufaktur. Selain itu, peningkatan kualitas hunian juga berkontribusi terhadap penurunan risiko kesehatan masyarakat, yang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen kunci dalam keberhasilan program ini. Program ini rencananya akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya. Selain itu, partisipasi sektor swasta melalui skema CSR dalam penyediaan material, pembiayaan, dan bantuan teknis diharapkan dapat mendukung program ini.

Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah

Pengelolaan sampah saat ini mengalami tantangan yang kompleks dengan jumlah timbulan sampah yang sangat besar. Total timbulan sampah nasional pada tahun 2025 mencapai lebih dari 28,0 juta ton per tahun (berdasarkan data SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup), di mana sekitar 65,9 persen di antaranya belum terkelola dengan baik dan sebanyak 7,8 juta ton/tahun berakhir di TPA *open dumping*. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah melaksanakan Gerakan Indonesia Aman Sehat Resik Indah (ASRI) sebagai instrumen strategis melalui pengendalian sampah secara terpadu. Hingga April 2026 Gerakan ASRI telah berhasil menggerakkan 279.140 partisipan di 135 kabupaten/kota dan mengelola 1062,06 ton sampah.

Gerakan ASRI jangka menengah ditargetkan untuk diikuti oleh 514 kabupaten/kota dan akan difokuskan pada penguatan empat cakupan kegiatan pengendalian sampah terpadu di masing-masing daerah. Cakupan kegiatan dilakukan dengan pengaktifan kembali gerakan

Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), revitalisasi budaya kerja bakti (korve) terjadwal untuk menjamin kebersihan lingkungan yang berkelanjutan, optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penguatan infrastruktur TPS3R, dan pengendalian limbah berbahaya (B3). Melalui peta jalan ini, Gerakan ASRI diproyeksikan mampu mentransformasi perilaku partisipasi jutaan warga menjadi sebuah ekosistem manajemen sampah yang mandiri, terstandardisasi, dan terintegrasi secara nasional, guna mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan asri.

Gerakan ASRI: Penghijauan

Program penghijauan merupakan upaya strategis untuk memulihkan kualitas lingkungan dan meningkatkan ketahanan air, dengan cara merehabilitasi lahan kritis serta konservasi tanah dan air. Program ini dilakukan secara kolaboratif guna mengurangi risiko banjir dan kekeringan serta mendukung peningkatan produktivitas lahan dan kesejahteraan Masyarakat. Program penghijauan ini ditujukan untuk mengatasi lahan kritis yang luas yang saat ini berjumlah sekitar 12,7 juta hektare yang telah menyebabkan turunnya fungsi tata Kelola air, menurunkan produktivitas lahan, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan, menurunkan sumber mata air dimana terdapat banyak mata air yang hilang atau debitnya menurun secara signifikan dan berkurangnya tutupan lahan.

Program penghijauan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian serta Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air melalui perbaikan fungsi resapan dan stabilitas debit air sepanjang tahun, menurunkan Risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah, memulihkan fungsi lahan kritis sehingga lebih produktif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk udara yang lebih bersih dan suhu yang lebih stabil, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui manfaat ekonomi dari hasil tanaman dan jasa lingkungan.

Program 3 Juta Rumah

Program 3 juta rumah diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui pendekatan pembangunan dan peningkatan kualitas hunian secara masif. Program ini dilakukan dengan pembangunan rumah baru serta perbaikan atau renovasi rumah di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Penerima manfaat utama program ini adalah MBR, termasuk masyarakat miskin dan rentan. Urgensi pelaksanaan program ini didasarkan pada masih besarnya kesenjangan kepemilikan dan kualitas hunian di masyarakat, khususnya pada kelompok MBR. Segmen MBR pada desil 1–4 (masyarakat miskin dan rentan) tercatat sebagai kelompok terbesar yang belum memiliki rumah. Implementasi program didukung oleh sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha, dengan penguatan ekosistem perumahan melalui pengembangan pembiayaan, penyediaan perumahan vertikal, dan integrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

APBN mendukung program 3 juta rumah melalui berbagai skema subsidi, insentif, dan pembiayaan investasi. Skema pendanaan untuk MBR antara lain Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau lebih dikenal sebagai KPR Subsidi, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Untuk masyarakat non-MBR, APBN memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti. Selain itu,

Pemerintah juga memperkenalkan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan bunga murah. Program 3 juta rumah juga didukung oleh APBD dan sumber-sumber yang lain, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemerintah berkomitmen untuk akselerasi pencapaian target pembangunan 3 juta rumah melalui penguatan kebijakan strategis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dukungan APBN 2025 senilai Rp45,4 triliun hanya mampu menyediakan 335,2 ribu unit rumah, termasuk 279 ribu unit rumah FLPP dari target 350 ribu unit. Rata-rata realisasi tahunan FLPP dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 223 ribu unit. Fakta ini mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan dalam upaya akselerasi pencapaian target 3 juta rumah. Terobosan tersebut dilakukan melalui intervensi pada sisi permintaan, penawaran, dan pembiayaan. Intervensi-intervensi tersebut tidak hanya bertujuan memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat, tetapi juga memastikan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dari sisi permintaan, Pemerintah perlu menyediakan program perumahan yang mampu memenuhi kebutuhan dan minat seluruh lapisan masyarakat. Mayoritas MBR penerima manfaat FLPP di 2024-2025 adalah masyarakat berpenghasilan Rp4-8 juta per bulan (65,5 persen). Sementara hanya 32 persen masyarakat berpendapatan di bawah Rp4 juta dan 2,5 persen MBR dengan penghasilan Rp8-14 juta yang memanfaatkan FLPP. Rendahnya minat MBR berpenghasilan Rp8-14 juta per bulan untuk membeli rumah FLPP dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi, akses, dan tipe/harga rumah yang berbeda dengan kebutuhan dan minat mereka. Sementara untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta per bulan, selain faktor daya beli, terdapat isu kelayakan kredit (*bankability*), khususnya untuk pekerja informal. Untuk menarik minat MBR berpenghasilan Rp8-14 juta per bulan, Pemerintah dapat memperkenalkan: (i) skema KPR campuran subsidi dan komersial; (ii) penyesuaian bunga KPR FLPP dan batas atas harga rumah subsidi; dan (iii) perluasan KPR Subsidi untuk rumah susun (rusun). Pemerintah dapat pula menaikkan batas atas harga rumah nasional dan membedakan suku bunga KPR FLPP berdasarkan penghasilan MBR atau harga rumah, agar skema FLPP menjadi lebih menarik dan berkeadilan. Untuk menjawab isu daya beli dan isu kelayakan kredit, Pemerintah dapat memperkenalkan skema kepemilikan bersama hunian antara Pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat pula memperkenalkan skema sewa beli yang memungkinkan masyarakat menyewa hunian dalam jangka waktu tertentu, dengan opsi untuk membelinya di akhir masa sewa.

Untuk mendorong sisi penawaran, Pemerintah memperkenalkan Kredit Program Perumahan (KPP) dan menaikkan batas atas harga dan tipe rumah yang menggunakan skema FLPP, termasuk mendorong hunian rumah susun (rusun). KPP membantu pengembang skala kecil untuk mendapatkan modal dengan suku bunga murah seperti bunga KUR. KPP juga membantu UMKM untuk memiliki atau merenovasi bangunan untuk tempat tinggal dan usaha dengan pembiayaan bunga murah. Di sisi lain, kenaikan batas atas harga rumah tapak dan rusun FLPP akan membantu tersedianya hunian dengan variasi harga dan tipe yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Kebijakan ini juga akan membantu menyerap pasokan hunian yang telah ada.

Di sisi pembiayaan, Pemerintah perlu mengembangkan diversifikasi pembiayaan non-APBN untuk mendorong pendanaan perumahan berkelanjutan. Opsi-opsi untuk terobosan pembiayaan adalah: (i) sekuritisasi piutang FLPP menjadi produk surat utang dalam bentuk

Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP); (ii) peningkatan kapasitas *leveraging* PT Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF); (iii) pembiayaan perumahan dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU); dan (iv) pembiayaan perumahan ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Penguatan Konektivitas melalui Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional merupakan salah satu kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang efisien, andal, dan terjangkau. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konektivitas, tetapi juga sebagai pengungkit utama dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan wilayah tertinggal. Kebijakan ini bertujuan untuk mentransformasi ekosistem perkeretaapian nasional melalui integrasi layanan penumpang dan logistik dalam satu sistem yang saling terhubung. Dengan pendekatan tersebut, jaringan kereta api diharapkan mampu menjadi tulang punggung mobilitas nasional yang mendukung pergerakan orang dan barang secara lebih efisien dibandingkan moda transportasi berbasis jalan.

Implementasi kebijakan dilakukan melalui empat klaster utama yang menjadi pilar pengembangan sektor perkeretaapian. Klaster pertama adalah revitalisasi dan akselerasi kereta api perkotaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan di wilayah metropolitan. Klaster kedua adalah pengembangan kereta api antarkota dan regional untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Klaster ketiga berfokus pada pengembangan kereta api logistik guna meningkatkan efisiensi distribusi barang. Terakhir, klaster keempat mencakup transformasi tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan skema pendanaan guna menciptakan ekosistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Urgensi pengembangan jaringan kereta api nasional semakin menguat seiring dengan arah kebijakan yang mendorong pemakaian transportasi publik. Penggunaan transportasi kereta api diharapkan dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Daya saing kereta api barang juga masih perlu peningkatan. Selain itu, perlu peningkatan keselamatan dan keandalan layanan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan operasional.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah target pengembangan jaringan kereta api yang terukur dalam periode 2026–2029. Target tersebut meliputi peningkatan dan perluasan layanan kereta api di wilayah Jabodetabek pada periode 2026–2027, pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Jawa dengan konsep jalur layang (*elevated track*) pada 2028–2029, serta pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa pada rentang waktu 2026–2029. Program-program tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif oleh Kementerian Perhubungan bersama PT KAI sebagai operator utama. Kebijakan pengembangan jaringan kereta api nasional diharapkan mampu menjadi katalis utama transformasi sistem transportasi Indonesia menuju arah yang efisien, andal, dan lebih terjangkau, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3.3.7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa

Pembangunan ekonomi kerakyatan dan desa dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) dan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Pembentukan KD/KMP akan mendorong ekonomi kerakyatan dan desa melalui

penyediaan kebutuhan pokok dan layanan bagi masyarakat, rantai distribusi yang diperpendek agar barang lebih mudah dan murah diakses masyarakat, serta dukungan pengembangan usaha masyarakat. Sejak peluncuran program KD/KMP pada bulan Juli 2025, 1,5 juta masyarakat desa/kelurahan telah menjadi anggota KD/KMP dan telah dipetakan 23.065 titik pembangunan fisik pada akhir Desember 2025.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sebanyak 80.000 KD/KMP ditargetkan terbangun di desa/kelurahan seluruh Indonesia, dengan target pertumbuhan volume usaha sebesar 10 persen hingga tahun 2029. Untuk mendorong program KD/KMP dan mengatasi beberapa tantangan seperti kurangnya minat dan partisipasi masyarakat, kurangnya kemampuan KD/KMP mengembangkan potensi desa/kelurahan, ketersediaan stok barang yang belum terjaga, serta keterbatasan lahan, pemerintah memiliki strategi: (i) peningkatan literasi perkoperasian serta penguatan kelembagaan dan SDM; (ii) penguatan pendampingan KD/KMP serta pemetaan dan optimalisasi potensi desa/kelurahan; (iii) penambahan produksi bahan baku secara desentralisasi dan penguatan KD/KMP sebagai koperasi produksi; dan (iv) penyesuaian skema pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah, termasuk revitalisasi dan optimalisasi aset pusat/daerah.

Program Percepatan Pembangunan Daerah 3T

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan Program Percepatan Pembangunan Daerah 3T untuk mengakselerasi ketersediaan infrastruktur dasar di wilayah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang masih menunjukkan keterbatasan yang sangat signifikan. Program ini dilakukan dengan latar belakang kondisi pembangunan di wilayah 3T masih terhambat oleh kondisi geografis ekstrem, keterbatasan anggaran serta SDM, hingga rendahnya minat investasi swasta yang mengakibatkan biaya pembangunan menjadi sangat tinggi. Fokus pembangunan ini mencakup penyediaan sarana vital mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan guna mengatasi ketertinggalan kualitas dan aksesibilitas masyarakat setempat.

Target utama program ini mencakup 431 desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal yang tersebar di 17 daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Melalui intervensi ini, pemerintah mengharapkan *outcome* nyata berupa peningkatan pemenuhan layanan serta pembangunan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas, hingga pengembangan ekonomi lokal yang berketahanan iklim serta tangguh bencana. Dalam jangka menengah, sasaran strategisnya adalah mengakselerasi transformasi daerah-daerah tersebut agar mampu naik kelas menjadi daerah berkembang atau maju.

3.3.8. Penurunan Kemiskinan

Strategi penurunan kemiskinan berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menjalankan strategi tersebut. DTSEN dalam strategi penurunan kemiskinan menjadi faktor krusial agar strategi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat terutama melalui program perlinsos. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan terjaganya realisasi anggaran perlinsos pada kisaran 2,2 persen PDB selama 2021-2025. Program perlinsos reguler diberikan untuk mengatasi berbagai risiko dan kerentanan masyarakat miskin dan rentan, dengan capaian pada 2025 antara lain: (i) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dengan realisasi Rp28,8 triliun; (ii) kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan realisasi Rp44,4 triliun; (iii) Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) untuk 96,9 juta jiwa dengan realisasi Rp46,3 triliun; (iv) Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) untuk 33,2 juta KPM desil 1-4 sebesar Rp29,9 triliun; (v) Subsidi LPG sebesar Rp82,9 triliun; (vi) Subsidi listrik sebesar Rp81,0 triliun; dan (vii) Subsidi Pupuk sebesar Rp32,7 triliun.

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat ditempuh melalui program pemberdayaan untuk berusaha dan masuk ke pasar kerja. Salah satunya adalah Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang ditujukan untuk mengakselerasi graduasi kemiskinan dan memberikan dukungan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberian tambahan modal dan pendampingan usaha. Pada 2025, program PPSE telah diterima oleh 10.270 penerima manfaat. Bagi pelaku usaha mikro level terbawah yang belum terjangkau layanan perbankan, pembiayaan Ultra Mikro berperan menyediakan akses modal kerja untuk memperkuat fondasi usaha dan mendorong transformasi mereka menjadi wirausahawan mandiri. Pada 2025, penyaluran UMi telah mencapai Rp12,2 triliun yang disalurkan kepada 2,2 juta nasabah. Keberlanjutan ekonomi wirausaha mandiri diperkuat dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memfasilitasi UMK produktif yang layak melalui dukungan subsidi bunga pemerintah guna mengatasi kendala keterbatasan agunan tambahan. Hingga akhir 2025, program KUR telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp270 triliun kepada 4,5 juta debitur dan berhasil mendorong 1,54 juta debitur untuk graduasi ke pembiayaan komersial.

Upaya penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan masih menghadapi beberapa tantangan. Dari aspek tata kelola, program perlinsos yang tersebar di beberapa K/L belum terintegrasi sehingga komplementaritas program belum optimal dan berpotensi adanya tumpang tindih. Dari aspek ketepatan sasaran, masih terdapat masyarakat kelompok desil bawah yang berhak menerima, tetapi sama sekali tidak menerima bantuan. Adapun dari aspek kecukupan, rasio manfaat terhadap pengeluaran rumah tangga cenderung menurun. Selain itu, nilai manfaat bansos yang seragam masih kurang mencerminkan variasi biaya kebutuhan hidup di berbagai daerah. Sementara itu, pelaksanaan program pemberdayaan belum memiliki standar kualitas yang memadai untuk mendukung graduasi dari kemiskinan dan menjaga kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam jangka menengah, upaya penurunan kemiskinan diwujudkan dalam kerangka Program Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA). Program PRO-KESRA dilaksanakan melalui dua program utama, yaitu melalui PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja. PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi menyinergikan program bantuan sosial (bansos) utama agar lebih tepat sasaran dan dapat saling melengkapi. Program PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja ditujukan untuk memberikan dukungan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi

Strategi PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi ditempuh melalui peningkatan ketepatan sasaran program, penerapan skema graduasi, serta peningkatan kualitas desain program bantuan sosial. Program PKH dan Kartu Sembako diprioritaskan untuk rumah tangga desil 1-2, sementara PIP dan PBI-JKN untuk desil 1-4. Ketepatan sasaran ditingkatkan melalui pensasaran berbasis DTSEN untuk mengurangi *inclusion error* maupun *exclusion error*. Pemerintah juga mendorong skema graduasi melalui paradigma pemberian bantuan sosial secara sementara sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada program bantuan sosial dan secara paralel dapat diprioritaskan mendapatkan program pemberdayaan ekonomi. PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi menargetkan penurunan kemiskinan 2-3 juta per tahun melalui penyaluran bantuan keluarga dan pangan kepada 10 juta KPM PKH dan 18 juta KPM Kartu Sembako; Bantuan Pendidikan dan Kesehatan kepada 22,13 juta siswa penerima PIP dan 96,8 juta jiwa penerima PBI-JK; serta Bantuan Energi kepada 87 juta pelanggan penerima subsidi listrik serta 66,4 juta pelanggan penerima subsidi LPG pada 2029.

PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja

Program PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja difokuskan pada pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin yang siap untuk graduasi. Program ini bertujuan untuk mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan dan memperkuat kemandirian sosial ekonomi melalui kemudahan akses program pemberdayaan. Sinergi intervensi diwujudkan melalui pengintegrasian jaring pengaman sosial dengan akses pembiayaan yang inklusif serta pendampingan wirausaha secara berkelanjutan. Hal ini salah satunya dilakukan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PPSE dan UMi. Penerima bansos yang memiliki potensi berwirausaha difasilitasi untuk mengembangkan usaha melalui penguatan kapasitas kewirausahaan serta akses terhadap permodalan dan pasar melalui sinergi dengan program Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi berperan menyediakan modal kerja bagi pelaku usaha mikro level terbawah yang belum terjangkau perbankan. Strategi pembiayaan tersebut diperkuat dengan Kartu Usaha Afirmatif (KUA) sebagai instrumen kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan pada kelompok desil 1-4 guna meningkatkan kemandirian mereka dalam bekerja maupun berusaha. Hingga tahun 2029, Pemerintah menargetkan 10 juta penduduk yang menerima KUA telah memiliki usaha atau bekerja. Selain itu, tata kelola UMKM ditargetkan meningkat dengan 6,3 persen usaha memiliki pembukuan lengkap atau telah menjadi badan hukum sehingga dapat lebih mudah memperoleh akses permodalan.

Program perlinsos lainnya yang belum tercakup dalam PRO-KESRA terus dioptimalkan untuk memperkuat perlinsos sepanjang hayat, khususnya bagi masyarakat rentan. Selain lebih fokus untuk meningkatkan kualitas SDM melalui PKH, perlinsos juga diarahkan untuk lebih memperluas cakupan sasaran kepada masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal. Pemerintah juga mendorong program jaminan sosial untuk memperluas perlindungan kepada masyarakat di masa tua dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Selain itu, di tengah meningkatnya risiko bencana alam, perubahan iklim, dan ketidakpastian global, perlinsos perlu didesain lebih adaptif agar mampu merespons secara cepat dan efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak krisis atau bencana.

3.3.9. Klaster Pendukung (*Enabler*)

Untuk memastikan implementasi program-program kerja berjalan secara efektif dan optimal, diperlukan penguatan yang menyeluruh di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Penguatan berbagai aspek fundamental tersebut menjadi fondasi utama yang akan diwujudkan melalui empat program kerja.

Pertama, pengembangan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai tulang punggung infrastruktur pemerintahan digital. PDN dirancang untuk mendukung pengelolaan, penyimpanan, dan integrasi data pemerintah secara terpusat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat proses pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Kedua, pemberantasan judi *online*. Program ini memiliki tingkat urgensi tinggi. Aktivitas ini menimbulkan dampak signifikan berupa kerugian ekonomi, gangguan sosial dan kesehatan mental masyarakat, serta ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan digital nasional. Oleh karena itu, penanganan judi *online* menjadi bagian penting dalam upaya penataan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

Ketiga, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN). Program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem sosial yang bersih dari narkoba guna melindungi potensi sumber daya manusia Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi. Pelaksanaannya dilakukan secara holistik dan terintegrasi melalui sinergi antara upaya pencegahan dan rehabilitasi, pemberantasan dan penegakan hukum, serta pemanfaatan intelijen dan teknologi.

Keempat, pemberantasan penyelundupan yang diarahkan untuk memberikan perlindungan dan dukungan optimal bagi perekonomian nasional dan masyarakat. Upaya ini juga bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga turut mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.4. Strategi Kebijakan Jangka Menengah

3.4.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Perekonomian Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sekitar 5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2025 sebesar 5,11 persen, dengan dukungan utama dari permintaan domestik yang tetap kuat, pemulihan investasi, serta stabilitas sistem keuangan. Pemerintah yang berupaya terus menjaga ruang fiskal agar tetap sehat, termasuk dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah batas 3 persen PDB sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga meskipun terdapat tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Selain itu, diperkirakan investasi akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, di mana untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi, terutama di sektor manufaktur dan sektor produktif lainnya.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi pada periode 2026–2029 diproyeksikan meningkat secara bertahap, dari sekitar 5,4 persen pada 2026 menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menuju 8 persen pada tahun 2029. Akselerasi pertumbuhan ini

diharapkan didorong oleh transformasi struktural ekonomi melalui penguatan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan produktivitas industri dan jasa. Strategi tersebut juga didukung oleh upaya deregulasi dan *debottlenecking* untuk memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi, sehingga dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi juga menunjukkan tren positif, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan kuat karena Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi yang dilakukan melalui penguatan peran lembaga investasi nasional seperti Danantara Indonesia. Danantara akan berfungsi sebagai platform untuk mengkonsolidasikan aset BUMN yang diharapkan dapat menarik investasi global guna mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan sektor strategis. Danantara sendiri menargetkan penyaluran investasi pada tahun 2026, termasuk didalamnya untuk membiayai proyek hilirisasi sumber daya alam, energi, dan industri bernilai tambah tinggi yang diharapkan dapat memperkuat basis industri nasional. Dengan dukungan kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas, reformasi struktural yang berkelanjutan, serta penguatan peran investasi dan sektor swasta, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diharapkan tetap kuat dan mampu mendorong transformasi ekonomi.

Pemerintah akan terus menjaga inflasi tetap rendah dan stabil dalam jangka menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam kisaran 1,5 – 3,5 persen guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan bagi kelompok rentan serta mengelola kebijakan harga energi secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan tekanan pada inflasi *administered prices*. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi fokus utama melalui kombinasi langkah stabilisasi harga jangka pendek dan upaya jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pasokan pangan. Selain itu, penguatan komunikasi publik dan sinergi kebijakan melalui koordinasi TPIP dan TPID terus dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau dan memastikan pengendalian inflasi yang efektif di tingkat nasional maupun daerah.

Nilai tukar mencerminkan kondisi fundamental dan mekanisme pasar dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas nilai tukar rupiah turut menciptakan kepastian usaha dan memperkuat daya saing perekonomian nasional. Dari sisi eksternal, stabilitas ini didukung oleh prospek neraca pembayaran yang tetap terjaga, seiring penguatan ekspor bernilai tambah, arus masuk investasi, serta pengelolaan aliran modal yang adaptif di tengah dinamika global, termasuk volatilitas pasar keuangan dan arah kebijakan suku bunga global. Dari sisi domestik, penguatan sektor riil melalui hilirisasi serta pendalaman sektor keuangan melalui pengembangan instrumen, penyempurnaan regulasi, dan penguatan infrastruktur terus dilakukan. Secara keseluruhan, sinergi kebijakan tersebut memberikan fondasi yang kokoh bagi stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka menengah.

Sejalan dengan itu, perkembangan suku bunga SBN tenor 10 tahun dalam jangka menengah diperkirakan tetap terjaga. Hal ini mencerminkan persepsi risiko yang semakin

baik, didukung oleh pengelolaan fiskal yang *prudent*, defisit anggaran yang terkendali, serta strategi pembiayaan yang hati-hati dan terdiversifikasi. Stabilitas inflasi dan penguatan permintaan investor domestik juga berperan penting dalam menjaga efisiensi biaya pembiayaan. Di sisi eksternal, dinamika suku bunga global, khususnya obligasi pemerintah Amerika Serikat, tetap menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SBN. Namun, dengan fundamental ekonomi domestik yang solid, pendalaman pasar keuangan, serta penguatan basis investor dalam negeri, tekanan eksternal tersebut dapat dikelola dengan baik. Dengan demikian, suku bunga SBN yang stabil dan lebih efisien diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fiskal dan pembiayaan pembangunan dalam jangka menengah.

Sementara itu, proyeksi harga minyak mentah ICP dalam jangka menengah diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan pasokan energi global serta perkembangan geopolitik. Pertumbuhan ekonomi global yang cenderung moderat di tengah meningkatnya fragmentasi perdagangan, ketidakpastian geopolitik, dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi permintaan dan stabilitas pasokan energi dunia. Ketegangan geopolitik tersebut turut meningkatkan volatilitas harga minyak global, terutama melalui potensi gangguan terhadap jalur distribusi dan produksi energi. Di sisi lain, percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih dan peningkatan penggunaan energi terbarukan diperkirakan secara bertahap menahan pertumbuhan permintaan minyak mentah dalam jangka menengah. Perkembangan pasokan minyak global, termasuk kebijakan pengaturan produksi oleh negara-negara produsen utama serta peningkatan kapasitas produksi di sejumlah kawasan, juga turut memengaruhi pergerakan harga minyak dunia dan domestik.

Proyeksi *lifting* migas jangka menengah ditentukan oleh kemampuan menjaga tingkat produksi lapangan existing di tengah penurunan alamiah dan keberhasilan penambahan produksi baru melalui investasi hulu migas. Dalam jangka menengah, *lifting* minyak dan gas bumi diproyeksikan meningkat secara bertahap, seiring dengan mulai beroperasinya proyek-proyek hulu migas baru serta meningkatnya aktivitas eksplorasi dan pengembangan. Kinerja *lifting* dalam jangka menengah ditentukan oleh beberapa faktor kunci, antara lain keberhasilan kegiatan eksplorasi dan pengembangan, percepatan penyelesaian dan implementasi *Plan of Development* (POD) hingga tahap *on-stream*, serta penerapan teknologi peningkatan produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) untuk meningkatkan tingkat perolehan. Selain itu, dukungan kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian berusaha, serta keberlanjutan investasi migas melalui kebijakan fiskal yang kompetitif dan menarik bagi investor, menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik investasi untuk mendukung penambahan kapasitas produksi nasional. Selain itu, kesiapan infrastruktur produksi dan efisiensi operasional juga berperan penting dalam berkontribusi menjaga kesinambungan produksi. Dengan demikian, proyeksi *lifting* migas dalam jangka menengah pada dasarnya ditentukan oleh keseimbangan antara laju penurunan alamiah lapangan eksisting dan keberhasilan upaya penambahan produksi baru melalui investasi dan pengembangan lapangan.

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

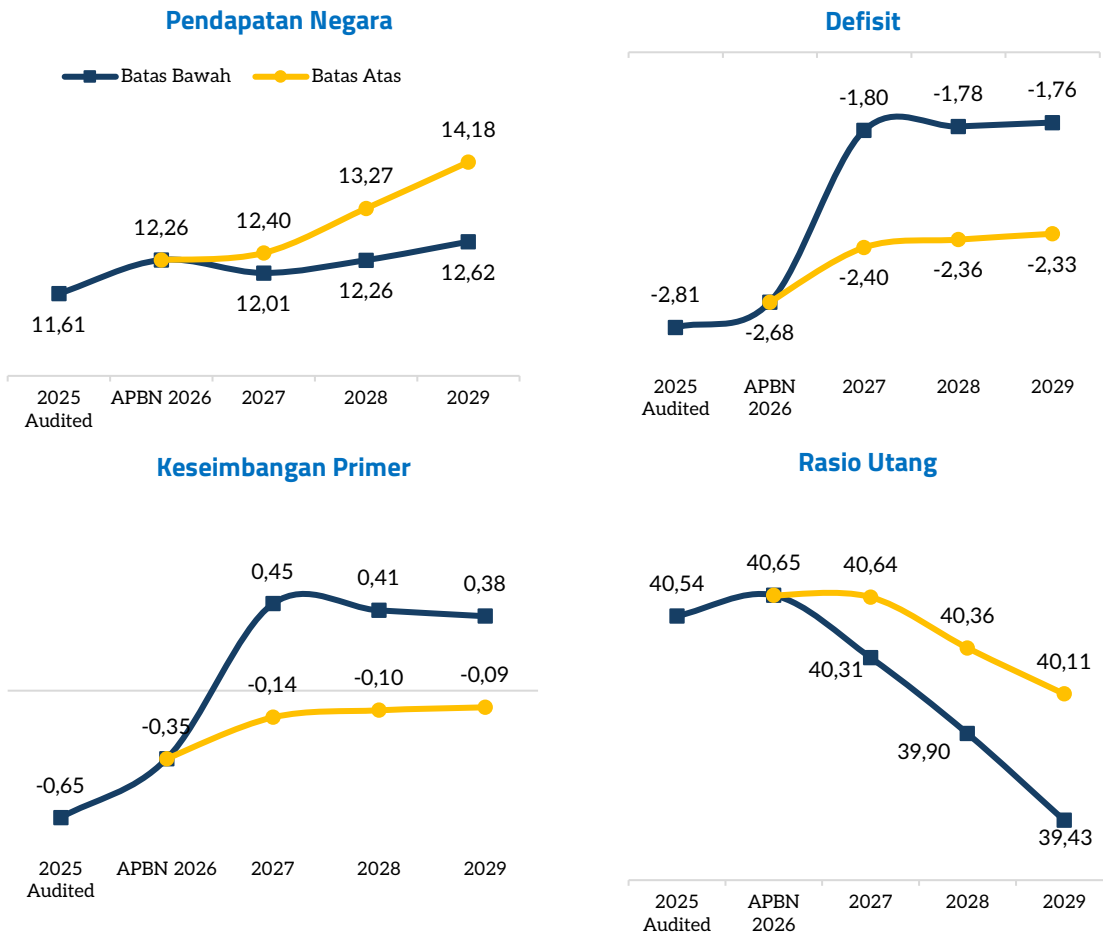
Indikator	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF Pemutakhiran	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,8 – 6,5	5,9 – 7,5	6,0 – 8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500	16.800 - 17.500	16.800 - 17.500	16.800 - 17.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9	6,5 – 7,3	5,9 – 6,9	5,9 – 6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	70	70 – 95	70-90	70-90
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (rbph)	610	605 - 620	585 – 677	602 - 797
<i>Lifting</i> Gas Bumi (rbsmph)	984	951 - 990	956 – 1.102	1.076 - 1.372

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

3.4.2. Makro Fiskal Jangka Menengah

Dengan mencermati perkembangan terkini dan prospek perekonomian kedepan serta arah pembangunan jangka menengah, maka Pemerintah menyusun strategi fiskal yang terefleksi pada postur makro fiskal jangka menengah. Penyusunan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah didesain agar kebijakan fiskal mampu mendukung agenda pembangunan secara optimal dengan tetap menjaga berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut upaya mendorong agar kebijakan fiskal kredibel dan *sustainable* ditempuh melalui optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, serta peningkatan kualitas belanja agar semakin produktif, tepat sasaran, dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Pada saat yang sama, pengelolaan defisit dan pembiayaan harus dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan efisien, dengan mengedepankan pengendalian risiko fiskal, pendalaman sumber pembiayaan yang berkelanjutan, serta pengelolaan utang secara *prudent* untuk menjaga kepercayaan pasar dan ruang fiskal jangka menengah. Kebijakan fiskal juga perlu diarahkan untuk memperkuat daya tahan APBN terhadap gejolak, meningkatkan efektivitas sinergi pusat dan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan masyarakat, dan transformasi struktural secara konsisten.

Grafik 22. Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

3.4.3. Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indonesia berkomitmen menjaga agenda pembangunan untuk terus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan harus mengedepankan tata kelola yang lebih *prudent* dan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal. Pembangunan juga akan diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki daya ungkit tinggi dengan tetap menjaga belanja negara dalam tingkat yang aman dengan tetap berpegang pada pencapaian sasaran nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan nasional tetap dijaga agar sasaran pembangunan nasional tercapai. Pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka konsisten turun menjadi 4,00–4,71 persen di 2029. Pemerintah akan mengarahkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif yang tercermin dengan target Rasio Gini di 2029 turun ke angka 0,372–0,375 dan peningkatan proporsi pekerja formal di level 46,00 di 2029. Pertumbuhan ekonomi dengan kualitas yang baik juga menargetkan tingkat kemiskinan turun ke level 4,5–5,0 persen di 2029. Kehadiran Pemerintah dalam berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat dan didukung oleh integrasi data dengan adanya data tunggal sosial ekonomi sangat krusial. Hal tersebut tentunya perlu dibarengi dengan menjaga ketepatan sasaran program-program bantuan sosial Pemerintah.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan transformasi jangka panjang melalui penguatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai basis utama. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dilakukan secara bertahap melalui perluasan program peningkatan kualitas SDM serta peningkatan standar hidup layak. Fokus kebijakan Pemerintah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. Untuk itu, pembangunan SDM ini ditargetkan akan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,61 di 2029. Target pembangunan SDM akan memastikan bahwa daya saing SDM Indonesia meningkat dan mampu menjawab tantangan industri dan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indikator	2026	2027	2029
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0 – 0,5	0,0	0,0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	6,0 – 6,5	4,5 – 5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	4,30 – 4,87	4,00 – 4,71
Rasio Gini (Indeks)	0,377 – 0,380	0,362 – 0,367	0,372–0,375
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57	0,575	0,61
Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	0,7731	0,8038	0,8599
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,00	40,81	46,00

Sumber : Bappenas, 2026

3.5. Penguatan Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Pengembangan sektor keuangan jangka menengah diarahkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sektor keuangan perlu terus dilakukan agar mampu menyediakan pembiayaan yang lebih besar, lebih murah, dan lebih beragam melalui perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, maupun instrumen keuangan lainnya. Indikator capaian pengembangan sektor keuangan tahun 2029 adalah meningkatnya skala industri keuangan terhadap perekonomian nasional. Total aset perbankan ditargetkan mencapai 77,2 persen PDB, total aset dana pensiun sebesar 11,2 persen PDB, total aset asuransi sebesar 10,5 persen PDB, serta kapitalisasi pasar modal sebesar 68 persen PDB.

Selain mendorong pembiayaan, sektor keuangan juga diharapkan semakin berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Setelah mampu menyerap sekitar 1,65 juta tenaga kerja pada tahun 2025, penguatan sektor keuangan ke depan diarahkan mampu membuka peluang kerja baru, khususnya melalui digitalisasi keuangan, perluasan inklusi keuangan, dan pengembangan ekosistem keuangan yang lebih inovatif. Kebijakan sektor keuangan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor keuangan yang sehat, dalam, inklusif, dan berdaya saing akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperluas akses pembiayaan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Penguatan sektor keuangan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai *enabler* bagi transformasi sektor riil. Melalui penguatan fungsi intermediasi, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan industri keuangan non-bank, sektor keuangan diharapkan mampu memperluas akses permodalan bagi dunia usaha, rumah tangga, dan proyek-proyek produktif yang menjadi motor pertumbuhan nasional. Dengan demikian, sektor keuangan dapat berkembang dan tumbuh untuk mendorong penciptaan industri baru, peningkatan produktivitas, dan perluasan basis pertumbuhan ekonomi.

Penguatan Pasar Modal

Pasar modal perlu terus didorong agar mampu menjadi tempat penghimpunan dana, dan ekosistem pembiayaan jangka panjang yang kredibel, efisien, dan mampu mendukung ekspansi sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, pengembangan pasar modal perlu dilakukan secara terkoordinasi dari sisi emiten, infrastruktur pasar, maupun investor. Pasar modal yang lebih dalam, likuid, transparan, dan inklusif akan memperkuat daya tahan sektor keuangan, memperluas alternatif pembiayaan selain perbankan, serta mendukung penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Penguatan Perbankan

Dominasi sektor perbankan memegang peran penting sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui fungsi utamanya sebagai penyalur dana dari masyarakat kepada sektor produktif, perbankan berperan dalam memperlancar arus modal dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Kinerja perbankan yang sehat dan stabil juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya sistem keuangan yang kuat dan berdaya saing. Selain itu, dukungan perbankan terhadap pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut memperluas kesempatan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan Dana Pensiun

Salah satu arah kebijakan industri dana pensiun adalah memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Pemerintah terus mendorong optimalisasi peran industri dana pensiun untuk memperkuat fungsi perlindungan sosial sebagai instrumen utama dalam mengurangi risiko kerentanan ekonomi pada usia lanjut serta menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sekaligus untuk memperkuat kontribusi dana pensiun dalam pendalaman pasar keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dominasi aset pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, dengan total aset mencapai Rp787,47 triliun, mencerminkan peran penting program pensiun wajib dalam memperluas

cakupan perlindungan sosial. Jumlah peserta aktif yang telah mencapai sekitar 19,5 juta pekerja menunjukkan kemajuan signifikan.

Selain itu, kebijakan industri dana pensiun juga diarahkan untuk dapat memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian atas pengelolaan akumulasi dana jangka panjang. Dari sisi pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan pembangunan, dana pensiun berperan sebagai investor institusional yang menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil. Hal ini tercermin dari meningkatnya porsi investasi pada SBN, yang berkontribusi dalam pembiayaan APBN, serta proyek-proyek prioritas nasional. Karakteristik dana pensiun sebagai investor jangka panjang turut mendukung stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam meredam volatilitas pasar melalui strategi investasi yang berorientasi jangka panjang.

Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Kebijakan Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) jangka menengah diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Fokus kebijakan LIK tidak lagi terbatas pada perluasan akses layanan keuangan, tetapi ditransformasikan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan (*financial well-being*), yaitu kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan, tahan terhadap guncangan, dan mampu mendukung produktivitas ekonomi. Peningkatan literasi keuangan akan difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan jangka menengah dan panjang, termasuk pasar modal, asuransi, dan dana pensiun, guna memperluas basis pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek. Pemerintah akan mendorong penguatan literasi keuangan yang berbasis perilaku dan siklus hidup, agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga mampu memilih dan menggunakan produk tersebut secara tepat sesuai kebutuhan dan profil risiko. Peningkatan kualitas inklusi diarahkan untuk mendukung rumah tangga, UMKM, serta kelompok rentan seperti lanjut usia dan difabel, agar dapat memperkuat ketahanan keuangan, mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi, serta meningkatkan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi.

Dalam mendukung agenda kesejahteraan keuangan, kebijakan LIK jangka menengah juga fokus untuk memperkuat perlindungan konsumen sektor keuangan. Pemerintah akan memastikan bahwa perluasan akses keuangan diikuti oleh penguatan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas penyedia jasa keuangan. Penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan diarahkan untuk menekan risiko pengambilan keputusan keuangan yang merugikan, mencegah praktik penjualan yang tidak sesuai (*mis-selling*), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Penguatan Kesejahteraan Keuangan

Arah kebijakan pengembangan sektor keuangan dalam jangka menengah adalah transformasi fundamental dari perluasan akses menuju pencapaian kesejahteraan keuangan (*financial well-being*). Sejalan dengan penguatan kerangka regulasi dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), Pemerintah mengintegrasikan kebijakan literasi dan inklusi keuangan (LIK) sebagai strategi menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Melalui penguatan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan

berkelanjutan dalam mengelola dana, membangun daya tahan terhadap guncangan ekonomi, serta berkontribusi aktif terhadap produktivitas nasional secara menyeluruh.

Secara konseptual, kesejahteraan keuangan dibangun di atas empat pilar utama yang saling berkaitan dan terintegrasi. Keempat pilar tersebut adalah kemampuan memenuhi kebutuhan harian, ketahanan terhadap risiko, kesiapan dalam perencanaan jangka panjang, serta kepercayaan diri dalam pengelolaan keuangan yang didukung oleh literasi yang memadai. Keempat pilar tersebut membentuk fondasi yang utuh, di mana keseimbangan antar-aspek menjadi faktor kunci dalam menciptakan kondisi keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan keuangan diukur melalui beberapa indikator kunci yang ditargetkan tercapai pada tahun 2029. Target utama mencakup pencapaian tingkat inklusi keuangan sebesar 93 persen, penurunan angka kemiskinan pada kisaran 4,5–5,0 persen, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di angka 8 persen. Dengan tolok ukur ini, kesejahteraan keuangan diposisikan bukan sekadar sebagai output rumah tangga, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Sinergi kebijakan yang solid antara kementerian, lembaga, serta otoritas moneter dan jasa keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK perlu dilakukan agar implementasinya lebih efektif. Hingga tahun 2026, koordinasi lintas sektor dalam pengembangan inklusi keuangan masih dilaksanakan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2020. Landasan ini menjadi titik awal bagi berbagai program literasi keuangan dan peningkatan akses pembiayaan yang telah berjalan di berbagai daerah. UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan hukum bagi transformasi kelembagaan dari DNKI menjadi Komite Nasional Kesejahteraan Keuangan (KNKK).

BAB IV

ARAH DAN STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL TAHUN 2027

Strategi ekonomi dan fiskal 2027 secara umum dirancang dalam suatu kerangka kebijakan yang terintegrasi dan sinergis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan. Kebijakan fiskal ditempatkan sebagai instrumen utama yang tidak hanya menjalankan fungsi alokasi dan distribusi, tetapi juga berperan aktif sebagai katalis pertumbuhan. Melalui APBN, pemerintah akan mengarahkan belanja fokus pada program prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan. APBN berperan sebagai katalis untuk memberdayakan peran swasta sebagai motor pertumbuhan. APBN terus dijaga tetap prudent, kredibel dan sustainable melalui disiplin anggaran dan optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja dan inovasi pembiayaan antara lain memperkuat sinergi dengan Danantara untuk akselerasi investasi strategis yang bernilai tambah tinggi.

Sinergi dengan kebijakan moneter diharapkan dapat menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta ketahanan sistem keuangan akan terus dipertahankan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan investor. Peran intermediasi perbankan juga terus diperkuat agar mampu mendukung sektor riil secara lebih optimal. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan likuiditas yang memadai, menciptakan kompetisi yang lebih sehat sehingga dapat menurunkan *cost of fund*, serta dorongan terhadap pertumbuhan kredit yang sehat dan produktif. Dengan kondisi moneter yang kondusif, iklim investasi diharapkan semakin menarik dan mampu mendorong ekspansi usaha secara lebih luas.

Danantara Indonesia akan berperan strategis yang memperkuat efektivitas kebijakan melalui pendekatan investasi yang lebih terarah pada sektor strategis dan berorientasi hasil. Fokus pada investasi produktif di sektor-sektor prioritas seperti pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi mencerminkan upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan meningkatkan nilai tambah domestik. Danantara akan mendukung program kerja prioritas Pemerintah yang telah direncanakan. Namun demikian, Danantara akan dengan tetap dioptimalkan perannya dalam kegiatan investasi strategis yang berorientasi komersial dan menjadi pengungkit sektor swasta dalam rangka menumbuhkan investasi. Melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan investasi diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mempercepat penurunan kemiskinan, dan menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan konsisten, strategi ini diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih kuat dan berdaya saing.

4.1. Strategi Ekonomi Makro Tahun 2027

Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,8-6,5 persen. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi jangkar pertumbuhan melalui penguatan daya beli dan jaring pengaman sosial. Momentum ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan dampak positif dari berbagai program prioritas nasional yang menjaga ekspektasi konsumen. Sementara itu, konsumsi Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan layanan publik dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah berkomitmen APBN berperan efektif sebagai katalisator pembangunan tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi.

Penguatan investasi dan keberlanjutan transformasi struktural merupakan prasyarat fundamental dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,8-6,5 persen. Upaya strategis ini menjadi langkah menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat untuk memastikan resiliensi konsumsi domestik. Kinerja investasi (PMTB) diproyeksikan tumbuh menguat, ditopang oleh kesinambungan belanja infrastruktur strategis, ekspansi kapasitas produksi sektor riil, dan optimalisasi arus Penanaman Modal Asing (PMA). Meskipun laju akumulasi kapital Indonesia secara komparatif mengungguli rata-rata negara berkembang, pencapaian target pertumbuhan ekonomi menuntut penyempurnaan terstruktur pada aspek efisiensi dan tidak hanya bertumpu pada eskalasi volume investasi semata. Tingkat ICOR yang masih persisten di kisaran 5–6 mencerminkan adanya tantangan inefisiensi, di mana injeksi modal belum sepenuhnya tertransmisi menjadi *output* ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, kerangka kebijakan makro fiskal difokuskan pada akselerasi *Total Factor Productivity* (TFP), presisi alokasi sumber daya, dan penguatan tata kelola. Dengan demikian, formasi modal yang tercipta mampu menghasilkan efek pengganda yang solid bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Belanja modal Pemerintah di tahun 2027 akan diupayakan untuk terus membiayai infrastruktur yang produktif yang dapat membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas investasi swasta. Investasi publik akan terus memainkan peran katalis melalui kombinasi pengeluaran anggaran, kemitraan publik-swasta (PPP), dan program investasi badan usaha milik negara (BUMN). Namun demikian, Pemerintah diperkirakan akan mempertahankan kehati-hatian fiskal dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB, sehingga belanja modal dilakukan secara terukur dengan prioritas tertentu sesuai dengan PKPN, antara lain untuk infrastruktur, transformasi digital, ketahanan pangan, dan transisi energi.

Danantara Indonesia berperan penting dan strategis untuk melaksanakan PKPN dengan kolaborasi swasta untuk akselerasi investasi. Danantara akan berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan aset negara, termasuk dividen dan kepemilikan pemerintah pada berbagai BUMN, guna mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis. Dengan basis aset yang sangat besar dari berbagai BUMN utama di sektor keuangan, energi, telekomunikasi, dan infrastruktur, Danantara memiliki potensi untuk menjadi *platform* investasi berskala global yang mampu mengonsolidasikan pengelolaan aset negara serta meningkatkan efisiensi alokasi modal. Melalui pengelolaan dividen BUMN dan instrumen pembiayaan pasar keuangan, Danantara ditargetkan dapat menyalurkan investasi dalam jumlah signifikan setiap tahun ke sektor-sektor prioritas pembangunan.

Ke depan, Danantara diharapkan dapat menarik *co-investment* dari investor global, *sovereign wealth funds*, dan investor institusional, khususnya pada sektor yang mendukung transformasi struktural ekonomi. Sektor prioritas tersebut meliputi hilirisasi mineral strategis, pengembangan energi hijau, pembangunan infrastruktur digital, serta pengembangan teknologi baru yang bernilai tambah tinggi. Dengan memanfaatkan kekuatan neraca BUMN serta kemitraan investasi internasional, Danantara dapat memperluas kapasitas pembiayaan proyek nasional tanpa meningkatkan tekanan terhadap APBN. Peran ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem investasi nasional, meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8-6,5 persen pada tahun 2027, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah melalui peningkatan produktivitas dan penguatan struktur industri domestik.

Selain itu, kinerja sektor eksternal diperkirakan tetap resilien di tengah tantangan fragmentasi perdagangan global. Ekspor didorong melalui strategi peningkatan nilai tambah produk hilirisasi mineral dan perluasan pasar ke negara-negara mitra dagang nontradisional. Di sisi lain, Impor dikelola secara terukur untuk mendukung kebutuhan barang modal dan bahan baku industri domestik guna memperkuat basis manufaktur nasional. Sinergi antara kebijakan perdagangan dan penguatan rantai pasok global diharapkan mampu menjaga neraca perdagangan tetap pada posisi yang sehat. Melalui penguatan seluruh komponen ini, struktur ekonomi Indonesia 2027 diharapkan menjadi lebih tangguh, inklusif, dan kompetitif di tingkat global.

Pada tahun 2027, inflasi diproyeksikan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi sebesar 1,5–3,5 persen seiring dengan semakin kuatnya keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran domestik. Stabilitas harga pangan diharapkan semakin terjaga melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri serta penguatan cadangan pangan Pemerintah sebagai *buffer* dalam mengantisipasi gejolak harga. Di sisi lain, kebijakan stabilisasi harga energi domestik dan penguatan bauran kebijakan fiskal dan moneter diharapkan mampu memitigasi dampak transmisi gejolak harga komoditas global terhadap inflasi domestik. Stabilitas inflasi tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Pencapaian sasaran inflasi tersebut juga didukung oleh upaya pengendalian inflasi pada periode meningkatnya permintaan, seperti pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional, di tengah berbagai tantangan dari sisi pasokan dan distribusi. Inflasi inti diharapkan tetap terjaga sehingga mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif kuat. Selain itu, Pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim melalui berbagai langkah dari hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, serta penyempurnaan infrastruktur logistik. Strategi pengendalian inflasi juga diperkuat melalui koordinasi kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah melalui sinergi TPIP dan TPID, didukung oleh penguatan kualitas data serta komunikasi publik yang efektif guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjangkau.

Pada tahun 2027, harga minyak mentah ICP diproyeksikan masih dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan pasokan energi global serta perkembangan geopolitik.

Ketegangan geopolitik yang meningkat, termasuk dampak dari konflik di kawasan Timur Tengah 2026, telah memicu gangguan terhadap jalur distribusi energi global, khususnya di kawasan Teluk Persia. Konflik tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap terganggunya arus pasokan minyak melalui Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, sehingga memicu lonjakan harga minyak mentah global dan meningkatkan volatilitas pasar energi.

Selain faktor geopolitik, dinamika dari sisi pasokan dan permintaan juga akan memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Dari sisi pasokan, kebijakan pengaturan produksi oleh negara-negara produsen utama, termasuk kelompok OPEC+, serta perkembangan produksi dari negara di luar OPEC+ akan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasar minyak global. Sementara itu, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi global yang cenderung moderat serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih berpotensi menahan pertumbuhan permintaan minyak dunia. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga minyak mentah ICP tahun 2027 diperkirakan berada dalam kisaran 70-95 USD per barrel.

Sementara itu, rentang nilai tukar pada tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS. Hal ini mencerminkan tekanan eksternal yang masih berlanjut terutama yang disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, tekanan *capital outflow* yang dipicu oleh sentimen *risk off* investor global juga turut menekan nilai tukar Rupiah. Di sisi lain, kemungkinan berlanjutnya pelonggaran suku bunga global, surplus perdagangan, dan peningkatan iklim investasi serta optimalisasi pengelolaan DHE SDA akan memberikan peluang penguatan nilai tukar Rupiah. Selanjutnya, stabilitas nilai tukar juga didukung oleh penguatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan melalui KSSK.

Pada tahun 2027, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,5–7,3 persen, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, terutama konflik geopolitik dan kebijakan suku bunga AS. Pergerakan *yield* juga dipengaruhi dinamika aliran modal dan persepsi risiko investor, yang turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan suku bunga global dan stabilitas pasar keuangan internasional. Di sisi domestik, sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang didukung oleh pendalaman pasar keuangan dan penguatan strategi komunikasi kebijakan diperkirakan dapat memberikan dampak positif pada *market confidence*.

Proyeksi asumsi *lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2027 diperkirakan relatif stabil dengan potensi peningkatan yang terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi minyak bumi diperkirakan mencapai sekitar 605-620 ribu barrel per hari yang telah mencakup *Natural Gas Liquid* (NGL), sementara *lifting* gas bumi diproyeksikan sebesar 951-990 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan ini mempertimbangkan tren penurunan alamiah (*natural decline*) pada lapangan migas eksisting yang masih mendominasi produksi nasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *lifting* tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan strategis secara komprehensif dan terintegrasi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi produksi melalui reaktivasi sumur dan lapangan tidak aktif (*idle well* dan *idle fields*), percepatan pengembangan cadangan yang belum dikembangkan (*undeveloped discoveries*), penerapan teknologi peningkatan produksi seperti *multi-stage fracturing* (MSF)

dan implementasi EOR secara lebih luas, percepatan persetujuan dan pelaksanaan POD pada lapangan yang telah selesai dieksplorasi, serta penguatan pengawasan produksi dan *lifting* secara lebih terarah. Pemerintah juga menjaga daya tarik investasi hulu migas melalui penciptaan iklim usaha yang lebih stabil dan kompetitif, antara lain melalui penguatan kepastian investasi, meningkatkan fiskal yang menarik bagi investor, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Upaya efisiensi biaya tetap didorong dengan tetap menjaga keberlanjutan investasi dan potensi peningkatan produksi migas sebagai sumber penerimaan negara. Seiring dengan progres pengembangan proyek-proyek strategis, diharapkan pada tahun 2027 mulai terdapat tambahan kontribusi produksi dari lapangan-lapangan yang *on-stream*, sehingga memberikan peningkatan *lifting* secara bertahap.

4.2. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2027

Kebijakan fiskal tetap kolaboratif dan terarah untuk mencapai target pembangunan nasional tahun 2027 yang salah satunya diarahkan untuk mendukung PKPN. Kebijakan tersebut memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap berbagai ketidakpastian global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi peran APBN menjadi penting untuk memastikan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat dijalankan secara efektif.

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) merupakan program yang lebih terfokus, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas nasional. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan secara efektif, kebijakan fiskal tahun 2027 difokuskan pada 8 klaster PKPN dan klaster pendukung (*enabler*) yang mencakup 60 program kerja. PKPN diposisikan sebagai instrumen dalam mendukung agenda strategis di bidang kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Sebagai klaster pendukung (*enabler*) adalah pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Melalui penataan prioritas program yang lebih jelas, PKPN diharapkan dapat memperkuat efektivitas fungsi alokasi APBN, meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong sinergi pendanaan dan pelaksanaan antara Pemerintah melalui APBN, Danantara, dan swasta.

Kedaulatan Pangan

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah fokus pada pengembangan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan Kawasan dan peningkatan produksi protein yang mengacu pada PKPN. Dalam klaster kedaulatan pangan, program KNMP dan Program Kapal Ikan Modern merupakan bagian dari sektor perikanan tangkap. Program KNMP ditargetkan terbangun 1.000 lokasi baru, sedangkan pembangunan kapal ikan modern ditargetkan sejumlah 962 unit kapal ikan. Sementara itu, pada sektor perikanan budi daya, program revitalisasi tambak nila salin Pantura dan pembangunan tambak udang terintegrasi Waingapu berada dalam tahap konstruksi. Selain itu, program budi daya ikan tematik ditargetkan pembangunan 11.200 titik bioflok lele, nila, dan mina padi di 12 provinsi di tahun 2027.

Pada kegiatan pengembangan kawasan untuk kedaulatan pangan, pemerintah akan melanjutkan program kawasan pangan terintegrasi untuk peningkatan produksi padi 55,27 juta ton, jagung 23,58 juta ton, ubi kayu 17,8 juta ton, dan kedelai 0,39 juta ton. Di samping itu, program kawasan sentra industri garam nasional ditargetkan dapat meningkatkan produksi garam 200 ribu ton. Program kawasan perkebunan, yang meliputi komoditas di antaranya kelapa sawit dan tebu, juga dicanangkan untuk meningkatkan produksi pangan, kesejahteraan pekebun, dan mendukung hilirisasi. Program kedaulatan pangan juga diarahkan pada peningkatan produksi protein yang meliputi daging, susu, dan telur melalui pengembangan peternakan modern terintegrasi. Pada tahun 2027, pemerintah mengharapkan produksi daging, telur, dan susu dapat meningkat masing-masing mencapai 5,25 juta ton, 8,04 juta ton, dan 877,53 ribu ton.

Kemandirian Energi dan Air

Program prioritas Kemandirian Energi dan Air diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan air nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengurangan ketergantungan impor, peningkatan pemanfaatan sumber daya domestik, perluasan akses energi dan air yang merata, serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Melalui klaster kemandirian energi dan air, Pemerintah mendorong sinergi lintas sektor dan wilayah agar target pembangunan RPJMN tercapai secara terukur, berdampak nyata bagi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Untuk mendukung program prioritas tersebut, Pemerintah akan mengimplementasikan beberapa strategi antara lain adalah percepatan bioenergi, pengembangan pembangkit energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi nasional, transformasi konsumsi energi, dan penguatan ketahanan energi.

Pertama, strategi percepatan bioenergi melalui mandatori biodiesel dan bioetanol diarahkan untuk memperkuat substitusi impor BBM dan meningkatkan bauran energi terbarukan.

Kedua, strategi pengembangan pembangkit energi terbarukan berbasis surya dan air.

Ketiga, strategi peningkatan efisiensi energi nasional melalui penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) diarahkan untuk menekan pertumbuhan kebutuhan energi tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Keempat, strategi transformasi konsumsi energi di sektor transportasi dan rumah tangga dilakukan melalui konversi motor BBM ke motor listrik, perluasan jaringan gas kota, dan pemanfaatan kompor listrik

Kelima, strategi penguatan ketahanan energi melalui sektor minyak dan gas difokuskan pada peningkatan dan penjagaan tingkat produksi nasional selama masa transisi energi. Program dilaksanakan melalui optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan lapangan baru, percepatan eksplorasi, serta penataan dan optimalisasi sumur tua dan sumur masyarakat secara legal, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan teknologi peningkatan produksi dan penyempurnaan tata kelola terus diperkuat.

Pendidikan

Untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global, program pendidikan kembali menjadi prioritas. Pemerintah akan melanjutkan program peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas gizi bagi setiap anak usia

sekolah. Peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas akan terus didorong melalui pengembangan program yang akan menjadi fokus Pemerintah. Program SR dan SUG menjadi program andalan Pemerintah yang didukung konsep pendidikan berkelanjutan melalui program SNT. Peningkatan kualitas SDM tentunya akan didukung oleh penyempurnaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan didukung bantuan perlengkapan sekolah. Pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui pelaksanaan program prioritas di sektor pendidikan tersebut akan didukung oleh anggaran pendidikan yang cukup besar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pelaksanaan program MBG pada tahun 2027 dioptimalkan untuk dapat memberikan manfaat bagi 69,7 juta penerima di lingkup pendidikan. Optimalisasi manfaat bagi lingkup pendidikan ditempuh melalui penyempurnaan desain menu berbasis gizi seimbang dan penguatan edukasi gizi kepada anak sekolah, peningkatan standar keamanan dan mutu pangan melalui penguatan sertifikasi higienitas dan sanitasi, peningkatan kapasitas petugas pelaksana, serta penegakan standar operasional dalam proses produksi dan distribusi makanan. Selain itu, pemberian MBG diarahkan untuk lebih prioritatif kepada kelompok masyarakat rentan dan wilayah dengan tingkat kerentanan gizi yang tinggi, termasuk daerah 3T. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program MBG dalam mendukung peningkatan capaian di bidang pendidikan dan memperkuat dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Intervensi peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera melalui Sekolah Rakyat. Operasionalisasi dan akselerasi penambahan Sekolah Rakyat dilakukan secara optimal agar dampak program dapat terasa secara inklusif.

Sekolah Unggul Garuda (SUG) merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kompetensi sumber daya manusia Indonesia pada jenjang pendidikan menengah melalui penyediaan layanan pendidikan berkualitas tinggi bagi siswa berprestasi. Pada 2027, pengembangan program diarahkan pada percepatan pembangunan dan operasionalisasi SUG melalui pembangunan SUG Baru dan pengembangan SUG Transformasi di berbagai wilayah, disertai penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas pendidik, serta perluasan sinergi dengan perguruan tinggi dan dunia industri. Dengan arah kebijakan tersebut, SUG diharapkan menjadi pusat pembinaan talenta unggul dan penggerak utama transformasi pendidikan nasional dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Kualitas infrastruktur pendidikan serta peningkatan tata kelola pendidikan terpadu menjadi fokus penguatan selain peningkatan akses. Pemerintah akan melanjutkan program revitalisasi sekolah dan madrasah, melanjutkan program SNT, revitalisasi infrastruktur fisik, Pemerintah akan terus mengoptimalkan program digitalisasi pembelajaran untuk menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih interaktif dan bermutu. Pemerintah menargetkan penambahan *Interactive Flat Panel* (IFP) lagi di tiap satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kesehatan

Program prioritas pemerintah di sektor kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang sehat dan unggul. Peningkatan kualitas SDM dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan. Upaya mengatasi prevalensi *stunting* dilakukan Pemerintah dengan memberikan asupan makanan bergizi sejak dalam kandungan dan disusui

dan usia balita melalui program MBG. Selain upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Untuk mencapai berbagai target pembangunan melalui dukungan anggaran kesehatan yang diprioritaskan pada berbagai program, Pemerintah mengacu pada PKPN.

Pemerintah senantiasa berupaya untuk melakukan penurunan prevalensi *stunting* dan peningkatan status gizi. Pemerintah terus memperkuat kualitas dan tata kelola pelaksanaan MBG agar efektif dan berkualitas untuk mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penguatan *primary health care* Pemerintah mendorong perluasan jangkauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan target cakupan hingga mencapai 55 persen jumlah penduduk pada akhir 2027. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi pendanaan belanja pemerintah pusat dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan.

Pemerintah berfokus pada penuntasan Tuberkulosis (TB) untuk memutus rantai penularan dan penurunan kasus. Hingga tahun 2024, angka insidensi TB masih tinggi, yaitu 382 per 100.000 penduduk. Untuk itu, Pemerintah menargetkan penurunan insidensi TB menjadi 231 per 100.000 penduduk pada 2027.

Selain itu, komitmen Pemerintah dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan diwujudkan melalui kelanjutan program Revitalisasi Rumah Sakit. Program ini mencakup rumah sakit yang direncanakan mulai direvitalisasi pada tahun 2027, serta rumah sakit yang masih berada dalam tahap pembangunan sejak tahun 2026 dengan skema pembiayaan.

Hilirisasi dan Industrialisasi

Pemerintah akan mendukung pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi strategis yang telah dimulai, sekaligus mempercepat tahap persiapan proyek lanjutan. Di sisi lain, Pemerintah juga akan mendorong upaya penjajakan kerja sama dengan investor internasional guna memperluas sumber pembiayaan dan transfer teknologi. Bersamaan dengan itu, percepatan penyelesaian perizinan, termasuk aspek lingkungan dan tata ruang, menjadi prioritas untuk mengurangi *bottleneck* implementasi. Keseluruhan langkah ini diarahkan untuk memastikan kesinambungan *pipeline* proyek hilirisasi, meningkatkan kepastian investasi, dan mempercepat realisasi dampak ekonomi dalam jangka menengah.

Adapun fokus kebijakan adalah memastikan proyek bertransisi menjadi industri yang *viable* secara ekonomi dan finansial. Kebijakan fiskal pada tahun 2027 adalah mendorong skema yang lebih berkelanjutan, seperti kemitraan Danantara dan swasta, dengan fokus pada penguatan investasi dan penciptaan *demand*. Selain itu, diperlukan strategi komersialisasi dan integrasi dengan *global value chain* agar proyek bertransisi menjadi sentra industri yang berkelanjutan.

Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana

Pemerintah memprioritaskan tahap persiapan proyek secara menyeluruh. Sebagai contoh, program GSW tahapannya meliputi finalisasi *masterplan* dalam kerangka PKPN nasional dan memperkuat Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Kelembagaan ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan proyek secara lintas sektor dan sinergi antara Pemerintah

pusat dan daerah. Langkah ini krusial untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Dalam jangka menengah-panjang, implementasi proyek akan diperluas secara selektif. Ekspansi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari tahap *piloting*, di mana hanya proyek dengan kelayakan tinggi yang akan dilanjutkan. Pendekatan ini untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara. Perlu menjadi catatan bahwa tidak semua wilayah membutuhkan tanggul laut dalam skala besar.

Dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, Pemerintah akan berfokus pada pemulihan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Pemerintah akan berfokus pada fasilitas umum (pasar, rumah ibadah, dan gedung perkantoran pemerintah daerah, rehabilitasi ekonomi dini (penyaluran bantuan modal usaha mikro dan bantuan alat tangkap bagi nelayan serta sarana produksi bagi pembudidaya ikan), dan rehabilitasi sosial (pendampingan psikososial melalui Pos SAPA dan rehabilitasi trauma (*trauma healing*) bagi kelompok rentan). Selain itu, pada tahun 2027, Pemerintah juga akan fokus pada rekonstruksi perumahan, infrastruktur strategis, dan rehabilitasi ekosistem.

Gerakan ASRI terutama akan diarahkan untuk memperluas program gentengisasi sampai ke luar Pulau Jawa. Perluasan ini akan dilaksanakan melalui integrasi dengan program perbaikan rumah tidak layak huni, dukungan pemerintah daerah, serta penguatan peran UMKM. Kebijakan ini juga akan didukung dengan skema pembiayaan kolaboratif agar peningkatan kualitas hunian berjalan berkelanjutan.

Ekonomi Kerakyatan dan Desa

Kebijakan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dan desa dilaksanakan melalui pembentukan 80.000 gerai fisik KD/KMP dan pembangunan daerah 3T. Untuk program KD/KMP, strategi kebijakan pemerintah dilaksanakan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan SDM, penguatan infrastruktur dan aset usaha, pengembangan usaha dan ekosistem bisnis, serta penguatan digitalisasi dan dukungan pembiayaan. Program KD/KMP diharapkan terus meningkat yang terefleksi pada pertumbuhan volume usaha sebesar 10 persen, rasio modal sendiri terhadap total aset KD/KMP sebesar 17 persen, dan proporsi KD/KMP yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebesar 80 persen. Sementara itu, untuk percepatan pembangunan di daerah 3T, pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai instrumen utama yang mencakup penguatan layanan pendidikan dan kesehatan melalui penyediaan fasilitas sekolah dan Puskesmas. Selain itu, pembangunan permukiman, layanan pemerintahan, serta infrastruktur ekonomi dan ketahanan pangan dilakukan secara terpadu melalui penyediaan sanitasi, air bersih, listrik, jalan, pasar, serta fasilitas pengolahan dan penyimpanan pangan.

Penurunan Kemiskinan

Pemerintah terus melanjutkan komitmen dalam meningkatkan sinergi berbagai program penurunan kemiskinan melalui PRO-KESRA. PRO-KESRA merupakan perwujudan dari tiga pilar strategi penurunan kemiskinan sebagaimana terdapat dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Program ini bertujuan untuk mendorong graduasi masyarakat miskin dengan meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah berupaya untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi. Pemerintah telah menargetkan beberapa sasaran program, seperti 10 juta KPM PKH, 18 juta KPM Kartu Sembako, 22,13 juta

siswa penerima PIP, 96,8 juta jiwa penerima PBI-JK, dan 43,3 juta pelanggan penerima subsidi listrik.

Pemerintah juga terus berupaya memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin yang siap untuk graduasi melalui PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja. Pada 2027, pemerintah menargetkan 2 juta masyarakat penerima KUA yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan. Sebanyak 5,4 persen dari total usaha juga ditargetkan memiliki pembukuan lengkap dan/atau telah berbadan hukum. Target tersebut akan dicapai dengan berbagai program pemberdayaan, antara lain melalui PPSE dan Umi.

Pendukung Klaster (*Enabler*)

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan ekspansi infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) sebagai fondasi utama penguatan pemerintahan digital. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas komputasi, penyimpanan (*storage*), dan jaringan, pelaksanaan migrasi data tahap II, penguatan layanan komputasi awan (*cloud*), serta dimulainya integrasi ekosistem digital pemerintah secara lebih menyeluruh.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pemberantasan judi *online*, Pemerintah menargetkan tersusunnya rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk pengentasan judi *online*. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas pemeliharaan dan operasional sistem penanganan konten internet ilegal, serta optimalisasi sistem pengendalian dan tata kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) guna memperkuat pengawasan di ruang digital.

Di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN), Pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi 1,65 dari capaian sebelumnya sebesar 1,70. Target ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk melindungi kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan sosial nasional.

Sementara itu, dalam upaya pemberantasan penyelundupan, Pemerintah akan terus memperkuat sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif lintas sektor. Langkah ini diarahkan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi perekonomian nasional dan masyarakat, sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Gambar 1. Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)



Sumber: Bappenas, 2026

4.3. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027

Untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal maka kebijakan fiskal tahun 2027 didesain kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB. Melalui kebijakan fiskal yang kolaboratif, terarah dan terukur diharapkan dapat membuat aktivitas ekonomi berputar lebih cepat, tumbuh lebih tinggi sehingga dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan.

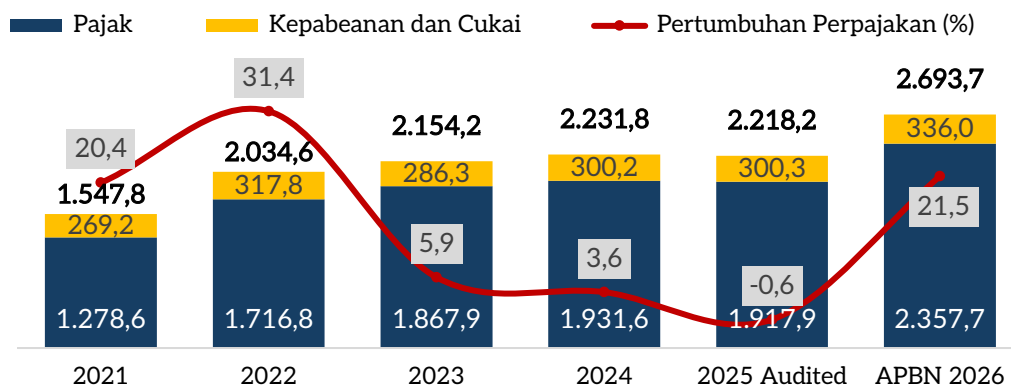
Sejalan dengan tujuan tersebut, maka APBN dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendapatan untuk mencapai pendapatan negara yang *sustainable*, penguatan kualitas belanja negara agar lebih efektif, efisien, produktif, dan tepat sasaran untuk mendukung prioritas nasional, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable antara lain melalui penguatan skema KPBU, serta kolaborasi dengan Danantara dan sektor swasta, sehingga ruang fiskal semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan yang pro-pertumbuhan dan pro-kesejahteraan.

4.3.1. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2027 diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi. Peningkatan rasio pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan negara yang mengedepankan efektivitas administrasi perpajakan dan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar, serta perluasan basis perpajakan dan optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari SDA, tanpa menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Optimalisasi pendapatan negara juga dilakukan melalui konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk menutup potensi adanya kebocoran pendapatan dan devisa negara melalui berbagai langkah, seperti perbaikan regulasi dan penegakan hukum, serta pemberian insentif fiskal yang lebih terukur untuk menjaga iklim investasi yang atraktif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Kebijakan pendapatan negara dirancang agar selaras dengan dinamika ekonomi digital, perkembangan sistem perpajakan global, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan.

Penerimaan Perpajakan

Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Pada periode 2023–2025, realisasi penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi. Pertumbuhan penerimaan perpajakan di tahun 2024 didukung oleh kinerja positif sektor utama penerimaan dan kebijakan optimalisasi perpajakan, di tengah termoderasinya harga komoditas. Sementara itu, kinerja perpajakan tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi dunia. Kinerja perpajakan sampai dengan triwulan I 2026 tumbuh 14,3 persen (yoy), dipengaruhi oleh kinerja pajak yang tumbuh signifikan dan kinerja positif bea masuk. Penurunan restitusi pajak dan peningkatan kinerja impor menjadi faktor pendorong kinerja perpajakan tersebut.

Grafik 23. Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2021-2026 (Rp T)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Penerimaan pajak periode 2021-2025 mencatatkan tren yang dinamis, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, harga komoditas, dan kebijakan fiskal Pemerintah. Penerimaan pajak masih tumbuh pada 2024, meskipun melambat dari 2023, menjadi 3,6 persen (yoy) di tengah volatilitas harga komoditas dan ketidakpastian global. Tekanan semakin meningkat pada 2025, dengan penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 0,71 persen (yoy) akibat moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga daya beli dan keberlangsungan usaha masyarakat. Penerimaan pajak sampai dengan triwulan I tahun 2026 tumbuh *double digit* sebesar 20,7 persen (yoy). Kinerjanya didukung oleh aktivitas ekonomi yang meningkat dan implementasi *Coretax*. Pertumbuhan terutama ditopang oleh PPN dan PPnBM yang mampu tumbuh sebesar 57,7 persen seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri. Selain itu, PPh orang pribadi dan PPh 21 yang tumbuh 15,8 persen, serta PPh Badan yang tumbuh sebesar 5,4 persen mencerminkan peningkatan kepatuhan dan pendapatan yang diterima orang pribadi atau badan. Secara sektoral, kontributor penerimaan pajak utamanya ditopang kinerja positif sektor perdagangan, industri pengolahan, keuangan, dan pertambangan. Meskipun elastisitas penerimaan pajak (*tax buoyancy*) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang perlu terus diperkuat, Pemerintah optimistis kinerjanya akan semakin membaik seiring penguatan basis data dan modernisasi administrasi perpajakan yang tengah berjalan.

Penerimaan kepabeanan dan cukai turut mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, perekonomian global, dan perkembangan harga komoditas. Setelah mengalami tekanan di 2023, pemulihan terjadi pada 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 4,9 persen (yoy) yang didukung oleh kebijakan intensifikasi cukai, penguatan nilai impor, dan kenaikan harga komoditas di akhir tahun. Pada 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai hanya tumbuh terbatas sebesar 0,02 persen (yoy), dengan cukai berkontraksi akibat penurunan produksi hasil tembakau, walaupun bea keluar tumbuh signifikan sebesar 36,1 persen (yoy) didorong oleh kenaikan harga dan volume ekspor CPO. Hingga akhir triwulan I 2026, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp67,9 triliun atau mencapai 20,2 persen dari target APBN, meskipun kebijakan ekstensifikasi bea keluar batubara masih dalam proses pembahasan. Secara agregat, penerimaan bea keluar dan cukai masih mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen, namun menunjukkan sinyal pemulihan. Optimisme ini didukung oleh mulai menguatnya harga CPO pada bulan Maret serta tren

peningkatan produksi rokok. Di sisi lain, bea masuk masih cukup resilien dan mampu tumbuh positif di tengah eskalasi geopolitik saat ini.

Boks 4. Kebijakan Bea Keluar Emas: Upaya Mendorong Nilai Tambah Nasional

Indonesia menempati posisi strategis dalam pasar emas global sebagai pemegang cadangan tambang terbesar keempat di dunia dengan pangsa sekitar 5,6 persen dari total cadangan global. Namun, cadangan ini terus menyusut seiring laju eksploitasi yang belum diimbangi upaya konservasi yang memadai. Kondisi tersebut semakin mendesak untuk ditangani mengingat harga emas dunia yang mencatat rekor USD4.165,2 per *troy ounce* pada Desember 2025, lonjakan yang memperbesar potensi kerugian apabila emas terus diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika pasar, tetapi juga konservatif dalam menjaga kelestarian sumber daya dan transformatif dalam meningkatkan manfaat ekonomi jangka panjang.

Dalam kerangka hilirisasi mineral nasional, pemerintah mendorong transformasi produk komoditas emas. Transformasi tersebut komoditas tambang mentah menjadi produk manufaktur bernilai tinggi, khususnya perhiasan emas dan logam mulia olahan yang memiliki daya saing besar di pasar ekspor. Instrumen Bea Keluar menjadi kunci dalam agenda ini: untuk ketersediaan pasokan emas domestik, kebijakan ini menekan biaya bahan baku bagi industri pengolahan lokal, mengurangi ketergantungan pada impor berbiaya logistik tinggi, sekaligus mendorong pergeseran dari ekspor bahan mentah ke ekspor produk manufaktur. Transformasi ini tidak hanya memperbesar margin nilai tambah yang tertahan di dalam negeri, tetapi juga menciptakan ekosistem industri baru yang menyerap tenaga kerja terampil di sektor kerajinan, desain, dan manufaktur logam mulia.

Stabilitas pasokan emas domestik juga menjadi prasyarat fundamental bagi pembangunan ekosistem bullion bank yang kokoh. Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, perbankan diberi kewenangan menjalankan empat fungsi intermediasi berbasis emas: simpanan emas, penitipan emas, pembiayaan emas, dan perdagangan emas. Keempat fungsi ini bertumpu pada ketersediaan emas fisik yang memadai di pasar domestik. Apabila aliran emas terus terserap ekspor secara tidak terkelola, *bullion* bank akan kehilangan basis aset untuk menjalankan peran intermediasinya, dan pengembangan instrumen keuangan berbasis emas sebagai segmen pasar bernilai strategis tinggi, akan terhambat secara struktural.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bea Keluar emas dirancang dengan dua prinsip tarif yang saling memperkuat. (i) Tarif bersifat diferensiatif antara produk hulu dan hilir: emas mentah dikenai tarif lebih tinggi dibandingkan produk olahan, sehingga menciptakan insentif langsung bagi produsen untuk melakukan pemurnian di dalam negeri sebelum mengekspor. (ii) Tarif bersifat progresif mengikuti pergerakan harga emas di pasar internasional: saat harga global naik, tarif ikut meningkat secara proporsional, memastikan negara mendapat bagian yang adil dari *windfall* komoditas sekaligus memperkuat daya tarik bahan baku lokal bagi industri dalam negeri. Dalam dimensi keuangan, ketersediaan emas fisik yang terjaga memberikan fondasi bagi *bullion* bank untuk mengembangkan produk berbasis emas secara berkelanjutan dan memperluas inklusi keuangan berbasis aset riil. Pada akhirnya, kebijakan ini dirancang untuk mentransformasi Indonesia dari sekadar eksportir bahan tambang mentah menjadi pemain industri yang terintegrasi secara vertikal. Dari hulu tambang hingga hilir keuangan dan manufaktur emas dunia.

Penerimaan perpajakan tahun 2027 diharapkan tumbuh dan melanjutkan capaian kinerja positif pada tahun 2026 yang cukup menantang. Penerimaan perpajakan tahun 2027 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan kemungkinan moderasi harga komoditas dan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sementara itu, Pemerintah berupaya mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2026 yang akan menjadi basis penerimaan perpajakan 2027, di tengah tekanan terhadap harga komoditas dan dinamika kondisi global. Adapun realisasi penerimaan perpajakan hingga triwulan I 2026 telah mencapai Rp462,7 triliun (17,2 persen terhadap APBN 2026). Penerimaan perpajakan tahun 2027 diproyeksikan juga akan meningkat meskipun terjadi perubahan tatanan dunia yang kemungkinan menimbulkan tekanan terhadap perekonomian domestik. Kinerja perpajakan tahun 2027 diharapkan dapat mendukung dan menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan efektif melalui upaya mobilisasi pendapatan negara yang lebih kuat.

Upaya optimalisasi penerimaan perpajakan tidak terlepas dari berbagai risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi, baik yang berasal dari tekanan eksternal global maupun dari faktor-faktor internal dalam negeri. Faktor eksternal masih dipengaruhi oleh adanya eskalasi ketegangan geopolitik dunia, tren proteksionisme global, volatilitas sektor keuangan, disrupsi AI dan ketimpangan teknologi, serta faktor perubahan iklim dan transisi energi dunia. Tantangan internal antara lain: (i) dorongan transformasi ekonomi digital dan berbasis AI yang berkembang pesat, namun belum sepenuhnya tertangkap dalam basis dan sistem perpajakan nasional; (ii) upaya penyelarasan kebijakan perpajakan nasional dengan standar dan praktik terbaik perpajakan internasional dalam merespons dinamika ekonomi global; dan (iii) efektivitas kesinambungan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi pajak yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi, terutama implementasi *Coretax system* secara menyeluruh; dan (iv) masih terdapatnya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya terjangkau oleh radar perpajakan, sehingga perluasan basis data dan cakupan pengawasan perpajakan akan terus didorong agar potensi penerimaan tersebut dapat teroptimalkan secara bertahap.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kebijakan perpajakan yang responsif dan tepat sasaran dapat menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Sistem perpajakan nasional perlu terus bertransformasi seiring perubahan struktur ekonomi dan dinamika global yang semakin kompleks, guna memastikan mobilisasi pendapatan domestik yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketidakpastian geopolitik dan fragmentasi perdagangan global harus dimanfaatkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat reformasi perpajakan yang adaptif dan menjadi fondasi fiskal yang kokoh. Upaya lanjutan reformasi perpajakan dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memastikan sistem perpajakan yang lebih adil untuk masyarakat dan dunia usaha. Upaya ini mencakup penyelarasan kebijakan perpajakan yang mendorong berkembangnya sektor-sektor produktif dan bernilai tambah tinggi, peningkatan kepatuhan melalui kemudahan layanan dan pengawasan berbasis teknologi dan AI, serta rasionalisasi pemberian insentif yang lebih tepat sasaran untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan perubahan lanskap perpajakan global menuntut semua pihak untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangannya. Sistem perpajakan nasional akan terus diperkuat dan dimodernisasi untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, hal tersebut juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi seluruh pelaku ekonomi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan umum perpajakan 2027 diarahkan untuk mendukung perekonomian agar dapat tumbuh lebih tinggi dan sejahtera bersama. Kebijakan tersebut diharapkan dapat

memitigasi dampak risiko dan tantangan yang ada, melalui: (i) penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan sektor bernilai tambah tinggi, meningkatkan penerimaan dan rasio perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (ii) peningkatan kepatuhan perpajakan melalui pengawasan aktivitas dan barang ilegal berbasis teknologi informasi berbasis *big data* dan AI, sinergi dan *joint program*, serta kepastian penegakan hukum termasuk percepatan *debottlenecking* tantangan berusaha dan investasi; (iii) penguatan sistem perpajakan ekonomi digital yang kondusif dan berkeadilan untuk memastikan sistem perpajakan nasional adaptif terhadap perkembangan model bisnis baru seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan; dan (iv) pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah, terukur, dan berjangka waktu untuk mengakselerasi investasi, hilirisasi industri, dan revitalisasi sektor resilien yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis pajak serta kepabeanan dan cukai sebagai implementasi dari kebijakan umum perpajakan 2027. Kebijakan teknis pajak tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, *shadow economy*, dan sektor informal lainnya;
2. Penguatan administrasi pajak dalam pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi *Coretax* dan penggunaan *Compliance Risk Management Integrated Risk Engine* (CRM-IRE) guna peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak;
3. Peningkatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Grup, Wajib Pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen;
4. Penguatan fungsi penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui *multidoor approach* untuk memberikan efek jera, termasuk antisipasi terhadap praktik penghindaran pajak, *under invoicing*, dan praktik ilegal lainnya; dan
5. Optimalisasi insentif pajak melalui evaluasi pemanfaatan insentif pajak guna mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan iklim usaha.

Selain itu, kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai juga berperan dalam mendukung kebijakan umum perpajakan. Kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2027 adalah sebagai berikut:

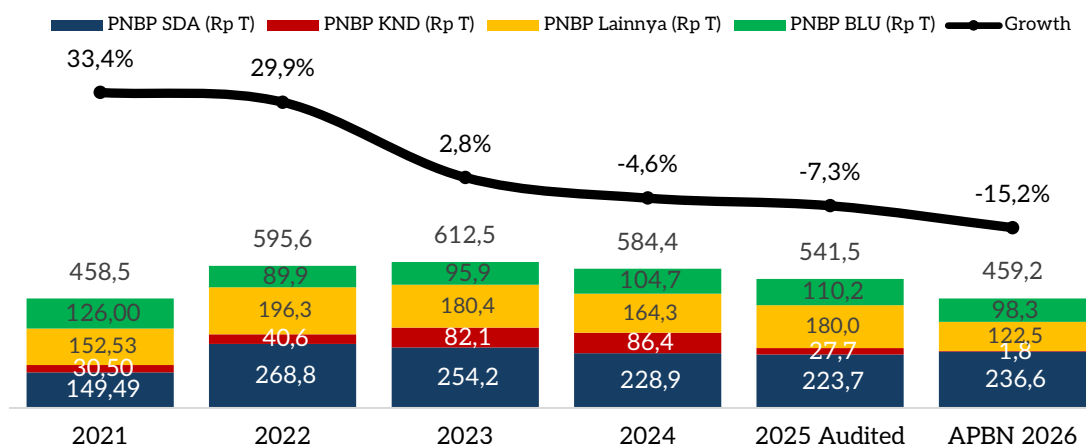
1. Penguatan peran kepabeanan dan cukai untuk mendukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi;
 - b. optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
 - c. peningkatan ekspor produk UMKM melalui optimalisasi klinik ekspor dan kolaborasi dengan berbagai entitas; dan
 - d. peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.
2. Penguatan kebijakan untuk mendukung perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif melalui:
 - a. penguatan kapasitas dan revitalisasi pengawasan laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan dan bandara utama;

- b. pencegahan dan pemberantasan perdagangan barang ilegal, Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP), dan kejahatan lintas negara;
 - c. peningkatan efektivitas penegakan hukum dan audit kepabeanan dan cukai; dan
 - d. pengawasan kepabeanan untuk mengantisipasi praktik transfer pricing, khususnya pada kegiatan ekspor komoditas.
3. Optimalisasi penerimaan negara dilakukan melalui:
 - a. intensifikasi kebijakan tarif CHT dan tarif bea masuk komoditas tertentu;
 - b. ekstensifikasi BKC dan perluasan basis penerimaan bea keluar komoditas tertentu sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini dan daya beli masyarakat;
 - c. penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif; dan
 - d. penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan (*joint program*).
4. Peningkatan kualitas layanan dan tata kelola melalui dukungan manajemen organisasi, SDM, dan IT dengan melakukan:
 - a. penguatan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif;
 - b. penyempurnaan manajemen proses bisnis kepabeanan dan cukai;
 - c. penguatan SDM yang berintegritas, berkompeten, dan berbudaya sesuai kebutuhan dan nilai organisasi;
 - d. penyempurnaan *Core System* dan *Smart Customs*; dan
 - e. peningkatan kualitas komunikasi, publikasi, dan bimbingan pengguna jasa, serta kerja sama antarlembaga.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kinerja PNBП tahun 2021-2025 menunjukkan capaian positif, dengan realisasi yang melebihi target APBN. Kinerja PNBП tahun 2025 mencapai Rp541,5 triliun atau 105,4 persen dari target APBN sebesar Rp513,6 triliun. Capaian tersebut melanjutkan kinerja tahun 2024, dengan realisasi PNBП mencapai Rp584,4 triliun atau 106,4 persen dari APBN 2024 yang sebesar Rp549,1 triliun. Dilihat dari kontribusinya, hingga tahun 2025 PNBП SDA masih cukup dominan dengan kontribusi 41,3 persen dari total penerimaan PNBП. Kontributor terbesar berikutnya berasal dari PNBП Lainnya sebesar 33,2 persen yang utamanya bersumber dari layanan K/L.

Grafik 24. Perkembangan PNBП, 2021 - 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Kinerja capaian positif pada periode tersebut perlu diwaspadai mengingat pertumbuhannya yang kontraktif dalam 2 tahun terakhir. Kinerja PNBП tahun 2024 berkontraksi sebesar 4,6 persen (yoy) akibat penurunan PNBП SDA dan PNBП Lainnya dan berlanjut di tahun 2025 menjadi sebesar 7,3 persen (yoy) terutama akibat berlanjutnya kontraksi PNBП SDA dan PNBП KND. Kontraksi PNBП SDA disebabkan karena moderasi harga serta penurunan volume produksi batu bara dan *lifting* minyak bumi sedangkan kontraksi PNBП KND disebabkan penerbitan UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) UU No. 16 Tahun 2026 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur pengalihan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara.

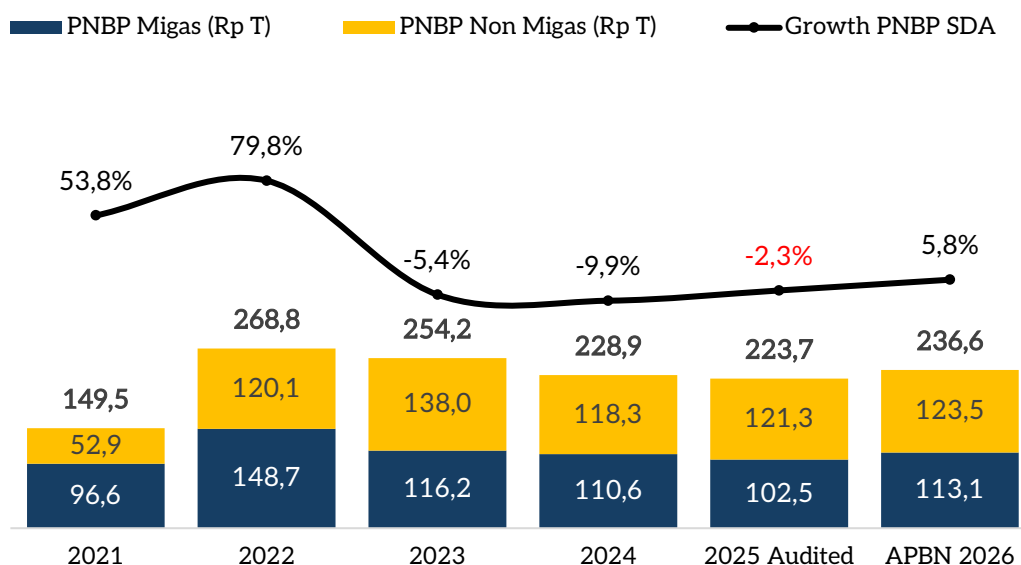
Pada tahun 2026, PNBП ditargetkan sebesar Rp459,2 triliun atau setara 1,8 persen PDB. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi PNBП 2025 yang mencapai Rp541,4 triliun, utamanya karena menurunnya target setoran dividen BUMN dan potensi beberapa PNBП tertentu yang bersifat tidak rutin antara lain pendapatan dari hasil penegakan hukum. Dari target PNBП 2026 tersebut, realisasi capaian hingga triwulan I 2026 telah mencapai Rp112,1 triliun (24,4 persen APBN 2026).

Beberapa tantangan pada tahun 2027 perlu direspons dengan kebijakan strategis. Berbagai tantangan yang tetap akan muncul antara lain volatilitas harga komoditas, pengendalian produksi pada beberapa komoditas SDA, *underinvoicing*, *underreporting*, aktivitas ilegal, kualitas layanan yang belum sepenuhnya merata dan inklusif, serta data layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi.

Untuk itu, perlu disusun arah dan strategi kebijakan umum PNBП 2027, sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan SDA dilakukan melalui strategi perbaikan kebijakan dan tata kelola SDA termasuk penguatan sistem pengawasan seperti SIMBARA, serta mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Peningkatan kualitas layanan PNBП, yang dilakukan melalui penerapan standarisasi, inovasi, digitalisasi, dan simplifikasi layanan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih inklusif, mudah diakses dan berkualitas; dan
3. Peningkatan kepatuhan, dilakukan melalui penguatan sinergi pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum serta optimalisasi penagihan piutang PNBП, antara lain melalui perluasan implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) guna mendukung pengelolaan PNBП yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Grafik 25. Perkembangan PNBPN SDA, 2021 - 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

PNBP SDA

Kinerja PNBPN SDA periode 2021-2025 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2024-2025 kinerja PNBPN SDA mengalami penurunan. Realisasi PNBPN SDA (yang terdiri dari migas dan nonmigas) pada tahun 2024 mencapai Rp228,9 triliun (target APBN Rp207,7 triliun), dan pada tahun 2025 mencapai Rp223,7 triliun (target APBN Rp217,9 triliun). Dilihat dari kinerja capaian, PNBPN SDA menunjukkan kinerja positif melampaui target APBN. Sementara dilihat dari pertumbuhannya, realisasi PNBPN SDA tersebut menunjukkan sedikit penurunan, terutama akibat penurunan harga ICP dan batu bara. Di sisi lain, harga-harga beberapa komoditas lainnya seperti emas dan tembaga menunjukkan tren kenaikan.

Upaya optimalisasi PNBPN SDA terus dilakukan baik dari sisi kebijakan maupun sisi administratif. Upaya optimalisasi melalui kebijakan dilakukan melalui penyempurnaan subyek, obyek, dan tarif. Sedangkan dari sisi administratif, optimalisasi dilakukan antara lain melalui penyempurnaan proses bisnis dan integrasi sistem informasi. Aspek lain yang sangat penting adalah peningkatan pengawasan, kepatuhan dan penegakan hukum yang dapat diperkuat melalui sinergi.

PNBP SDA Migas

Kinerja PNBPN SDA Migas tahun 2021-2025 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Realisasi PNBPN SDA Migas tahun 2024 mencapai Rp110,6 triliun atau berkontraksi 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja ICP dan *lifting* minyak bumi. Sementara kinerja PNBPN SDA Migas tahun 2025 hanya mencapai Rp102,5 triliun atau mengalami kontraksi 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh realisasi ICP yang berkontraksi menjadi USD67,4 per barel dan *lifting* gas bumi menjadi 948,9 ribu BSMPH. Sementara itu, *lifting* minyak bumi relatif membaik dengan capaian realisasi sebesar 605,9 ribu BPH. Capaian kinerja PNBPN SDA Migas

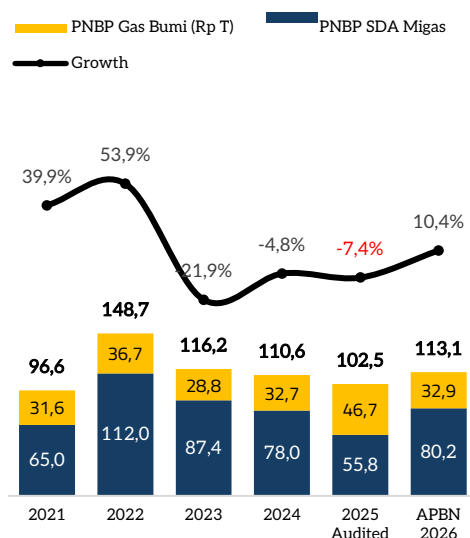
tahun 2025 tersebut disumbang oleh Pendapatan dari Minyak Bumi sebesar Rp55,8 triliun dan Pendapatan dari Gas Bumi sebesar Rp46,7 triliun.

PNBP SDA Migas tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp113,1 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Minyak Bumi sebesar Rp80,2 triliun dan Penerimaan Gas Bumi sebesar Rp32,9 triliun. Penetapan target tersebut terutama mempertimbangkan fluktuasi ICP dan kinerja *lifting* migas di sepanjang tahun 2026. Realisasi PNBP SDA Migas triwulan I tahun 2026 tercatat Rp18,6 triliun atau berkontraksi 25,4 persen (yoy).

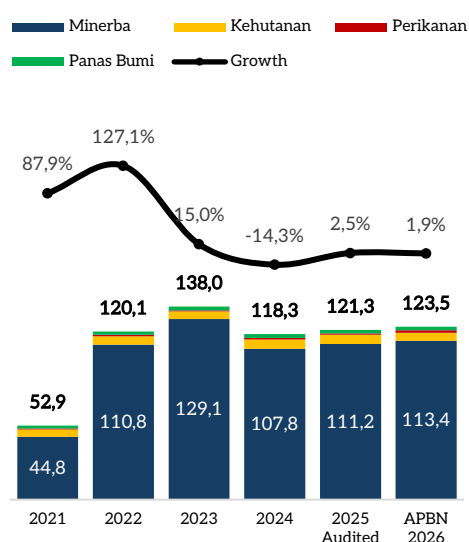
PNBP SDA Migas masih menghadapi tantangan cukup berat seperti volatilitas harga minyak mentah internasional di tengah konflik Timur Tengah, dan kecenderungan penurunan produksi migas nasional. ICP masih dalam tren yang fluktuatif serta kinerja *lifting* migas yang belum optimal masih menjadi tantangan utama dalam upaya optimalisasi kinerja PNBP SDA migas. Selain itu, terdapat beberapa tantangan lain yang dapat memengaruhi optimalisasi PNBP SDA migas, antara lain: (i) upaya mendorong investasi sektor migas; (ii) upaya penyempurnaan regulasi terkait; (iii) upaya mendorong optimalisasi *lifting* migas; (iv) upaya dalam mendorong penyelesaian proyek migas strategis; (v) upaya meningkatkan optimalisasi tata kelola dan kegiatan monitoring evaluasi secara berkelanjutan; (vi) upaya sinkronisasi sistem/aplikasi yang terintegrasi dan penguatan digitalisasi data antarinstansi terkait; serta (vii) upaya Pemerintah dalam mendorong transisi EBT.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah akan melaksanakan berbagai langkah kebijakan PNBP SDA Migas tahun 2027. Arah kebijakan tersebut adalah:

1. Optimalisasi PNBP SDA minyak dan gas bumi antara lain melalui :
 - a. Optimalisasi *lifting* migas dengan mereaktivasi sumur dan lapangan *idle* (*idle well and fields*), mempercepat pengembangan *undeveloped discovery*, optimalisasi sumur eksisting melalui pemanfaatan teknologi seperti *multi-stage fracturing* (MSF), mempercepat implementasi *Enhanced Oil Recovery (EOR) full scale*, dan percepatan *Plan of Development (PoD)*;
 - b. Efisiensi biaya dengan tetap mengutamakan keberlanjutan investasi dan potensi peningkatan produksi migas; dan
 - c. Meningkatkan pengawasan *lifting* migas dan produksi berbasis wilayah penghasil.
2. Peningkatan layanan perizinan dalam upaya penambahan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi antara lain melalui percepatan, penyiapan dan penawaran wilayah kerja yang berkualitas;
3. Penyempurnaan kebijakan dan tata kelola untuk menjaga daya tarik investasi hulu migas melalui kepastian fiskal, penyederhanaan regulasi dan penerapan yang konsisten; serta sinkronisasi data hulu-hilir migas untuk mengoptimalkan potensi pengembangan hulu migas.

Grafik 26. Perkembangan PNBP SDA Migas, 2021 – 2026 (Rp T)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Grafik 27. Perkembangan PNBP SDA Nonmigas, 2021 – 2026 (Rp T)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

PNBP SDA Nonmigas

Kinerja PNBP SDA Nonmigas 2021-2025 tumbuh relatif stabil. Realisasi PNBP SDA Nonmigas tahun 2025 mencapai Rp121,3 triliun, atau tumbuh 2,5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp118,3 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan dampak implementasi PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian ESDM dan adanya tren peningkatan harga mineral acuan (HMA) pada kuartal IV 2025. Pada tahun 2026, PNBP SDA Nonmigas ditargetkan sebesar Rp123,5 triliun atau meningkat 1,9 persen dari realisasi 2025 sejalan dengan proyeksi harga batu bara dan mineral yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Realisasi PNBP SDA Nonmigas hingga triwulan I 2026 telah mencapai Rp31,2 triliun atau sebesar 25,2 persen dari target APBN, tumbuh 23,2 persen (yoy).

Pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada tahun 2027 masih menghadapi berbagai tantangan. Selain adanya fluktuasi harga komoditas, terdapat beberapa tantangan lain, di antaranya: (i) belum optimalnya penerimaan negara akibat praktik *underreporting* dan *underinvoicing*; (ii) masih adanya praktik *illegal mining*, *illegal logging* dan *illegal fishing*; (iii) belum maksimalnya upaya penegakan hukum; (iv) pengawasan dan monitoring digital; (v) regulasi yang belum optimal; (vi) isu dampak kerusakan lingkungan; dan (vii) transisi energi dan kebijakan hijau.

Kebijakan PNBP SDA Nonmigas di masing-masing sektor pada tahun 2027 diarahkan agar dapat mengoptimalkan penerimaan pada sektor Minerba, Kehutanan, Kelautan-Perikanan, serta Panas Bumi. Rincian kebijakan PNBP SDA Nonmigas pada masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

Kebijakan PNBPN SDA Minerba

1. Optimalisasi PNBPN SDA minerba antara lain melalui:
 - a. Ekstensifikasi dan intensifikasi objek PNBPN minerba;
 - b. Penguatan pengawasan data transaksi pertambangan melalui peningkatan kerjasama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan instansi terkait lainnya; dan
 - c. Pemberian sanksi atas ketidakpatuhan dalam pemenuhan DMO Batu bara dan target komitmen pembangunan smelter.
2. Peningkatan layanan antara lain melalui:
 - a. Percepatan layanan perizinan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB); dan
 - b. Peningkatan kualitas layanan ePNBP dan *Helpdesk*.
3. Penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola antara lain melalui:
 - a. Evaluasi serta penyesuaian tarif PNBPN melalui penguatan regulasi;
 - b. Digitalisasi dan integrasi sistem melalui implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) pada sistem aplikasi ePNBP dan integrasi data transaksi aplikasi ePNBP dengan MOMS Mineral ke dalam ekosistem SIMBARA; dan
 - c. Penguatan pembinaan, pengawasan dan kepatuhan antara lain melalui penagihan aktif dan monitoring, integrasi ePNBP dengan SIMPONI, dan audit kewajiban Wajib Bayar.

Kebijakan PNBPN SDA Kehutanan:

1. Optimalisasi PNBPN SDA Kehutanan antara lain melalui:
 - a. Penyelesaian kasus perkebunan kelapa sawit terbangun di kawasan hutan tanpa perizinan;
 - b. Intensifikasi multi usaha kehutanan (MUK) melalui optimalisasi potensi pemanfaatan kawasan (*sylvofishery* dan *sylvopastural*) dan jasa lingkungan berupa perdagangan karbon dan wisata alam;
 - c. Optimalisasi penyelesaian piutang PNBPN penggunaan kawasan hutan (PKH) dengan memprioritaskan koordinasi dengan K/L dalam rangka mempersempit ruang gerak yang mempunyai piutang;
 - d. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kewajiban PNBPN-PKH; dan
 - e. Percepatan penyelesaian piutang PNBPN melalui *Automatic Blocking System* (ABS).
2. Peningkatan layanan melalui implementasi konsolidasi spasial untuk mendukung penyelarasan peta perizinan berusaha, pengawasan, kepastian ruang investasi pada kawasan hutan, dan percepatan pengembangan industri kehutanan;
3. Penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola antara lain melalui
 - a. Penguatan SISPAHUT, SIPUHH, SIPNBPN, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar yang tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan kewajiban pembayaran PNBPN; dan
 - b. Digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar Kementerian/Lembaga dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan Wajib Bayar dengan pengembangan integrasi SIPNBPN-PKH dengan Sistem Informasi di Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM;

Kebijakan PNBP SDA Kelautan-Perikanan:

1. Optimalisasi PNBP SDA kelautan dan perikanan melalui:
 - a. pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. Evaluasi jenis dan besaran tarif PNBP sektor kelautan dan perikanan; serta perluasan Wajib Bayar atas jenis PNBP sektor kelautan dan perikanan melalui penyesuaian regulasi;
 - c. Mengintensifkan pendaftaran kapal perikanan; yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perluasan Wajib Bayar;
2. Peningkatan layanan perizinan pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan antara lain melalui peningkatan sinergi lintas K/L dalam rangka kemudahan dan percepatan perizinan.
3. Penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola SDA perikanan dan kelautan, melalui:
 - a. Integrasi dan penguatan basis data sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung optimalisasi penerapan implementasi e-PIT (Penangkapan Ikan Terukur);
 - b. Penguatan, perluasan, dan peningkatan teknologi dan infrastruktur monitoring dan pengawasan serta penegakan hukum, seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) dan kamera elektronik pemantau (*electronic monitoring system*) di Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.

Kebijakan PNBP SDA Panas Bumi:

1. Optimalisasi PNBP SDA panas bumi melalui:
 - a. Pemanfaatan panas bumi untuk mendorong porsi EBT dalam bauran energi nasional dan memperkuat ketahanan energi nasional; dan
 - b. Peningkatan efisiensi biaya produksi melalui penguatan monitoring dan evaluasi RKAB, penerapan inovasi teknologi, serta peningkatan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3LL).
2. Peningkatan integrasi lintas lembaga terkait layanan perizinan panas bumi dan layanan perizinan lainnya yang mendukung pengembangan panas bumi, di antaranya perizinan di bidang kehutanan dan perindustrian;
3. Penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola perusahaan panas bumi melalui:
 - a. Percepatan perubahan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi pengembangan panas bumi;
 - b. Penguatan tata kelola perusahaan panas bumi melalui percepatan dan perluasan penggunaan aplikasi digital antara lain: *Geothermal Energy Information System* (GENESIS), meliputi penambahan modul *dashboard* laporan ePNBP dan e-RKAB, persetujuan tajak dan uji alir, penerbitan sertifikat kelayakan peralatan dan instalasi, serta laporan K3LL secara terintegrasi; dan
 - c. Penguatan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian isu sosial.

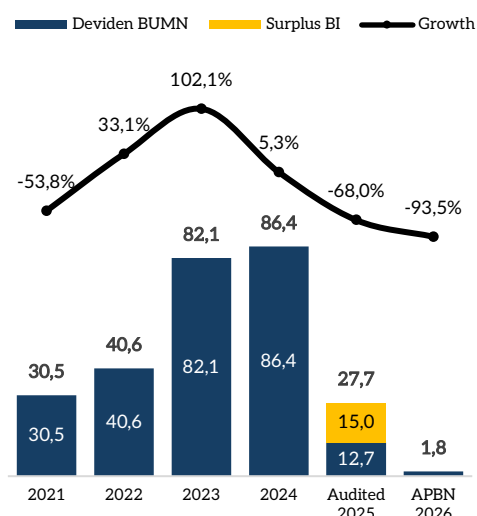
PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

PNBP KND tahun 2021 - 2025 menunjukkan kinerja yang dinamis, sejalan dengan perubahan kebijakan. Kinerja tahun 2024-2025 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2025 sttd UU No. 16 Tahun

2026 tentang Badan Usaha Milik Negara yang salah satunya terdapat perubahan kebijakan pengelolaan BUMN. Kebijakan tersebut mengatur tugas dan peran BPI Danantara dalam mengelola BUMN secara operasional dan mengoptimalkan dana setoran dividen BUMN. Dampak langsungnya adalah tidak disetorkannya lagi dividen BUMN ke rekening kas negara sehingga capaian PNPB KND yang bersumber dari dividen BUMN menjadi turun drastis. Pada tahun 2024, realisasi PNPB KND mencapai Rp86,4 triliun (utamanya bersumber dari dividen BUMN), turun menjadi Rp27,7 triliun di tahun 2025 atau 30,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi PNPB KND pada triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar Rp55,7 miliar.

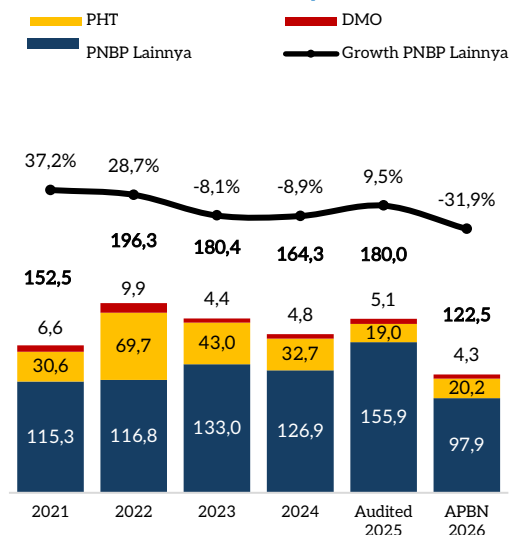
PNPB KND pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung agenda reformasi struktural di bidang pengelolaan BUMN. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 tahun 2023 tentang BUMN guna memperkuat peran BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional sekaligus memastikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap penerimaan negara dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal.

Grafik 28. Perkembangan PNPB KND, 2021 - 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Grafik 29. Perkembangan PNPB Lainnya, 2021 - 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

PNPB Lainnya

Kinerja PNPB Lainnya tahun 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif seiring dinamika aktivitas ekonomi dan masyarakat serta volatilitas harga komoditas, khususnya batu bara. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2024, realisasi PNPB Lainnya kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp180,0 triliun atau tumbuh 9,5 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp164,3 triliun. Pertumbuhan positif pada tahun 2025 terutama didorong oleh kenaikan PNPB K/L sebesar 22,9 persen, dari Rp126,9 triliun pada 2024 menjadi Rp155,9 triliun pada 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya layanan Pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha, optimalisasi pemanfaatan aset negara, serta penyempurnaan kualitas layanan publik pada kementerian/lembaga.

Pada tahun 2026, PNBK Lainnya ditargetkan sebesar Rp122,5 triliun, atau menurun 31,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp180,0 triliun. Target besaran PNBK Lainnya tahun 2026 secara terperinci mencakup PNBK K/L sebesar Rp97,9 triliun, Pendapatan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp20,2 triliun, dan Pendapatan Minyak Mentah *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar Rp4,3 triliun. Target PNBK Lainnya tahun 2026 tidak memperhitungkan penerimaan seperti Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) serta penerimaan lainnya yang bersifat temporer. Penetapan target telah memperhitungkan prospek harga serta permintaan komoditas batu bara yang masih cenderung moderat. Realisasi PNBK Lainnya pada triwulan I tahun 2026 mencapai Rp40,6 triliun atau sebesar 33,1 persen dari target APBN atau tumbuh 8,3 persen (yoy) antara lain berasal dari pendapatan dari hasil penegakan hukum.

PNBK Lainnya khususnya PNBK K/L, ke depan masih menghadapi berbagai tantangan, utamanya bersumber dari kualitas layanan yang belum merata dan tata kelola yang belum optimal. Oleh karena itu, arah kebijakan umum PNBK K/L tahun 2027 dilakukan melalui kebijakan yaitu: (i) peningkatan kualitas layanan PNBK yang inklusif melalui standardisasi, digitalisasi dan simplifikasi layanan (ii) penyempurnaan pengelolaan, integrasi dan sinkronisasi *database* sistem informasi; (iii) optimalisasi BMN melalui pemanfaatan dan pendayagunaan BMN pada K/L secara optimal; (iv) penyempurnaan tata kelola, regulasi, dan pengawasan, serta penguatan sinergi antar K/L.

Secara rinci, arah kebijakan pada enam K/L kontributor utama PNBK K/L adalah sebagai berikut:

1. **Kementerian Komunikasi dan Digital**, antara lain

- a. Peningkatan Kualitas Layanan: (i) pengembangan layanan Palapa Ring melalui kebijakan *sandbox* sebagai ruang uji coba terbatas (*pilot project*) dalam rangka optimalisasi manfaat layanan konektivitas kepada masyarakat khususnya daerah 3T dan diseminasi program Pemerintah/Presiden; (ii) percepatan dan kemudahan pelayanan izin stasiun radio (ISR) dan penerbitan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi; (iii) pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran guna mendukung program internet murah dan layanan digitalisasi penyiaran; serta (iv) penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan publik tertentu bagi pengguna selain pegawai instansi/instansi;
- b. Penyempurnaan Kebijakan dan Tata Kelola: (i) evaluasi kebijakan tarif secara berkala atas layanan Kementerian Komunikasi dan Digital guna menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pertumbuhan industri telekomunikasi; (ii) penyempurnaan pengelolaan, integrasi dan sinkronisasi *database* sistem informasi di Kementerian Komunikasi dan Digital dan K/L terkait; (iii) pelaksanaan edukasi dan evaluasi pengelola Nama Domain Indonesia; (iv) Penguatan mutu dan daya saing kelembagaan melalui peningkatan akreditasi institusi dan program studi pada Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) serta (v) peningkatan kepastian hukum dalam perlindungan anak di ruang digital melalui pengawasan dan pengendalian kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital) serta regulasi pelaksana terkait lainnya.

2. **Kepolisian RI**, antara lain

- a. Peningkatan Kualitas Layanan: (i) digitalisasi sistem layanan Polri (misalnya SKCK, SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, NRKB Pilihan, dan TCKB), dengan pemanfaatan *database Electronic Registration and Identification* (ERI); (ii) optimalisasi layanan regident yang semakin dekat dengan masyarakat seperti gerai SIM, layanan keliling, Samsat corner, *delivery service*; (iii) dukungan pengayoman masyarakat, melalui pengembangan *Regional Traffic Management Center* (RTMC), *Traffic Management Center* (TMC), dan *smart city*;
- b. Penyempurnaan Kebijakan dan Tata Kelola: (i) dukungan penegakan hukum, di antaranya melalui pengembangan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE); dan (ii) penguatan Sistem Manajemen Pengamanan pada objek vital nasional (obvitnas) dan objek tertentu serta pengamanan keramaian yang bersifat komersial.

3. **Kementerian Perhubungan**, antara lain

- a. Peningkatan Kualitas Layanan: (i) peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, kualitas layanan dan diversifikasi layanan melalui penyediaan layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya pada wilayah 3TP (terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan); (ii) optimalisasi pemanfaatan BMN melalui skema sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada aset transportasi secara efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Penyempurnaan Kebijakan dan Tata Kelola: (i) peningkatan tata kelola, regulasi, dan pengawasan PNBP melalui penyesuaian regulasi tarif PNBP yang adaptif, optimalisasi penyelesaian piutang, dan peningkatan pengawasan PNBP guna menjamin akuntabilitas dan kepatuhan Wajib Bayar; (ii) transformasi digital dan integrasi sistem layanan PNBP melalui penyederhanaan sistem informasi ke dalam satu platform aplikasi terpadu dan persiapan penerapan sistem *single billing*. Salah satunya melalui pengembangan **Inaportnet** untuk mendukung integrasi layanan guna mendukung kelancaran arus distribusi dan pembangunan nasional.

4. **Kementerian Hukum**, antara lain

- a. Peningkatan Kualitas Layanan: (i) transformasi digital layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi dan penguatan basis data; (ii) peningkatan kualitas layanan hukum untuk memberikan jaminan waktu penyelesaian yang lebih singkat melalui pengembangan skema layanan premium/*fast track*; (iii) penguatan fungsi edukasi dan sosialisasi layanan melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik secara berkala di berbagai wilayah;
- b. Penyempurnaan Kebijakan dan Tata Kelola: (i) peningkatan kepatuhan administrasi bagi pengguna layanan antara lain melalui integrasi dan pertukaran data dengan berbagai instansi, serta penerapan sistem peringatan dini (*automated reminder*) atas pemenuhan kewajiban pembayaran perpanjangan merek dan biaya tahunan paten yang akan jatuh tempo; (ii) penguatan regulasi melalui penyesuaian jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Hukum agar memiliki dasar pengenaan PNBP yang jelas, terukur, dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan, serta kemampuan masyarakat namun tetap kompetitif secara global.

5. **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, antara lain
 - a. Peningkatan Kualitas Layanan: (i) penguatan transformasi digital untuk pengembangan dan integrasi sistem layanan keimigrasian baik internal maupun eksternal dengan K/L terkait; (ii) perluasan jangkauan dan kualitas layanan melalui perluasan layanan dan cabang layanan keimigrasian seperti unit kerja keimigrasian, unit layanan paspor, dan *immigration lounge*;
 - b. Penyempurnaan Kebijakan dan Tata Kelola: (i) kebijakan bebas visa secara lebih selektif dengan memperhatikan asas resiprokal dan kepentingan nasional; (ii) penguatan regulasi melalui penyesuaian jenis dan tarif PNBP layanan keimigrasian dan pemasarakatan, serta pembentukan regulasi teknis pelaksanaan dan pelaporannya.
6. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**, antara lain
 - a. Peningkatan Kualitas Layanan: (i) perluasan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan pertanahan; (ii) inovasi dan diversifikasi pelayanan pertanahan;
 - b. Penyempurnaan Kebijakan dan Tata Kelola: (i) optimalisasi pemanfaatan aset milik Kementerian melalui penataan dan penyiapan peraturan pelaksanaan; (ii) kebijakan penyusunan tarif PNBP yang mendorong kemudahan berinvestasi dan keberpihakan kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kontribusi terhadap penerimaan negara, serta (iii) transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang dengan menghadirkan layanan yang transparan, mudah, dan bernilai tambah melalui penguatan tiga pilar transformasi yaitu kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia.

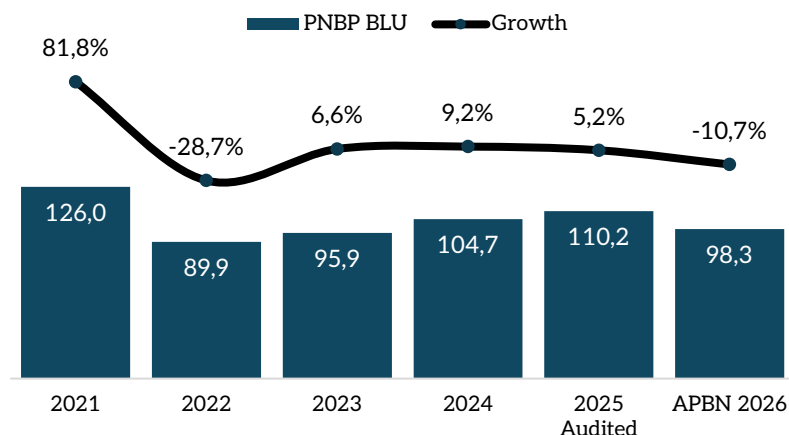
PNBP Badan Layanan Umum (BLU)

PNBP Pendapatan BLU tahun 2021 – 2025 menunjukkan kinerja yang fluktuatif, di mana mengalami penurunan tahun 2022, namun kembali menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2025. Tahun 2025, realisasi pendapatan BLU mencapai Rp110,2 triliun atau tumbuh 5,2 persen dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp104,7 triliun. Berdasarkan komposisinya, pendapatan BLU dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan yaitu Rp25,8 triliun pada tahun 2024 dan tumbuh sebesar 22,3 persen menjadi Rp31,5 triliun di tahun 2025. Kinerja capaian PNBP dari BLU pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dipengaruhi terutama oleh perkembangan harga CPO. Peningkatan PNBP BLU 2025 juga didukung oleh peningkatan kinerja terutama dari BLU rumpun bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2026, PNBP Pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp98,3 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 disebabkan perkiraan harga CPO yang mengalami moderasi. Realisasi PNBP Pendapatan BLU hingga triwulan I 2026 mencapai Rp21,8 triliun (22,2 persen dari target APBN 2026).

Pada tahun 2027, peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi PNBP BLU masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: fluktuasi harga, pemerataan kapasitas dan layanan BLU, belum optimalnya pengelolaan aset, serta jejaring dan kerja sama layanan antar BLU yang masih perlu ditingkatkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa kebijakan PNBP BLU pada tahun 2027 adalah sebagai berikut: (i) penguatan layanan BLU melalui pengembangan layanan spesialis, sertifikasi, pengujian dan

pendidikan; (ii) dukungan terhadap ketahanan energi melalui penguatan BLU sektor sawit dengan pemberian insentif biodiesel; (iii) Optimalisasi pemanfaatan aset BLU dengan meningkatkan utilisasi aset, mengembangkan unit usaha, serta menata pengelolaan usaha; (iv) Optimalisasi investasi dana BLU melalui diversifikasi instrumen dan portofolio investasi, penguatan manajemen risiko, serta penataan pengelolaan dana untuk meningkatkan efektivitas penempatan dana BLU.

**Grafik 30. Perkembangan PNPB BLU,
2021 – 2026 (Rp T)**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Hibah

Penerimaan hibah perlu dikelola secara hati-hati untuk memastikan kontribusinya terhadap pembangunan nasional tetap optimal tanpa menimbulkan risiko fiskal maupun nonfiskal. Dalam pelaksanaannya, penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian, serta tidak disertai ikatan politik maupun muatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara. Selain itu, hibah diutamakan yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP), tidak menimbulkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN, serta dalam bentuk barang dan jasa yang berada dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya untuk peningkatan atau penyesuaian. Oleh karena itu, kebijakan penerimaan hibah diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga yang memberikan nilai tambah nyata bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Kebijakan Penerimaan Hibah dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 antara lain:

1. Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.
2. Mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP).
3. Penerimaan hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN.

4. Penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau *retrofit*.
5. Penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Kementerian/Lembaga dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional

4.3.2. Kebijakan Belanja Negara

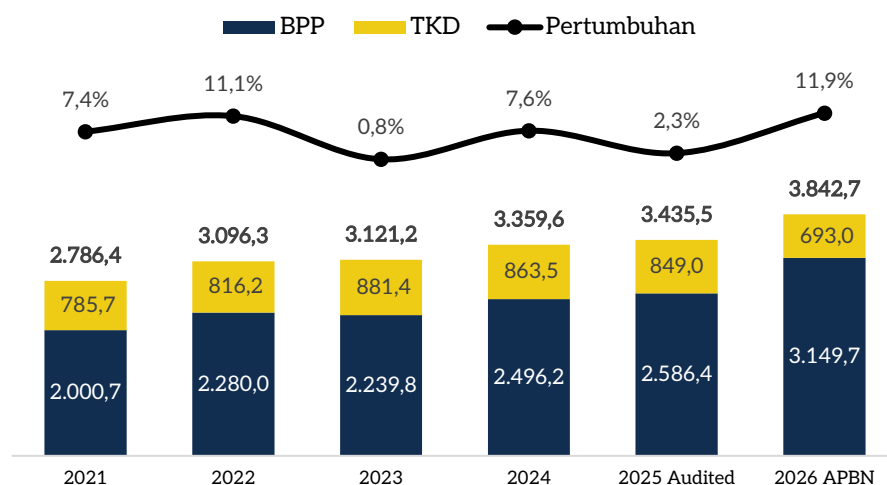
Perkembangan Belanja Negara pada periode 2021-2025 secara nominal menunjukkan tren peningkatan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan dengan terus mendorong efisiensi dan efektivitas. Arah belanja pada periode ini mengutamakan penguatan fondasi ekonomi melalui akselerasi pemulihan pascapandemi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan SDM antara lain pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada tahun 2025, belanja negara terutama ditekankan untuk mendukung delapan program prioritas antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Di akhir tahun 2025, untuk penanganan bencana Sumatera, pemerintah melakukan percepatan penyaluran dana darurat untuk 56 Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan Dana Siap Pakai yang dikoordinir oleh BNPB serta melalui relaksasi penyaluran TKD.

Pemerintah berkomitmen melakukan restrukturisasi anggaran guna mendorong efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah. Restrukturisasi ini bertujuan untuk menggeser porsi belanja yang kurang produktif menuju belanja yang lebih berdampak pada penguatan ketahanan pangan dan energi, serta kemandirian ekonomi. Langkah strategis ini mencakup restrukturisasi belanja rutin, penajaman target subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, serta penguatan sinergi antara pusat dan daerah. Efisiensi yang dilakukan diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi, sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan secara optimal untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pada tahun 2026, belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 81,9 persen dan TKD sebesar 18,1 persen.

Sejalan dengan upaya penanganan darurat bencana, Pemerintah melakukan percepatan realisasi TKD bagi wilayah terdampak di Sumatera guna mendukung proses rehabilitasi dan restrukturisasi infrastruktur dasar. Langkah ini diperkuat dengan alokasi dana cadangan bencana serta optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk merespons kondisi darurat. Kebijakan afirmatif ini diharapkan dapat segera memulihkan aktivitas ekonomi lokal dan memastikan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak tetap berjalan optimal.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun (21,2 persen dari pagu APBN), menunjukkan kinerja positif dan akselerasi penyerapan sejak awal tahun. Capaian ini tumbuh sebesar 31,4 persen (yoy), didorong oleh realisasi BPP sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari pagu) dan TKD yang mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari pagu). Realisasi belanja pada awal tahun ini dimanfaatkan secara optimal untuk menjalankan program-program prioritas nasional dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Realisasi program MBG yang jumlah penerimanya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu merupakan salah satu yang mendorong kenaikan Belanja Negara.

Grafik 31. Perkembangan Belanja Negara, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Kebijakan Belanja Negara tahun 2027 akan didorong untuk mendukung agenda PKPN dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan. PKPN disusun ke dalam 8 klaster yang berorientasi pada isu-isu yang paling strategis serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

1. **Kedaulatan Pangan** dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan sistem distribusi, stabilisasi harga, pengembangan sarana infrastruktur pangan, serta stabilisasi harga guna menjamin keterjangkauan bagi masyarakat.
2. **Kemandirian Energi dan Air** diarahkan pada pengurangan ketergantungan impor, peningkatan pemanfaatan sumber daya domestik, perluasan akses energi dan air yang merata, serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
3. **Pendidikan** dilaksanakan melalui peningkatan akses dan keterjangkauan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
4. **Kesehatan** difokuskan pada peningkatan akses fasilitas medis dan penguatan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah.
5. **Hilirisasi dan Industrialisasi** melalui peningkatan nilai tambah domestik dari komoditas unggulan melalui transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi untuk memperluas skala ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada ekspor bahan mentah
6. **Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana** melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang tidak hanya memperkuat konektivitas dan penyediaan hunian layak tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana
7. **Ekonomi Kerakyatan dan Desa** Pemberdayaan Desa dan Ekonomi Lokal diakselerasi melalui penguatan koperasi dan UMKM, serta pemberdayaan masyarakat guna memutus rantai kemiskinan dan pemeratakan kesejahteraan.
8. **Penurunan Kemiskinan** melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Selain itu, Belanja Negara juga diarahkan untuk mendukung faktor pendukung (*enabler*) yang meliputi pertahanan, kemananan, dan penegakan hukum, penguatan tata kelola dan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

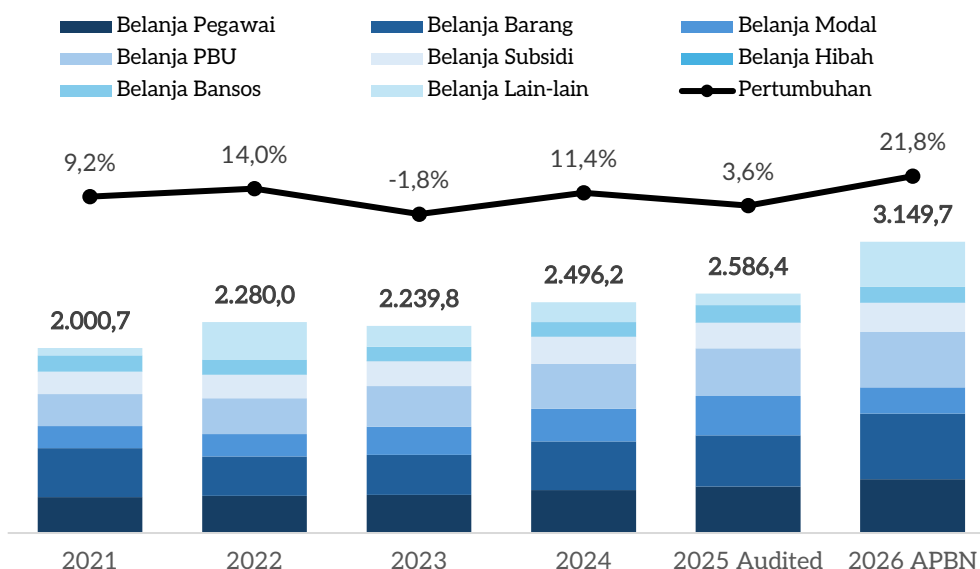
Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, dirumuskan kebijakan Belanja Negara tahun 2027. Kebijakan Belanja Negara 2027 akan diarahkan untuk: (i) melaksanakan rekonstruksi anggaran dengan mengedepankan belanja berkualitas dan efisiensi belanja; (ii) memperkuat infrastruktur pendukung sektor strategis dan prioritas guna mencapai kedaulatan ekonomi; (iii) mengoptimalkan belanja pegawai melalui digitalisasi birokrasi, remunerasi berbasis kinerja, dan mendukung perbaikan sistem pensiun ASN; (iv) menajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran; serta (v) memperkuat sinergi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode 2021-2025 menunjukkan peran vital APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga stabilitas domestik di tengah ketidakpastian global. Peningkatan nominal BPP pada periode ini dipengaruhi oleh dukungan pada agenda prioritas nasional, penanganan dampak pandemi, fenomena iklim seperti *El Nino* dan bencana hidrometeorologi, serta penyediaan layanan dasar masyarakat.

Pelaksanaan BPP menghadapi beberapa tantangan antara lain semakin berkurangnya ruang fiskal karena meningkatnya belanja wajib dan belum optimalnya belanja dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan BPP terus diarahkan pada penajaman komposisi anggaran agar belanja lebih berkualitas, peningkatan kualitas SDM.

Grafik 32. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2027 akan diarahkan pada belanja yang berkualitas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut dilaksanakan melalui strategi berikut:

1. Belanja Pegawai dioptimalkan dengan melanjutkan reformasi birokrasi melalui digitalisasi birokrasi, menjaga kesejahteraan ASN/TNI/Polri, serta mendukung perbaikan sistem Pensiun.
2. Belanja Barang didorong lebih efisien dan efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka efisiensi. Selain itu, dilakukan penghematan belanja operasional dan perjalanan dinas, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
3. Belanja Modal diarahkan sebagai investasi publik untuk mendukung program prioritas nasional (PKPN) antara lain ketahanan pangan dan energi, infrastruktur sosial, dan transformasi digital secara nasional.
4. Belanja Subsidi dan Bansos diperkuat melalui pemanfaatan DTSEN agar lebih tepat sasaran dan mengembangkan program bansos yang adaptif.

Belanja Pegawai sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal akan dioptimalkan untuk mendukung penyediaan layanan publik yang berkualitas, profesional dan berintegritas. Untuk itu, kebijakan Belanja Pegawai diarahkan pada:

1. Melanjutkan reformasi birokrasi dengan optimalisasi digitalisasi serta penguatan manajemen ASN termasuk kecukupan jumlah ASN, sistem kerja, dan remunerasi ASN.
2. Menjaga daya beli dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan pensiunan antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dengan tetap menjaga efisiensi anggaran dan memperhatikan keberlanjutan fiskal.
3. Mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.

Belanja Barang diupayakan untuk mendukung program prioritas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. Efektivitas dan efisiensi Belanja Barang terus ditingkatkan agar berdampak optimal terhadap pertumbuhan. Untuk itu, kebijakan Belanja Barang diarahkan pada:

1. Melanjutkan efisiensi belanja barang belanja perjalanan dinas, paket meeting, dan honorarium dengan memanfaatkan digitalisasi birokrasi;
2. Menyinkronisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dengan belanja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran dan Standar Struktur Biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan
4. Mendorong prioritas penggunaan TKDN dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

Belanja modal sebagai investasi publik akan diarahkan mendukung program prioritas nasional untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing. Oleh karena itu, kebijakan Belanja Modal tahun 2027 diarahkan pada:

1. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan energi, air dan konektivitas guna mencapai kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing;

2. Mendukung pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
3. Memperkuat belanja modal yang produktif untuk mendukung program prioritas nasional agar berdampak kuat terhadap pertumbuhan;
4. Memprioritaskan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor;
5. Mendorong inovasi pembiayaan Non APBN dengan mendorong pengembangan pembiayaan kreatif melalui skema KPB dan *blended finance*; dan
6. Melaksanakan optimalisasi dan penajaman belanja modal untuk menciptakan fleksibilitas anggaran dalam mendukung kebijakan strategis Presiden;
7. Sinergi Pusat-Daerah melalui sinkronisasi belanja modal K/L dengan transfer ke daerah (DAK Fisik) agar tidak terjadi duplikasi pendanaan dan tercapai konvergensi pembangunan antardaerah.

Optimalisasi Belanja Bantuan Sosial (bansos) terus diarahkan untuk akselerasi penurunan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan mendorong kemandirian. Untuk itu, kebijakan Belanja Bansos diarahkan pada:

1. Percepatan graduasi dari kemiskinan melalui sinergi program bansos dengan program pemberdayaan termasuk peningkatan akses terhadap modal dan lapangan kerja;
2. Peningkatan ketepatan sasaran penerima program bansos melalui pemanfaatan DTSEN;
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan program bansos agar berdampak optimal, antara lain melalui sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan, digitalisasi penyaluran, dan dengan memperhatikan faktor kewilayahan; dan
4. Mendorong pelaksanaan bantuan sosial adaptif dan sepanjang hayat yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Belanja Pembayaran Bunga Utang dikelola secara akuntabel untuk memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga risiko pembiayaan utang tetap terkendali. Dengan pendekatan pengelolaan utang yang *prudent*, adaptif, dan terukur serta berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka menengah, kebijakan Belanja Pembayaran Bunga Utang tahun 2027 diarahkan pada:

1. Memenuhi pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang negara.
2. Mendorong efisiensi beban bunga melalui pengelolaan portofolio utang dan strategi pengadaan utang baru yang terukur, termasuk penerbitan utang yang fleksibel sesuai kondisi pasar untuk memperoleh biaya pembiayaan yang efisien dalam tingkat risiko yang terkendali.
3. Memitigasi fluktuasi pembayaran bunga utang akibat perubahan nilai tukar dengan memperkuat pembiayaan utang dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*), antara lain dengan memperluas basis investor domestik dan memperkuat bauran instrumen.

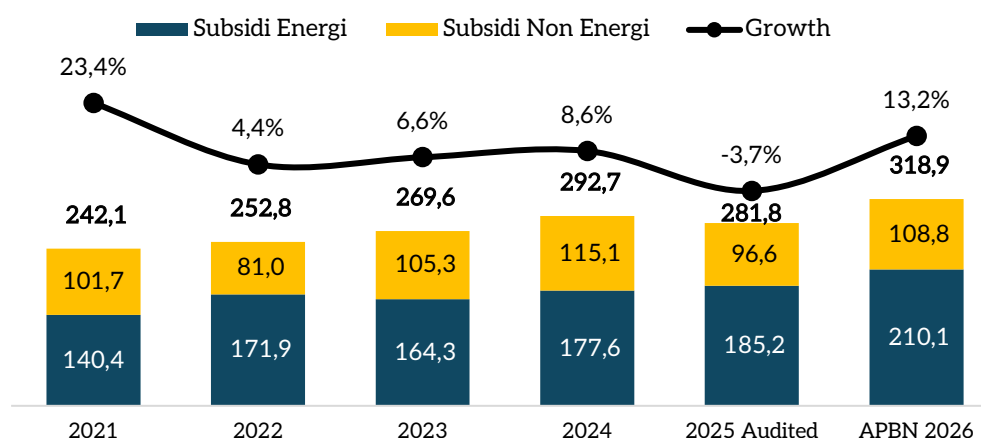
Belanja subsidi berperan sebagai instrumen fiskal strategis untuk menstabilkan harga, memperkuat daya saing sektor usaha kunci, dan menjamin mutu layanan publik. Pemerintah berkomitmen penuh dalam mereformasi pengelolaan subsidi guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Transformasi ini diwujudkan melalui skema penyaluran yang lebih tepat sasaran, penguatan transparansi, serta akuntabilitas tata kelola. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas serta efektivitas kebijakan fiskal, Pemerintah secara berkesinambungan mendorong transformasi subsidi guna memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi penyaluran. Selain itu, Pemerintah melakukan penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan subsidi. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan nyata baik di subsidi energi maupun subsidi nonenergi.

Pada sektor subsidi energi telah dilakukan beberapa kebijakan yang berfokus pada peningkatan ketepatan sasaran penerima. Kebijakan tersebut antara lain: (i) pada tahun 2017, dilakukan penerapan subsidi listrik tepat sasaran bagi golongan Rumah Tangga (RT) R1 900 VA yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, sementara pelanggan golongan RT R1 450 VA tetap menerima subsidi secara menyeluruh; (ii) pada tahun 2022, dilakukan penyesuaian tarif listrik bagi golongan nonsubsidi yang mencakup kelompok masyarakat mampu dan instansi Pemerintah, serta dilakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar; (iii) pada tahun 2023, dilakukan pendataan konsumen dan digitalisasi dalam pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi.

Pada sektor subsidi nonenergi, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas subsidi. Pada tahun 2017, dilakukan pengalihan subsidi pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) secara bertahap, diterapkan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), serta dilakukan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani. Selanjutnya, pada tahun 2018, dilakukan penghapusan subsidi benih yang diintegrasikan ke dalam Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kementerian Pertanian. Pada tahun 2020, dialokasikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penurunan suku bunga hingga mencapai level 6 persen, optimalisasi alokasi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan, dan integrasi subsidi bunga perumahan ke dalam skema FLPP untuk mendorong kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR. Selain itu, pada tahun 2026 Pemerintah mengubah perhitungan subsidi pupuk dari berbasis *cost plus margin* menjadi berbasis nilai komersial.

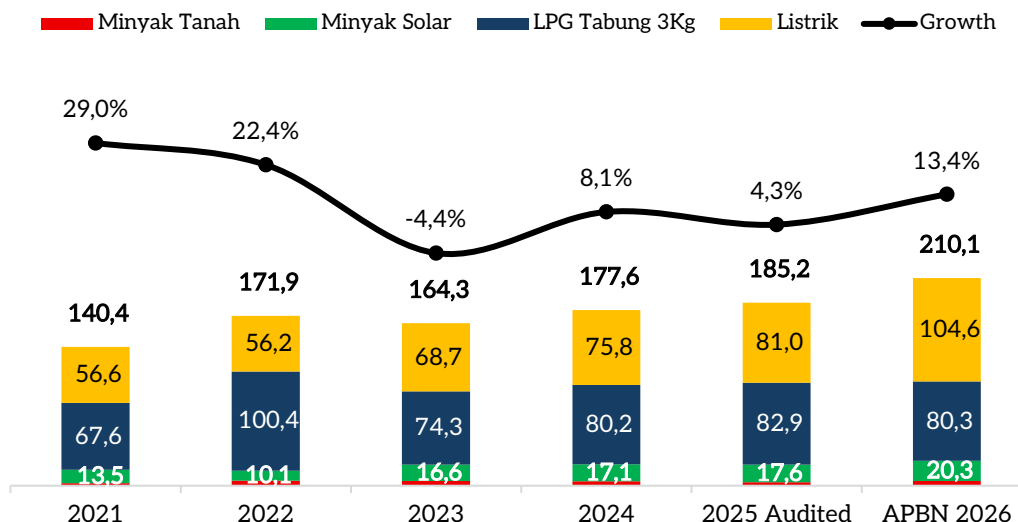
Grafik 33. Perkembangan Subsidi, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Belanja subsidi selama periode 2021–2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,8 persen per tahun. Adapun besaran subsidi dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro seperti ICP, inflasi, nilai tukar Rupiah, dan volatilitas harga komoditas. Selain itu, besaran subsidi juga dipengaruhi oleh parameter konsumsi masyarakat dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

Grafik 34. Perkembangan Subsidi Energi, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Pada periode tahun 2021 hingga 2025, subsidi energi berfluktuasi dengan rata-rata realisasi sebesar Rp167,9 triliun atau tumbuh rata-rata sebesar 11,9 persen. Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG Tabung 3 kg mendominasi subsidi energi dengan rata-rata realisasi Rp100,2 triliun, yang dipengaruhi oleh perkembangan ICP, nilai tukar Rupiah serta volume konsumsi. Pada periode yang sama, rata-rata subsidi listrik mencapai Rp67,7 triliun, atau rata-rata tumbuh 6,3 persen. Besaran subsidi listrik yang tumbuh cukup tinggi terjadi akibat meningkatnya volume konsumsi, naiknya rasio elektrifikasi nasional, serta masih tingginya biaya penyediaan dan target capaian Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pada periode tahun 2021 hingga 2025, Pemerintah melakukan reformasi kebijakan subsidi energi yang cukup signifikan, salah satunya melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima subsidi. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM Solar. Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan subsidi BBM melalui registrasi konsumen pengguna yang dilakukan oleh Badan Usaha penugasan. Selanjutnya, transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg diwujudkan melalui perubahan dari subsidi selisih harga komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat/orang yang berhak yang terintegrasi dengan program perlindungan sosial. Hal ini didukung dengan penggunaan basis data kependudukan yang kuat sebagai acuan penyaluran subsidi, yang dilakukan melalui: pengembangan fitur pendataan konsumen berdasarkan NIK, pencocokan data dengan DTSEN, serta penyiapan infrastruktur penyaluran LPG Tabung 3 kg. Selaras dengan hal itu, mulai bulan Januari 2024, pembelian LPG tabung 3

kg di pangkalan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi.

Subsidi listrik juga diarahkan agar semakin berkeadilan dengan menargetkan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu. Upaya ini dilakukan antara lain melalui penerapan *tariff adjustment* pada golongan nonsubsidi serta penyesuaian kembali pada golongan-golongan pelanggan yang berhak menerima subsidi. Transformasi kebijakan subsidi listrik ini didukung dengan pemanfaatan DTSEN agar data penerima manfaat benar-benar akurat.

Berdasarkan evaluasi kebijakan dari tahun 2022 hingga 2026 maka arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2027 yakni:

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg

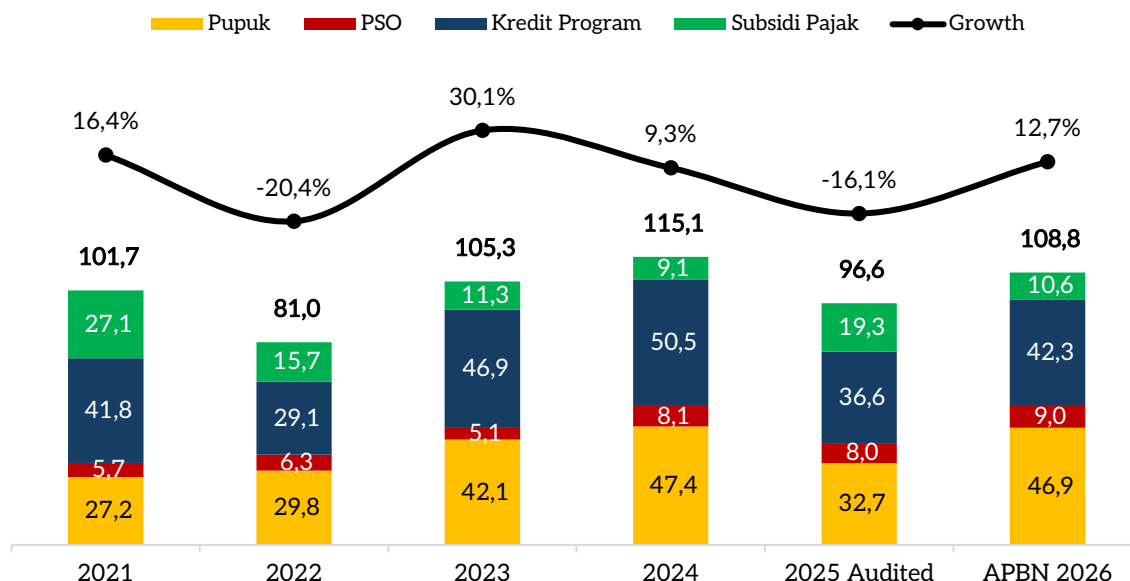
- a. **Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah.** Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan, serta memastikan alokasi pasokan minyak tanah dan distribusi khusus di daerah-daerah yang belum mengalami migrasi dari minyak tanah ke gas secara efektif dan merata. Dalam menetapkan besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.
- b. **Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran.** Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunaannya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya.
- c. **Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat.** Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Kebijakan Subsidi Listrik

- a. **Memberikan subsidi listrik kepada golongan yang berhak.** Golongan pelanggan yang berhak dikelompokkan ke dalam golongan Rumah Tangga, bisnis dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi sesuai regulasi yang berlaku dan juga dengan melihat status kesejahteraan masyarakat.
- b. **Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu (DTSEN)** disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non subsidi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada Rumah Tangga yang berhak.
- c. **Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.** Pemerintah telah berkomitmen untuk

mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

Grafik 35. Perkembangan Subsidi Nonenergi, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Pada periode 2021 sampai dengan 2025, realisasi subsidi nonenergi berfluktuasi dengan rata-rata realisasi sebesar Rp99,9 triliun. Didominasi oleh subsidi bunga kredit program dengan rata-rata proporsi sebesar 44,3 persen per tahun serta subsidi pupuk dengan rata-rata proporsi sebesar 40,6 persen per tahun dari total subsidi nonenergi. Pada tahun 2024, realisasi subsidi nonenergi mencapai Rp114,9 triliun atau yang tertinggi selama 5 tahun terakhir, terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi bunga kredit program, kebutuhan subsidi pupuk, pembayaran kurang bayar subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya, serta efektivitas implementasi berbagai kebijakan penyempurnaan tata kelola subsidi nonenergi. Pada tahun 2025, realisasi subsidi nonenergi tercatat sebesar Rp96,6 triliun, sementara untuk tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp108,8 triliun. Perkembangan komponen utama subsidi nonenergi adalah sebagai berikut:

a. Subsidi Pupuk

Realisasi Subsidi Pupuk pada tahun 2024 meningkat sebesar 12,7 persen dibandingkan tahun 2023. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran tagihan kurang bayar tahun sebelumnya serta penguatan dukungan terhadap produktivitas sektor pertanian. Pada tahun 2025, realisasi Subsidi Pupuk sebesar Rp32,7 triliun, sedangkan untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp46,9 triliun.

b. Subsidi Bunga Kredit Program

Subsidi Bunga Kredit Program didominasi oleh Subsidi Bunga KUR dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,2 persen pada periode 2023–2024. Penurunan realisasi pada tahun 2025 dipengaruhi oleh dinamika penyaluran KUR, kebijakan plafon kredit, serta pengaturan suku bunga KUR sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro dan 6 persen untuk KUR jenis lainnya.

c. Subsidi PSO

Subsidi PSO diarahkan untuk mendukung pelayanan transportasi publik dan penyediaan informasi publik, antara lain kepada PT Pelni, PT KAI dan LKBN Antara. Pada tahun 2025, realisasi Subsidi PSO sebesar Rp7,9 triliun, sementara tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp9 triliun. Kebijakan PSO tetap diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kelas ekonomi, efisiensi operasional, serta perluasan akses informasi publik.

d. Subsidi Pajak DTP

Subsidi Pajak DTP pada periode 2021 sampai dengan 2026 diberikan secara selektif, antara lain untuk sektor panas bumi dan SBN valas. Pada tahun 2025, realisasi Subsidi Pajak DTP sebesar Rp19,1 triliun, sedangkan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp10,7 triliun.

Pelaksanaan Subsidi Nonenergi masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut antara lain: (i) perlunya peningkatan validitas dan akurasi data penerima manfaat guna memastikan ketepatan sasaran; (ii) terdapat deviasi antara asumsi dalam perencanaan dan realisasi anggaran yang memengaruhi efektivitas kebijakan; (iii) penyaluran pada beberapa skema subsidi juga belum optimal sehingga memerlukan penyempurnaan dalam implementasi; dan (iv) tekanan kebutuhan anggaran tetap tinggi seiring dengan upaya Pemerintah dalam mendukung swasembada pangan, penguatan UMKM, dan pengurangan *backlog* perumahan.

Berdasarkan evaluasi realisasi 2021-2026, arah kebijakan Subsidi Nonenergi tahun 2027 difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor riil, penguatan ketepatan sasaran, serta konsistensi terhadap konsolidasi fiskal.

1. Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan Subsidi Pupuk diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran melalui integrasi sistem informasi pupuk bersubsidi. Pemerintah juga akan memperkuat proses verifikasi dan validasi penerima untuk memastikan subsidi diterima secara tepat dalam rangka mendukung agenda swasembada pangan.

2. Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program

Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program diarahkan untuk menjaga keberlanjutan akses pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM dan sektor usaha lain yang ditargetkan. Kebijakan subsidi ini didominasi oleh program KUR. Kebijakan subsidi bunga KUR antara lain: (i) mempertahankan suku bunga yang terjangkau bagi debitur; (ii) menetapkan target debitur baru dan debitur naik kelas secara lebih selektif dengan mempertimbangkan kualitas penyaluran dan kapasitas usaha; (iii) mendorong peningkatan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi guna memperkuat basis ekonomi riil; (iv) meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan kualitas kredit melalui evaluasi penyaluran KUR. Selain itu, kebijakan subsidi bunga kredit program lainnya seperti Subsidi Bunga Kredit Usaha

Alsintan (KUA), Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), Subsidi Bunga Kredit Pinjaman Daerah, Subsidi Bunga Kredit Penyelenggaran CPP, dll. diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kebijakan Subsidi PSO

Kebijakan Subsidi PSO pada tahun 2027 diarahkan untuk mempertahankan dukungan terhadap layanan kelas ekonomi dan konektivitas wilayah guna menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Selain itu, Pemerintah mendorong peningkatan efisiensi penyelenggaraan PSO berbasis *output* agar penggunaan anggaran lebih optimal. Penguatan pengawasan kinerja juga dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan akuntabilitas pelaksanaan subsidi tetap terjaga.

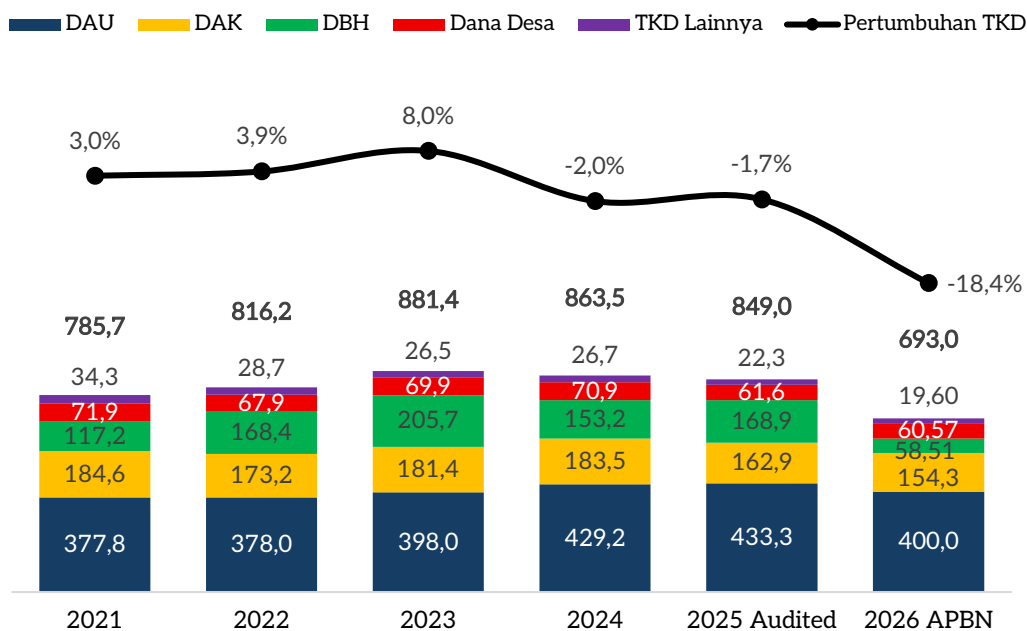
4. Kebijakan Subsidi Pajak DTP

Kebijakan subsidi pajak DTP tetap diarahkan pada sektor yang memiliki nilai strategis bagi ekonomi, yaitu sektor panas bumi dan SBN valas. Pemberian PPh DTP pada sektor panas bumi diperlukan untuk mendorong investasi dan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sementara itu, PPh DTP atas SBN valas diarahkan untuk menjaga daya tarik instrumen pemerintah di pasar keuangan global, menarik investasi asing, memperluas sumber pembiayaan, serta mendukung stabilitas nilai tukar.

Transfer Ke Daerah

Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada periode 2021-2025 terus diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan. TKD menunjukkan kinerja positif sebagai komitmen Pemerintah dalam mendukung penyediaan layanan publik di daerah. Pada periode ini, TKD difokuskan pada penguatan sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta sinkronisasi belanja daerah dengan prioritas nasional. Hal ini mencakup transformasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih terarah (*earmarked*) untuk sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pemulihan ekonomi lokal dan penguatan daya saing daerah. Pada tahun 2025, sejalan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, alokasi TKD mengalami penyesuaian sebesar Rp50,6 triliun. Realisasi TKD tahun 2025 mencapai Rp849,0 triliun yang dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas. Salah satu kebijakan yang mulai dilaksanakan yaitu penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung ke rekening guru dan kebijakan Dana Desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Grafik 36. Perkembangan Transfer ke Daerah, 2021-2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Hingga triwulan I 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari pagu APBN, mencerminkan komitmen akselerasi penyaluran dana ke daerah sejak awal tahun. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan kinerja penyaluran pada periode yang sama tahun 2025 yaitu sebesar 23,8 persen. Kinerja capaian ini didorong oleh penyempurnaan kebijakan penyaluran dan relaksasi syarat salur untuk daerah terdampak bencana. Selain relaksasi syarat salur, langkah afirmatif terhadap daerah terdampak bencana Sumatera dilakukan melalui pemberian tambahan dukungan fiskal untuk mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur serta memulihkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Pemerintah melalui kebijakan TKD tahun 2027 terus memperkuat sinkronisasi fiskal untuk mendukung program prioritas dan tetap menjaga kualitas layanan publik di daerah. Fokus kebijakan bertujuan untuk memastikan capaian target pembangunan sesuai dengan program prioritas Pemerintah dan meminimalisir ketimpangan layanan antardaerah. Selain itu, kebijakan TKD juga diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi regional.

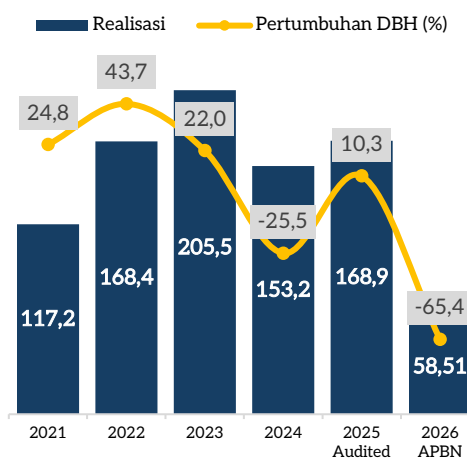
Dana Bagi Hasil

Pada periode 2021-2025, alokasi DBH menunjukkan tren yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,9 persen. Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh volatilitas penerimaan negara yang dibagihasilkan, khususnya pada sektor sumber daya alam yang sensitif terhadap pergerakan harga komoditas global seperti batu bara serta minyak dan gas bumi. Realisasi DBH tahun 2025 tumbuh 10,3 persen (yoy) untuk mendukung penyediaan layanan publik antara lain bantuan iuran JKN, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, perlindungan dan pengamanan hutan

serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2026, alokasi DBH disusun dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas, sinergi dengan program prioritas, dan keberlanjutan fiskal.

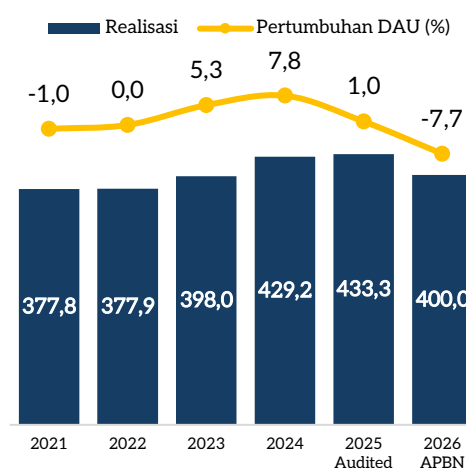
Pengelolaan DBH masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan DBH *earmarked* yang masih perlu dioptimalkan; (ii) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur DBH yang masih perlu ditingkatkan; dan (iii) adanya deviasi proyeksi DBH yang menimbulkan Kurang Bayar/Lebih Bayar.

Grafik 37. Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Grafik 38. Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2021-2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Dana Alokasi Umum

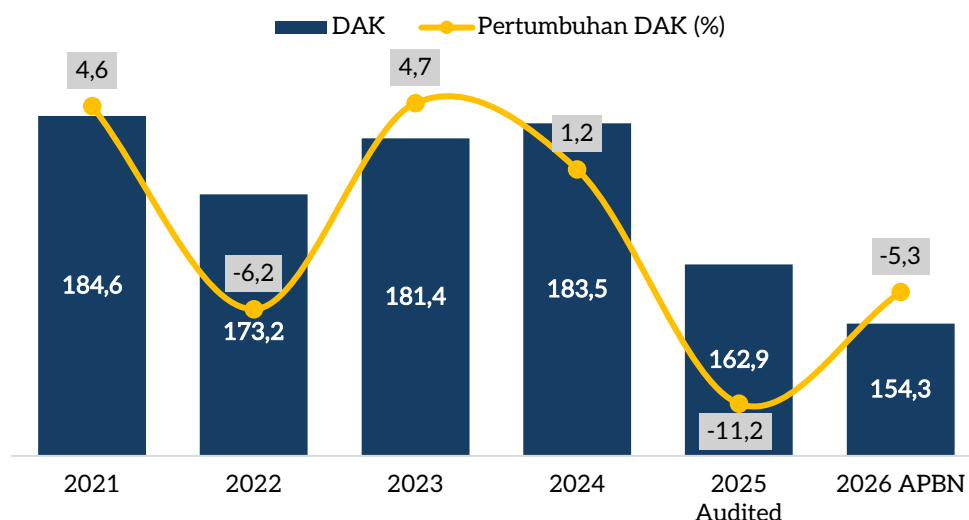
DAU menjadi instrumen pemerataan keuangan daerah dan peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah. Selama rentang 2021-2025 DAU tumbuh rata-rata sebesar 2,6 persen, dipengaruhi antara lain oleh kebijakan Pemerintah dalam mendukung pendanaan untuk PPPK dan kenaikan gaji ASN daerah. Pada 2023-2024, kebijakan DAU tidak hanya diarahkan untuk meminimalisir ketimpangan kemampuan keuangan namun juga mengurangi ketimpangan layanan antardaerah. Pada 2025-2026, postur DAU memperhatikan dinamika konsolidasi fiskal dan penyesuaian struktur APBN sehingga tata kelola DAU diarahkan lebih optimal untuk memberikan dukungan dan manfaat yang lebih efektif terhadap penyediaan layanan dasar di daerah.

Pengelolaan DAU masih menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat masih tinggi; (ii) meningkatnya porsi belanja ASN daerah mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas; (iii) kesenjangan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan antar daerah menyebabkan efektivitas pemanfaatan DAU belum merata; serta (iv) kualitas layanan dasar dan pencapaian SPM belum memadai.

Dana Alokasi Khusus

Pada periode 2021-2025, realisasi DAK mengalami fluktuasi dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK dengan pencapaian prioritas nasional. Adapun penyesuaian tersebut dilakukan melalui penyempurnaan perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK. Pada tahun 2025, terdapat penguatan kebijakan agar alokasi DAK dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat antara lain penyaluran TPG langsung ke rekening guru. Pada tahun 2026, DAK mengalami penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya alokasi DAK Fisik sejalan dengan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan sinergi antara belanja pusat dan daerah. Sementara itu, alokasi DAK Nonfisik dan Hibah kepada Daerah meningkat.

Grafik 39. Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2021-2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Pengelolaan DAK dan Hibah kepada Daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) kinerja penyerapan anggaran antara lain disebabkan keterlambatan penetapan juknis, penundaan pengadaan barang dan jasa karena inpres efisiensi; (ii) kualitas *output*; (iii) akurasi data dan sasaran penerima; dan (iv) koordinasi antar K/L pengampu dan daerah.

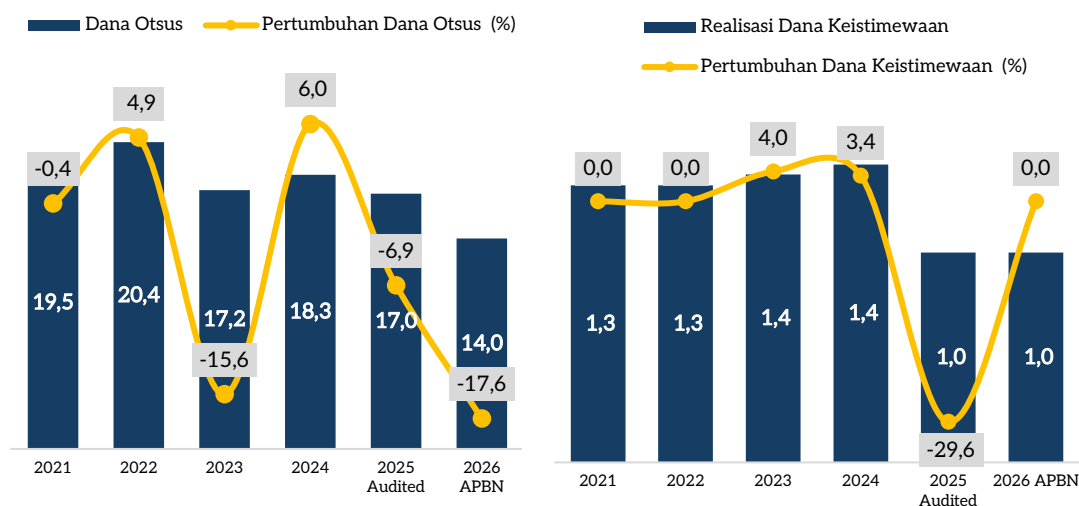
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Perkembangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dan Papua serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Papua pada periode 2021-2025 menunjukkan dinamika kebijakan fiskal yang cukup signifikan. Dana Otsus dan DTI pada periode tersebut secara rata-rata mengalami pertumbuhan negatif 2,42 persen utamanya dipengaruhi oleh penyesuaian besaran alokasi Dana Otsus Aceh mulai tahun 2023 sebagai pelaksanaan ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada tahun 2025, Pemerintah juga melanjutkan kebijakan DTI untuk wilayah Papua guna mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain infrastruktur penunjang gedung perkantoran untuk Daerah Otonom Baru (DOB). Selain itu, DTI juga tetap diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan 5 (lima) bidang infrastruktur sebagaimana amanat undang-undang, meliputi infrastruktur perhubungan, air bersih, energi listrik, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan yang bertujuan

antara lain untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat integrasi ekonomi kawasan timur Indonesia. Pada tahun 2026, Dana Otsus dan DTI tetap menjadi instrumen fiskal strategis dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah khusus, dengan prioritas pada peningkatan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, serta penguatan kinerja tata kelola pemerintah daerah, di wilayah Aceh dan Papua. Secara khusus, kebijakan penggunaan Dana Otsus Papua tahun 2026 tetap diarahkan pada upaya mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sesuai rencana induk percepatan pembangunan papua.

Implementasi Dana Otsus dan DTI masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal; (ii) belum efektifnya penggunaan Dana Otsus dan DTI dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (iii) transparansi, akuntabilitas keuangan, serta validitas informasi capaian *output* yang masih perlu ditingkatkan; (iv) kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan; serta (v) dukungan sistem informasi yang masih terbatas.

Grafik 40. Perkembangan Dana Otsus, 2021 – 2026 (Rp T) **Grafik 41. Perkembangan Dana Keistimewaan, 2021 – 2026 (Rp T)**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Dana Keistimewaan DIY

Dana keistimewaan (DAIS) diberikan khusus kepada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan 5 urusan keistimewaan. Tahun 2025, DAIS digunakan untuk mendukung pengembangan DI Yogyakarta antara lain melalui pemberian bantuan kepada UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan jalan dan pengembangan layanan air bersih untuk mendukung peningkatan konektivitas ruang strategis dan layanan dasar. Selain itu, penatausahaan terkait pertanahan Kasultanan dan Kadipaten serta pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan juga dilakukan dalam rangka menjaga keistimewaan DI Yogyakarta. Realisasi DAIS tahun 2025 mencapai Rp1,0 triliun atau 83,3 persen dari pagu APBN. Pada tahun 2026, DAIS juga diarahkan untuk mendukung program prioritas.

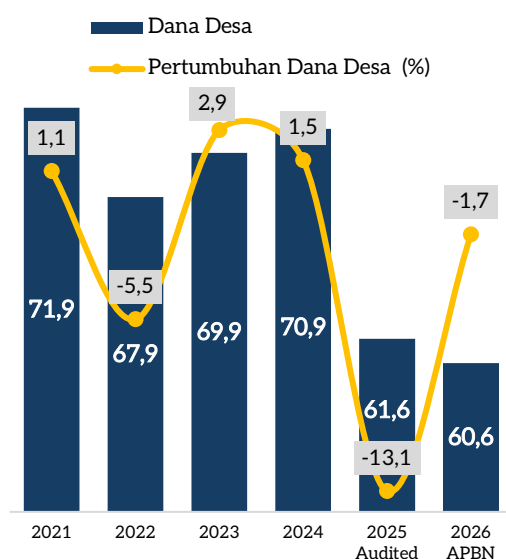
Pengelolaan DAIS menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) sinergi perencanaan program dan kegiatan keistimewaan dengan K/L dalam mendukung prioritas nasional; (ii) sinergi pendanaan dana keistimewaan dengan sumber lainnya; (iii) kualitas belanja dari DAIS yang perlu ditingkatkan; serta (iv) dukungan sistem informasi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DAIS.

Dana Desa

Dana Desa ditujukan untuk percepatan pembangunan desa, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Dana Desa juga difokuskan untuk mendukung program prioritas seperti penurunan kemiskinan melalui penyaluran BLT Desa, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan ketahanan pangan. Dana Desa dalam periode tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan alokasi tertinggi pada tahun 2023. Pada tahun 2025, terdapat kebijakan baru yaitu pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pendirian KDMP. Rata-rata realisasi penyaluran Dana Desa pada periode 2021-2025 adalah sebesar 97,74 persen.

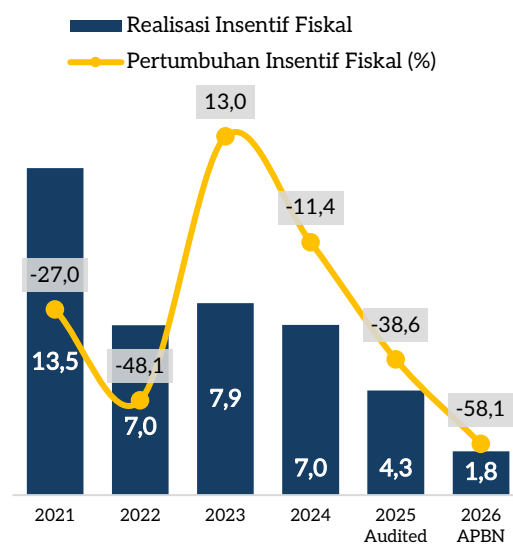
Dana Desa masih menghadapi beberapa tantangan di berbagai aspek. Tantangan tersebut antara lain: (i) dinamika kebijakan dan penajaman prioritas nasional yang menuntut penyesuaian kebijakan Dana Desa; (ii) integritas perangkat desa serta kapasitas kelembagaan dan manajerial desa yang masih perlu diperkuat; (iii) keterbatasan ruang fiskal desa serta pemanfaatan Dana Desa belum optimal sebagai pengungkit pembangunan ekonomi desa; (iv) monitoring dan evaluasi Dana Desa belum optimal dalam memastikan kualitas *output* pembangunan desa, dan (v) kualitas dan integrasi data yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung evaluasi berbasis kinerja dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Grafik 42. Perkembangan Dana Desa, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Grafik 43. Perkembangan Dana Insentif Fiskal 2021-2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Dana Insentif Fiskal

Insentif Fiskal mengalami fluktuasi sepanjang periode 2021-2025. Mulai tahun 2025, besaran Insentif Fiskal mengalami penyesuaian sejalan upaya kebijakan penyelarasan dengan prioritas nasional. Dalam pelaksanaannya, Insentif Fiskal mengalami beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) belum sinkronnya indikator kinerja yang diperoleh dari K/L Teknis dengan upaya daerah untuk memenuhi indikator tersebut; (ii) indikator penilaian masih didominasi oleh pemenuhan dokumen regulasi dan administrasi; dan (iii) masih rendahnya pemahaman daerah terhadap kebijakan insentif dan implikasinya terhadap pengelolaan APBD secara keseluruhan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan TKD dan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan, maka arah kebijakan umum TKD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Transfer ke Daerah diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok daerah, meliputi belanja pegawai, operasional pemerintahan, dan pelayanan dasar publik;
2. Mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal (antar daerah) untuk akselerasi peningkatan dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat daerah;
3. Memperkuat sinergi fiskal Pusat dan Daerah melalui:
 - a. penguatan koordinasi lintas KL dalam pelaksanaan program prioritas;
 - b. penyusunan KEM PPKF regional untuk sinkronisasi sasaran pembangunan;
 - c. penguatan probis aspek perencanaan/penganggaran berbasis *output*;
 - d. relaksasi pemberlakuan kebijakan *mandatory spending* belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40%; dan
4. Mendukung daya saing daerah melalui belanja berkualitas, sinergi dengan pembiayaan kreatif, dan penguatan *local taxing*.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD per jenis transfer tahun 2027 sebagai berikut.

Arah kebijakan DBH Tahun 2027, yaitu:

1. Menyelaraskan alokasi DBH dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan belanja daerah;
2. Menyinergikan pemanfaatan DBH yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung program prioritas pemerintah;
3. Meningkatkan kualitas data dasar dan perhitungan realisasi DBH melalui sinkronisasi data pusat dan daerah menggunakan teknologi informasi;
4. Penyelesaian KB DBH secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan negara; dan
5. Memperhatikan kinerja daerah dalam pemeliharaan lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara dalam alokasi DBH.

Arah kebijakan DAU Tahun 2027 yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah melalui dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Mendorong peningkatan Standar Pelayanan Minimal termasuk afirmasi pada daerah 3 T;

3. Memperkuat formulasi DAU yang lebih menunjukkan karakteristik kewilayahan serta memperhatikan perekonomian;
4. Meningkatkan kualitas dan akurasi data dasar perhitungan alokasi DAU; dan
5. Menyempurnakan tata kelola DAU melalui efektifitas penganggaran dan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya.

Arah kebijakan DAK Tahun 2027 secara umum, yaitu:

1. Mendukung pencapaian program prioritas nasional, percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah;
2. Memperkuat afirmasi fiskal bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan kapasitas fiskal daerah;
3. Memperkuat sinergi dan integrasi DAK dengan Belanja Kementerian/Lembaga melalui pendekatan pembangunan terpadu berbasis hasil dan kemanfaatan;
4. Memperkuat kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK berbasis data yang akurat dan terintegrasi; dan
5. Mengembangkan mekanisme DAK berbasis kinerja (*performance-based grant*) guna mendorong efektivitas pembangunan daerah.

Arah kebijakan Dana Otsus dan DTI Tahun 2027:

1. Menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Otsus dengan target rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua melalui sinkronisasi data penerima manfaat, dengan memperbaiki akurasi data masyarakat asli daerah (*indigenous people*) agar program afirmasi tepat sasaran;
2. Mengarahkan penggunaan Dana Otsus untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional, seperti ketahanan pangan, energi, penurunan angka kemiskinan ekstrem dan *stunting*;
3. Memprioritaskan penggunaan DTI untuk DOB dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur penunjang Proyek Strategis Nasional Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Memperkuat sistem *earmarking* penggunaan dana otsus dengan mengunci porsi minimal anggaran otsus terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan per-undang-undangan;
5. Menerapkan *reward and punishment* berbasis kinerja dalam pengalokasian dan penyaluran dana otsus;
6. Meningkatkan kualitas tata kelola melalui peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan intensif, serta dukungan sistem informasi dengan prinsip interoperabilitas; dan
7. Menyiapkan regulasi teknis tata kelola dalam rangka mendukung keberlanjutan Dana Otsus Aceh.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2027:

1. Penajaman fokus penggunaan Dana Keistimewaan DIY pada penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah di DIY;
2. Penguatan sinergi Dana Keistimewaan DIY dengan instrumen fiskal lain;
3. Peningkatan kualitas belanja Dana Keistimewaan DIY; dan
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dengan pemantauan dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Arah kebijakan Dana Desa Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan Dana Desa regular untuk mendukung pembangunan berkelanjutan:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai desa dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
 - b. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, ketahanan iklim dan tangguh bencana, serta penguatan lembaga ekonomi desa lainnya;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas lainnya sesuai potensi dan keunggulan desa;
2. Mendukung operasional pemerintah desa maksimal 3 persen dari pagu Dana Desa regular;
3. Mendukung keberlanjutan implementasi KDMP;
4. Memperkuat tata kelola Dana Desa melalui reformulasi pengalokasian Dana Desa interoperabilitas sistem, peningkatan sistem monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa; dan
5. Memperkuat sinergi Dana Desa dengan instrumen pendanaan lain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam rangka mitigasi risiko berkurangnya kapasitas Dana Desa dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan, telah didesain kebijakan sebagai berikut:

1. Kewajiban kontribusi kepada PADes atas Sisa Hasil Usaha KDMP, dan aset KDMP menjadi milik pemerintah desa.
2. Fleksibilitas penggunaan Dana Desa sesuai potensi dan kebutuhan desa.

Arah kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun 2027, yaitu:

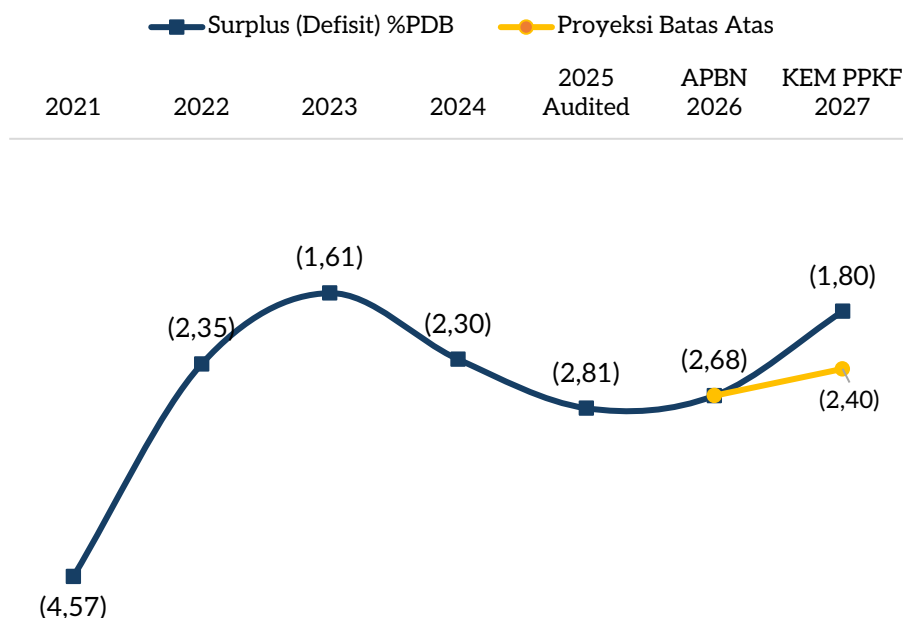
1. Mewujudkan kompetisi antardaerah untuk meningkatkan kinerja daerah dalam mendukung prioritas nasional.
2. Mempertajam indikator penilaian kinerja, sekaligus memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, peningkatan kedaulatan pangan, pengurangan kemiskinan; dan
3. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait pengelolaan Dana Insentif Fiskal melalui diseminasi/edukasi/bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

4.3.3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Kebijakan Defisit

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek kedepan serta mendukung agenda pembangunan yang ditetapkan, kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Untuk mendukung hal tersebut maka kebijakan fiskal dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan Danantara dalam mengakselerasi pertumbuhan, dan mendorong agar kebijakan fiskal lebih fokus dan terarah untuk mendukung 8 (delapan) klaster PKPN bersama pendukung klasternya (*enabler*) dan tetap menjaga pengelolaan fiskal terukur dan terkendali dengan menjaga defisit berkisar 1,80 persen PDB sampai dengan 2,40 persen PDB. Defisit tetap dijaga dalam batas maksimal 3 persen PDB dan rasio utang paling tinggi 60 persen PDB. Kebijakan ini tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi *countercyclical* secara efektif dalam merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Grafik 44. Defisit APBN, 2021-2027 (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

.

Boks 5. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk sebagai instrumen strategis negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. BPI Danantara menjalankan misi sebagai agen pertumbuhan melalui investasi, penguatan ketahanan nasional, dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Dengan mandat ganda, BPI Danantara tidak hanya berfokus pada imbal hasil investasi yang berkelanjutan, tetapi juga pada penguatan ketahanan nasional dan pembangunan kekayaan lintas generasi.

Untuk menjalankan mandat tersebut, strategi pengembangan BPI Danantara dirumuskan secara bertahap. Periode 2025–2026 diarahkan pada pembentukan fondasi sebagai *sovereign fund*. Selanjutnya, pada 2027–2028 fokus diberikan pada penguatan kapabilitas operasional dan investasi. Pada 2029–2030, strategi diarahkan untuk menjaga penciptaan nilai yang berkelanjutan. Seluruh tahap ini ditopang oleh tata kelola keuangan yang kuat, manajemen risiko, pengembangan SDM, penguatan jejaring global, kepatuhan hukum, transformasi digital, serta pemanfaatan teknologi strategis.

Dalam pelaksanaannya, BPI Danantara didukung oleh 2 subholding utama yang saling sinergi, yaitu PT Danantara Asset Management (DAM) dan PT Danantara Investment Management (DIM). DAM berperan mengoptimalkan operasional BUMN untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial jangka panjang, sementara DIM mengelola investasi untuk menghasilkan imbal hasil berkelanjutan yang mendukung ketahanan nasional.

Rencana strategis BPI Danantara dilaksanakan melalui tiga pilar utama. Strategi tersebut mencakup peningkatan nilai portofolio BUMN, pelaksanaan investasi berdampak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus knowledge transfer, serta penguatan sektor-sektor prioritas guna memperkuat ketahanan dan daya saing nasional.

Fokus kebijakan investasi BPI Danantara diarahkan pada lima agenda utama, yakni mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan nasional, mengembangkan manufaktur domestik, meningkatkan daya saing global, dan mendorong transisi energi. Investasi DIM dilakukan melalui tiga kelas aset: investasi publik untuk mendukung agenda pemerintah, investasi privat dengan skema investasi komersial pada delapan sektor prioritas (mineral, energi terbarukan dan energi, infrastruktur digital dan kecerdasan artifisial (AI), kesehatan, jasa keuangan, pangan dan pertanian, infrastruktur dan utilitas, properti dan kawasan industri), serta investasi hibrida melalui kolaborasi dengan manajer investasi eksternal yang disertai dengan pengembangan kapasitas internal inti, sehingga diharapkan pengelolaan aset dapat bergerak menuju model yang lebih seimbang sesuai dengan kesiapan internal dan kompleksitas aset. Pelaksanaan investasi dilakukan dengan pendekatan diversifikasi geografis, baik di dalam maupun luar negeri, diterapkan untuk memperkuat resiliensi portofolio, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengelola risiko secara menyeluruh.

Dalam mendukung program prioritas pemerintah, DAM berperan sebagai agen pembangunan dan DIM berperan dalam menjalankan investasi strategis. Aktivitas DAM akan fokus pada operasionalisasi 20 proyek hilirisasi di bidang mineral, pangan, dan agrikultur. Sementara itu, DIM menjalankan 2 investasi strategis utama, yaitu Proyek Berkah dan Proyek Wamena. Proyek Berkah mendukung pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah untuk meningkatkan layanan jamaah serta memperkuat ekosistem halal. Sedangkan Proyek Wamena ditujukan untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah melalui pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, sejalan dengan agenda ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur berkualitas.

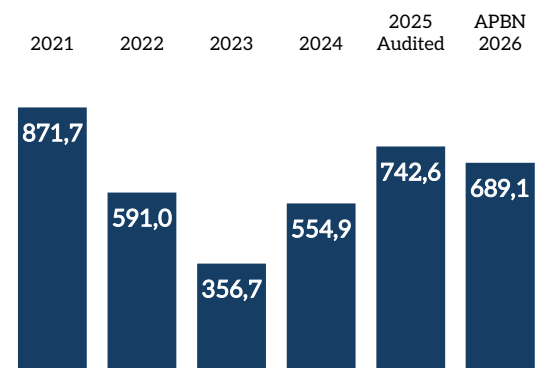
Kebijakan Pembiayaan Anggaran

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan fiskal yang kolaboratif, terarah dan terukur dengan defisit dikisaran 1,80 persen sampai dengan 2,40 persen PDB, maka diperlukan pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*.

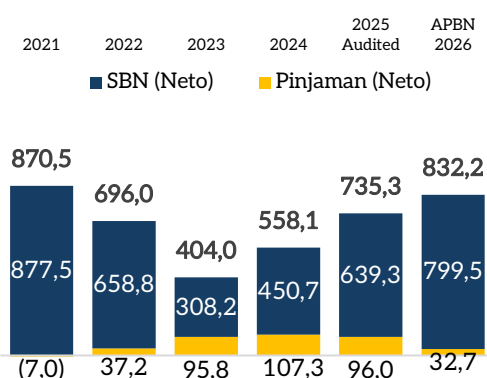
Pembiayaan Anggaran terdiri dari **Pembiayaan Utang dan Pembiayaan Non-Utang**. Pembiayaan Utang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman. Sedangkan, Pembiayaan Non-Utang terdiri dari Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, dan Pembiayaan Lainnya. Dalam pengelolaan Pembiayaan Anggaran, Pemerintah berkewajiban menjaga keseimbangan antara upaya menjaga momentum dan pengendalian risiko. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan memastikan rasio utang terhadap PDB tetap berada dalam batas aman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Arah Pembiayaan Anggaran difokuskan pada pembiayaan investasi yang bersifat produktif, melaksanakan program prioritas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dalam jangka menengah - panjang.

Pembiayaan Anggaran tetap dikelola secara *prudent* dan terukur mempertimbangkan likuiditas Pemerintah dan dinamika pasar keuangan. Kemudian pada tahun 2027 arah kebijakan pembiayaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable.
2. Pembiayaan utang sebagai langkah antisipatif dan *active cash & debt management* untuk menjaga ketersediaan kas yang memadai
3. Optimalisasi peran Danantara, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.
4. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
5. Meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR.
6. Optimalisasi SAL sebagai *buffer* mengantisipasi ketidakpastian.

Grafik 45. Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2021 – 2026 (Rp T)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Grafik 46. Perkembangan Pembiayaan Utang, 2021 – 2026 (Rp T)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Pembiayaan Utang

Pemerintah berkomitmen menjaga pengelolaan pembiayaan secara *prudent* dan *sustainable*. Dalam upaya menjaga pengelolaan APBN yang kredibel, akuntabel, dan andal, kebijakan pengelolaan utang diarahkan secara konsisten berlandaskan prinsip akseleratif, efisien, dan seimbang. Pengelolaan utang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator percepatan pembangunan nasional dan pengungkit dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemanfaatan utang dilaksanakan dengan prinsip akseleratif untuk mendukung pembiayaan program prioritas dan investasi produktif yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip efisiensi dilaksanakan dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui sumber utang berbiaya terendah dalam tingkat risiko yang dapat diterima, antara lain melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, serta penguatan inovasi dan diversifikasi instrumen utang agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Selanjutnya, prinsip keseimbangan dijadikan landasan pembentukan struktur portofolio utang yang optimal, dengan melakukan kalibrasi yang cermat antara biaya dan risiko, baik dari sisi jatuh tempo, suku bunga, maupun komposisi mata uang. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pengelolaan utang diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang, memperkuat kepercayaan pasar, serta memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global maupun tantangan struktural domestik.

Kebijakan pembiayaan utang tahun 2027 diarahkan sebagai instrumen penguatan *counter cyclical*. Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, dengan mendorong pembiayaan *innovative*, *prudent*, dan *sustainable* dalam mendukung pencapaian percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pembiayaan utang dilakukan dengan:

1. Mengendalikan utang dalam batas aman dan *manageable*;

2. Menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang kolaboratif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
3. Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan
4. Menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan biaya yang optimal dan risiko yang dapat ditoleransi serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.

Selain bertujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga mendukung pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang dalam, likuid dan aktif dan mendorong efisiensi pasar keuangan yang inklusif di dalam negeri. Demi mewujudkan tujuan tersebut, pengelolaan utang dijaga dalam kerangka pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dengan memegang penuh prinsip akseleratif, efisien dan seimbang. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan umum pengelolaan portofolio utang antara lain:

1. Mengendalikan risiko portofolio utang pada batas aman guna menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang, melalui pengelolaan portofolio yang aktif dan adaptif, dengan menyesuaikan kondisi pasar dan profil risiko;
2. Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri sebagai pilar utama pembiayaan APBN, dengan pemanfaatan sumber pembiayaan luar negeri secara selektif sebagai pelengkap untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dan pengelolaan risiko;
3. Mengembangkan dan mendiversifikasi instrumen utang untuk mendorong pendalaman pasar keuangan, meningkatkan fleksibilitas pembiayaan, serta mengoptimalkan biaya dan risiko utang;
4. Memperluas basis investor dengan fokus pada pasar domestik melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan strategi hubungan investor yang komprehensif dan terstruktur, dengan pasar global dimanfaatkan sebagai pelengkap;
5. Melakukan diversifikasi mata uang utang selain USD, EUR, dan JPY secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, peluang pasar, serta keseimbangan antara biaya dan risiko;
6. Mengoptimalkan pinjaman proyek yang dikoordinasikan secara erat dengan kementerian/lembaga untuk menjamin kualitas belanja dan *outcome* pembangunan, sementara pinjaman tunai dan pinjaman valas tetap diprioritaskan guna menjaga fleksibilitas fiskal, dengan peran *Multilateral Development Banks* sebagai *intermediary* berbasis *policy metric*;
7. Mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan untuk mendukung program prioritas, pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN;
8. Mendukung pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program prioritas melalui pemberian penjaminan pemerintah yang terukur dan dikelola secara *prudent*; dan

9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala, strategi komunikasi kebijakan yang adaptif dan selaras dengan target kuantitatif, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Kebijakan Pengelolaan SBN

Pengembangan dan pendalaman pasar SBN merupakan prasyarat utama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan Pemerintah secara berkelanjutan dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal, mengingat penerbitan SBN sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, perilaku investor, serta dinamika global dan domestik. Pasar SBN yang dalam dan likuid memungkinkan Pemerintah mengakses pembiayaan secara optimal, meningkatkan ketahanan terhadap gejolak eksternal, memperkuat transmisi kebijakan fiskal, serta mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Pengembangan dan pendalaman pasar SBN tidak hanya mendukung pembiayaan APBN, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengembangan pasar keuangan domestik, antara lain:

1. Menyediakan alternatif instrumen investasi guna mendukung penguatan institusi/lembaga keuangan domestik;
2. Mendukung kebutuhan industri keuangan dalam pengelolaan aset dan liabilitas (ALM);
3. Menjadikan *yield* SBN sebagai acuan (*benchmark*) bagi penerbitan instrumen keuangan lainnya;
4. Mendorong pendalaman pasar SBN yang pada akhirnya mendukung terbentuknya pasar repo dan derivatif, sehingga meningkatkan efisiensi pasar keuangan secara keseluruhan; dan
5. Memperluas serta memperdalam basis investor domestik.

Pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan SBN tetap diutamakan dari pasar domestik. Namun demikian, partisipasi investor asing tetap memiliki peran strategis dalam meningkatkan likuiditas, memperkuat mekanisme pembentukan harga yang kompetitif, serta mendorong diversifikasi basis investor. Keseimbangan antara peran investor domestik dan asing perlu terus dikelola secara hati-hati guna menjaga stabilitas pasar serta keberlanjutan pembiayaan APBN. Keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik pada akhirnya berkontribusi terhadap efisiensi pembiayaan, termasuk dalam bentuk penurunan *yield* dan pengendalian biaya utang.

Kebijakan Pinjaman

Kebijakan pengelolaan pinjaman diarahkan untuk memastikan pemanfaatan utang pemerintah baik pinjaman dalam negeri (PDN) maupun pinjaman luar negeri (PLN), dilakukan secara selektif, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan ini menekankan pada peningkatan kualitas pembiayaan melalui pinjaman, penguatan tata kelola dan kinerja pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi instrumen pinjaman agar selaras dengan prioritas pembangunan, kapasitas pelaksana, dan pengelolaan risiko utang dalam jangka menengah dan panjang.

Pengelolaan pinjaman pemerintah perlu dilaksanakan secara cermat agar mampu menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan

fiskal. Di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan dan keterbatasan ruang fiskal, kualitas pemanfaatan pinjaman menjadi faktor yang semakin penting, mulai dari ketepatan sasaran kegiatan hingga pengelolaan risikonya. Oleh karena itu, kebijakan pinjaman diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan yang produktif dan strategis, termasuk infrastruktur, alih teknologi, serta belanja prioritas, dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan pendamping dan pembayaran kembali utang dalam jangka menengah dan panjang. Upaya peningkatan kinerja pinjaman juga dilakukan melalui penguatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana agar kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat optimal.

Pada saat yang sama, pengelolaan pinjaman juga dituntut untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan pembiayaan dan dinamika pengelolaan kas negara. Diversifikasi sumber dan instrumen pinjaman menjadi penting untuk meningkatkan fleksibilitas pembiayaan sekaligus mengelola biaya dan risiko secara lebih seimbang. Dalam konteks tersebut, kebijakan pengelolaan pinjaman diarahkan pada perluasan pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) serta optimalisasi pinjaman tunai, dengan mempertimbangkan kebutuhan mata uang, profil risiko, kapasitas mitra pemberi pinjaman, dan kerangka kebijakan yang mendasari, sehingga pinjaman dapat mendukung pencapaian target pembangunan secara berkelanjutan.

Pembiayaan Investasi

Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan Pembiayaan Investasi mengalami kenaikan. Pembiayaan Investasi terealisasi sebesar Rp86,2 triliun pada tahun 2025. Pembiayaan Investasi tersebut berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat, antara lain untuk: (i) mencerdaskan bangsa melalui LPDP; (ii) menyediakan perumahan bagi MBR; (iii) menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga; (iv) meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan layanan publik yang merata; (v) memperkuat transportasi publik dan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan sarana dan industri pendukungnya; serta (vi) memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional. Sementara Pembiayaan Investasi TA 2026 dialokasikan sebesar Rp203,1 triliun. Pada tahun 2026, Pemerintah mengakselerasi investasi antara lain melalui: (i) pembiayaan infrastruktur; (ii) mendukung program ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian, serta stabilitas harga pangan; (iii) penyediaan perumahan bagi MBR; (iv) pendidikan melalui LPDP; (v) lingkungan hidup; dan (vi) memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional. Pemerintah terus berperan aktif dan memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat peran Pembiayaan Investasi.

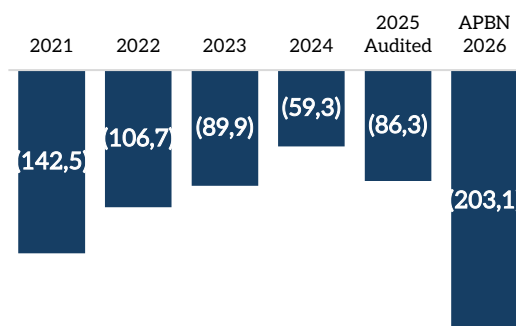
Investasi Pemerintah dapat menjadi katalisator bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pembiayaan Investasi agar lebih berkualitas, efektif, dan efisien. Investasi Pemerintah sangat berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing. Dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan fokus pada investasi jangka panjang yang berkelanjutan, investasi pemerintah dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembiayaan Investasi merupakan salah satu instrumen fiskal untuk memberdayakan peran BLU, BPI Danantara, SMV sebagai *quasi* fiskal. Pembiayaan Investasi tersebut diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan Pembiayaan Investasi tahun 2027 ditujukan untuk:

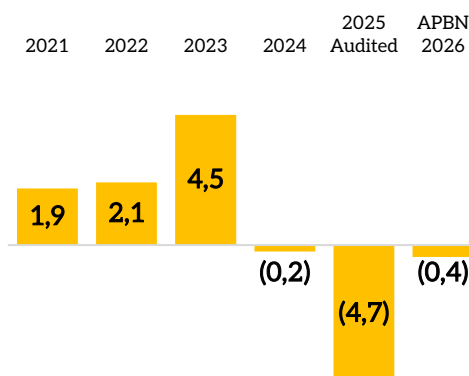
1. Meningkatkan efektivitas Pembiayaan Investasi termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung agenda program kerja prioritas nasional.
2. Mendorong penguatan peran BLU, SMV, BUMN dan Danantara sebagai *agent of development*.
3. Mendorong sinergi antara Danantara, SMV, BLU dan lembaga/badan hukum lainnya.
4. Meningkatkan kontribusi BLU, SMV, BUMN dan Danantara pada penerimaan negara.
5. Mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Grafik 47. Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Grafik 48. Perkembangan Pemberian Pinjaman, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Boks 6. Penguatan Sisi Permintaan, Penawaran, dan Pembiayaan untuk Mendukung Program Perumahan yang Berkelanjutan

Pemerintah menargetkan penyediaan 3 juta rumah untuk menjawab *backlog* kepemilikan dan kualitas rumah. APBN mendukung target ini dengan berbagai alokasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan Rp14 juta ke bawah per bulan atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR, sesuai peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk memiliki rumah layak dan terjangkau. Dukungan APBN tersebut antara lain berupa Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau lebih dikenal sebagai KPR Subsidi, Subsidi Bantuan Uang Muka, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Untuk masyarakat non-MBR, APBN memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sektor properti. Pemerintah juga memperkenalkan Kredit Program Perumahan dengan bunga murah. Program 3 Juta Rumah juga didukung oleh APBD dan sumber-sumber yang lain, seperti CSR.

Realisasi APBN untuk program perumahan di 2025 mencapai Rp45,4 Triliun untuk 335,2 ribu unit rumah, mayoritas untuk Program KPR Subsidi (279 ribu unit dari target 350 ribu unit rumah). Angka realisasi 2025

ini terbilang kecil dibandingkan dengan target 3 juta rumah. Jika melihat rata-rata tahunan realisasi KPR Subsidi selama 5 tahun terakhir sebanyak 223 ribu unit, Pemerintah perlu menciptakan terobosan untuk memenuhi target tersebut. Terobosan kebijakan yang dipilih hendaknya mampu mengintervensi sisi permintaan, penawaran, dan pembiayaan serta mendorong penyediaan perumahan ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dari sisi permintaan, mayoritas MBR penerima manfaat KPR Subsidi di 2024-2025 adalah masyarakat berpenghasilan Rp4-8 juta perbulan (65,5 persen). Sementara hanya 32 persen masyarakat berpendapatan di bawah Rp4 juta (MBR Bawah) dan 2,5 persen MBR dengan penghasilan Rp8-14 juta (MBR Atas) yang memanfaatkan KPR Subsidi. Belum tingginya minat MBR Atas untuk membeli rumah subsidi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi, akses, dan tipe rumah KPR Subsidi yang berbeda dengan kebutuhan dan minat mereka. Sementara untuk MBR Bawah, selain faktor daya beli, terdapat isu kelayakan kredit (*bankability*), khususnya untuk pekerja informal. Harga rumah subsidi bervariasi dengan batas atas berbeda antar daerah: dari Rp166 juta sampai dengan Rp240 juta. Batas atas harga rumah di Jabodetabek adalah Rp185 juta.

Untuk menarik minat MBR Atas, Pemerintah dapat memperkenalkan: (i) skema KPR campuran subsidi dan komersial; (ii) penyesuaian bunga KPR FLPP dan batas atas harga rumah subsidi; dan (iii) perluasan KPR Subsidi untuk rumah susun (rusun). Dengan skema campuran, sebagai ilustrasi, MBR Atas di Jabodetabek dapat membeli hunian dengan harga Rp400-500 juta dengan rincian Rp185 juta (batas atas harga rumah subsidi) dengan skema KPR Subsidi dan sisanya dengan KPR komersial. Pemerintah dapat pula menaikkan batas atas harga yang diterapkan secara nasional dan membedakan bunga KPR rumah subsidi berdasarkan kelas MBR atau harga rumah baik rumah tapak maupun rusun, agar skema KPR Subsidi menjadi lebih menarik dan berkeadilan.

Untuk menjawab isu daya beli dan *bankability*, Pemerintah dapat memperkenalkan skema kepemilikan bersama hunian antara Pemerintah dengan masyarakat, misalnya dengan proporsi 30 persen dan 70 persen. Skema ini dapat dilaksanakan dengan dua model. Pertama, Pemerintah memiliki sebagian porsi kepemilikan rumah dengan pembiayaan tunai. Kedua, Pemerintah dapat memanfaatkan tanah Barang Milik Negara untuk dibangun apartemen atau rumah tapak. Secara matematis pemanfaatan tanah BMN akan menurunkan harga rumah sekitar 30-40 persen sesuai dengan rata-rata nilai tanah dalam struktur harga hunian.

Hadirnya Pemerintah dalam kepemilikan rumah subsidi diharapkan meningkatkan kepercayaan perbankan kepada nasabah pekerja informal. Skema ini telah berjalan di beberapa negara seperti Australia dan Inggris (*Help to Buy, Shared Equity*), dengan pengawasan dan pendataan yang tersistem. Pemerintah dapat pula memperkenalkan skema sewa beli yang memungkinkan masyarakat menyewa hunian dalam jangka waktu tertentu, dengan opsi untuk membelinya di akhir masa sewa.

Intervensi sisi permintaan di atas diharapkan membantu sisi penawaran dengan menyerap pasokan hunian yang telah ada dengan harga di atas batasan harga KPR Subsidi. Selain itu, perubahan skema di atas juga akan memperluas jenis rumah subsidi yang disediakan oleh pengembang sehingga MBR memiliki pilihan rumah subsidi yang semakin beragam. Penyediaan tanah BMN juga menjadi alat Pemerintah untuk menambah jumlah hunian layak yang lebih terjangkau.

Di sisi pembiayaan, Pemerintah perlu mengembangkan diversifikasi pembiayaan yang mendorong pendanaan berkelanjutan agar dukungan APBN menjadi lebih efisien. Opsi-opsi untuk terobosan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sekuritisasi piutang FLPP menjadi produk surat utang dalam bentuk Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP);

2. Peningkatan kapasitas *leveraging* PT Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF); dan
3. Pendanaan perumahan ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Sekuritisasi akan mengubah aset tidak lancar perbankan yang menghasilkan arus kas di masa depan menjadi dana tunai untuk disalurkan kembali ke pembiayaan perumahan. Aset KPR Subsidi dijual kepada PT. SMF dan diubah menjadi instrumen pasar modal berupa Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) untuk dibeli investor. PT SMF yang merupakan *special purpose vehicle* Pemerintah adalah satu-satunya perusahaan yang memfasilitasi penyaluran dana dari pasar modal ke sektor perumahan. EBA-SP dapat dijual dengan imbal hasil yang menarik, di atas SBN. Sampai dengan Kuartal 1 2026, *outstanding* KPR Subsidi mencapai sekitar 1,7 juta rumah dengan nilai lebih dari Rp140 Triliun. Setiap penerbitan EBA-SP senilai Rp1 T diperkirakan dapat membiayai hunian subsidi sekitar 6.100 unit.

Dari sudut pandang Pemerintah, sekuritisasi adalah peluang diversifikasi pembiayaan perumahan non-APBN dengan menambah dana tunai bagi bank penyalur KPR Subsidi. Bagi masyarakat dan investor, EBA-SP dari PT SMF ini memberikan opsi investasi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan perumahan serta memperdalam pasar keuangan. EBA-SP juga menjadi instrumen yang semakin menarik bagi investor perbankan karena Bank Indonesia sejak November 2025 telah mengakui surat utang PT. SMF untuk digunakan sebagai jaminan transaksi *Repurchase Agreement* (REPO).

Upaya Pemerintah untuk mengurangi *backlog* perumahan di atas perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah perlu mendorong pengembang untuk memenuhi standar bangunan gedung hijau (yang ditetapkan Pemerintah) untuk memastikan ketersediaan hunian ramah lingkungan yang berkelanjutan (rumah hijau). Upaya ini diimbangi dengan stimulasi sisi permintaan melalui edukasi masyarakat mengenai efisiensi energi dan kenyamanan jangka panjang, sehingga tercipta kesadaran pasar yang kuat terhadap hunian hijau. Untuk menjembatani kedua aspek tersebut, peran pembiayaan menjadi krusial melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif seperti KPR subsidi hijau.

Pemberian Pinjaman

Rencana penyaluran pinjaman periode 2027 diprioritaskan untuk mendukung target Asta Cita Presiden, khususnya dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan percepatan kemandirian energi. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui pendanaan proyek energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP, serta pengembangan transportasi massal ramah lingkungan melalui kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 2. Serangkaian inisiatif tersebut menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik dengan transisi menuju ekonomi hijau dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun terdapat tren penurunan pengajuan proposal baru, pemerintah secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan penyerapan dana yang efektif serta mitigasi risiko gagal bayar melalui berbagai skema restrukturisasi seperti penjadwalan kembali dan *debt swap*. Dengan demikian, penyaluran pinjaman ini merupakan instrumen fiskal strategis yang dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi nasional secara jangka panjang.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan muncul dari penjaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, antara lain kepada K/L, Pemda, BPI Danantara, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan tersebut diberikan dalam rangka mengurangi risiko investasi bagi investor (termasuk kreditur) sehingga diharapkan investasi pada program/proyek strategis menjadi lebih menarik. Penjaminan Pemerintah ini juga diberikan

untuk mempercepat program dan proyek strategis nasional. Penjaminan merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi berbagai pihak sehingga dapat mengatasi keterbatasan pendanaan dari APBN. Program-program strategis nasional meliputi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan Program Non Infrastruktur.

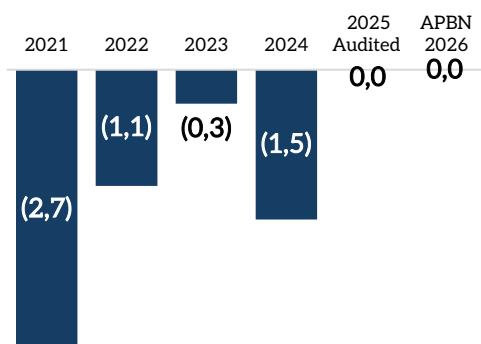
Penjaminan diberikan oleh Pemerintah karena memberikan manfaat lebih luas. Sebagai bentuk sinergi dan dukungan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyediakan Penjaminan Pemerintah untuk pelaksanaan program infrastruktur, sehingga memberikan manfaat dan tujuan dalam: (i) menyediakan infrastruktur bagi rakyat tanpa penyediaan dana APBN; (ii) menyediakan layanan infrastruktur kepada masyarakat melalui pengelolaan yang profesional oleh pihak swasta atau BPI Danantara yang ditunjuk dengan tarif yang terjangkau; dan (iii) memberi kesempatan pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Penjaminan Pemerintah diberikan kepada pihak terjamin sebagai upaya dalam: (i) meningkatkan kredibilitas pihak terjamin dalam menurunkan risiko dan biaya sehingga mudah mengakses sumber pembiayaan selain dari APBN; dan (ii) memberikan keyakinan pihak swasta/ investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dengan kerjasama yang saling menguntungkan, memberikan kepastian pengembalian dan keamanan dana yang akan diinvestasikan ke program-program strategis nasional. Pihak terjamin pada Penjaminan Program Percepatan Infrastruktur terdiri dari K/L, pemda, BPI Danantara, dan BUMD.

Kebijakan Pemerintah terkait penjaminan ini dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut mencakup sarana dan prasarana transportasi, jalan, sumber daya air, irigasi, air bersih, kesehatan, pendidikan, permukiman, sanitasi, telekomunikasi dan informatika serta infrastruktur kawasan dan infrastruktur energi. Penjaminan Pemerintah diberikan untuk: (i) suatu kredit yang dilakukan pihak terjamin berupa pinjaman dari perbankan atau obligasi yang diterbitkan atau (ii) suatu investasi yang dilakukan pihak terjamin dengan badan usaha swasta, dimana penjamin menjamin kelayakan usaha pihak terjamin ataupun risiko tertentu/politik dari suatu perjanjian kerjasama. Selain itu, kewajiban penjaminan juga diarahkan untuk menjalankan pengelolaan risiko penjaminan dengan menerapkan: (i) prinsip-prinsip umum penjaminan; (ii) penetapan batas maksimal penjaminan; (iii) penerbitan *benchmarking* pinjaman; (iv) pemantauan perkembangan proyek; (v) pemantauan risiko kredit; (vi) pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan pemerintah; dan (vii) pengelolaan dana cadangan penjaminan. Pemberian jaminan pemerintah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip umum, yaitu kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal.

Dalam kurun waktu 2017-2025, kewajiban penjaminan yang dilakukan pemerintah mengalami evolusi dari sekadar instrumen pendukung infrastruktur fisik menjadi alat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial di tengah berbagai guncangan global. Pada Kurun waktu tersebut dukungan penjaminan diberikan pada percepatan pembangunan infrastruktur Nasional, Dukungan Penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada Danantara. Kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional diantaranya untuk: (i) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara; (ii) percepatan penyediaan air minum; (iii) penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iv) Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung

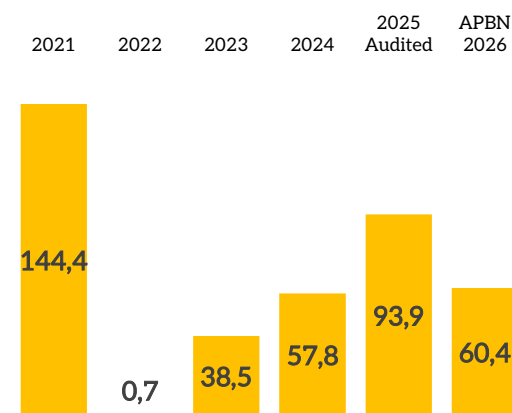
dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BPI Danantara; (v) Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; (vi) Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek; (vii) Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (infrastruktur ketenagalistrikan).

Grafik 49. Perkembangan Kewajiban Penjaminan, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Grafik 50. Perkembangan Pembiayaan Lainnya, 2021 – 2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Kebijakan penjaminan dijalankan secara selektif dan *prudent* dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Pada tahun 2026, pengelolaan kewajiban penjaminan mengalami transisi dengan berakhirnya dukungan bagi UMKM dan korporasi sehingga fokus beralih pada mitigasi risiko gagal bayar proyek infrastruktur strategis, seperti jalan tol dan kelistrikan, serta penjaminan bagi BUMN. Memasuki tahun 2027, pemerintah secara selektif mengarahkan instrumen penjaminan pada sektor ketahanan pangan, transisi energi, dan infrastruktur dasar guna meningkatkan kredibilitas lembaga dalam mengakses pembiayaan kreatif di luar APBN. Dengan demikian, berbagai langkah tersebut merupakan manifestasi dari strategi Pemerintah untuk memperkuat pembangunan nasional melalui sinergi antara efisiensi fiskal dan mitigasi risiko yang *prudent* demi menjamin keberlanjutan ekonomi serta keamanan bagi investor.

Kebijakan Pembiayaan Kreatif

Pembangunan infrastruktur nasional menghadapi tantangan pembiayaan yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan layanan publik, percepatan transformasi ekonomi, dan keterbatasan ruang fiskal. Dalam kondisi tersebut, partisipasi sektor swasta menjadi semakin penting untuk melengkapi peran pembiayaan pemerintah. Sejak tahun 2011, skema KPBU telah dikembangkan sebagai instrumen strategis kebijakan fiskal untuk mendorong percepatan investasi infrastruktur melalui dukungan fiskal yang terarah, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat konektivitas ekonomi nasional.

Pemerintah terus memperluas dan mengoptimalkan dukungan fiskal guna meningkatkan minat investasi swasta, khususnya melalui skema KPBU. Berbagai fasilitas seperti *Project Development Facility* (PDF), Dukungan Kelayakan (VGF), penjaminan pemerintah, serta skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) disediakan sebagai instrumen pengungkit pembiayaan dan pengelolaan risiko proyek. Di samping itu,

diversifikasi skema pembiayaan melalui pembiayaan kreatif atau *blended finance*, baik KPBU maupun non-KPBU, terus dikembangkan, termasuk dukungan kepada Pemerintah Daerah, dengan tetap mengintegrasikan prinsip *value for money* serta penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Memperhatikan arah kebijakan APBN ke depan yang menuntut pengelolaan fiskal secara lebih prudent, responsif dan berkelanjutan, optimalisasi pembiayaan kreatif dan inovatif menjadi agenda kebijakan yang semakin strategis. Untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mendukung agenda pembangunan prioritas, Pemerintah memperkuat sinergi dengan *Special Mission Vehicle* (SMV), antara lain melalui pengembangan platform SDG Indonesia One sebagai sarana *blended finance* bagi proyek infrastruktur dasar, transisi energi, dan penanganan perubahan iklim. Dengan dukungan kerangka kebijakan yang diperkuat, pembiayaan kreatif diarahkan untuk meningkatkan peran swasta, mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, serta memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan selaras dengan target pembangunan nasional.

Pembiayaan Lainnya

Dinamika perekonomian domestik dan global hingga saat ini masih diwarnai oleh tingkat ketidakpastian global dan geopolitik yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan instrumen fiskal yang fleksibel guna merespons berbagai tantangan ekonomi agar momentum pertumbuhan tetap terjaga. Pada tahun 2025 realisasi anggaran Pembiayaan Lainnya mencapai Rp93,94 triliun. Instrumen utama Pembiayaan Lainnya bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL), adapun realisasi penggunaan SAL pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp85,6 triliun guna mendukung efisiensi pembiayaan.

SAL dapat berperan sebagai *fiscal buffer* untuk memenuhi kebutuhan kas temporer dan pemenuhan pembiayaan anggaran serta menjaga keberlangsungan fiskal jangka panjang. Pada tahun 2027, pengelolaan SAL akan terus dioptimalkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, menjaga keberlanjutan fiskal, memitigasi ketidakpastian dan risiko pasar. Namun, jika diperlukan SAL dapat digunakan untuk menutup defisit APBN. Selain itu, optimalisasi SAL juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan stabilisasi perekonomian dengan tetap mempertahankan fungsi SAL sebagai *fiscal buffer*. Di sisi lain, optimalisasi SAL tetap dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko.

Fleksibilitas penggunaan SAL memungkinkan pemerintah untuk melakukan stabilisasi fiskal maupun ekonomi secara selektif di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Sinergi antara efisiensi pengelolaan instrumen keuangan dan mitigasi risiko yang terukur menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, optimalisasi SAL dalam kerangka Pembiayaan Lainnya merupakan pilar penting bagi terciptanya kesinambungan APBN yang kokoh dan berkelanjutan, serta stabilitas ekonomi yang terjaga.

4.4. Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Agenda pembangunan tahun 2027 dilaksanakan untuk mendukung RPJMN 2025-2029. Tahun 2027 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ketegangan antara Iran-US mendorong Pemerintah agar kembali fokus pada target pembangunan yang telah ditentukan. Berbagai program dan kebijakan Pemerintah di bidang-bidang yang memiliki nilai strategis

harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal di masa yang akan datang.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda pembangunan nasional. Di 2027, tingkat penciptaan lapangan tenaga kerja harus diikuti dengan target penurunan level pengangguran terbuka mencapai 4,30-4,87 persen. Seiring membaiknya kualitas pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja formal juga ditargetkan meningkat mencapai 40,81 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2027 ditargetkan turun di angka 6,0-6,5 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun akan terus didorong untuk mencapai 0 persen. Pembangunan nasional harus inklusif sehingga rasio gini terus menurun hingga berada pada rentang 0,362-0,367. Melalui kebijakan penguatan program perlintas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM merupakan pilar utama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi dan dinamika global yang tidak pasti harus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Di tahun 2027, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,575.

Kesejahteraan petani menjadi salah satu sasaran utama pemerintah dalam rangka memperkuat kedaulatan pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi komoditas pangan strategis mengalami peningkatan seiring kebijakan menuju swasembada pangan. Namun demikian, ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi harga pangan menuntut pemerintah untuk tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Untuk itu, kebijakan kedaulatan pangan difokuskan pada pengembangan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan kawasan dan peningkatan produksi protein, serta stabilisasi pasokan dan harga guna mengendalikan inflasi pangan sekaligus meningkatkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP). Pada tahun 2027, IKP ditargetkan mencapai 0,8038.

4.5. Kebijakan Sektor Keuangan

Pemeringkat Kredit Alternatif Sebagai Alternatif Pengembangan Kredit Perbankan

Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sistem penilaian kredit tradisional, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR). Kelompok UMK dan PBR tersebut seringkali tidak memiliki jaminan fisik (*physical collateral*) atau riwayat kredit yang memadai, sehingga PKA diharapkan menjadi solusi. PKA dapat menghasilkan penilaian kredit yang lebih inklusif dan akurat dengan memanfaatkan data alternatif seperti transaksi telekomunikasi, utilitas, *e-commerce*, dan media sosial. Oleh karena itu, PKA berperan memperluas jangkauan lembaga keuangan kepada segmen masyarakat yang selama ini tergolong *unbanked* atau *underbanked* dengan tingkat risiko gagal bayar (*probability of default*) yang setara dengan metode tradisional berbasis 5Cs (*Character* (karakter debitur), *Capacity* (kemampuan debitur untuk

membayar kembali), *Capital* (modal yang dimiliki debitur), *Collateral* (jaminan/agunan yang dimiliki debitur), dan *Condition* (kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis).

Keunggulan PKA semakin diperkuat dengan penerapan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*). Upaya tersebut memungkinkan analisis data secara real-time dengan tingkat akurasi tinggi. Teknologi ini mampu mengolah berbagai sumber data, termasuk riwayat transaksi, perilaku keuangan, dan faktor risiko lainnya, untuk membangun profil kredit yang lebih komprehensif. Dengan evaluasi yang lebih cepat dan efisien, lembaga keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, mempercepat penyaluran kredit, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMK dan PBR yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem keuangan konvensional.

Demutualisasi Bursa Sebagai Upaya Pendalaman Pasar Keuangan dan Mendukung Perekonomian Nasional

Fokus pendalaman pasar keuangan adalah penguatan dan pengembangan pasar modal yang akan menjadi katalis penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Pasar modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, efisiensi alokasi modal, penurunan biaya pembiayaan, dan penguatan stabilitas sistem keuangan, dengan dampak yang diharapkan berupa pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan produktivitas dan kapasitas ekonomi.

Arah kebijakan yang akan ditempuh mencakup implementasi terintegrasi dari 8 inisiatif dalam 4 klaster untuk memperdalam pasar modal Indonesia, meningkatkan rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB, serta memperkuat peran pasar modal sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Klaster pertama, sisi integritas pasar yang menekankan tujuan peningkatan kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan, penguatan integritas pasar. Dengan inisiatif pertama yaitu penegakan hukum yang kuat terhadap tindak pidana pasar modal dan perlindungan investor, serta inisiatif kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas di pasar modal. Klaster kedua, pengembangan investor yang mencakup dua inisiatif. Inisiatif pertama yaitu penguatan *anchor investor* seperti dana pensiun, asuransi, dan *sovereign-linked funds* yang akan meningkatkan kapasitas pembiayaan jangka panjang di dalam negeri. Inisiatif kedua, mobilisasi investor ritel melalui skema *Systematic Investment Plan* (SIP) akan memperluas basis investor domestik, sehingga menciptakan sumber likuiditas yang lebih stabil. Klaster ketiga, fokus pengembangan pada emiten dan instrumen dengan 3 inisiatif. Inisiatif pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas emiten, termasuk mendorong BUMN dan perusahaan besar untuk melakukan *Initial Public Offering* atau IPO. Inisiatif kedua, peningkatan likuiditas pasar, termasuk melalui penyesuaian bertahap terhadap persyaratan *free float*. Inisiatif ketiga, peningkatan ketersediaan instrumen investasi yang variatif dan likuid. Klaster keempat, regulasi dengan satu inisiatif yaitu penyelesaian regulasi turunan UU P2SK, termasuk demutualisasi bursa, penguatan struktur *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan *trustee*, serta fleksibilitas (*cut-loss*) dalam pengelolaan investasi BUMN.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2027

Harmonisasi kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah merupakan modal penting menuju Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadikan sinergi kebijakan fiskal nasional menjadi salah satu ruang lingkup yang ditujukan untuk meningkatkan keselarasan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal. Mekanisme penyalarsan perencanaan penganggaran hingga tahapan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). Dalam implementasinya, penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun oleh Pemerintah Daerah diharapkan selaras dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi daerah dalam menyusun KUA-PPAS agar selaras dengan arah kebijakan fiskal yang dituangkan dalam KEM PPKF.

Kerangka harmonisasi kebijakan disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang mencakup penguatan pendekatan kewilayahan, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan fiskal daerah yang efektif dan berkelanjutan. Harmonisasi kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan keterpaduan alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, guna memperkuat layanan dasar dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pada saat yang sama, optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja menjadi instrumen kunci untuk menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mendukung prioritas pembangunan nasional dan regional.

Dalam rangka mendukung Program Kerja Prioritas Nasional, strategi kebijakan fiskal kewilayahan tahun 2027 antara lain difokuskan pada: (i) pertumbuhan ekonomi; (ii) penurunan kemiskinan; (iii) pendidikan; (iv) kesehatan; (v) pengelolaan sampah; dan (vi) kedaulatan pangan. Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), serta pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan *prudent*.

5.1. Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kewilayahan

Dalam rangka merumuskan kebijakan fiskal kewilayahan yang responsif dan tepat sasaran, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dan dinamika perekonomian kewilayahan. Evaluasi atas capaian ekonomi kewilayahan menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi kekuatan, potensi, serta tantangan yang masih dihadapi di

berbagai wilayah. Hasil evaluasi ini tidak hanya menggambarkan kinerja makro ekonomi secara agregat, tetapi juga mengungkapkan disparitas antardaerah yang perlu mendapatkan perhatian kebijakan lebih lanjut. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan telaah kinerja perekonomian kewilayahan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan intervensi fiskal kewilayahan.

5.1.1. Perkembangan Kinerja Perekonomian-Kewilayahan

Kinerja indikator makro ekonomi kewilayahan periode 2021-2025 menunjukkan tren yang relatif stabil, ditandai dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan di seluruh wilayah. Kinerja pertumbuhan ekonomi masih bervariasi antarwilayah, dengan peningkatan hanya terjadi di sebagian wilayah, sementara wilayah lainnya mengalami perlambatan. Di sisi lain, tingkat pengangguran pada 2025 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator sosial membaik, kualitas pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Tantangan ini terlihat di wilayah berbasis sumber daya alam seperti Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi, yang masih menghadapi tingkat kemiskinan relatif tinggi serta kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi akibat ketergantungan pada komoditas.

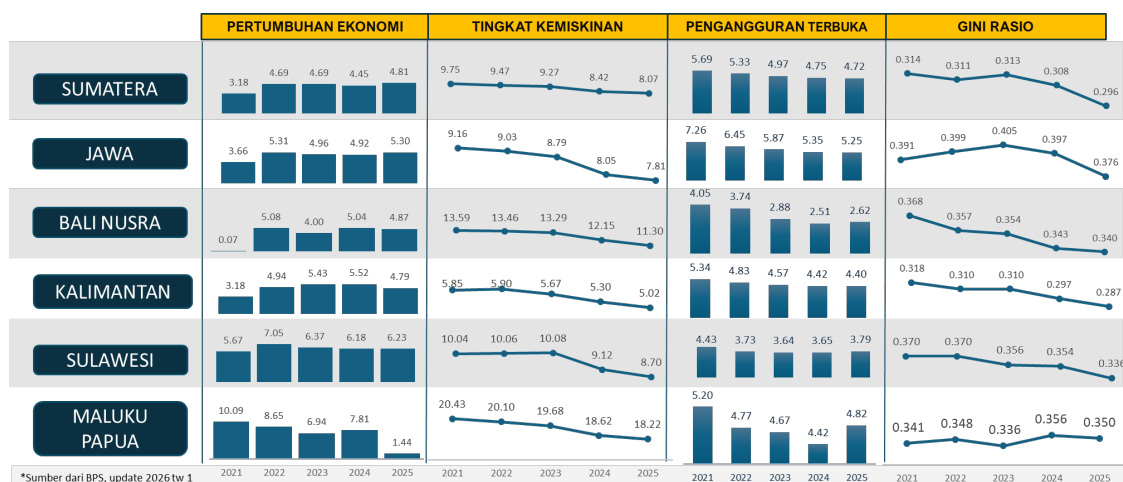
Dari sisi sektoral dan spasial, kinerja perekonomian kewilayahan didukung oleh penguatan aktivitas ekonomi daerah, peningkatan produktivitas sektor ekonomi utama, serta peran belanja pemerintah melalui sinergi APBN dan APBD. Dukungan terhadap UMKM, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta perlindungan sosial berkontribusi dalam menjaga momentum pertumbuhan dan memperluas kesempatan kerja. Namun, dampak pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Disparitas antarwilayah masih terlihat, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal.

5.1.2. Tantangan

Perbedaan kinerja antarwilayah tersebut mengindikasikan adanya tantangan struktural yang memengaruhi daya saing dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa aspek seperti kualitas infrastruktur dan konektivitas, produktivitas tenaga kerja, kondisi iklim investasi, serta kemampuan daerah dalam menarik dan mengelola investasi produktif yang berbeda berakibat pada tingkat daya saing daerah yang bervariasi. Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah turut memengaruhi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan efisiensi investasi yang belum optimal, sebagaimana tercermin dari tingkat *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tambahan investasi belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan output yang optimal. Kondisi ini tidak terlepas dari komposisi belanja yang belum cukup produktif, variasi kualitas proyek dan implementasi, serta belum optimalnya dukungan ekosistem ekonomi daerah.

Gambar 2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kewilayahan



*TPT dan Rasio Gini wilayah dihitung dengan rata-rata provinsi di wilayah tsb.

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2026

Berdasarkan evaluasi tersebut, terlihat bahwa kinerja perekonomian kewilayahan masih diwarnai oleh disparitas pertumbuhan dan kualitas pembangunan antardaerah. Kondisi ini menegaskan perlunya perumusan arah kebijakan fiskal kewilayahan yang lebih terarah dan bervariasi, dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai jangkar utama dalam mengidentifikasi karakteristik daerah serta merumuskan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

5.2. Arah dan Strategi Kebijakan Kewilayahan Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perekonomian kewilayahan, diperlukan penguatan strategi fiskal kewilayahan yang lebih terarah dan diferensiatif sesuai karakteristik daerah. Kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kedaulatan pangan guna mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, kebijakan fiskal kewilayahan yang terintegrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada penguatan fondasi sosial dan ekonomi daerah.

Arah dan strategi kewilayahan dapat lebih mudah diidentifikasi dengan menggunakan klasifikasi daerah. Pendekatan utama yang digunakan dalam pengklasifikasian daerah adalah indikator pertumbuhan ekonomi dan kapasitas belanja per kapita. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi relatif daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 4 kuadran yaitu;

1. Kuadran I adalah daerah-daerah dengan karakteristik belanja daerah per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah

2. Kuadran II adalah daerah-daerah dengan karakteristik belanja daerah per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku, Banten, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat
3. Kuadran III adalah daerah-daerah dengan karakteristik belanja daerah per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung
4. Kuadran IV adalah daerah-daerah dengan karakteristik belanja daerah per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Aceh, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.

5.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil evaluasi kinerja perekonomian daerah menunjukkan sebanyak 17 dari 38 provinsi belum mencapai target pertumbuhan tahun 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan basis ekonomi daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan nasional secara agregat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada: (i) penguatan *new engine of growth*; (ii) peningkatan daya saing daerah; dan (iii) penguatan resiliensi daerah untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan.

Penguatan *New Engine of Growth*

Penguatan *new engine of growth* menjadi salah satu kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, strategi kebijakan fiskal disusun berdasarkan pemetaan kuadran antara belanja per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Pemetaan ini bertujuan untuk melihat kemampuan belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih diferensiatif sehingga intervensi fiskal dapat difokuskan pada penguatan sektor produktif, peningkatan efisiensi belanja, serta penciptaan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan dan merata antarwilayah.

Pada Kuadran I (belanja dan pertumbuhan tinggi), kebijakan difokuskan pada penguatan *spillover*. Hal tersebut dijalankan melalui konektivitas dan kerja sama antardaerah, integrasi ke rantai pasok nasional dan global, serta pemanfaatan belanja untuk mendorong inovasi dan daya saing sektor unggulan, dengan sinergi pendanaan pusat-daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pada Kuadran II (belanja rendah, pertumbuhan tinggi), strategi diarahkan pada penguatan kerja sama antardaerah untuk peningkatan *spillover* teknologi, perluasan keterlibatan dalam rantai pasok global, serta peningkatan kualitas belanja, melalui kebijakan fiskal yang selektif untuk mengatasi tantangan utama dan memperkuat kapasitas fiskal. Sementara itu, pada Kuadran III (belanja dan pertumbuhan rendah), kebijakan difokuskan pada optimalisasi pinjaman konsesional dan sinergi pendanaan terutama di daerah afirmasi, optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan tata kelola, serta dukungan afirmasi fiskal bagi wilayah potensial, dengan belanja diarahkan sebagai stimulus melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pembukaan akses ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru. Pada Kuadran IV (belanja tinggi, pertumbuhan rendah), strategi ditekankan pada peningkatan efektivitas

belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi, penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta penentuan target wilayah *new engine of growth* selaras dengan potensinya, melalui kebijakan fiskal yang fokus pada evaluasi dan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja untuk mendorong investasi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Penciptaan *new engine of growth* tidak hanya ditentukan oleh besaran belanja daerah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas belanja yang mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah. Belanja yang tepat sasaran dan produktif akan mengatasi tantangan utama pertumbuhan, mendorong transformasi ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, penguatan daya saing daerah menjadi indikator penting untuk mengindikasikan apakah daerah telah melakukan belanja yang tepat sasaran dalam mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan Daya Saing Daerah

Penguatan daya saing daerah diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pada aspek-aspek daya saing yang masih relatif lemah, sebagaimana tercermin dalam Indikator Daya Saing Daerah (IDSD). Hasil IDSD 2025 menunjukkan bahwa sejumlah aspek seperti institusi dan stabilitas ekonomi makro telah relatif kuat di sebagian wilayah. Namun, tantangan masih menonjol pada aspek lingkungan pendukung seperti infrastruktur, pasar, dan ekosistem inovasi terutama di luar Jawa. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi peningkatan daya saing perlu disesuaikan dengan tantangan utama masing-masing wilayah.

Kebijakan fiskal kewilayahan difokuskan pada penguatan peran belanja negara dan daerah sebagai katalis peningkatan aspek daya saing yang lemah, khususnya melalui peningkatan kualitas infrastruktur, perluasan akses dan efisiensi pasar, serta penguatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. Sinergi belanja pusat dan daerah diarahkan untuk memperbaiki konektivitas wilayah, menurunkan biaya logistik, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong adopsi teknologi dan inovasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menurunkan ICOR, sehingga investasi yang masuk lebih produktif dan efisien serta memperkuat daya saing daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Tabel 3. Pemetaan Aspek Indeks Daya Saing Daerah, 2025

	Institusi	Infrastruktur	Adopsi TIK	Stabilitas Ekonomi Makro	Kesehatan	Keterampilan	Pasar Produk	Pasar Tenaga Kerja	Sistem Keuangan	Ukuran Pasar	Dinamika Bisnis	Kapabilitas Inovasi	IDSD 2025
SUMATERA	4.37	3.45	3.99	4.11	3.84	3.77	2.28	2.98	2.94	4.52	2.90	3.55	3.56
JAWA	4.58	4.31	4.45	4.37	4.05	3.58	2.33	3.70	3.23	4.87	3.60	4.55	3.97
BALI NUSRA	4.66	3.44	3.90	3.97	3.72	3.97	3.81	2.85	2.93	4.27	2.70	3.99	3.69
KALIMANTAN	4.52	3.29	4.05	4.38	3.91	3.76	1.97	3.32	3.01	4.44	2.62	3.08	3.53
SULAWESI	4.41	3.20	3.55	3.94	3.76	3.94	2.80	3.04	2.83	4.28	2.60	3.71	3.50
MALUKU PAPUA	3.65	2.73	2.49	3.51	3.52	3.23	2.77	2.13	2.56	3.89	2.33	2.74	2.96

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (diolah), 2026

Penguatan Resiliensi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan tidak hanya ditopang oleh penciptaan sumber pertumbuhan baru dan peningkatan daya saing, tetapi juga bergantung pada ketahanan daerah dalam menghadapi guncangan, termasuk bencana

alam dan tekanan eksternal lainnya. Indeks Resiliensi Bencana Indonesia (IRBI) 2025 menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia berada pada risiko bencana tingkat sedang hingga tinggi. Di sisi lain, adanya perbedaan kapasitas fiskal memengaruhi kemampuan daerah dalam merespons dan pulih dari guncangan. Tanpa penguatan resiliensi, capaian pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan akan berisiko tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan resiliensi daerah diarahkan melalui peningkatan kapasitas fiskal dan penguatan kualitas belanja berbasis risiko. Hal ini dikhususkan untuk mendukung mitigasi bencana dan menjaga stabilitas ekonomi regional. Strategi kebijakan fiskal difokuskan pada penguatan belanja preventif dan adaptif, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis risiko, serta diversifikasi ekonomi daerah. Sinergi fiskal pusat dan daerah, termasuk optimalisasi TKD dan alternatif pembiayaan melalui skema *pooling fund* bencana diharapkan mampu memperkuat resiliensi daerah.

Secara keseluruhan, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah ditempuh melalui penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah yang menempatkan APBN dan APBD sebagai instrumen katalis pembangunan wilayah. Belanja K/L dan TKD berbasis kinerja diarahkan untuk mendukung daerah sasaran *new engine of growth*, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan resiliensi terhadap risiko. Pemerintah daerah diharapkan melakukan *refocusing* belanja pada sektor berdaya ungkit tinggi, infrastruktur tahan bencana, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan publik. Sejalan dengan itu, kebijakan PDRD yang selektif dan berkeadilan, pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, serta penguatan tata kelola fiskal dan kelembagaan daerah menjadi kunci untuk mendorong daya saing sehingga dapat meningkatkan investasi, menurunkan ICOR, dan memastikan pertumbuhan ekonomi.

Dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai jangkar utama, kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut selanjutnya ditentukan oleh kinerja berbagai dimensi pembangunan lainnya. Oleh karena itu, intervensi pada sektor-sektor tematik seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kedaulatan pangan diarahkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif, berkelanjutan, dan merata antarwilayah.

5.2.2. Penurunan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penurunan kemiskinan menjadi fokus utama dalam memperkuat inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan posisi daerah dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskalnya. Pada daerah dengan pertumbuhan yang masih terbatas, kemiskinan umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya peluang ekonomi. Oleh karena itu, intervensi difokuskan pada penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, serta penciptaan aktivitas ekonomi produktif yang mampu menjadi stimulus awal pertumbuhan.

Sementara itu, pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi, tantangan utama terletak pada belum meratanya distribusi manfaat pertumbuhan. Dalam konteks ini, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pensasaran program,

memperkuat keterkaitan antara pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, serta memastikan kelompok rentan dapat terintegrasi dalam aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Strategi penurunan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap melalui tiga pendekatan utama. Pertama, penurunan beban pengeluaran melalui penguatan perlindungan sosial dan peningkatan akses layanan dasar guna menjaga daya beli masyarakat rentan. Kedua, peningkatan pendapatan melalui pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan keterampilan tenaga kerja. Ketiga, pengurangan kantong kemiskinan melalui intervensi afirmatif berbasis wilayah, khususnya pada daerah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.

Penurunan Beban Pengeluaran

Penurunan beban pengeluaran menjadi langkah awal dalam melindungi kesejahteraan dasar rumah tangga miskin dan rentan, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang relatif tinggi. Tekanan pengeluaran terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi faktor utama yang menahan peningkatan kesejahteraan, sehingga perlindungan sosial diposisikan sebagai fondasi kebijakan penurunan kemiskinan. Dalam konteks ini, intervensi diarahkan untuk menjaga daya beli dan mencegah kerentanan rumah tangga miskin terhadap guncangan ekonomi.

Strategi fiskal dilaksanakan melalui sinergi belanja perlindungan sosial antara pemerintah pusat dan daerah, dengan penajaman pensasaran berbasis DTSEN. Belanja perlinsos pusat dikonsolidasikan dengan dukungan APBD untuk memastikan keterpaduan program, perluasan cakupan yang tepat sasaran, serta peningkatan efektivitas belanja di daerah di tengah kapasitas fiskal terbatas. Selain perlinsos, sinergi belanja pusat dan daerah diarahkan juga untuk memperkuat *wellbeing* multidimensi agar mengurangi beban pengeluaran atas layanan.

Peningkatan Pendapatan

Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama kelompok usia produktif. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses pekerjaan layak, rendahnya produktivitas UMKM, serta lemahnya keterkaitan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kebijakan fiskal difokuskan pada pengembangan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan *link and match* melalui TKD, belanja K/L, dan DAK nonfisik. Optimalisasi peran KD/KMP menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.

Pengurangan Kantong Kemiskinan

Keterbatasan infrastruktur, akses ekonomi, dan layanan dasar masih menjadi tantangan utama dalam peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. Strategi fiskal diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, dan pembukaan akses ekonomi melalui sinergi Dana Desa, TKD afirmatif, dan belanja K/L. Melalui intervensi terarah dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, strategi ini diharapkan mampu mempercepat konvergensi kesejahteraan dan meningkatkan *wellbeing* multidimensi di wilayah kantong kemiskinan.

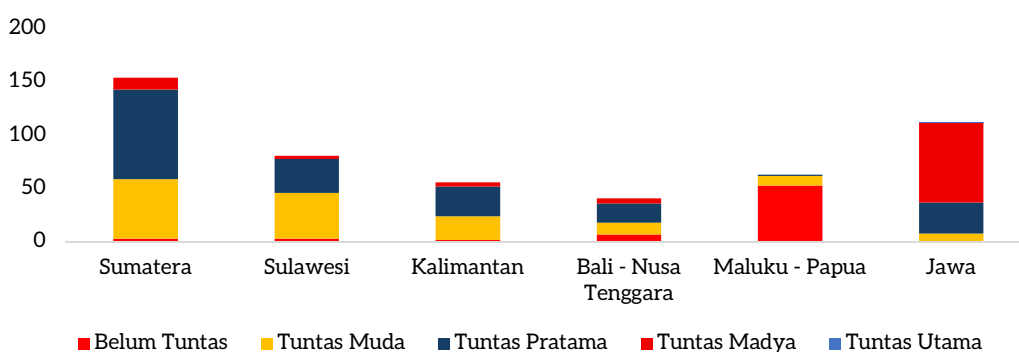
Secara keseluruhan, berdasarkan tingkat kemiskinan dan belanja kemiskinan daerah serta melihat kinerja indikator kesejahteraan (Indeks Regional *Wellbeing/IRW*), strategi kewilayahan penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui penguatan sinergi APBN dan APBD untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara multidimensi. Kebijakan diarahkan pada reorientasi belanja yang lebih tepat sasaran berbasis DTSEN, penguatan perlindungan sosial dan layanan dasar, serta dukungan peningkatan pendapatan melalui belanja K/L, TKD afirmatif, dan pengembangan UMKM serta padat karya produktif, khususnya di wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T. Selain dari aspek belanja, Pemda juga perlu memperkuat kebijakan PDRD yang inklusif, pemanfaatan pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur layanan dasar, serta penguatan sinergi pendanaan pusat, daerah, dan sektor swasta. Strategi tersebut diharapkan tidak hanya menurunkan kemiskinan, tetapi juga mendorong konvergensi kesejahteraan antarwilayah secara berkelanjutan.

Dalam jangka menengah dan panjang, keberlanjutan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan menjadi instrumen kunci untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

5.2.3. Pendidikan

Pembangunan pendidikan masih menghadapi tantangan ketimpangan kualitas layanan antardaerah. Hal ini tercermin dari capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan tahun 2024 yang belum merata meskipun secara nasional menunjukkan penyempurnaan. Rata-rata capaian SPM Pendidikan meningkat dari 64,45 pada tahun 2023 menjadi 66,15 pada tahun 2024. Namun, disparitas antardaerah masih cukup lebar, terutama di wilayah tertinggal dan berisiko tinggi. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan jangka menengah, termasuk kesempatan kerja, produktivitas, dan keberhasilan penurunan kemiskinan.

Grafik 51. Status Penuntasan SPM Pendidikan Perwilayah, 2024



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah), 2026

Arah kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan posisi daerah dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskalnya. Pada daerah dengan pertumbuhan yang masih terbatas, tantangan utama terletak pada ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan difokuskan pada pemenuhan layanan dasar

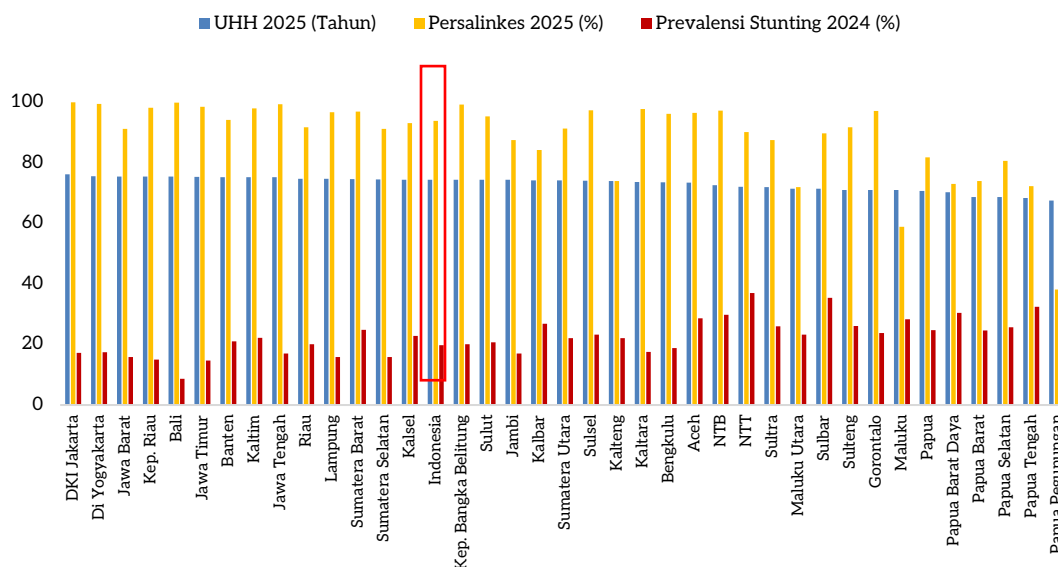
pendidikan, peningkatan akses, serta penguatan intervensi afirmatif untuk mempercepat konvergensi kualitas pendidikan antarwilayah.

Sementara itu, pada daerah dengan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi, kebijakan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan *link and match* dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap transformasi ekonomi.

Dalam rangka mempercepat konvergensi kualitas dan akses pendidikan yang inklusif, kebijakan fiskal pusat dan daerah diarahkan pada penguatan kualitas belanja *mandatory spending* pendidikan dan pemanfaatan TKD secara lebih efektif yang secara kewilayahan akan diarahkan berdasarkan kinerja capaian SPM dan kapasitas fiskal daerah. Pertama, Belanja K/L diarahkan untuk mendukung program prioritas berbasis layanan dasar seperti pemenuhan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan akses pendidikan (wajib belajar), bantuan pendidikan bagi kelompok rentan, serta pengembangan model pembelajaran fleksibel termasuk pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh. Lebih lanjut, penguatan *mandatory spending* dilakukan melalui pemutakhiran *budget tagging and tracking* belanja pendidikan, pemetaan subkegiatan yang meningkatkan kualitas belanja pendidikan dan mendorong *refocusing* belanja pendidikan daerah untuk mengutamakan indikator SPM yang masih lemah. Skema sinergi pendanaan melalui penguatan sinergi belanja K/L dan APBD, serta optimalisasi pembiayaan kreatif seperti pinjaman daerah dan KPBU juga akan didorong untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, pemerintah provinsi berperan strategis dalam memperkuat *link and match* pendidikan vokasi melalui sinergi TKD-APBD, peningkatan kualitas pembelajaran dan tenaga pendidik, serta penguatan tata kelola agar lulusan pendidikan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Secara keseluruhan, penguatan tata kelola dan akuntabilitas belanja pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap intervensi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan.

5.2.4. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan masih menghadapi tantangan. Tantangan tersebut diantaranya, ketimpangan kualitas layanan dan indikator prioritas seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir menurut Provinsi dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Fasilitas Kesehatan (Persalinakes), dan Prevalensi *Stunting*.

Grafik 52. Perkembangan Indikator UHH, Persalinkes, dan Prevalensi *Stunting* di Daerah

Sumber: BPS (diolah), 2026

Intervensi kebijakan difokuskan dengan mempertimbangkan posisi daerah dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskalnya. Pada daerah dengan pertumbuhan yang masih terbatas, tantangan utama meliputi keterbatasan akses layanan kesehatan, kualitas fasilitas kesehatan, serta tingginya beban masalah kesehatan dasar. Oleh karena itu, kebijakan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan akses dan kualitas fasilitas kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

Sementara itu, pada daerah dengan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi, kebijakan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan efisiensi belanja kesehatan, serta penguatan sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dan mencegah penurunan produktivitas akibat beban kesehatan. Selain itu, isu prioritas seperti penurunan *stunting* dan peningkatan gizi masyarakat menjadi bagian integral dalam kebijakan kesehatan, mengingat dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas jangka panjang. Sinergi belanja pusat dan daerah, optimalisasi TKD *earmarked*, serta pemanfaatan pembiayaan kreatif menjadi instrumen utama dalam memperkuat intervensi kesehatan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Strategi fiskal ini didukung melalui berbagai instrumen seperti Belanja K/L untuk program kerja prioritas nasional bidang kesehatan seperti revitalisasi Rumah Sakit dan Pencegahan Penyakit Menular, dan TKD tematik bidang kesehatan. Guna mewujudkan akses kesehatan yang berkualitas, pemerintah daerah diharapkan melakukan langkah-langkah strategis seperti: (i) percepatan realisasi belanja TKD *Earmarked* sesuai petunjuk teknis K/L terkait; (ii) penguatan komitmen anggaran untuk memenuhi SPM dan revitalisasi faskes; (iii) optimalisasi pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan publik; (iv) sinergi perencanaan pendanaan antara pusat (TKD/Belanja K/L) dan daerah agar intervensi kesehatan lebih terintegrasi; dan (v) dukungan distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang lebih merata.

Peningkatan Gizi Untuk Penanganan *Stunting*

Pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Prioritas ini diterjemahkan dalam target prioritas intervensi penurunan prevalensi *stunting*, yang mencapai 19,8 persen pada 2024 dan ditargetkan sebesar 14,2 persen pada 2029. Pemetaan data kondisi prevalensi *stunting* di daerah, efisiensi belanja intervensi, serta pengembangan komoditas pangan lokal bernilai gizi tinggi menjadi langkah prioritas. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah daerah didorong memperbaiki kualitas data pensasaran penanganan prevalensi *stunting*, mengefisienkan belanja intervensi, serta mengembangkan komoditas pangan lokal bernilai gizi tinggi. Dengan pendekatan tersebut, kedaulatan pangan diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan *stunting* secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu melakukan langkah terpadu untuk mendukung penurunan prevalensi *stunting*. Pertama, memperbaiki kualitas data dan sistem informasi gizi agar intervensi lebih tepat sasaran, melalui penyediaan data yang akurat tentang ibu hamil, bayi, dan balita, serta penguatan integrasi data lintas sektor seperti kesehatan, perlindungan sosial, dan kedaulatan pangan. Kedua, meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja daerah dengan mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan tepat guna, terutama untuk intervensi spesifik dan sensitif yang berdampak langsung pada perbaikan gizi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun. Ketiga, memperkuat ketersediaan dan akses pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, dukungan sarana produksi, pengembangan komoditas pangan lokal bergizi, serta perbaikan distribusi dan stabilitas pasokan. Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal untuk mendorong keberagaman konsumsi pangan masyarakat, sehingga selain meningkatkan akses terhadap gizi yang lebih terjangkau, juga dapat memperkuat perekonomian daerah.

5.2.5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di daerah menjadi fokus Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bersih, sehat, dan asri. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa 60,99 persen sampah (34,54 juta ton) belum terkelola dengan baik, di mana 21,8 persen sampah tersebut berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) *open dumping* dan 39,1 persen terbuang ke lingkungan. Wilayah Jawa menjadi prioritas utama penanganan karena memiliki volume timbunan sampah tertinggi.

Terdapat tiga strategi utama untuk mengatasi permasalahan persampahan. Pertama, pembangunan sistem pengumpulan sampah berbasis zonasi (perkotaan, pedesaan) dengan armada transportasi sampah yang memadai. Kedua, perluasan jaringan bank sampah tingkat desa/kelurahan dan pengintegrasian dengan industri daur ulang untuk menciptakan ekonomi sirkular. Ketiga, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPST3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) skala komunal untuk pengolahan sampah organik dan anorganik.

Guna mendukung keberhasilan strategi tersebut, terdapat kebijakan fiskal daerah yang perlu dilakukan. Kebijakan tersebut antara lain: (i) optimalisasi pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan untuk pengadaan lahan serta sarana dan prasarana; (ii) pemanfaatan dana

earmarking Pajak Air Tanah (PAT) khusus untuk penanganan sampah; (iii) menyiapkan Insentif Pajak Daerah untuk rumah tangga maupun nonresidensial yang terlibat pengelolaan persampahan melalui pembebasan retribusi pelayanan kebersihan dan pemberian insentif kepada kalangan maupun sektor tertentu yang telah melakukan pengolahan sampah (dengan instalasi) ataupun pemilahan sampah; serta (iv) memperbaiki tata kelola retribusi pelayanan kebersihan dengan menerapkan *polluter pay principle* (P3).

5.2.6. Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian dinamika global. Pemetaan kewilayahan menunjukkan bahwa belanja daerah bidang ketahanan pangan tidak selalu memiliki korelasi positif terhadap produktivitas pertanian dan perikanan, serta Nilai Tukar Petani (NTP) termasuk komponen di dalamnya Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP). Strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan akan difokuskan pada sektor pertanian dan sektor perikanan.

Arah kebijakan kewilayahan difokuskan dengan mempertimbangkan posisi daerah dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskalnya. Pada daerah dengan pertumbuhan yang masih terbatas, tantangan utama berkaitan dengan rendahnya produktivitas sektor pangan, baik pada subsektor pertanian maupun perikanan, keterbatasan infrastruktur, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan difokuskan pada penguatan fondasi produksi melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan produktivitas, serta dukungan terhadap pelaku usaha skala kecil di sektor pertanian dan perikanan, khususnya petani dan nelayan.

Pada subsektor pertanian, intervensi diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta penguatan sarana produksi dan distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan. Sementara itu, pada subsektor perikanan, kebijakan difokuskan pada peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan melalui modernisasi alat tangkap, penguatan budi daya, serta pengembangan kawasan perikanan yang terintegrasi.

Sementara itu, pada daerah dengan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi, kebijakan diarahkan pada penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di kedua subsektor tersebut. Pada pertanian, strategi difokuskan pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan diversifikasi produk pangan. Pada perikanan, kebijakan diarahkan pada hilirisasi produk perikanan, penguatan rantai dingin (*cold chain*), serta integrasi ke dalam rantai pasok nasional dan global. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor pangan tidak hanya berperan sebagai penopang stabilitas, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Strategi fiskal untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut didukung melalui instrumen Belanja K/L, TKD *earmarked*, PDRD, dan kebijakan belanja daerah yang terintegrasi yang akan diarahkan berdasarkan tingkat produktivitas, kapasitas belanja dukungan kedaulatan pangan serta mempertimbangkan NTP dan NTNP. Dukungan melalui TKD *earmarked* bidang kedaulatan dan/atau ketahanan pangan mencakup dukungan terhadap infrastruktur pertanian dan perikanan, serta stabilisasi pasokan. Kebijakan PDRD dioptimalkan melalui penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih rendah untuk lahan pangan dan ternak sesuai amanah UU HKPD, pemberian

insentif perpajakan, pemenuhan *earmarking* atas PKB dan opsen PKB untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan tata kelola pungutan retribusi. Selain itu, daerah dengan produktivitas dan NTP rendah dapat mengalokasikan belanja daerah yang mendukung basis kedaulatan pangan baik sektor pertanian dan perikanan, optimalisasi BUMDes/koperasi dalam rantai pasok pangan, serta penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga pangan.

5.3. Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan Tahun 2027

Berbagai intervensi tematik seperti penurunan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kedaulatan pangan memerlukan efektivitas kebijakan fiskal yang kuat, terintegrasi, dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal kewilayahan diarahkan untuk memastikan bahwa instrumen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mampu secara efektif mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Sebagai tindak lanjut dari arah dan strategi kewilayahan, kebijakan fiskal kewilayahan 2027 difokuskan pada penguatan efektivitas dan ketepatan sasaran intervensi fiskal melalui pendekatan berbasis kinerja. Strategi ini menekankan pada pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah, dan alokasi belanja daerah produktif, serta inovasi pembiayaan daerah yang berkelanjutan, *prudent*, dan mampu mendorong akselerasi pembangunan tanpa meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan.

5.3.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan PDRD diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga iklim investasi dan kualitas pelayanan publik. Strategi optimalisasi dilakukan melalui penguatan basis data, digitalisasi layanan, sinergi pemungutan pajak (seperti Pajak Kendaraan Bermotor/PKB dan Mineral Bukan Logam dan Batuan/MBLB), serta interkoneksi data antar pemerintah. Penetapan target pendapatan harus realistis berdasarkan kondisi makroekonomi dan potensi penerimaan PDRD. Selain itu, pemberian insentif fiskal dilakukan secara selektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Penguatan penggalan potensi pajak sangat diperlukan untuk meminimalisasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan (*tax gap*). Saat ini, tantangan utama masih ditemukan pada PKB terkait kepatuhan pembayaran, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terkait pelaporan atas distribusi Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) untuk industri, dan PBB-P2 terkait pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pemanfaatan teknologi dan data spasial menjadi kunci utama dalam memetakan objek pajak secara lebih akurat dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah wajib meningkatkan kepatuhan terhadap alokasi belanja yang ditentukan (*earmarking*) untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022, penerimaan dari pajak tertentu, yaitu PKB dan opsennya, Pajak Rokok, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, dan Pajak Air Tanah harus dialokasikan kembali untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan guna mendukung pembangunan yang produktif. Hal ini bertujuan agar modalitas pembangunan dari PDRD dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Sinergi antarlevel pemerintah dan partisipasi bermakna dari masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat akseptabilitas kebijakan pajak. Kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan opsen perlu ditingkatkan, dibarengi dengan komunikasi publik yang transparan. Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan berfungsi untuk memitigasi gejolak sosial serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.3.2. Belanja Daerah

Pemerintah daerah harus memperkuat tata kelola belanja melalui perencanaan yang matang dan evaluasi berbasis kinerja demi efisiensi anggaran. Langkah ini krusial untuk memastikan setiap pengeluaran berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing ekonomi daerah. Dengan penguatan tata kelola, belanja daerah bertransformasi dari sekadar penyerapan anggaran menjadi instrumen pembangunan yang efektif.

Alokasi belanja perlu diprioritaskan untuk menurunkan kesenjangan wilayah dan memenuhi SPM di daerah tertinggal. Fokus anggaran dialihkan pada pemerataan akses agar kualitas layanan publik tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Hal ini memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah.

Strategi belanja diarahkan pada pemenuhan kewajiban sektor dasar, skema transfer berbasis kinerja, serta program yang adaptif terhadap tantangan masa depan. Daerah diinstruksikan untuk disiplin dalam alokasi pendidikan dan kesehatan serta memperkuat kedaulatan pangan lokal dan mitigasi bencana. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk membangun ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan risiko lingkungan jangka menengah.

5.3.3. Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

Inovasi pembiayaan kreatif sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah dalam mendanai proyek pembangunan besar. Pendekatan ini dapat mengoptimalkan sumber dana untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan melalui instrumen strategis seperti pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pendekatan ini memungkinkan daerah tetap produktif menjalankan kebijakan fiskal nasional meskipun memiliki ruang anggaran yang sempit.

Sebagai terobosan kebijakan, penggunaan kurang bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH) sebagai instrumen pembayaran pinjaman daerah merupakan inovasi fiskal yang strategis. Melalui mekanisme ini, hak daerah atas KB-DBH yang belum terbayarkan diperhitungkan langsung sebagai pembayaran kewajiban pinjaman, sehingga menciptakan efisiensi arus kas fiskal pusat-daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat: (i) mengurangi akumulasi kewajiban KB-DBH Pemerintah Pusat; (ii) membantu daerah membayar kewajiban pinjaman tanpa mengurangi kas daerah; (iii) mengurangi risiko gagal bayar (*default risk*) pinjaman daerah; (iv) mendorong daerah untuk mengakses pembiayaan kreatif berupa pinjaman daerah; serta (v) memperkuat kepercayaan daerah terhadap komitmen Pemerintah Pusat dalam pembayaran KB-DBH. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis fiskal, tetapi juga sebagai katalis perluasan akses pembiayaan daerah dan penguatan hubungan keuangan pusat-daerah.

Peningkatan keterlibatan sektor swasta melalui skema KPBU menjadi solusi pemerataan infrastruktur. Meski sektor transportasi telah mendominasi, pemerintah daerah perlu

mendorong proyek KPBU skala kecil pada sektor pelayanan publik lainnya. Diversifikasi sektor ini penting agar pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya bertumpu pada dana pemerintah, tetapi juga didukung oleh investasi swasta.

Penyederhanaan prosedur dan sinergi pendanaan dengan lembaga keuangan (*Special Mission Vehicle/SMVs*) menjadi kunci untuk mengatasi tantangan investasi proyek skala kecil. Tantangan berupa proses yang rumit dan biaya penyiapan yang tinggi perlu dimitigasi dengan insentif serta kolaborasi bersama PT. PII dan PT. SMF. Fokus kolaborasi ini diarahkan pada sektor krusial seperti pengelolaan sampah dan air minum yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Pemanfaatan pinjaman daerah konsesional menjadi bentuk afirmasi fiskal bagi daerah dengan kapasitas ekonomi terbatas. Skema dengan bunga rendah dan tenor panjang ini memberikan ruang bagi daerah tertinggal untuk berinvestasi pada layanan dasar tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Selain itu, instrumen ini berfungsi melatih disiplin fiskal sekaligus menjamin keberlangsungan proyek strategis Pemerintah Daerah seperti kesehatan dan sanitasi.

Di sisi instrumen pembiayaan, diversifikasi perlu terus didorong dengan mengeksplorasi potensi obligasi daerah dan sukuk daerah (*municipal bond*, termasuk *green bond*, maupun *blue bond*) sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang. Instrumen-instrumen ini tidak hanya memperluas basis investor, tetapi juga dapat memberikan sinyal komitmen daerah terhadap pembangunan berkelanjutan kepada pasar modal.

Kombinasi inovasi pembiayaan dan penguatan peran swasta akan mempercepat pembangunan infrastruktur serta perumahan secara nasional. Sinergi berbagai sumber pendanaan non-APBD memastikan kebijakan efisiensi anggaran berjalan efektif tanpa mengorbankan target pembangunan. Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

Pengelolaan defisit APBD merupakan instrumen fiskal yang sah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah sesuai mandat undang-undang. Pemerintah daerah diperbolehkan menganggarkan defisit agar proyek strategis tetap berjalan meskipun penerimaan terbatas. Ruang ini diberikan sebagai fleksibilitas fiskal untuk memastikan roda pembangunan di daerah tidak terhenti.

Pengendalian defisit wajib mematuhi prinsip kehati-hatian fiskal guna menjaga batas aman akumulasi defisit nasional sebesar 3 persen dari PDB. Batasan ini mencakup gabungan defisit pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin stabilitas ekonomi makro. Penegakan disiplin anggaran ini sangat penting agar beban utang publik tetap terkendali dan tidak mengancam kesinambungan fiskal jangka panjang.

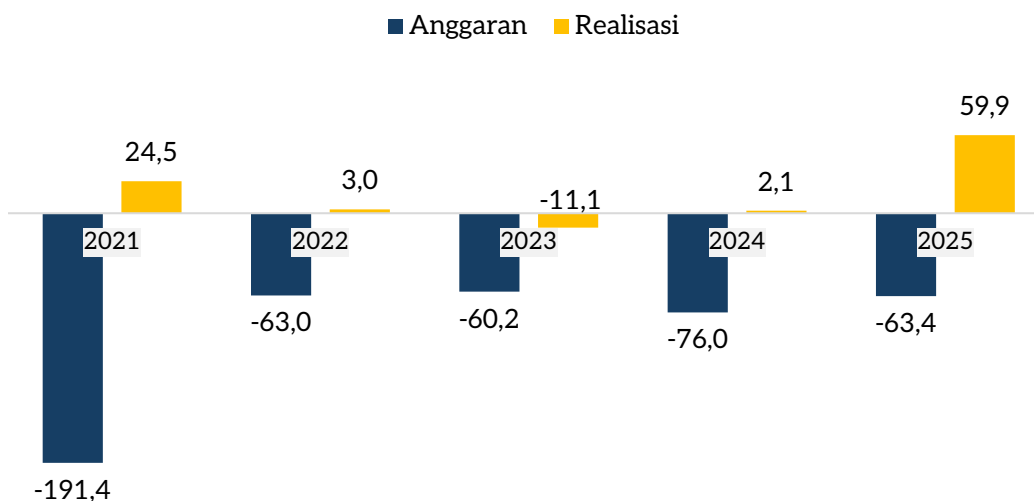
Pemerintah menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit (BMKD) setiap tahun sebagai alat kendali agar kebijakan fiskal daerah selaras dengan kebijakan nasional. Penetapan BMKD memastikan bahwa penggunaan ruang defisit oleh setiap daerah tetap terukur dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara. Mekanisme ini mencegah adanya tekanan berlebihan pada stabilitas sistem keuangan akibat pembiayaan utang daerah yang tidak terkontrol.

Evaluasi kapasitas fiskal dan kemampuan pengembalian pinjaman menjadi syarat utama dalam menyetujui pembiayaan defisit melalui utang daerah. Pemerintah secara ketat memantau rasio beban utang agar setiap pinjaman yang diambil daerah memiliki profil risiko yang terjaga. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan anggaran daerah di masa depan agar tetap mampu membiayai layanan dasar publik.

Realisasi defisit APBD secara agregat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang terkendali di bawah batas maksimal yang ditetapkan. Meskipun ruang defisit tersedia, pemerintah daerah cenderung menerapkan pola pengelolaan yang konservatif dan hati-hati sesuai kapasitas jangka menengah. Tren positif ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga kesehatan fiskal daerah sambil tetap berupaya membangun infrastruktur.

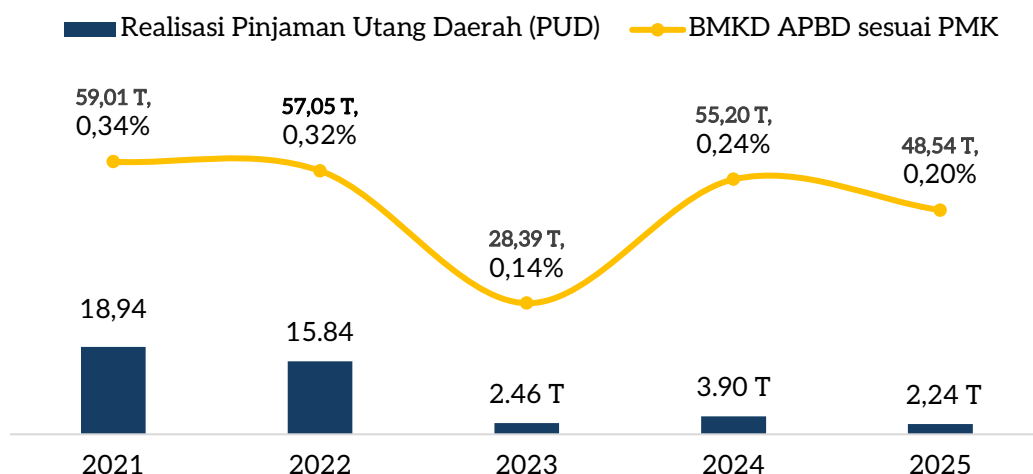
Upaya pengendalian ini bertujuan untuk menjamin percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal jangka menengah dan panjang. Dengan menjaga rasio defisit dan utang pada level yang aman, pemerintah daerah tetap memiliki ruang gerak untuk mendanai proyek strategis di masa depan. Sinergi ini pada akhirnya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan investasi infrastruktur yang mendesak dan kesehatan fiskal nasional.

Grafik 53. Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2021-2025 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah), 2026

Pemerintah akan terus memperkuat pengendalian defisit dan utang daerah melalui mekanisme evaluasi serta penetapan batas maksimal kumulatif tahunan yang ketat. Langkah ini mencakup koordinasi intensif antara pusat dan daerah guna memastikan bahwa setiap rencana pembiayaan tetap berada dalam koridor kebijakan fiskal nasional. Penguatan pengawasan ini menjadi instrumen utama untuk mencegah risiko gagal bayar dan menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Grafik 54. Realisasi Pembiayaan Utang Daerah (PUD) dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, 2021-2025 (Rp T)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah), 2026

Secara keseluruhan, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah diarahkan untuk memastikan bahwa setiap instrumen fiskal dapat berfungsi sebagai pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai jangkar, serta mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan sebagai instrumen pendukung, kebijakan fiskal kewilayahan diharapkan mampu mempercepat konvergensi antarwilayah dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2027

6.1. Kinerja APBN secara Umum Tahun 2025

Di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi domestik dapat dijaga tetap resilien yang diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari semula di bawah 5,00 persen pada triwulan I 2025 kemudian dapat mencapai 5,11 persen pada tahun 2025. Pemerintah berupaya memelihara ekspektasi pasar dan menjaga momentum melalui kebijakan deregulasi dan *debottlenecking* serta pemberian paket stimulus untuk menopang pertumbuhan. APBN tahun 2025 dirancang tetap ekspansif guna merespons dinamika perekonomian yang penuh ketidakpastian serta mendukung berbagai agenda pembangunan secara lebih optimal dengan defisit yang terkendali dalam batas aman.

Hingga akhir tahun 2025, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.765,1 triliun atau 92,0 persen dari target APBN di tengah tantangan yang cukup berat, utamanya dipengaruhi pengalihan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari dividen BUMN ke BPI. Di antara, termoderasinya harga komoditas, serta penyesuaian tarif PPN yang terbatas untuk barang mewah. Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.435,5 triliun atau 94,9 persen dari APBN. Dalam komponen Belanja Negara, khususnya Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2.586,4 triliun (95,7 persen dari APBN), yang pada umumnya difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas antara lain MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), Lumbung Pangan, penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan (antara lain Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda), peningkatan layanan kesehatan antara lain melalui CKG, serta dukungan bagi sektor produktif untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pada komponen Belanja Negara lainnya yaitu Transfer ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp849,0 triliun (92,3 persen dari APBN), yang berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit APBN tahun 2025 tetap terjaga dalam batas aman sebesar Rp670,3 triliun atau 2,81 persen terhadap PDB. Capaian ini mencerminkan keseimbangan antara kebijakan fiskal yang ekspansif dan komitmen kuat Pemerintah terhadap kesinambungan fiskal jangka menengah.

6.2. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) merupakan komponen terbesar dari Belanja Negara dengan pagu APBN tahun 2025 sebesar Rp2.701,4 triliun. Pada awal tahun 2025 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan kebijakan efisiensi belanja APBN dan APBD sebesar Rp306,7 triliun, terdiri dari efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1

triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50,6 triliun. Kebijakan efisiensi tersebut tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar K/L, serta belanja bantuan sosial. BPP dianggarkan untuk menjalankan tiga peran utama pemerintah. Pertama, sebagai *development agent* dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian melalui program stimulus serta penanggulangan bencana. Ketiga, sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

APBN tahun 2025 didesain fleksibel untuk mengantisipasi dinamika sepanjang tahun antara lain untuk mengakomodir penyesuaian struktur pemerintahan, kebijakan stimulus ekonomi, dukungan untuk program unggulan, serta penanggulangan bencana alam yang terjadi pada akhir 2025. Hingga akhir triwulan IV tahun 2025, realisasi BPP mencapai Rp2.586,4 triliun atau 95,7 persen dari pagu. Realisasi ini terdiri dari realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Non-K/L yang masing-masing menunjukkan dinamika berbeda sepanjang tahun. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.483,9 triliun atau 127,9 persen dari pagu, tumbuh 12,1 persen secara tahunan. Anggaran Belanja K/L dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial seperti PBI JKN, kartu sembako, BLTS Kesra, PKH, PIP, dan KIP Kuliah, dukungan pelaksanaan program MBG, berbagai bantuan pemerintah, serta pengadaan infrastruktur termasuk pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan. Sementara itu, realisasi Belanja Non-K/L hingga akhir tahun 2025 mencapai Rp1.102,6 triliun atau 71,5 persen dari pagu dan mengalami kontraksi sebesar 5,9 persen secara tahunan. Belanja Non-K/L terutama digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi tepat waktu. Pembayaran manfaat pensiun terealisasi Rp166,5 triliun, tumbuh 3,7 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pensiunan ASN/TNI/Polri. Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp281,8 triliun, terkontraksi 3,8 persen (yoy), dipengaruhi oleh fluktuasi *Indonesian Crude Price* (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, listrik, dan pupuk. Subsidi terdiri dari Subsidi Energi sebesar Rp185,2 triliun untuk penyaluran BBM bersubsidi 19,0 juta kiloliter, LPG 3 kg 8,5 juta metrik ton, dan listrik bersubsidi untuk 42,8 juta pelanggan serta Subsidi Non Energi sebesar Rp96,4 triliun, yang terutama digunakan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 4,6 juta debitur dengan plafon KUR Rp270,1 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan untuk 278,9 ribu unit rumah bersubsidi, dan penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 8,1 juta ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp124,3 triliun, mengalami kontraksi tajam 42,5 persen (yoy), dan sebagian besar digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp120,0 triliun.

6.3. Kinerja Belanja Transfer ke Daerah Tahun 2025

Pada 2025, kebijakan Efisiensi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) ditandai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang pelaksanaannya diatur dalam KMK Nomor 29/2025 terkait **penyesuaian alokasi TKD**. Pagu TKD yang semula berdasarkan Perpres 201/2024 adalah Rp919,9 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp869,3 triliun. Meskipun pagu mengalami penurunan, efisiensi TKD tersebut tidak mengurangi manfaat yang diterima oleh masyarakat, karena hasil efisiensi ini digunakan untuk kegiatan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Efisiensi TKD bahkan mendorong pemerintah khususnya pemda untuk berinovasi dan berkolaborasi serta bersinergi agar pembangunan berjalan terpadu, saling melengkapi, dan berkelanjutan. Adapun bagi pemerintah desa

(pemdes), pengaruh efisiensi TKD tidak terlalu berdampak karena Dana Desa yang telah dialokasikan per Desa tetap tidak berubah.

Secara keseluruhan, realisasi TKD di 2025 mencapai Rp849,0 triliun (92,3 persen dari Pagu Perpres), atau terkontraksi 1,7 persen (yoy), dampak adanya pencadangan nilai TKD sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dilihat per jenis dana, dimulai dengan Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi penyaluran di tahun 2025 tercatat Rp168,9 triliun (87,8 persen dari Perpres). Dalam realisasi tersebut termasuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar (KB) DBH sebesar Rp18,5 triliun. Selama 2025, DBH mendukung penyediaan layanan kepada masyarakat, antara lain berupa bantuan iuran JKN untuk 4,9 juta orang, bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 696 ribu orang, serta perlindungan dan pengamanan hutan seluas 1.302 hektare.

Untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), menunjukkan kinerja yang baik yaitu Rp433,3 triliun (97,0 persen dari Perpres). Realisasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum mekanisme penyaluran DAU telah berjalan sesuai harapan, didukung oleh kesiapan pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran serta konsistensi pemerintah pusat dalam menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini menegaskan peran strategis DAU dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Secara lebih rinci, DAU terbagi atas DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya (*DAU Block Grant*) dan DAU Ditentukan Penggunaannya (*DAU Specific Grant*). *DAU Block Grant* menunjukkan kinerja penyaluran yang optimal dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu, *DAU Specific Grant* telah tersalurkan 93,17 persen yang terdiri atas: (i) DAU dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); (ii) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan; (iii) DAU dukungan bidang pendidikan; (iv) DAU dukungan bidang kesehatan; dan (v) DAU dukungan bidang pekerjaan umum (termasuk dalam efisiensi TKD). Penyaluran DAU tersebut termasuk juga DAU dukungan THR dan gaji ketiga belas bagi guru ASN daerah yang telah disalurkan pada Desember 2025. Pemanfaatan DAU pada 2025 diantaranya untuk pembayaran gaji PPPK atas pengangkatan tenaga honorer sebanyak 166.123 orang, pembangunan 5.858 ruang kelas baru, rehabilitasi dan pemeliharaan 724 unit rumah sakit, serta pengadaan alat kesehatan sebanyak 13.976 unit.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2025 telah terealisasi sebesar Rp162,9 triliun (88,0 persen dari Pagu Perpres). Kinerja ini tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan secara terukur tanpa mengurangi fokus pada manfaat dan hasil nyata bagi masyarakat. Secara lebih rinci, DAK Fisik terealisasi Rp17,6 triliun (47,7 persen dari Pagu Perpres). Capaian ini dipengaruhi oleh kesiapan pelaksanaan kegiatan di sebagian daerah, terutama terkait aspek perencanaan teknis dan proses pengadaan barang dan jasa. Penyaluran DAK Fisik menunjukkan kinerja yang solid dan terfokus pada bidang prioritas nasional, dengan tingkat penyaluran tertinggi pada bidang Sanitasi, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Permukiman, Air Minum, serta Pendidikan, yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, realisasi DAK Nonfisik di 2025 mencapai Rp145,1 triliun atau 98,9 persen dari Pagu Perpres, sejalan dengan kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru secara langsung ke rekening guru serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah. Dari segi penyaluran Hibah kepada Daerah tercatat Rp251,1 miliar (15,6 persen dari Pagu Perpres) telah terealisasi di 2025 sejalan dengan tahapan pelaksanaan

proyek strategis di daerah, seperti pembangunan *Mass Rapid Transit* koridor *East-West*. Hibah kepada Daerah tetap difokuskan pada dukungan transportasi umum massal perkotaan, penguatan sektor pertanian dataran tinggi, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana. Sepanjang 2025, DAK memberikan dampak langsung bagi peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan DAK antara lain mendukung pendanaan untuk operasional satuan pendidikan bagi 50,4 juta peserta didik, pembangunan dan renovasi lebih dari 1.000 puskesmas, operasionalisasi lebih dari 10 ribu puskesmas dan 6,4 ribu balai penyuluh kesehatan, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 88 km, serta perluasan layanan air minum dan sanitasi melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi puluhan ribu sambungan rumah.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) terealisasi Rp17,0 triliun (97,1 persen Pagu Perpres). Penggunaan Dana Otsus dan DTI 2025 telah menghasilkan beberapa *output* utama, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adapun *output* yang dihasilkan antara lain: (i) penyediaan beasiswa yang diprioritaskan bagi Orang Asli Papua pada pendidikan SD/SMP/SMA bagi 54.420 siswa; (ii) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SD sebanyak 2.599 guru; (iii) pembangunan puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya sebanyak 79 faskes; (iv) pembangunan/rekonstruksi jalan sepanjang 3.105 km; dan (v) pembangunan jembatan sebanyak 57 unit.

Kemudian untuk Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, terealisasi Rp1,0 triliun (83,3 persen Pagu Perpres) dengan capaian realisasi fisik 95,69 persen. Penggunaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada 2025 telah menghasilkan beberapa *output*, diantaranya: (i) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rumah Tidak Layak Huni di 280 kelurahan; (ii) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rumah sebanyak 95 unit; (iii) Beasiswa *Retrieval* SMA kepada 250 Siswa; (iv) Kartu Cerdas/Siswa Miskin untuk 15.200 siswa; dan (v) Verifikasi Tanah Kelurahan sebanyak 3.450 bidang.

Selanjutnya, penyaluran Dana Desa mencapai Rp61,6 triliun (89,34 persen pagu perpres) atau mengalami penurunan 13,09 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh: (i) tingkat kepatuhan dalam pemenuhan persyaratan penyaluran; dan (ii) kebijakan pengendalian anggaran Dana Desa Tahap II untuk mendukung kebijakan pengendalian belanja dan defisit dalam rangka mendukung prioritas nasional. Penggunaan Dana Desa tetap diarahkan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem di desa melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Hingga periode ini, BLT Desa telah disalurkan ke Rekening Kas Desa Rp6,73 triliun kepada 1,87 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar pada 74.639 desa. Selain itu, fokus Dana Desa juga mendukung program ketahanan pangan yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan pangan, baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa; (ii) meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; serta (iii) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk mendukung program Ketahanan Pangan tersebut, Dana Desa telah disalurkan Rp 15,17 triliun kepada 74.600 desa.

Pada tahun 2025, Insentif Fiskal mencatat realisasi penyaluran Rp4,3 triliun (71,2 persen dari pagu Perpres). Capaian ini terkontraksi 38,9 persen (yoy), salah satunya disebabkan karena adanya penyesuaian pagu sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dari sisi capaian

output, penggunaan Dana Insentif fiskal 2025 telah menghasilkan beberapa output utama, diantaranya adalah: (i) Iuran JKN 1,3 juta orang; (ii) Bantuan Benih Tanaman Pangan 376.231 kg; (iii) Jalan Usaha Tani 419 KM, dan (iv) Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni 5.769 unit.

6.4. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2026

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2026 secara umum diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kerangka tersebut, kebijakan belanja difokuskan pada beberapa prioritas utama antara lain: (i) penguatan ketahanan pangan antara lain dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing; (ii) penguatan ketahanan energi antara lain dengan menjaga stabilisasi harga dan serta percepatan transisi energi terbarukan untuk kemandirian energi dan ekonomi; (iii) Program MBG untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil/menyusui; (iv) penguatan sektor pendidikan melalui keberlanjutan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda; (v) penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan sarana, prasarana, dan layanan kesehatan, termasuk keberlanjutan program Cek Kesehatan Gratis.

Untuk mendukung pencapaian berbagai program-program prioritas, pelaksanaan program-program tetap dilakukan dengan menjaga efektivitas, efisiensi, kehati-hatian, dan tata kelola fiskal yang baik serta memiliki fleksibilitas yang memadai untuk mengantisipasi tambahan kebutuhan pendanaan secara cepat dan terukur. Berbagai langkah-langkah percepatan realisasi belanja dan pencapaian target kinerja serta langkah-langkah penajaman fokus anggaran akan dilaksanakan pada tahun 2026. Langkah-langkah percepatan dilakukan antara lain dengan: (i) akselerasi realisasi belanja modal; (ii) ketepatan waktu pemenuhan kewajiban pembayaran; (iii) pencapaian target output prioritas dengan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden guna memastikan seluruh output tercapai sesuai rencana; (iv) percepatan realisasi anggaran bantuan sosial dan bantuan pemerintah; (v) optimalisasi anggaran yang bersumber dari non rupiah murni; dan (vi) percepatan pengesahan belanja Badan Layanan Umum. Selanjutnya, langkah-langkah penajaman fokus anggaran akan dilakukan antara lain melalui: (i) mengoptimalkan ketersediaan anggaran guna memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat *mandatory* serta program prioritas Presiden; (ii) meningkatkan efisien dengan membatasi biaya pendukung seperti honorarium tim kegiatan, biaya konsumsi rapat dalam kantor, biaya kegiatan seremonial, biaya percetakan, pengadaan souvenir, pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan, biaya lain yang substansinya tidak berpengaruh secara langsung; (iii) melakukan penajaman belanja; dan (iv) penajaman fokus anggaran dalam rangka dukungan pemulihan pascabencana wilayah Sumatera.

6.5. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2027

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam APBN tahun 2027 diarahkan untuk belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Hal tersebut akan dicapai dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Difokuskan untuk mendukung pencapaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tahun 2027;
2. Memprioritaskan belanja barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat;
3. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional;
4. Mengakselerasi, memperkuat dan mempertajam program penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pencegahan kelompok rentan miskin masuk dalam kategori miskin berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
5. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
6. Mengoptimalkan belanja pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan program pembangunan;
7. Meningkatkan kualitas SDM; dan
8. Memperkuat kapasitas riset nasional untuk mendukung pencapaian hilirisasi dan industrialisasi.

Penjabaran lebih lanjut dari kebijakan BPP tersebut, antara lain melalui penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (KL) yang diuraikan sebagai berikut:

6.5.1. Kebijakan Umum Belanja K/L

Kebijakan umum belanja K/L tahun 2027 diarahkan antara lain untuk:

1. Meningkatkan produktivitas dan mendukung 8 klaster PKPN dan 1 fondasi klaster yang merupakan arah kebijakan prioritas anggaran, yaitu: (1) klaster Kedaulatan Pangan, (2) Klaster Kemandirian Energi dan Air, (3) klaster Pendidikan, (4) klaster Kesehatan, (5) klaster Hilirisasi dan Industrialisasi, (6) Klaster Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana, (7) Klaster Ekonomi Kerakyatan dan Desa, dan (8) klaster Penurunan Kemiskinan, serta 1 fondasi klaster (penegakan hukum serta tata kelola dan digitalisasi);
2. Mendukung pencapaian RKP khususnya yang sejalan dengan direktif Presiden berupa 8 klaster PKPN dan 1 fondasi klaster;
3. Menjaga kebutuhan minimum belanja pemerintahan dan *mandatory* (termasuk alokasi belanja pegawai dan belanja pendidikan) dengan menggunakan basis kebijakan efisiensi tahun 2026;
4. Memastikan agar belanja tetap menjadi stimulus/dukungan atas kebijakan yang bernilai tambah tinggi dan mampu menjaga ketahanan ekonomi;
5. Menjaga harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dan TKD serta komponen APBN lain untuk menjaga disiplin anggaran dan optimalisasi fungsi anggaran;
6. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN);
7. Meningkatkan kualitas Belanja K/L melalui perbaikan proses bisnis dan optimalisasi layanan berbasis TIK/digitalisasi birokrasi;
8. Meningkatkan ketepatan pencapaian sasaran dan penerima manfaat program dengan memanfaatkan DTSEN;
9. Meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan Standar Biaya, baik Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, maupun Standar Struktur Biaya; dan

10. Memanfaatkan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan non Rupiah Murni (non RM) yang bersifat saling melengkapi dan merupakan bagian dari strategi pendanaan dalam APBN untuk mencapai target Prioritas Nasional, khususnya PKPN, dengan ketentuan:
 - a. Dalam rangka perumusan kebijakan belanja, proporsi pemanfaatan sumber dana RM maupun Non RM untuk menghasilkan suatu keluaran dalam rangka pencapaian target prioritas nasional, dapat diidentifikasi, dikelompokkan dan dihimpun berdasarkan informasi kerangka pendanaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen perencanaan anggaran, baik yang berdimensi jangka pendek maupun jangka menengah; dan
 - b. Pengalokasian Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) difokuskan untuk penyelesaian pinjaman proyek yang berstatus on going dengan memperhitungkan rencana realistis penarikan oleh Kementerian Negara/Lembaga, termasuk memperhitungkan penarikan PLN dan PDN untuk proyek-proyek Kementerian/ Lembaga yang bersifat strategis.

6.5.2. Kebijakan Khusus Belanja K/L

Intervensi utama Belanja K/L disusun menurut PKPN melalui program unggulan jangka pendek untuk mendukung:

1. Kedaulatan Pangan
2. Kemandirian Energi dan Air
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Hilirisasi dan Industrialisasi
6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa
8. Penurunan Kemiskinan

yang diperkuat dengan fondasi pada aspek penegakan hukum, serta tata kelola dan digitalisasi. Penjelasan atas masing-masing klaster PKPN di atas adalah sebagai berikut:

1. **Klaster Kedaulatan Pangan** diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan secara berkelanjutan, antara lain dengan:
 - a. Meningkatkan produktivitas pangan, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian dan perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, pembangunan pergaraman nasional, pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha, peremajaan tanaman perkebunan, serta penguatan riset perbenihan/perbibitan;
 - b. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, antara lain: pembangunan kawasan swasembada pangan dan kawasan perkebunan, penguatan cadangan pangan, dan peningkatan efisiensi rantai pasok dan distribusi yang efektif, serta penguatan sistem logistik pangan nasional, pengembangan kawasan industri pendukung, serta penguatan integrasi hulu-hilir untuk mendorong hilirisasi dan nilai tambah;

- c. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, antara lain program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana produksi, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan dan perlindungan usaha pertanian dan perikanan;
 - d. Memperkuat ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, antara lain melalui mitigasi dan adaptasi terhadap potensi perubahan iklim yang dapat berdampak pada ketahanan pangan; dan
 - e. Menopang kedaulatan pangan secara bertahap, dimulai dari kedaulatan beras, selanjutnya jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula, yang dituntaskan pada periode jangka menengah.
2. **Klaster Kemandirian Energi dan Air**, diarahkan untuk peningkatan *lifting* Migas, stabilisasi harga energi, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan pemenuhan kebutuhan air bersih antara lain dengan:
- a. Mendukung peningkatan *lifting* migas, antara lain memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau *idle well*, optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru dan mengeksplorasi cadangan minyak baru;
 - b. Mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain transisi energi dalam ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan biodiesel dan bioetanol;
 - c. Mendukung kemandirian energi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi, dan secara bersamaan menurunkan konsumsi migas dengan alih energi ke listrik dan energi terbarukan;
 - d. Memperkuat swasembada air, untuk memperluas akses air bersih, dan sanitasi aman bagi masyarakat, antara lain melalui peningkatan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta pengembangan jaringan air tanah dan baku; dan
 - e. Pemerataan infrastruktur kelistrikan serta jaringan gas.
3. **Klaster Pendidikan**, diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM unggul yang cerdas, berintegritas dan berdaya saing guna merespons berbagai tantangan pembangunan, antara lain dengan:
- a. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. antara lain melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan Perguruan Tinggi (medical university berbasis STEMM), SMA Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Nasional Terintegrasi sesuai penugasan regulasi yang berlaku;
 - c. Percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - d. Peningkatan kualitas pembelajaran antara lain melalui penerapan Kurikulum yang berfokus pada karakter dan kompetensi esensial; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; serta penerapan digitalisasi pendidikan dan studio guru;

- e. Peningkatan kualitas lingkungan belajar yang kondusif, salah satunya dengan pemberian asupan gizi yang terjamin melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disempurnakan tata kelola dan target sasaran di Satuan Pendidikan;
 - f. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) a.l melalui penguatan program magang dan teaching industry serta peningkatan akses ke pekerjaan luar negeri
 - g. Mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - h. Pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif;
 - i. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan antara lain melalui pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan insentif;
 - j. Penyaluran Bantuan Pendidikan yang tepat sasaran, termasuk bantuan perlengkapan sekolah;
 - k. Mendukung pembinaan atlet terpadu melalui Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional;
 - l. Mendukung perlindungan anak di ruang digital;
 - m. Penyusunan kajian untuk meningkatkan dan mengakselerasi wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun; dan
 - n. Menopang akses anak-anak rumah tangga miskin terhadap pendidikan menengah dan tinggi.
4. **Klaster Kesehatan**, diarahkan untuk mendorong perluasan cakupan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain melalui:
- a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui penuntasan tuberkulosis, penyediaan alat kontrasepsi, dan pelaksanaan vaksinasi serta imunisasi;
 - b. Penguatan promosi dan pencegahan bidang kesehatan (*promotive – preventive*), antara lain melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG);
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan pemberian asupan gizi yang terjamin melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disempurnakan tata kelola dan target sasaran;
 - d. Peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas, antara lain melalui peningkatan efektivitas program jaminan kesehatan, pembangunan/revitalisasi rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, serta peningkatan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan;
 - e. Penguatan sistem kesehatan melalui digitalisasi dan penguatan data kesehatan; dan
 - f. Pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.
5. **Klaster Hilirisasi dan Industrialisasi**, diarahkan untuk memberikan nilai tambah, peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja di bidang industri, antara lain melalui:
- a. Percepatan hilirisasi industri pada komoditas strategis berbasis Sumber Daya Alam untuk percepatan ekonomi (tambang mineral, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan minyak bumi);
 - b. Pengembangan *Online Single Submission* (OSS) untuk memfasilitasi penerbitan berbagai izin usaha secara online dan terintegrasi;
 - c. Peningkatan penerapan standardisasi industri; dan

- d. Peningkatan investasi, adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk mengembangkan kebangkitan industri strategis (antara lain: industri mobil, industri motor, dan industri kedirgantaraan).
- 6. **Klaster Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana** diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta penyediaan perumahan, dan mendukung pelaksanaan infrastruktur ketahanan bencana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan resiliensi terhadap bencana, antara lain melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur konektivitas jaringan jalan dan kereta api yang menunjang hilirisasi serta mendorong pusat pertumbuhan;
 - b. Penyediaan infrastruktur jaringan irigasi dan bendungan untuk air baku dan pengendalian banjir, serta infrastruktur ketahanan pangan;
 - c. Penyediaan infrastruktur ketahanan bencana serta penataan kembali wilayah terdampak bencana; dan
 - d. Penyediaan rumah murah, renovasi rumah bersanitasi baik, serta penataan permukiman dan lingkungan;
- 7. **Klaster Ekonomi Kerakyatan dan Desa**, diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan daya saing dan kemandirian finansial, antara lain dengan:
 - a. Pengembangan koperasi;
 - b. Peningkatan kapasitas usaha dan akses UMKM; dan
 - c. Mendukung percepatan pembangunan daerah 3 T.
- 8. **Klaster Penurunan Kemiskinan**, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan, antara lain dengan:
 - a. Peningkatan ketepatan sasaran program dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung bansos terintegrasi;
 - b. Percepatan graduasi dari kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi melalui sinergi program bansos dengan program pemberdayaan termasuk peningkatan akses terhadap modal dan lapangan kerja;
 - c. Peningkatan kualitas program bansos agar berdampak optimal, antara lain melalui sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan, digitalisasi penyaluran, dan dengan memperhatikan faktor kewilayahan; dan
 - d. Mendorong perlindungan sosial adaptif dan sepanjang hayat yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Agar seluruh klaster PKPN tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terukur dan berkelanjutan, didukung dengan fondasi PKPN yang meliputi:

1. Penegakan Hukum

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), pemberantasan penyelundupan, dan judi online

2. Tata Kelola dan Digitalisasi

Pemanfaatan Data Terintegrasi melalui pengembangan Pusat Data Nasional.

6.5.3. Kebijakan Belanja K/L Menurut Jenis Belanja

- 1. **Kebijakan Belanja Pegawai**, antara lain dengan:

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur negara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan digitalisasi;
- b. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh;
- c. Menjaga ketepatan perhitungan kebutuhan Belanja Pegawai serta meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan
- d. Menghitung kebutuhan ASN tahun 2027 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan dan jumlah ASN yang pensiun serta berpedoman pada kebijakan *zero* atau *minus growth*.

2. Kebijakan Belanja Barang, antara lain dengan:

- a. Melanjutkan kebijakan efisiensi tahun 2026 sebagai baseline untuk penajaman Belanja Barang Operasional;
- b. Mengoptimalkan Belanja Pemeliharaan dalam rangka menjaga nilai aset Barang Milik Negara (BMN);
- c. Melanjutkan sinkronisasi Belanja Barang yang diserahkan kepada Pemda dan bantuan lainnya; dan
- d. Melanjutkan pendanaan kreatif untuk mendukung KPBU yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Kebijakan Belanja Modal, antara lain dengan:

- a. Melaksanakan optimalisasi dan penajaman belanja modal untuk menciptakan fleksibilitas anggaran dalam mendukung direktif Presiden;
- b. Memfokuskan belanja modal secara selektif berdasarkan skala prioritas untuk mendanai kegiatan/output strategis yang mendukung Prioritas Nasional serta berdampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi;
- c. Mengembangkan pembiayaan inovatif;
- d. Mendukung pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas; dan
- e. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas utamanya melalui ketahanan pangan, ketahanan energi, jaringan konektivitas, swasembada air, penguatan industri serta pengembangan teknologi dan transformasi digital.

4. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial, antara lain dengan:

- a. Melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial antara lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan rehabilitasi sosial;
- b. Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan, serta penyempurnaan mekanisme penyaluran melalui digitalisasi bantuan;
- c. Mendorong pelaksanaan bantuan sosial adaptif dan sepanjang hayat yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif; serta

- d. Mendorong percepatan graduasi, antara lain melalui sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan lainnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh 99 Kementerian/ Lembaga pada tahun 2027 setelah masing-masing Kementerian/ Lembaga melalui tahapan proses pembahasan tinjau ulang angka dasar (*review baseline*) bersama dengan Kemenkeu (cq. Ditjen Anggaran) dan Bappenas. Pokok-pokok kebijakan belanja dalam Pagu Indikatif Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun 2027 tersebut telah diselaraskan dengan arah dan strategi perencanaan pembangunan yang terdapat pada Rancangan Awal RKP Tahun 2027. Pagu Indikatif Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun 2027 sebesar Rp1.381,0 Triliun yang dirinci berdasarkan program pada 99 Kementerian/ Lembaga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran.

6.6. Pagu Indikatif Transfer Ke Daerah Tahun 2027

Pemerintah berupaya terus melanjutkan penyempurnaan dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan anggaran TKD, khususnya dalam mendukung program-program prioritas nasional. Strategi pengelolaan TKD tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja untuk sebagian jenis TKD, penguatan APIP dalam melakukan pengawasan, dan peningkatan kualitas penyaluran TKD.

Anggaran TKD sebagai instrumen fiskal bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pengalokasian dan penggunaan TKD harus memberikan kontribusi optimal dalam program-program prioritas nasional dan meraih capaian rencana pembangunan nasional khususnya dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan umum TKD tahun 2027 adalah sebagai berikut: (i) diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok daerah, meliputi belanja pegawai, belanja operasional pemerintahan, dan pelayanan dasar publik; (ii) mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal (antar daerah) untuk akselerasi peningkatan dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat daerah; ; (iii) memperkuat sinergi fiskal Pusat dan Daerah melalui: penguatan koordinasi lintas K/L dalam pelaksanaan program prioritas, penyusunan kebijakan ekonomi dan fiskal regional untuk sinkronisasi sasaran pembangunan, penguatan probis aspek perencanaan/penganggaran berbasis output, dan relaksasi pemberlakuan kebijakan *mandatory spending* belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen; serta (iv) mendukung daya saing daerah melalui belanja berkualitas, sinergi dengan pembiayaan kreatif, dan penguatan *local taxing power*.

BAB VII

RISIKO FISKAL

Pengelolaan fiskal ke depan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor global yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal di antaranya konflik geopolitik, terganggunya rantai pasok, volatilitas harga komoditas dan, pasar keuangan global, arah kebijakan moneter negara maju, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, terdapat beberapa tantangan struktural seperti: (i) perubahan iklim; (ii) bonus demografi yang semakin terbatas; (iii) ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; dan (iv) kualitas SDM dan optimalisasi pengelolaan SDA. Berbagai tantangan tersebut harus diantisipasi dan dimitigasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat serta keberlanjutan fiskal. Berdasarkan pada kondisi dimaksud di atas, dapat diidentifikasi beberapa risiko fiskal utama, mencakup: (i) risiko ekonomi makro; (ii) risiko kontingensi; dan (iii) risiko neraca konsolidasi sektor publik.

7.1. Risiko Ekonomi Makro

Pemerintah mencermati ketidakpastian global yang terefleksikan dalam sejumlah indikator utama, seperti laju pertumbuhan ekonomi dunia, perkembangan volume perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas, tingkat inflasi, serta arah suku bunga global. Dinamika global berpotensi memengaruhi perekonomian domestik, Pemerintah mencermati dinamika global tersebut dan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk menjaga kinerja dan stabilitas perekonomian.

7.1.1. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan refleksi langsung dari fundamental ekonomi. Pendapatan negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, *lifting* minyak dan gas, serta harga komoditas. Jenis komoditas yang harganya dapat memengaruhi pendapatan negara antara lain minyak bumi (ICP), batu bara, CPO, nikel, dan tembaga. Kondisi perekonomian akan memengaruhi penerimaan perpajakan. Ketika perekonomian tumbuh dan stabil akan meningkatkan penerimaan perpajakan, sebaliknya ketika perekonomian mengalami perlambatan atau ketidakstabilan, penerimaan perpajakan cenderung termoderasi. Dinamika perekonomian juga secara langsung memengaruhi kemampuan wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan stabilitas dan daya tahan ekonomi makro menjadi kunci dalam memastikan kesinambungan penerimaan perpajakan.

Harga komoditas merupakan salah satu determinan utama dalam penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan diproyeksikan tetap tumbuh positif di tengah risiko perlambatan global, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik. Harga komoditas strategis seperti batu bara, CPO, nikel, tembaga, serta minyak dan gas memiliki pengaruh besar terhadap dinamika penerimaan perpajakan. Namun, transmisinya tidak terjadi secara simultan. Dapat terjadi langsung pada tahun berjalan, sementara lainnya baru terjadi pada tahun fiskal berikutnya seiring dengan mekanisme perhitungan dan pelaporan yang berlaku.

Langkah mitigasi yang terencana dan antisipatif diperlukan guna menjaga ketahanan penerimaan perpajakan. Kebijakan perpajakan diarahkan untuk memperkuat fungsi perpajakan secara seimbang, yaitu sebagai instrumen penerimaan negara sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ketahanan ini dilakukan melalui penguatan reformasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor bernilai tambah tinggi, meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memanfaatkan *big data* dan kecerdasan artifisial (AI), serta menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan untuk ekonomi digital secara kondusif. Hal ini dimaksudkan agar sistem perpajakan semakin adaptif terhadap perkembangan model bisnis baru.

Pada saat yang sama, iklim investasi perlu terus dijaga kondusif guna menjamin keberlanjutan penerimaan perpajakan. Rasionalisasi insentif perpajakan dilaksanakan secara terarah dan terukur untuk mendorong investasi, khususnya pada kegiatan hilirisasi dan penguatan sektor-sektor resilien, sebagai sumber pertumbuhan penerimaan jangka panjang. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah optimistis target penerimaan perpajakan tahun 2027 dapat dicapai secara optimal, sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

7.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Dalam kondisi tertentu, dampak volatilitas perekonomian domestik dan global berpotensi mendorong peningkatan belanja negara, misalnya belanja subsidi BBM. Peningkatan belanja negara ini pada akhirnya juga meningkatkan kewajiban *mandatory spending*. Peningkatan porsi belanja negara yang bersifat mengikat (*mandatory spending*) berpotensi memengaruhi fleksibilitas kebijakan fiskal Pemerintah. Hal ini karena belanja yang diatur secara proporsional terhadap total belanja negara akan meningkat secara otomatis seiring dengan bertambahnya ukuran APBN. Salah satu komponen utama *mandatory spending* adalah anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pemenuhan pembangunan program-program prioritas.

Atas risiko-risiko tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi. Upaya mitigasi tersebut dilakukan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan lebih terarah pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas SDM. Di samping itu, penguatan pengendalian belanja dan pengelolaan fiskal yang adaptif juga diperlukan guna menjaga keberlanjutan APBN.

7.1.3. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Utang

Dinamika pasar keuangan global masih menjadi tantangan dalam pengelolaan pembiayaan utang Pemerintah. Volatilitas tingkat bunga dan nilai tukar tidak hanya meningkatkan beban kewajiban utang, tetapi juga memengaruhi sentimen dan perilaku investor terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Dalam pengelolaan portofolio utang, Pemerintah secara konsisten memantau risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, serta risiko pembiayaan kembali.

Dalam rangka memitigasi risiko-risiko di atas, Pemerintah senantiasa memantau perkembangan indikator-indikator utama portofolio utang Pemerintah. Adapun

pemantauan dilakukan terhadap indikator antara lain rasio utang terhadap PDB, rata-rata jatuh tempo utang (*Average Time to Maturity*), komposisi utang berdasarkan instrument, suku bunga dan mata uang, serta indikator pasar keuangan lainnya seperti *Credit Default Swap* (CDS) dan kepemilikan investor asing di SBN domestik. Pemantauan secara reguler atas indikator-indikator tersebut dapat membantu Pemerintah dalam mendeteksi potensi tekanan, sehingga respons kebijakan dapat dirumuskan secara antisipatif dan proporsional. Dengan pendekatan pengelolaan utang yang *prudent*, adaptif, dan terukur serta berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka menengah, Pemerintah berkeyakinan bahwa risiko utang Pemerintah dapat dijaga dari dampak volatilitas pasar keuangan, sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN tetap berjalan secara andal, efisien, dan dalam koridor disiplin fiskal yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

7.2. Risiko Kontingensi

Risiko kewajiban kontingensi merupakan risiko fiskal yang timbul dari kewajiban potensial yang bersumber dari perjanjian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut pada dasarnya belum menjadi kewajiban aktual Pemerintah, namun memiliki konsekuensi/implikasi bila terjadi klaim menjadi beban APBN apabila kondisi atau faktor pemicu risiko tertentu terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kewajiban kontingensi perlu dilakukan secara cermat dan terukur. Risiko penjaminan umumnya terkait dengan pemberian jaminan atas proyek atau entitas tertentu. Dalam konteks tersebut, penguatan pengelolaan risiko kewajiban kontingensi menjadi penting untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mendukung kesinambungan fiskal.

7.2.1. Risiko Penjaminan Infrastruktur

Dalam rangka mencapai target pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan partisipasi sektor swasta, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyediakan berbagai bentuk dukungan dan insentif, salah satunya melalui pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah menyediakan fasilitas penjaminan untuk beberapa program atau proyek pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU serta pembangunan infrastruktur melalui penugasan pemerintah kepada badan usaha. Pemberian jaminan pemerintah tersebut berpotensi menimbulkan risiko keuangan terhadap APBN apabila dana kewajiban penjaminan yang dicadangkan tidak cukup untuk menutup klaim yang timbul. Dalam kondisi tertentu, realisasi klaim atas penjaminan pemerintah dapat meningkatkan tekanan terhadap ruang fiskal. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan mitigasi risiko tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (*fiscal sustainability*).

Selain berasal dari proyek KPBU, potensi risiko kontingensi juga dapat muncul dari pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur maupun penyediaan layanan publik strategis. Dukungan Pemerintah atas penugasan Pemerintah tersebut antara lain berupa jaminan atas kewajiban tertentu yang timbul dari pelaksanaan proyek. Untuk memitigasi risiko kontingensi atas pelaksanaan jaminan tersebut, pemantauan terhadap eksposur risiko yang berasal dari BUMN penerima penugasan Pemerintah dan penguatan koordinasi antara Pemerintah dan BPI Danantara tetap menjadi bagian penting dalam kerangka pengelolaan risiko fiskal secara

keseluruhan. Dalam rangka mitigasi potensi klaim yang berdampak terhadap APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (DCPP). Dana ini bertujuan untuk menyediakan tambahan perlindungan fiskal dalam rangka menangani klaim penjaminan. Selain pengelolaan DCPP, Pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi risiko lainnya, antara lain dengan penetapan Batas Maksimum Penjaminan (BMP), mengoptimalkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai mekanisme *ring-fencing* APBN, melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin bersama PT PII, serta meninjau secara periodik pelaksanaan rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan.

7.2.2. Risiko Penjaminan Program PEN

Seiring dengan berakhirnya masa penjaminan kredit modal kerja PEN UMKM porsi Pemerintah pada 2024 dan berakhirnya penjaminan PEN sektor Korporasi pada tahun 2025, Pemerintah memastikan bahwa tidak terdapat eksposur risiko fiskal dari segmen tersebut pada tahun 2027. Dengan berakhirnya program tersebut, eksposur risiko penjaminan Program PEN yang masih perlu dikelola hanya bersumber dari Program Penjaminan PEN kepada BUMN, dimana fokus pengelolaan risiko untuk mengantisipasi potensi timbulnya kewajiban penjaminan yang dapat berdampak pada APBN.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan beberapa mitigasi dalam rangka pengelolaan risiko atas penjaminan Program PEN. Beberapa upaya Pemerintah diantaranya: (i) melakukan monitoring dan evaluasi rutin khususnya untuk debitur yang memiliki potensi klaim (*watchlist*) dan memiliki outstanding pinjaman yang masih cukup besar; (ii) menyediakan dana cadangan kewajiban penjaminan; (iii) memperkuat peran PT PII sebagai *first loss* atau *risk buffer* untuk menyerap risiko kontingensi penjaminan BUMN; dan (iv) menjaga kapasitas penjamin agar dapat melaksanakan penugasan dengan baik.

7.2.3. Risiko Penjaminan Kredit Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Peranan penyelenggaraan CPP menjadi signifikan untuk memastikan ketahanan pangan dan mengurangi kerentanan di tengah ketidakpastian global di sektor pangan. Ketidakpastian ini dipicu oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan. Dalam rangka kebutuhan penguatan penyelenggaraan CPP tersebut, diperlukan adanya dukungan Pemerintah kepada penyelenggara CPP. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan yaitu Jaminan Pemerintah untuk mendapatkan kredit dengan bunga rendah dalam rangka pengadaan dan pengelolaan stok pangan. Dengan diberikannya Jaminan Pemerintah, maka penyelenggara CPP memiliki biaya modal yang lebih rendah sehingga lebih efisien dalam mengelola CPP. Sebagai bagian dari kebijakan dukungan kepada sektor pangan, pada tahun 2027 diperkirakan terdapat potensi peningkatan frekuensi permohonan jaminan Pemerintah atas pengadaan pembelian beberapa komoditas pangan sebagaimana diatur dalam Perpres No 125 Tahun 2022 oleh penyelenggara CPP.

Pemberian penjaminan Pemerintah dapat menimbulkan risiko keuangan negara akibat terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan penyelenggara CPP dalam membayar pinjaman kepada kreditur. Untuk itu, diperlukan upaya mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam PMK No. 34 Tahun 2023, diantaranya persetujuan dari Kementerian/Lembaga yang berwenang (Badan Pangan Nasional) sebagai syarat penarikan pinjaman, penggunaan rekening penampungan (*escrow account*) dalam menampung dana yang diterima oleh

penyelenggara CPP, serta kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman yang sudah harus tersedia minimal satu bulan sebelum jatuh tempo. Selain upaya mitigasi risiko tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan monitoring penyaluran pinjaman dan risiko penjaminan Pemerintah secara berkala bersama dengan Badan Usaha Penjaminan, penyelenggara CPP, dan Kreditur.

7.3. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Risiko neraca konsolidasi sektor publik perlu terus dimonitor. Risiko ini dapat berupa penurunan cadangan devisa ataupun penurunan *Net Financial Worth (NFW)*. Untuk mengelola risiko tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar serta ketahanan neraca pembayaran melalui penguatan cadangan devisa. Upaya ini didukung dengan peningkatan ekspor bernilai tambah, pengendalian impor, peningkatan aliran investasi, serta pendalaman pasar keuangan domestik dan kerja sama internasional. Dalam jangka menengah dan panjang, mitigasi dilakukan melalui pengelolaan aset dan kewajiban sektor publik secara lebih *prudent*, termasuk pengendalian utang, optimalisasi pengelolaan aset negara, serta penguatan manajemen portofolio utang.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

L.1. Arah dan Strategi Kebijakan Kewilayahan Tahun 2027

1. Aceh	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	3,0%	4,7% - 5,0%	4,1% - 4,5%
Karakteristik	- Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata, namun masih memerlukan fokus intervensi pada dimensi perumahan serta pekerjaan. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata - NTP di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain sektor pertanian, jasa, perdagangan, dan industri. - Refocusing belanja daerah untuk mendorong investasi dan daya saing utamanya aspek tenaga kerja, sistem keuangan, dan dinamika bisnis. - Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. - Peningkatan kepatuhan earmarking pajak daerah tertentu (PKB dan Opsen, Pajak Rokok, dll) untuk kegiatan pembangunan yang produktif. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik. Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (misalnya basic service allocation dan padat karya produktif untuk memperluas lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan - Pemanfaatan earmarking Pajak Rokok untuk program JKN masyarakat miskin - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur perumahan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Belanja kesehatan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, termasuk dengan memberikan perhatian pada imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, dan penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga dan infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Sinergi pendanaan dari belanja APBD, TKD, dan Belanja K/L untuk mempertahankan capaian indikator kesehatan. Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian - Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

2. Sumatera Utara	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,5%	5,4%-5,6%	5,0%-5,6%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW di atas rata-rata, namun masih menghadapi tantangan pada dimensi pendapatan, perumahan, kesehatan. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata - NTP di atas rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan skala usaha dan formalisasi UMKM, (2) belanja perumahan dalam rangka perbaikan deprivasi kesejahteraan perumahan kelompok miskin, dan (3) penguatan akses pelayanan kesehatan primer, sanitasi dan air minum layak serta perluasan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan terutama pada daerah 3T. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur perumahan dan kesehatan Pendidikan - Refocusing prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR pooling pendidikan. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, serta penguatan layanan kesehatan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

3. Sumatra Barat	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	3,4%	4,8% - 5,2%	5,1% - 6,4%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata, namun masih memiliki ruang perbaikan besar pada dimensi keamanan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata. - NTP di atas rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang publik yang aman, dan (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik terutama untuk daerah 3T. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur keamanan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap dan penanganan stunting, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

4. Riau	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,8%	4,7% - 4,9%	5,1% - 5,6%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih menghadapi tantangan pada dimensi perumahan dan pekerjaan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata. - NTP di atas rata-rata - Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata - NTNP di atas rata-rata - Kapasitas Fiskal di atas rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata - Indeks Kesehatan di atas rata-rata, belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain industri pengolahan, perdagangan, perkebunan sawit. - Meningkatkan kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPB dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik, (2) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti dan padat karya produktif, cash for work, serta program training berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan skill pekerja, maupun belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan agar lebih sejahtera) - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur perumahan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPB skala kecil-menengah untuk smart school, blended finance vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan		

5. Jambi	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,9%	4,8% - 5,0%	5,2% - 5,8%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pekerjaan, pendidikan, dan keamanan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata. - NTP di atas rata-rata - Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata - NTNP di bawah rata-rata - Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata - Indeks Kesehatan di atas rata-rata, belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Infrastruktur, Pasar Produk dan Dinamika Bisnis - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang publik yang aman, (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan, (3) belanja yang dapat meningkatkan pendapatan seperti padat karya produktif, cash for work, serta program training berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan skill pekerja. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan dan keamanan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek persalinan di fasilitas kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga, ketersediaan makanan dan air, serta kesehatan dan fasilitas kesehatan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

6. Sumatra Selatan	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,3% - 5,8%	5,5% - 6,3%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di atas rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata • IRW di atas rata-rata, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pendapatan, pendidikan dan keamanan. • Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata. • NTP di atas rata-rata • Belanja perikanan di atas rata-rata dan produksi perikanan di atas rata-rata • NTNP di atas rata-rata • Kapasitas Fiskal di atas rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata • Indeks Kesehatan rendah, belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan skala usaha, dan formalisasi UMKM, (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan terutama untuk wilayah 3T, dan (3) penguatan pencegahan kriminalitas melalui program berbasis komunitas, pembangunan desain ruang publik yang aman, serta peningkatan kapasitas penegak hukum. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan dan keamanan Pendidikan • Refocusing prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR pooling pendidikan. • Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga. • Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan • Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi. Pertanian • Dukungan belanja daerah untuk mendukung penguatan peran sebagai sentra produksi nasional • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan • Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan.		

7. Bengkulu	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,8%	4,8% - 5,6%	5,2% - 6,5%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi keamanan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata. - NTP di atas rata-rata - Belanja perikanan dan produksi perikanan di bawah rata-rata - NTNP di atas rata-rata - Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata - Indeks Kesehatan di atas rata-rata, belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Dinamika Bisnis, Infrastruktur dan Pasar Produk - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti basic service allocation, cash for work), (2) belanja pembangunan desain ruang publik yang aman di daerah dalam rangka memperbaiki deprivasi keamanan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan - Pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan dasar dan keamanan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ketersediaan makanan dan air, infeksi penyakit, serta kesehatan dan fasilitas kesehatan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan		

8. Lampung	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,6% - 5,8%	5,8% - 6,2%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pendidikan, keamanan, dan kepuasan hidup. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang publik yang aman serta akses rekreasi yang muda, dan (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan terutama pada wilayah 3T - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi peran KD/LMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan dan keamanan Pendidikan - Refocusing prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR pooling pendidikan. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga, dan infeksi penyakit. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

9. Kepulauan Bangka Belitung	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,1%	4,6% - 4,8%	4,8% - 5,3%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pekerjaan dan keamanan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata - NTP di atas rata-rata - Belanja perikanan di bawah rata-rata nasional dan produksi perikanan di bawah rata-rata - NTNP di atas rata-rata - Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata - Indeks Kesehatan di atas rata-rata, belanja kesehatan per kapita di atas rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain perikanan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif; - Meningkatkan kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang publik yang aman, (2) belanja yang dapat meningkatkan pendapatan seperti padat karya produktif, cash for work, serta program training berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan skill pekerja. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur keamanan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Belanja kesehatan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, termasuk dengan memberikan perhatian pada penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu menyusui dan infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan - Sinergi pendanaan dari belanja APBD, TKD, dan Belanja K/L untuk mempertahankan capaian indikator kesehatan Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan.		

10. Kepulauan Riau	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	6,9%	5,2% - 5,8%	7.1% - 7.6%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pekerjaan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata. - NTP di bawah rata-rata - Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di atas rata-rata - NTNP di bawah rata-rata - Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata - Indeks Kesehatan di atas rata-rata, belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Dinamika Bisnis dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik, (2) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti padat karya produktif, cash for work, serta program training berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan skill pekerja) - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan optimalisasi KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

11. DKI Jakarta	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,2%	5,0% - 5,6%	5,7% - 6,4%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pekerjaan. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Keterampilan, Pasar Produk dan Dinamika Bisnis - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan skala usaha dan formalisasi UMKM, (2) penyelenggaraan training berbasis demand industri (link and match) serta penguatan UMKM dan kewirausahaan. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, blended finance vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, serta infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi. Pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan.		

12. Jawa Barat	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,1% - 5,7%	5.8% - 6.5%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pekerjaan, pendidikan, dan keamanan. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Keterampilan, Pasar Produk dan Pasar Tenaga Kerja - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan skala usaha, dan formalisasi UMKM, (2) penyelenggaraan training berbasis demand industri (link and match) serta penguatan UMKM dan kewirausahaan, (3) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan, (3) penguatan pencegahan kriminalitas melalui program berbasis komunitas, pembangunan desain ruang publik yang aman, serta peningkatan kapasitas penegak hukum. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan dan keamanan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, blended finance vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga, dan infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi Pertanian - Fokus Belanja daerah untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian - Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

13. Jawa Tengah	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,0% - 5,7%	5,9% - 6,6%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pendidikan. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan skala usaha, dan formalisasi UMKM, dan (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur Pendidikan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, blended finance vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada aspek distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi dan infeksi penyakit. - Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian - Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

14. DI Yogyakarta	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	5,2% - 5,5%	5.9% - 6.7%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di atas rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi kesehatan dan keamanan. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti: (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang publik yang aman, (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas kesehatan yang mapan dan terjangkau • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan • Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur kesehatan dan keamanan Pendidikan • Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. • Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi serta infeksi penyakit. • Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan Pertanian • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan • Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

15. Jawa Timur	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,0% - 5,7%	6,0% - 6,5%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata nasional dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pendidikan. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan skala usaha dan formalisasi UMKM, dan (2) penguatan beasiswa/bantuan biaya pendidikan untuk keluarga rentan dalam mendukung wajib belajar 12 tahun. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, blended finance vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian - Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

16. Banten	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,3% - 5,6%	5,6% - 6,2%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di atas rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata • IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pekerjaan. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata. • NTP di bawah rata-rata • Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata • NTNP di bawah rata-rata • Kapasitas Fiskal di atas rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata • Indeks Kesehatan di bawah rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Infrastruktur dan Sistem Keuangan • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan skala usaha, dan formalisasi UMKM, dan (2) penyelenggaraan training berbasis demand industri (link and match) serta penguatan UMKM dan kewirausahaan. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM Pendidikan • Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, blended finance vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. • Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, ibu menyusui, serta infeksi penyakit. • Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi Pertanian • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan. • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

17. Bali	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,8%	5,6% - 6,3%	6,0% - 6,9%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi Kepuasan hidup. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas tinggi. - NTP di bawah rata-rata - Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata - NTNP di bawah rata-rata - Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata - Indeks Kesehatan di atas rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Dinamika Bisnis, Pasar Produk dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan skala usaha dan formalisasi UMKM, dan (2) perluasan akses dan peningkatan fasilitas rekreasi terjangkau serta pengembangan ruang terbuka publik di daerah. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan <i>green financing</i> efisiensi energi sekolah. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek penguatan layanan kesehatan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian - Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan. - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

18. NTB	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	3,2%	5,3% - 6,0%	10,2% - 12,8%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di bawah rata-rata nasional, dengan dimensi yang memerlukan fokus intervensi yaitu keamanan dan kepuasan hidup. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata. - NTP di atas rata-rata - Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di atas rata-rata - NTNP di atas rata-rata - Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata - Indeks Kesehatan di bawah rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertambangan, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. - Meningkatkan kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif), (2) belanja pembangunan desain ruang publik dan akses rekreasi yang aman untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan - Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan publik dan keamanan terutama untuk wilayah 3T. Pendidikan - Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada aspek penanganan stunting, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga dan infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi Pertanian - Fokus belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

19. NTT	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,1%	4,6% - 4,9%	5,4% - 6,1%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di bawah rata-rata nasional, dengan intervensi yang perlu difokuskan pada hampir seluruh aspek IRW selain pekerjaan dan keamanan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata - Meningkatkan kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan - Refocusing belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti padat karya produktif dan belanja perumahan untuk memperbaiki daerah terdeprivasi perumahan), (2) belanja perumahan dan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan terutama untuk wilayah 3T, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan - Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin - Dukungan optimalisasi KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan dasar Pendidikan - Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, infeksi penyakit, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani - Belanja daerah untuk mendukung penguatan jaring pengaman sosial bagi petani - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

20. Kalimantan Barat	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,1% - 5,6%	6,0% - 6,6%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. - Meningkatkan kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Dinamika Bisnis - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti: (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik, (2) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti padat karya produktif, <i>cash for work</i>, serta program <i>training</i> berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan <i>skill</i> pekerja, maupun belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan agar lebih sejahtera), dan (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur perumahan dan pendidikan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk <i>smart school</i>, <i>blended finance</i> vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri.		
	Kesehatan - Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, infeksi penyakit, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

21. Kalimantan Tengah	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,8%	4,7% - 5,4%	5,0% - 5,6%
Karakteristik	- Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi perumahan, pekerjaan, dan Pendidikan - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Dinamika Bisnis dan Kapabilitas Inovasi - Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik, (2) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti padat karya produktif, <i>cash for work</i>, serta program <i>training</i> berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan <i>skill</i> pekerja, maupun belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan agar lebih sejahtera), (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD prioritas pencapaian SPM layanan publik seperti pendidikan mapan untuk keluarga rentan - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur perumahan dan pendidikan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, a.l KPBU skala kecil-menengah untuk <i>smart school</i>, <i>blended finance</i> vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) serta memberikan perhatian pada imunisasi dasar lengkap, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu menyusui, ketersediaan makanan dan air, infeksi penyakit, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung penguatan peran sebagai sentra produksi nasional - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan <i>Refocusing</i> belanja agar lebih berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan. - Belanja daerah untuk mendukung penguatan jaring pengaman sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan		

22. Kalimantan Selatan	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,2%	5,3% - 5,6%	5,8% - 6,5%
Karakteristik	- Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi perumahan, pendidikan, dan kepuasan hidup. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan skala usaha, dan formalisasi UMKM, (2) belanja perumahan dalam rangka perbaikan deprivasi kesejahteraan perumahan kelompok miskin, (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan, dan (3) perluasan akses dan peningkatan fasilitas rekreasi terjangkau serta pengembangan ruang terbuka publik di daerah. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur perumahan dan pendidikan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, <i>blended finance</i> vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Belanja kesehatan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, termasuk dengan memberikan perhatian pada aspek penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ketersediaan makanan dan air, serta infeksi penyakit. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Sinergi pendanaan dari belanja APBD, TKD, dan Belanja K/L untuk mempertahankan capaian indikator kesehatan. Pertanian <i>Refocusing</i> belanja agar lebih berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan - Belanja daerah untuk mendukung penguatan jaring pengaman sosial bagi petani - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

23. Kalimantan Timur	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,5%	5,5% - 6,6%	5,1% - 5,7%
Karakteristik	- Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di atas rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di atas rata-rata - IRW diatas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi perumahan dan pekerjaan. - Belanja ketahanan pangan di atas rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan kepatuhan <i>earmarking</i> pajak daerah tertentu (PKB dan Opsen, Pajak Rokok, dll) untuk kegiatan pembangunan yang produktif. - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan - Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. <i>Refocusing</i> belanja daerah untuk mendorong investasi dan daya saing utamanya aspek Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik. Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan skala usaha, dan formalisasi UMKM, (2) penyelenggaraan <i>training</i> berbasis <i>demand</i> industri (<i>link and match</i>) serta penguatan UMKM dan kewirausahaan, dan (3) belanja perumahan dalam rangka perbaikan deprivasi kesejahteraan perumahan kelompok miskin. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, <i>blended finance</i> vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Belanja kesehatan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, termasuk dengan memberikan perhatian pada aspek penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, ibu menyusui, infeksi penyakit, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Sinergi pendanaan dari belanja APBD, TKD, dan Belanja K/L untuk mempertahankan capaian indikator kesehatan Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan - Belanja daerah untuk mendukung penguatan peran sebagai sentra produksi nasional - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

24. Kalimantan Utara	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,6%	5,0% - 5,4%	5,3% - 5,9%
Karakteristik	- Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut khususnya pada dimensi perumahan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, dan kepuasan hidup. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi rendah. - NTP di bawah rata-rata - Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata. - NTNP di bawah rata-rata - Kapasitas Fiskal di atas rata-rata dan SPM Pendidikan di atas rata-rata - Indeks Kesehatan di atas rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di atas rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan kepatuhan <i>earmarking</i> pajak daerah tertentu (PKB dan Opsen, Pajak Rokok, dll) untuk kegiatan pembangunan yang produktif. - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertambangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. - Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. <i>Refocusing</i> belanja daerah untuk mendorong investasi dan daya saing utamanya aspek Pasar Produk, Dinamika Bisnis dan Kapabilitas Inovasi - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik. Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang terbuka publik yang aman, (2) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas kesehatan yang mapan, ruang publik yang aman, dan akses rekreasi terjangkau, (3) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti padat karya produktif serta program <i>training</i> berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan <i>skill</i> pekerja, maupun belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan) - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan - Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur kesehatan, perumahan dan keamanan Pendidikan - Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk smart school, <i>blended finance</i> vokasi-industri dan Dana Abadi Pendidikan Daerah. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Belanja kesehatan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, termasuk dengan memberikan perhatian pada aspek penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga, infeksi penyakit, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Sinergi pendanaan dari belanja APBD, TKD, dan Belanja K/L untuk mempertahankan capaian indikator kesehatan Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan yang mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

25. Sulawesi Utara	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,7%	5,6% - 6,0%	5,8% - 7,1%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di atas rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut khususnya pada dimensi pendapatan, pekerjaan, akses, dan kepuasan hidup • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas rendah.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik, (2) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti padat karya produktif, program <i>training</i> berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan <i>skill</i> pekerja, perluasan akses internet, ruang terbuka dan rekreasi, sanitasi dan air minum layak dan terjangkau terutama untuk daerah 3T) • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan • Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur akses pelayanan publik, rekreasi, dan keamanan Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada aspek distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu menyusui, ketersediaan makanan dan air, dan infeksi penyakit. • Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi Pertanian • Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan • Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan. • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

26. Sulawesi Tengah	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	8,5%	9,0% - 10,3%	8,7% - 9,8%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut khususnya pada seluruh dimensi selain dimensi kesehatan. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata. • NTP di bawah rata-rata • Belanja perikanan di atas rata-rata dan produksi perikanan di atas rata-rata • NTNP di bawah rata-rata • Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata • Indeks Kesehatan di bawah rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di atas rata-rata		
Dukungan Penda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> khususnya pendidikan dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja pembangunan desain ruang publik dan akses rekreasi yang aman untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan • Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pendidikan, perumahan, rekreasi, dan keamanan terutama untuk daerah 3T Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK serta memberikan perhatian pada aspek penanganan stunting, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan Pertanian • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan • Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

27. Sulawesi Selatan	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,9% - 6,2%	6,3% - 6,8%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di atas rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut khususnya pada dimensi perumahan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan kepuasan hidup • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata. • NTP di bawah rata-rata • Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produktivitas perikanan tinggi • NTNP di atas rata-rata • Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata • Indeks Kesehatan di atas rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang terbuka publik dan rekreasi terjangkau, (2) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan, (3) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan agar lebih sejahtera) • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan • Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur kesehatan, pendidikan dan rekreasi Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek penanganan stunting, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, ketersediaan makanan dan air, dan infeksi penyakit. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan • Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan. • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

28. Sulawesi Tenggara		Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi		5,8%	5,7% - 6,0%	6,2% - 7,8%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut khususnya pada dimensi pendapatan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan kepuasan hidup. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas rendah			
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang publik yang aman, (2) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan agar lebih sejahtera), (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mapan serta akses ruang publik dan rekreasi terjangkau. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan • Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan perumahan Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Belanja kesehatan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, termasuk dengan memberikan perhatian pada aspek penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu menyusui, ketersediaan makanan dan air, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Sinergi pendanaan dari belanja APBD, TKD, dan Belanja K/L untuk mempertahankan capaian indikator kesehatan. Pertanian • Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian • Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani • Belanja daerah untuk mendukung penguatan jaring pengaman sosial bagi petani • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan • Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan			

29. Gorontalo	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,7%	6,1% - 6,4%	6,5% - 8,1%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di atas rata-rata • Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di atas rata-rata nasional, namun masih memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi pendapatan, pendidikan, dan kepuasan hidup. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di atas rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Infrastruktur, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPB dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. • Pemberian insentif PDRD bagi UMK untuk meningkatkan pendapatan • Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan dan rekreasi. Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPB terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • NTP di bawah rata-rata • Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata • NTNP di bawah rata-rata • Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata • Indeks Kesehatan di bawah rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di atas rata-rata Pertanian • Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK serta memberikan perhatian pada aspek penanganan stunting, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, ketersediaan makanan dan air, infeksi penyakit, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Perikanan • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan. • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

30. Sulawesi Barat	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,0% - 5,3%	5,6% - 6,6%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut khususnya pada dimensi pendapatan, perumahan, pendidikan, dan kepuasan hidup. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas tinggi.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti akses rekreasi yang mudah dan belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan agar lebih sejahtera, (2) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan • Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan, perumahan dan rekreasi. Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, ketersediaan makanan dan air, infeksi penyakit, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan. Pertanian • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan • Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

31. Maluku	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4,6%	5,4% - 6,2%	5,2% - 6,0%
Karakteristik	• Total belanja per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut pada seluruh dimensi selain perumahan dan pendidikan. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas rendah. • NTP di bawah rata-rata nasional • Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di atas rata-rata • NTNP di atas rata-rata • Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata • Indeks Kesehatan di bawah rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di bawah rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas Penurunan Kemiskinan • Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin • <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pelayanan dasar dan akses sanitasi serta internet terutama untuk wilayah 3T Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i>, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi Pertanian • Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian • Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani • Belanja daerah untuk mendukung penguatan jaring pengaman sosial bagi petani • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan • Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan		

32. Maluku Utara	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	34,2%	12,1% - 13,4%	21,5% - 24,2%
Karakteristik	• Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di bawah rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi selain perumahan, pendidikan, dan keamanan. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas rendah.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Infrastruktur, Pasar Tenaga Kerja dan Dinamika Bisnis • Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistic Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan skala usaha, dan formalisasi UMKM (2) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas kesehatan, sanitasi dan air minum layak yang mapan dan terjangkau terutama untuk wilayah 3T • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan • Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur kesehatan, akses internet dan keamanan Pendidikan • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU terbatas (untuk sanitasi, air bersih, dan internet sekolah), CSR untuk sarana prasarana dasar sekolah, dan <i>blended finance</i> (untuk akses dasar, sekolah layak, dan literasi numerasi). • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan • <i>Refocusing</i> belanja agar lebih berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan • Belanja daerah untuk mendukung penguatan jaring pengaman sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan		

33. Papua Barat	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	6,5%	11,6% - 12,5%	5,4% - 7,4%
Karakteristik	• Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut pada seluruh dimensi selain pendidikan. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas tinggi. • NTP di bawah rata-rata • Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata • NTNP di bawah rata-rata • Kapasitas Fiskal di atas rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata • Indeks Kesehatan di bawah rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di atas rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan, (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti kesehatan, akses internet, sanitasi dan air minum layak, ruang publik yang aman, serta rekreasi yang terjangkau, dan (4) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan • Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan dasar terutama untuk wilayah 3T Pendidikan • <i>Refocusing</i> prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR <i>pooling</i> pendidikan. • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian Perikanan • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan. • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

34. Papua Barat Daya	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4%	5,0% - 5,3%	4,5% - 5,6%
Karakteristik	• Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut pada seluruh dimensi selain pendidikan. • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas rendah. • NTP di bawah rata-rata • Belanja perikanan di bawah rata-rata dan produksi perikanan di bawah rata-rata • NTNP di bawah rata-rata • Kapasitas Fiskal di atas rata-rata dan SPM Pendidikan di bawah rata-rata • Indeks Kesehatan di bawah rata-rata dan belanja kesehatan per kapita di atas rata-rata		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Peningkatan kepatuhan <i>earmarking</i> pajak daerah tertentu (PKB dan Opsen, Pajak Rokok, dll) untuk kegiatan pembangunan yang produktif. • Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata) • <i>Refocusing</i> belanja daerah untuk mendorong investasi dan daya saing utamanya aspek Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik. Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan a.l: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (<i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti kesehatan, serta penguatan akses internet, sanitasi dan air minum layak, ruang publik yang aman, dan rekreasi yang terjangkau, dan (4) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan • Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur kesehatan, akses, keamanan, perumahan dan rekreasi Pendidikan • <i>Refocusing</i> prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR <i>pooling</i> pendidikan. • Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan • Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan. • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan		

35. Papua	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	4%	4,2% - 5,0%	5,1% - 5,4%
Karakteristik	- Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut pada seluruh dimensi selain pendidikan dan keamanan. - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan kepatuhan <i>earmarking</i> pajak daerah tertentu (PKB dan Opsen, Pajak Rokok, dll) untuk kegiatan pembangunan yang produktif. - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. <i>Refocusing</i> belanja daerah untuk mendorong investasi dan daya saing utamanya aspek Infrastruktur, Pasar Produk dan Dinamika Bisnis - Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik. Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan (3) belanja dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan - Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan dasar dan akses internet terutama untuk wilayah 3T Pendidikan <i>Refocusing</i> prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR <i>pooling</i> pendidikan. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas produksi dasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan.		

36. Papua Selatan	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	-21,8%	4,6% - 5,0%	4,1% - 6,0%
Karakteristik	- Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut hampir seluruh dimensi selain dimensi pekerjaan - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertanian, perkebunan dan perikanan <i>Refocusing</i> belanja daerah untuk mendorong investasi dan daya saing utamanya aspek Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan dan Adopsi TIK - Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. - Peningkatan kepatuhan <i>earmarking</i> pajak daerah tertentu (PKB dan Opsen, Pajak Rokok, dll) untuk kegiatan pembangunan yang produktif. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik. Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta penguatan akses internet, sanitasi dan air minum layak, ruang publik yang aman, dan rekreasi yang terjangkau, dan (4) dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan - Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan dasar Pendidikan <i>Refocusing</i> prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR <i>pooling</i> pendidikan. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung penguatan peran sebagai sentra produksi nasional - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan.		

37. Papua Tengah	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	3,7%	5,1 - 5,7%	2,8% - 6,9%
Karakteristik	• Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata • Daya saing di bawah rata-rata • Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata • IRW di bawah rata-rata nasional, dan memerlukan intervensi lebih lanjut pada dimensi selain pekerjaan dan keamanan • Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Tenaga Kerja, Adopsi TIK dan Kapabilitas Inovasi • Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. • Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik Penurunan Kemiskinan • <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta penguatan akses internet, sanitasi dan air minum layak, ruang publik yang aman, serta rekreasi yang terjangkau, dan (4) dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan • Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin • Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. • Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan dasar Pendidikan • <i>Refocusing</i> prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR <i>pooling</i> pendidikan. Kesehatan • Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, serta kesehatan dan fasilitas kesehatan. • Optimalisasi pemanfaatan persentase <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan yang mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan Perikanan • <i>Refocusing</i> belanja agar lebih berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan • Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan.		

38. Papua Pegunungan	Kinerja 2025	Target 2026	Target 2027
Pertumbuhan Ekonomi	3,4%	4,5% - 4,9%	4,2% - 6,7%
Karakteristik	- Total belanja per kapita di atas rata-rata dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata - Daya saing di bawah rata-rata - Kemiskinan di atas rata-rata dan belanja kemiskinan di bawah rata-rata - IRW di bawah rata-rata, dan memerlukan intervensi lebih lanjut pada seluruh dimensi selain dimensi pekerjaan - Belanja ketahanan pangan di bawah rata-rata dan produktivitas padi di bawah rata-rata.		
Dukungan Pemda	Pertumbuhan Ekonomi - Peningkatan efektivitas belanja melalui reorientasi ke sektor berdaya ungkit tinggi antara lain pertanian, perkebunan, dan pariwisata <i>Refocusing</i> belanja daerah untuk mendorong investasi dan daya saing utamanya aspek Pasar Tenaga Kerja, Adopsi TIK dan Kapabilitas Inovasi - Modernisasi perpajakan dan pemberian skema insentif PDRD yang selektif dan berkeadilan untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. - Peningkatan kepatuhan <i>earmarking</i> pajak daerah tertentu (PKB dan Opsen, Pajak Rokok, dll) untuk kegiatan pembangunan yang produktif. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU untuk mendukung peningkatan nilai tambah industri, infrastruktur ekonomi, dan logistik. Penurunan Kemiskinan <i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti <i>basic service allocation</i> dan padat karya produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan), (2) belanja perumahan dalam rangka memperbaiki deprivasi perumahan bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan, (3) belanja dari <i>earmarking</i> TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta penguatan akses internet, sanitasi dan air minum layak, ruang publik yang aman, dan rekreasi yang terjangkau, dan (4) dukungan perbaikan penajaman target sasaran bantuan kemiskinan menggunakan DTSEN. - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan - Pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk program JKN masyarakat miskin - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif dan pinjaman konsesional untuk infrastruktur pelayanan dasar Pendidikan <i>Refocusing</i> prioritas belanja pendidikan kepada indikator SPM yang masih lemah dalam rangka pemenuhan layanan dasar pendidikan. - Memfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk layanan pendukung dan infrastruktur operasional sekolah, dan CSR <i>pooling</i> pendidikan. - Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri. Kesehatan - Optimalisasi pemanfaatan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Optimalisasi penggunaan belanja kesehatan untuk meningkatkan indikator kualitas dan layanan kesehatan berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, persalinan di fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. - Skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. Pertanian - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan Perikanan - Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan perikanan.		